

Kata Pengantar

Dalam rangkaian finalisasi seluruh tahapan dan proses Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Muara Bungo Tahun Anggaran 2011, Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Jambi, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, dengan ini Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Muara Bungo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 214 / BAPPEDA TAHUN 2011 tanggal 9 Mei 2011, telah berhasil menyusun Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Muara Bungo yang di dalamnya termasuk Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) SPPIP Kota Muara Bungo 2012 – 2016 khusus untuk Bidang Cipta Karya.

Dengan telah disusunnya Laporan Akhir Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Muara Bungo ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan, baik di tingkat Kabupaten Bungo, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Pusat, dalam kontribusinya melaksanakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kota Muara Bungo.

Muara Bungo, Desember 2011

Tim Pokjanis

Penyusunan SPPIP dan RPKPP Kota Muara Bungo

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1 - 1
1.1. Umum	1 - 1
1.2. Latar Belakang	1 - 1
1.3. Maksud Dan Tujuan	1 - 4
1.4. Sasaran Kegiatan	1 - 4
1.4.1. Sasaran Fungsional	1 - 4
1.4.2. Sasaran Operasional	1 - 5
1.5. Lokasi Kegiatan	1 - 5
1.6. Ruang Lingkup Materi Dan Ruang Lingkup Wilayah Kegiatan .	1 - 6
1.6.1. Ruang Lingkup Materi	1 - 6
1.6.2. Ruang Lingkup Wilayah Kegiatan.....	1 - 10
1.7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	1 - 11
1.8. Sistematika Penulisan Konsep Laporan Akhir	1 - 11
BAB 2 PROFIL PERKOTAAN MUARA BUNGO, KONDISI PERMUKIMAN DAN	
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	2 - 1
2.1 Profil Perkotaan Muara Bungo	2 - 1
2.1.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah	2 - 1
2.1.2. Kondisi Fisik	2 - 5
2.1.3. Pola Penggunaan Lahan	2 - 9
2.1.4. Sosial Kependudukan	2 - 12
2.1.5. Kondisi Sosial Budaya	2 - 15



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

2.1.6.	Kondisi Perekonomian	2 - 16
2.2.	Profil Permukiman Kota Muara Bungo	2 - 19
2.2.1.	Eksisting Arah Perkembangan Permukiman	2 -19
2.2.2.	Ketersediaan Sarana Pendidikan	2 -19
2.2.3.	Sarana Kesehatan	2 - 20
2.2.4.	Sarana Peribadatan	2 - 21
2.2.5.	Sarana Perdagangan dan Jasa	2 - 22
2.2.6.	Sarana Rekreasi dan Olahraga	2 - 22
2.2.7.	Kecenderungan Arah Perkembangan Kota	2 - 22
2.2.8.	Kondisi Permukiman Muara Bungo	2 - 25
2.3.	Profil Infrastruktur Perkotaan Muara Bungo	2 - 30
2.3.1	Sistem Transportasi dan Perhubungan	2 - 30
2.3.2	Prasarana Penerangan (Jaringan Listrik)	2 - 30
2.3.3	Prasarana Telekomunikasi	2 - 30
2.3.4	Prasarana Air Bersih (Jaringan PDAM)	2 - 31
2.3.5	Prasarana Pengelolaan Persampahan	2 - 33
2.3.6	Prasarana Drainase dan Pengendalian Banjir	2 -35
2.4.	Potensi dan Persoalan Permukiman dan Infrastruktur	2 - 37
2.4.1	Potensi Permukiman dan Infrastruktur Permukiman ..	2 - 37
2.4.2	Persoalan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman	2 - 38
BAB 3 REVIEW KEBIJAKAN		3 - 1
3.1.	Kebijakan dalam Spasial Plan / Penataan Ruang / RTRW Kab. Bungo.....	3 -2
3.1.1	Kebijakan dan Startegi	3 - 2
3.1.2	Strategi Penataan Ruang Kabupaten Bungo	3 -6
3.1.3	Arahan Struktur Pelayanan Kabupaten Bungo	3 -14
3.1.4	Arahan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	3 - 17
3.2.	Kebijakan dalam Development Plan / Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kab.Bungo	3 -26
3.2.1	Prioritas Pembangunan Daerah	3 -26
3.2.2	Program Pembangunan Daerah	3 -27



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

3.3.	Review Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Muara Bungo ...	3 - 31
3.3.1	Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan	3 -31
3.3.2	Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan	3 -32
3.3.3	Arahan Pengembangan dan Distribusi Penduduk	3 -33
3.3.4	Arahan Pengembangan Perumahan	3 -36
3.3.5	Arahan Pengembangan Perdagangan dan Jasa	3-38
3.3.6	Arahan Pengembangan Utilitas Kota	3 - 40
BAB 4	IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERSOALAN PEMBANGUNAN.....	4 - 1
4.1	Identifikasi Potensi dan Persoalan Pembangunan Kota	4 - 1
4.2	Identifikasi Potensi dan Persoalan Pembangunan Kawasan ...	4 - 9
BAB 5	ANALISIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN	
	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	5 - 1
5.1	Identifikasi Sebaran Permukiman	5 - 1
5.2	Kriteria, Indikator dan Variabel dalam Penentuan Kawasan	
	Prioritas	5 -2
5.2.1	Kriteria Kawasan Prioritas	5 - 2
5.2.2	Indikator dan Variabel	5-3
5.2.3	Hasil Penilaian	5-10
5.2.4	Rangking Kawasan Prioritas	5-11
5.2.5	Kawasan Prioritas Terpilih	5-11
5.3	Analisis Strategi Penanganan Kawasan Prioritas	5 -12
5.3.1	Kelurahan Jaya Setia	5 - 13
5.3.2	Kelurahan Batang Bungo	5-14
5.3.3	Kelurahan Pasir Putih	5-15
BAB 6	ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN.....	6 - 1
6.1	Identifikasi Permasalahan dan Kajian Keselarasan Kebijakan	
	Dan Strategi	6 - 1
6.2	Analisis Permasalahan dan Pembangunan Permukiman dan	
	Infrastruktur Pendukung Perkotaan	6 - 10
6.3	Analisis Permasalahan dan Pembangunan Permukiman dan	



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

	Infrastruktur Pendukung Kawasan Prioritas	6 - 13
6.4	Identifikasi dan Perumusan Strategi Pengembangan Kota	6 - 15
6.5	Identifikasi Kebutuhan Strategis Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Perkotaan	6 - 24

BAB 7 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

7.1	Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012–2016.....	7 - 1
7.1.1	Visi Pembangunan Daerah	7 - 1
7.1.2	Misi Pembangunan Daerah	7–2
7.1.3	Sasaran Pembangunan Daerah	7–3
7.1.4	Penjabaran Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Ke dalam Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	7–3
7.2	Visi dan Misi Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)	7 - 6
7.2.1	Visi	7 – 6
7.2.2	Misi	7–6

BAB 8 PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN.....

8.1	Daftar Kebutuhan Strategis Pembangunan Permukiman	8 - 1
8.1.1	Daftar Kebutuhan Strategis Pembangunan Permukiman	8 - 1
8.1.2	Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bidang Jalan Lingkungan	8 - 2
8.1.3	Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bidang Drainase	8 - 2
8.1.4	Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bidang Air Minum	8 - 3
8.1.5	Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bidang Pengelolaan Persampahan.....	8 - 3



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

8.1.6	Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bidang Pengelolaan Sanitasi/Air Limbah .	8 - 4
8.1.7	Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan pada Pemberdayaan Masyarakat	8 - 4
8.1.8	Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan pada Aspek Kemampuan Keuangan	8 - 5
8.1.9	Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan pada Aspek Kelembagaan	8 - 6
8.2	Daftar Prioritas Kebutuhan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan	8 - 6
8.2.1	Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Permukiman	8 - 6
8.2.2	Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman dibidang Jalan Lingkungan	8 - 7
8.2.3	Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman dibidang Drainase	8 - 7
8.2.4	Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman dibidang Air Minum	8 - 8
8.2.5	Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman dibidang Pengelolaan Persampahan	8 - 8
8.2.6	Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman dibidang Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi	8 - 8
8.2.7	Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman Pada Pemberdayaan Masyarakat	8 - 9
8.2.8	Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman Pada Aspek Kemampuan Keuangan	8 - 10
8.2.9	Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman Pada Aspek Kelembagaan	8 - 10
8.3	Daftar Kebutuhan Konsep Strategis Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan	8 - 11
8.3.1	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman	8 - 11
8.3.2	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dibidang Jalan Lingkungan	8 - 11



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

8.3.3	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dibidang Drainase	8 - 12
8.3.4	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dibidang Air Minum	8 - 12
8.3.5	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dibidang Pengelolaan Sampah	8 - 12
8.3.6	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dibidang Pengelolaan Air Limbah	8- 13
8.3.7	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Pada Pemberdayaan Masyarakat	8 - 13
8.3.8	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Pada Aspek Kemampuan Keuangan	8 - 14
8.3.9	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Pada Aspek Kelembagaan	8 - 15
8.4	Daftar Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan	8 -16
8.4.1	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman	8 - 16
8.4.2	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dibidang Jalan Lingkungan	8 - 18
8.4.3	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dibidang Drainase	8 - 19
8.4.4	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dibidang Air Minum	8 - 20
8.4.5	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dibidang Pengelolaan Air Limbah	8 - 21
8.4.6	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dibidang Pengelolaan Persampahan	8- 22
8.4.7	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Pada Pemberdayaan Masyarakat	8 - 23
8.4.8	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Pada Aspek Kemampuan Keuangan	8 - 25



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

8.4.9	Konsep Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Pada Aspek Kelembagaan	8 - 26
BAB 9	ANALISIS KORELASI STRATEGI	9- 1
9.1	Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Pembangunan Permukiman	9- 1
9.2	Analisa Korelasi Strategi Pembangunan Permukiman Terhadap Kebutuhan Infrastruktur Pendukung	9 - 3
BAB 10	ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI STRATEGI	10 - 1
10.1	Identifikasi Implikasi Dampak Strategi	10 - 1
BAB 11	RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)	11 - 1
11.1.	Rencana Program Investasi Jangka Menengah (rPIJM) SPPIP Kota Muara Bungo	11 - 1
11.2.	Komponen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (rPIJM) SPPIP Kota Muara Bungo	11 - 1
11.3.	Rincian Kegiatan RPIJM SPPIP KotaMuara Bungo	11 - 1



Daftar Tabel

Tabel 1 - 1	Lingkup Lokasi Kegiatan	1 - 11
Tabel 2 - 1	Luas Sementara Wilayah Kota Muara Bungo ,.....	2 - 2
Tabel 2 - 2	Kondisi Kelerengan Lahan Wilayah Perkotaan Muara Bungo ..	2 - 5
Tabel 2 - 3	Jumlah dan Pertumbuhan di Perkotaan Muara Bungo	2 - 12
Tabel 2 - 4	Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Muara Bungo dengan Jumlah Penduduk se Kabupaten Bungo	2 - 13
Tabel 2 - 5	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Perkotaan Muara Bungo Tahun 2010	2 - 14
Tabel 2 - 6	Rasio Penduduk Laki-Laki dibanding Perempuan Tahun 2010	2 - 15
Tabel 2 - 7	Jumlah Tempat Ibadat di Perkotaan Muara Bungo Tahun 2009	2 - 16
Tabel 2 - 8	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo atas dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2009 ..	2 - 17
Tabel 2 - 9	Distribusi PDRB Kabupaten Bungo atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 Masa Berlaku Tahun 2004 – 2009	2 - 18
Tabel 2 - 10	Sarana Pendidikan di Perkotaan Muara Bungo Tahun 2009 .	2 - 19
Tabel 2 - 11	Jumlah Murid dan Guru di Kota Muara Bungo Tahun 2009	2 - 20
Tabel 2 - 12	Rasio Guru Murid diPerkotaanMuara Bungo Tahun 2009	2 - 20
Tabel 2 - 13	Sarana Kesehatan di Kota Muara BungoTahun 2009.....	2 -21
Tabel 2 - 14	Sarana Peribadatan di Kota Muara Bungo Tahun 2009	2 - 21
Tabel 2 - 15	Sebaran Perijinan Bangunan di Perkotaan Muara Bungo	2 - 29
Tabel 3 - 1	Program Pembangunan Perwujudan Misi ke Dua	3 - 29
Tabel 3 - 2	Program Pembangunan Perwujudan Misi Ke Tujuh	3 - 30
Tabel 3 - 3	Perkiraan Jumlah Penduduk Kota Muara Bungo Tahun 2012-2031.....	3 - 34
Tabel 3 - 4	Perkiraan Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Ruangnya di Muara Bungo Sampai Tahun 2031	3 –37

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

Tabel 3 - 5	Kebutuhan Fasilitas Perdagangan di Kota Muara Bungo	3 - 39
Tabel 3 - 6	Kondisi Instalasi Pengolahan Air di Kabupaten Bungo	3 - 40
Tabel 3 - 7	Banyaknya Unit Jamban yang Dianjurkan dalam Fasilitas Jamban Komunal	3 - 47
Tabel 3 - 8	Ukuran Tangki Septik	3 - 47
Tabel 3 - 9	Perkiraan Volume Sampah Tahun 2011 – 2031	3 - 49
Tabel 4 - 1	Potensi dan Persoalan Pembangunan Kota Muara Bungo	4 - 2
Tabel 4 - 2	Potensi dan Persoalan Pembangunan Kota Pada Tingkat Kawasan Prioritas	4 - 10
Tabel 5 - 1	Kawasan Cenderung Padat dan Cenderung Kumuh	5 - 1
Tabel 5 - 2	Kawasan Permukiman Tidak Padat di Kota Muara Bungo ...	5 - 2
Tabel 5 - 3	Contoh Skoring Tingkat / Dampak Kekumuhan Lingkungan .	5 - 5
Tabel 5 - 4	Contoh Skoring Kondisi Kondisi Prasarana dan Sarana Lingkungan	5 - 6
Tabel 5 - 5	Contoh Skoring Posisi Strategis Kawasan dan Resiko Bencana	5 - 7
Tabel 5 - 6	Rekap Hasil Skoring Tingkat Potensi Kepemilikan Kawasan Cenderung Kumuh di Perkotaan Muara Bungo	5 - 10
Tabel 5 - 7	Rangking 10 Besar Hasil Penilaian Kelurahan Prioritas	5 - 11
Tabel 5 - 8	Kawasan Prioritas Terpilih	5 - 11
Tabel 6 - 1	Matrik Keselarasan Antara Kebijakan dan Program Bidang Permukiman	6 - 2
Tabel 6 - 2	Matrik Keselarasan Antara Kebijakan dan Program Bidang Infrastruktur	6 - 3
Tabel 6 - 3	Matrik Keselarasan Antara Kebijakan dan Kondisi Eksisting ..	6 - 5
Tabel 6 - 4	Permasalahan dan Pembangunan Permukiman dan Infra- struktur Pendukung Kawasan Perkotaan	6 - 11
Tabel 6 - 5	Permasalahan dan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Pendukung Kawasan Prioritas	6 - 14
Tabel 6 - 6	Matrik Analisis SWOT Pembangunan Kota Muara Bungo	6 - 16
Tabel 6 - 7	Matrik Analisis SWOT Pembangunan Permukiman Kota MuaraBungo	6 - 18
Tabel 6 - 8	Matrik Analisis SWOT Jalan Lingkungan Kota Muara Bungo ...	6 - 19



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

Tabel 6 - 9	Matrik Analisis SWOT Drainase Kota Muara Bungo	6 - 20
Tabel 6 - 10	Matrik Analisis SWOT Air Bersih Kota Muara Bungo	6 - 21
Tabel 6 - 11	Matrik Analisis SWOT Air Limbah Kota Muara Bungo	6 - 22
Tabel 6 - 12	Matrik Analisis SWOT Persampahan Kota Muara Bungo	6 - 23
Tabel 6 - 13	Matrik Analisis Korelasi Strategi dalam Skema Manajemen Pembangunan Perkotaan Muara Bungo	6 - 27
Tabel 9 - 1	Perumusan Penilaian Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Terhadap Pembangunan Permukiman	9 - 2
Tabel 9 - 2	Daftar Kebutuhan Infrastrktur Pendukung Pembangunan Permukiman Berdasarkan Skala Prioritasnya	9 - 3
Tabel 9 - 3	Daftar Kebutuhan Infrastrktur Pendukung Pembangunan Permukiman Berdasarkan Skala Prioritasnya di Kawasan Prioritas	9 - 3
Tabel 9 - 4	Matrik Analisis Korelasi Strategi dalam Skema Manajemen Pembangunan Perkotaan	9 - 5
Tabel 10 - 1	Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Perkotaan Bidang Permukiman	10 - 2
Tabel 10 - 2	Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan bidang Jalan Lingkungan	10 - 4
Tabel 10 - 3	Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan bidang Drainase	10 - 6
Tabel 10 - 4	Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan bidang Air Minum	10 - 7
Tabel 10 - 5	Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan bidang Air Limbah	10 - 9
Tabel 10 - 6	Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan bidang Persampahan	10 - 10
Tabel 10 - 7	Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat	10 - 11
Tabel 10 - 8	Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan bidang Pendanaan Ekonomi	10 - 13
Tabel 10 - 9	Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan bidang Kelembagaan	10 - 14



Daftar Gambar

Gambar 2 - 1	Peta Lokasi Kabupaten Bungo	2 - 3
Gambar 2 - 2	Peta Kawasan Perkotaan Muara Bungo	2 - 4
Gambar 2 - 3	Peta Tutupan Lahan Perkotaan Muara Bungo	2 - 10
Gambar 2 - 4	Peta Citra Eksisting Pusat Kota Muara Bungo	2 - 19
Gambar 2 - 5	Peta Arah Perkembangan Eksternal Perkotaan Muara Bungo	2 - 23
Gambar 2 - 6	Peta Arah Pembangunan Internal Perkotaan Muara Bungo	2 - 24
Gambar 2 - 7	Peta Eksisting Sebaran dan Tipologi Permukiman di Perkotaan Muara Bungo	2 - 27
Gambar 2 - 8	Peta Arah Perkembangan Permukiman di Perkotaan Muara Bungo	2 - 28
Gambar 2 - 9	Peta Jaringan Pelayanan Air Bersih PDAM Pancuran Talago Kab. Bungo di Kawasan Perkotaan Muara Bungo	2 - 32
Gambar 2 - 10	Peta Jaringan Pelayanan Pengelolaan Sampah Perkotaan Muara Bungo	2 - 34
Gambar 2 - 11	Peta Eksisting Jaringan Drainase Perkotaan Muara Bungo..	2 - 36
Gambar 3 - 1	Peta Propinsi Jambi	3 - 2
Gambar 3 - 2	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bungo	3 - 10
Gambar 3 - 3	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bungo	3 - 16
Gambar 3 - 4	Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Bungo	3 - 21
Gambar 3 - 5	Peta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air..	3 - 24
Gambar 3 - 6	Peta Rute Truk Pengangkutan Sampah Kota Muara Bungo..	3 - 26
Gambar 3 - 7	Peta Sebaran Permukiman Kawasan Perkotaan Muara Bungo	3 - 38
Gambar 3 - 8	Peta Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Perkotaan Muara Bungo	3 - 39
Gambar 3 - 9	Peta Jaringan Pipa Distribusi Tertier Penguras dan Valve Kota Muara Bungo	3 - 41



Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Laporan Akhir kegiatan pendampingan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Muara Bungo ini dibuat berdasarkan kontrak dengan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, tahun Anggaran 2011 Nomor : No: KU. 08.08-PKP/III/2011 tanggal 20 Mei 2011, untuk kegiatan pendampingan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011.

1.2. Latar Belakang

Daya tarik kehidupan perkotaan dan tuntutan kehidupan yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyak penduduk Indonesia yang beralih untuk tinggal dan beraktivitas di kawasan perkotaan. Terkait dengan hal ini, sejumlah kajian memprediksikan jumlah penduduk Indonesia yang mendiami kawasan perkotaan akan terus meningkat dari tahun ke tahun, diprediksikan pada akhir 2025 jumlahnya akan mencapai sekitar 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Adanya konsentrasi penduduk perkotaan ini perlu disikapi dan diantisipasi lebih awal mengingat akan adanya beberapa persoalan wilayah perkotaan yang akan muncul.

Kecenderungan perkembangan perkotaan ditambah dengan indikasi munculnya beberapa persoalan di wilayah perkotaan tersebut mensyaratkan adanya penanganan yang lebih terpadu dalam konteks kota dan membutuhkan kejelasan payung dalam strategi pembangunan. Adapun selama ini penanganan yang terpadu tersebut mencoba diwadahi dalam dua bentuk produk perencanaan pembangunan, yaitu:

- (1) Perencanaan pembangunan (development plan) yang memuat arahan dan strategi pembangunan kota; dan
- (2) Perencanaan Tata Ruang (spatial plan) yang memuat arahan dan

strategi penataan ruang.

Kedua produk ini pada dasarnya harus berjalan secara sinergi satu dengan yang lain. Penataan ruang (spatial plan) yang salah satu keluarannya adalah program pemanfaatan ruang pada dasarnya harus sejalan dengan arahan kebijakan, strategi dan program dalam perencanaan pembangunan (development plan). Namun dalam kenyataannya antara penataan ruang (spatial plan) dan perencanaan pembangunan (development plan) seringkali tidak sinergi yang kemudian berdampak pada tidak adanya kejelasan arah pengembangan dan pembangunan kota.

Mengacu pada kedua kondisi tersebut, maka Strategi Pengembangan Kota (SPK) yang merupakan strategi pembangunan berskala kota, berorientasi pada kebutuhan kota dan tidak sektoral, komprehensif dan terpadu, serta dapat menjadi acuan bagi strategi dibawahnya (sektoral) maupun para pemangku kepentingan, sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai acuan pembangunan sektor di bawahnya dalam skala kota. Strategi ini dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan merupakan suatu alat yang akandipakai oleh pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah perkotaan, yang diharapkan dapat membantu mengoptimalkan alokasi dana pembangunan secara akurat dan rasional. Sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan kota untuk membangun wilayah perkotaannya. Pada dasarnya Strategi Pengembangan Kota SPK ini tidak berdiri sendiri namun terdiri atas aspek-aspek yang berkenaan dengan sektor unggulan, sektor penunjang, dan sektor strategis lainnya sebagai satu kesatuan. Salah satu aspek utama untuk terselenggaranya pembangunan wilayah perkotaan adalah aspek permukiman dan infrastruktur perkotaan, dimana aspek ini menjadi awal dari adanya kehidupan perkotaan.

Dalam perkembangannya, aspek permukiman dan infrastruktur perkotaan yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam pembangunan perkotaan seringkali justru menyumbang persoalan serius bagi kehidupan perkotaan itu sendiri. Banyak persoalan perkotaan yang bermula dari aspek permukiman dan infrastruktur perkotaan, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya. Persoalan-persoalan ini seringkali menjadi persoalan yang laten yang tidak tertangani secara optimal. Hal ini terjadi pada dasarnya karena ada beberapa faktor sebagai berikut:

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

- Tuntutan yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan aspek permukiman dan infrastruktur perkotaan seringkali tidak atau belum didukung dengan suatu kebijakan dan strategi pembangunan yang memadai, matang dan berskala kota;
- Kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan seringkali bersifat instant dan responsif terhadap persoalan yang ada serta berorientasi pada ketersediaan program atau proyek pendukung sehingga kebijakan dan strategipembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan seringkali bersifat parsial dan tidak komprehensif serta tidak terpadu dengan kebutuhan strategi pembangunan perkotaan;
- Tidak adanya atau belum adanya strategi khusus pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan penataan ruang dan perencanaan pembangunan secara keseluruhan;
- Adanya tumpang tindih kebijakan dan strategi penanganan persoalan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada tingkat operasional (kabupaten/kota).

Berkenaan dengan kondisi ini, maka perlu adanya penekanan penyusunan strategi pengembangan kota pada strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) yang nantinya diharapkan akan menjamin integrasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan dengan program terkait lain. Penyusunan strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) itu sendiri tetap didasarkan dan mengacu pada Strategi Pengembangan Kota (SPK).

Sebagai suatu proses yang sangat strategis dan signifikan serta akan diterapkan di kota/kabupaten dengan karakter yang berbeda maka sangat disadari bahwa dalam proses penyusunannya akan sangat membutuhkan dukungan penguatan bersama, baik yang bersifat pemahaman, kapasitas maupun pengetahuan terhadap SPPIP ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum memberikan dukungan dalam bentuk bantuan dan bimbingan teknis yang bersifat pendampingan dan peningkatan serta penguatan kapasitas (*capacity building*) bagi propinsi, kota/kabupaten yang akan melaksanakan penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) ini diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah guna menghasilkan strategi dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kebijakan dan strategi serta kebutuhan pembangunan kota.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota ini adalah:

1. Membantu kota/kabupaten dalam penyediaan strategi yang komprehensif untuk mengembangkan kota dengan menekankan kepada strategipembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang memenuhi kaidah perencanaan dan terintegrasi dengan sistem perkotaan, sehingga dapat menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan kawasan perkotaan (bagi kota-kota yang telah memilikinya);
2. Memberikan pendampingan bagi perangkat perencana dan pelaksana pembangunan di daerah dalam menyusun strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) yang terintegrasi dengan sektor pembangunan lain sesuai dengan peran, fungsi dan kontribusi yang diharapkan dalam mencapai tujuan pengembangan kawasan perkotaan.

1.4. Sasaran Kegiatan

Berdasarkan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya sasaran dari kegiatan Penyusunan SPPIP Kabupaten/Kota dapat dibedakan atas dua hal, yaitu sasaran fungsional dan sasaran operasional sebagai berikut:

1.4.1. Sasaran Fungsional

Terselenggaranya kegiatan pengembangan kotamelalui pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan kawasan perkotaan secara berdaya dan berhasil guna berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

1.4.2. Sasaran Operasional

Sasaran yang ingin dicapai dengan tersedianya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) ini adalah:

- (1) Tersedianya instrumen pembangunan kota yang menitikberatkan pada pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah yang memenuhi kaidah perencanaan dan kaidah tata pemerintahan yang baik;
- (2) Terwujudnyaproses pembinaan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang terintegrasi dengan kawasan fungsional perkotaan lainnya dalam konstelasi pembangunan kota;
- (3) Terwujudnya keselarasan strategi pembangunan kawasan permukiman perkotaan antara sasaran pembangunan permukiman perkotaan nasional dengan rencana pembangunan permukiman perkotaan di daerah;
- (4) Tersedianya acuan bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengoptimalkan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang dapat mendukung dan mempercepat pembangunan kota sesuai dengan karakter atau kekhasan kota dan tujuan pembangunannya;
- (5) Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kota (stakeholder) dalam penyediaan strategi pembangunan permukiman perkotaan dan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

1.5. Lokasi Kegiatan

Sesuai dengan Kontrak Kerja, pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Muara Bungo, pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Jambi Tahun Anggaran 2011, adalah di Kota Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

1.6. Ruang Lingkup Materi & Ruang Lingkup Wilayah Kegiatan

1.6.1. Ruang Lingkup Materi

Kegiatan Penyusunan SPPIP Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian kegiatan besar pembangunan kota yang akan diselenggarakan dalam waktu dua tahun. Keluaran dari kegiatan yang diselenggarakan pada tahun pertama ini akan menjadi dasar dalam proses institusionalisasi strategi yang disusun dan upaya uji terap/implementasi strategi pada suatu kawasan yang diprioritaskan. Dalam kerangka waktu satu tahun anggaran ini, lingkup kegiatan ini ditekankan kepada penyusunan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dengan infrastruktur perkotaan yang dibatasi pada infrastruktur keciptakarya dalam lingkup wilayah kota.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan rangkaian lingkup kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi program penyusunan SPPIP kepada pemangku kepentingan daerah terkait kedudukan dan fungsi SPPIP dalam strategi pengembangan kota;
- b. Menyelenggarakan pelatihan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang proses penyusunan SPPIP yang dilakukan di tingkat Kota/Kabupaten. Pelatihan ini ditujukan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) dari pemerintah daerah atau yang telah ditetapkan sebagai Pokjanis Daerah untuk penyusunan SPPIP dan bagi tim pendamping penyusunan. Pelatihan dilakukan untuk 20 (dua puluh) orang selama 2 hari;
- c. Melakukan survey primer dan sekunder untuk mendapatkan data dan informasi terkait permasalahan, kebijakan, strategi dan program pengembangan kota serta data dan informasi pendukung analisa dan penyusunan SPPIP;
- d. Menyiapkan peta dasar dengan kedalaman informasi skala 1 : 25.000 yang akan digunakan sebagai peta dasar untuk melakukan identifikasi kebijakan dan strategi pembangunan kota, melakukan analisa serta menuangkan strategi pengembangan kota dan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) ke dalam bentuk spasial;

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

- e. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi, permasalahan dan isu terkait serta kebutuhan pembangunan perkotaan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, serta menetapkan permasalahan dan isu strategis permukiman perkotaan. Dalam proses identifikasi ini dilakukan berdasarkan pemetaan dasar spasial, data sekunder, pengamatan lapangan, dan wawancara kepada stakeholder inti, serta disajikan di atas peta;
- f. Melakukan kajian/kaji ulang (review) terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah. Apabila telah tersedia Strategi Pengembangan Kota (SPK) atau dokumen sejenis lainnya, maka kajian dilakukan terhadap dokumen SPK tersebut, sedangkan apabila belum tersedia Strategi Pengembangan Kota SPK ataupun dokumen sejenis lainnya, maka kajian dilakukan terhadap semua dokumen kebijakan, strategi, dan program yang telah dimiliki dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah;
- g. Melakukan identifikasi permasalahan dan kajian keselarasan terhadap kebijakan, strategi dan program pembangunan yang terdapat di dalam rencana pembangunan (development plan) dan rencana penataan ruang (spatial plan);
- h. Identifikasi dan perumusan strategi pembangunan kota dengan penekanan pada potensi dan persoalan bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan;
- i. Melakukan pendataan identifikasi sebaran permukiman, dan analisis permasalahan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur pendukungnya;
- j. Melakukan identifikasi, analisa dan perumusan kebutuhan strategis pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) dalam konstelasi pengembangan kota;
- k. Penyusunan dan perumusan visi dan misi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan;
- l. Penyelenggaraan konsultasi publik untuk perumusan visi dan misi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Dalam penyelenggaraankonsultasi publik, Tim Pokjanis Daerah akan didampingi oleh konsultan pendamping dalam proses persiapan dan pelaksanaannya;
- m. Perumusan kriteria dan indikator kawasan prioritas pembangunan

- permukiman dan infrastruktur perkotaan;
- n. Identifikasi indikasi kawasan prioritas pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang akan digunakan sebagai acuan oleh daerah dalam menyusun kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP).
- o. Perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan;
- p. Identifikasi implikasi dampak strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan;
- q. Identifikasi dan analisa korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan infrastruktur pendukung dalam skema manajemen pembangunan perkotaan dan rencana pembiayaannya;
- r. Perumusan kebutuhan program strategis yang mengacu pada strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur yang telah disusun;
- s. Penyelenggaraan konsultasi publik untuk perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP), dan kebutuhan program strategis. Dalam penyelenggaraan konsultasi publik, Tim Pokjanis Daerah akan didampingi oleh konsultan pendamping dalam proses persiapan dan pelaksanaannya;
- t. Mendukung pengadaan basis data sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja program yang saat ini sedang dikembangkan oleh DJCK;
- u. Melakukan sosialisasi hasil kesepakatan perumusan SPPIP melalui diseminasi kepada dinas/instansi terkait di daerah;
- v. Menyusun materi visualisasi hasil studi yang akan digunakan untuk kebutuhan sosialisasi dalam bentuk poster dan leaflet;
- w. Melakukan kegiatan diskusi dan pembahasan sebagai berikut:

1) Focus Group Discussion (FGD),

dilakukan untuk setiap kegiatan bersama antara Tim Konsultan dengan Tim Pokjanis Daerah dan instansi terkait dalam menyusun dan merumuskan setiap kegiatan yang membutuhkan kesepakatan bersama. FGD dilakukan sebanyak 4 (empat) kali untuk kegiatan:

- Persiapan dan pematapan perencanaan kerja penyusunan SPPIP

dan sekaligus sebagai kegiatan sosialisasi tentang penyusunan SPPIP kepada tim Pokjanis;

- Identifikasi dan pemetaan potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan kota dan perumusan strategi pembangunan kota;
- Perumusan visi dan misi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan;
- Perumusan strategi pembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan serta perumusan;
- Perumusan program strategis.

Setiap kegiatan FGD diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta, dan dilakukan di kota/kabupaten tempat penyusunan SPPIP.

2) Konsultasi Publik,

dilakukan untuk setiap kegiatan yang membutuhkan proses sosialisasi, masukan dan penyepakatan dengan pemangku kepentingan daerah. Pelaksanaan kegiatan Konsultasi publik di kota/kabupaten tempat dilakukannya penyusunan SPPIP, sebanyak 2 (dua) kali untuk kegiatan berikut:

- Perumusan Visi dan Misi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
 - Perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastrutur perkotaan (SPPIP) dan perumusan kebutuhan program strategis
- Setiap kegiatan Konsultasi Publik diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang mewakili pemangku kepentingan kota, baik lembaga eksekutif, legislatif, akademisi maupun perwakilan masyarakat.

3) Kolokium,

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, yang ditujukan untuk melakukan penyamaan pencapaian hasil kegiatan penyusunan SPPIP yang dilakukan di setiap kota/kabupaten. Pihak Konsultan dan Pokjanis akan mengikuti kegiatan Kolokium dan melaporkan kemajuan pencapaian kegiatan maupun hasil kesepakatan di daerah dalam penyusunan SPPIP. Kegiatan Kolokium ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing masing selama 1 (satu) hari untuk kegiatan berikut:

- Dilakukan pada awal bulan ke-2 (dua) setelah SPMK, setelah dilakukan kegiatan persiapan dan pemantapan rencana kerja penyusunan SPPIP
- Dilakukan pada akhir bulan ke-7 (tujuh) setelah SPMK, pada saat dilakukan kegiatan perumusan strategi pembangunan permukiman dan Infrastruktur perkotaan (SPPIP);
- perumusan kebutuhan program strategis.

4) Diseminasi,

dilakukan pada akhir kegiatan dan ditujukan untuk mensosialisasikan seluruh hasil kegiatan khususnya SPPIP dan Program Strategis yang telah disepakati, kepada dinas/instansi terkait dan pemangku kepentingan daerah lainnya. Diseminasi dilakukan di tingkat Kota/Kabupaten.

Kegiatan Diseminasi diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang mewakili pemangku kepentingan kota, baik lembaga eksekutif, legislatif, akademisi maupun perwakilan masyarakat, dan pihak pemerintah propinsi.

5) Diskusi Pembahasan,

dilakukan untuk setiap pembahasan laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapnya. Diskusi pembahasan dilakukan di Kota/kabupaten tempat dilakukannya penyusunan SPPIP. Diskusi pembahasan dilakukan untuk pembahasan laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir sementara dan laporan akhir.

1.6.2. Ruang Lingkup Wilayah Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten/Kota dilakukan pada lingkup wilayah Kota Muara Bungo, yang sesuai dengan kecenderungan dan arah pengembangan kota terkait dengan telah dibangunnya jalur jalan lingkaran timur Kota Muara Bungo dan Bandara, maka atas kesepakatan dengan Tim Pokjanis lokasi kegiatan mencakup 5 wilayah Kecamatan sebagaimana tabel berikut. .

Tabel: 1-1
Lingkup Lokasi Kegiatan

No	Kecamatan	Desa/Kel	Luas Wilayah (Ha.)	Dusun	RWT	RT
1.	Pasar Muara Bungo	1. Kel. Bungo Barat	169,7		3	8
		2. Kel. Batang Bungo	334,1		6	18
		3. Kel. Bungo Timur	362,5		5	15
		4. Kel. Jaya Setia	322,2		7	22
		5. Kel. Tanjung Gedang	514,2		4	13
		Jumlah.	1.702,7		25	75
2.	Rimbo Tengah	1. Sungai Mengkuang	6.002,0	7		17
		2. Sungai Buluh	3.670,0	4		15
		3. Kel. Pasir Putih	577,0		8	28
		4. Kel. Cadika	898,0		5	17
		Jumlah	11.147,0	11	13	77
3.	Bungo Dani	1. Kel. Sungai Kerjan	654,0		9	28
		2. Sungai Arang	2.728,0	6		13
		3. Talang Pantai	2.810,0	4		9
		4. Kel. Sungai Pinang	376,0		6	18
		5. Pulau Pekan *)				
		Jumlah	6.868,0	10	15	68
4.	Bathin III	1. Kel. Manggis	1.909,0			
		2. Kel. Sungai Binjai	567,0			
		3. Kel. Bungo Taman Agung	330,0			
		4. Purwo Bakti	1.430,0			
		5. Air Gemuruh	2.500,0			
		6. Teluk Panjang	1.450,0			
		7. Lubuk Benteng	430,0			
		8. Sarana Jaya	1.800,0			
		Jumlah	10.416,0			
5	Bathin II Babeko	1. Sepunggur	15.440,0	6		13
		2. Babeko	6.000,0	2		4
		3. Simpang Babeko	3.300,0	3		12
		4. Tanjung Menanti	3.160,0	1		6
		5. Suka Makmur *)		2		8
		Jumlah	27.900,0	14		43
TOTAL			57.733,7			

*) Merupakan Kel. Desa pemekaran baru, data luas wilayah dan lain-lain belum tersedia dan masih bergabung dengan Desa asal

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, Tahun 2009, BPS Kabupaten Bungo

1.7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo ini diselenggarakan dalam jangka waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.

1.8. Sistematika Penulisan Laporan Akhir

Penyusunan Laporan Akhir ini, mengacu pada :

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Pekerjaan Penyusunan Strategi

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

- Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Muara Bungo, Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011.
2. Buku Panduan Pelaksanaan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RKPP) edisi Mei 2011, yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum.
 3. Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RKPP) edisi Mei 2011, yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
 4. Sosialisasi Penyusunan SPPIP dan RPKPP tanggal 26 dan 27 Mei 2011, di Hotel Grand Angkasa, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.
 5. Sosialisasi Penyusunan SPPIP dan RPKPP oleh Tim Pusat pada tanggal 27 Juni 2011, di Bappeda Kabupaten Bungo, Jl. R. M. Thaher No. 54, Muara Bungo.
 6. Koordinasi Konsultan dengan Tim Pokjanis Kabupaten Bungo Tanggal 21 Mei 2011 di Bapeda Kabupaten Bungo. Jl. R. M. Thaher No. 54, Muara Bungo

Sistematika penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisi uraian secara garis besar tentang latar belakang, maksud, tujuan, sasaran dan lingkup kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Muara Bungo, Tahun Anggaran 2011.

Bab II PROFIL PERKOTAAN MUARA BUNGO, KONDISI PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Berisi uraian tentang Profil Kota Muara Bungo, yaitu kondisi geografis, kependudukan, kondisi fisik kota, kondisi permukiman dan infrastruktur perkotaan Muara Bungo.

Bab III REVIEW KEBIJAKAN

Berisi uraian tentang Review Kebijakan Perencanaan Pembangunan yaitu terhadap RPJP Kabupaten Bungo, RPJM Kabupaten Bungo, RPIJM Kabupaten Bungo dan Review Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yaitu terhadap RTRW Kabupaten Bungo dan RUTR/ RDTR Perkotaan Muara Bungo.

Bab IV IDENTIFIKASI POTENSI & PERSOALAN PEMBANGUNAN

Berisikan uraian tentang Potensi Permasalahan, Peluang dan tantangan Pembangunan Kota, dan uraian tentang Potensi Permasalahan, Peluang dan Tantangan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan.

Bab V ANALISIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Berisikan uraian tentang Identifikasi sebaran permukiman dan infrastruktur perkotaan, kondisi sebaran permukiman dan infrastruktur perkotaan, pemilihan kawasan prioritas pembangunan melalui perumusan kriteria dan indikator kawasan prioritas, penilaian skoring kawasan prioritas pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, serta penentuan kawasan prioritas terpilih.

Bab VI ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN

Berisikan uraian tentang Kriteria dan Indikator keselarasan kebijakan dan strategi keselarasan kebijakan, Identifikasi permasalahan kebijakan pembangunan dan spatial planning pada bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan, analisis pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan, serta identifikasi dan perumusan strategi pengembangan kota Serta Identifikasi kebutuhan strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Bab VII VISI & MISI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Berisi uraian tentang Visi dan Misi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota Muara Bungo, serta Tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Visi, Misi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan.

BabVIII PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Berisiuraian tentang Daftar kebutuhan Strategi Pembangunan, Daftar Konsep Strategi Pembangunan, perumusan dan kajian Peran dan Kemampuan Pembiayaan dan Kajian Peran Pemerintah pada kegiatan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Bab IX IDENTIFIKASI ANALISIS KORELASI STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Berisiuraian tentang analisis Korelasi Strategi terhadap strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, dan Prioritas penanganan

Bab X IDENTIFIKASI IMPLIKASI DAMPAK PENERAPAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Berisiuraian tentang kajian terhadap strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, kegiatan-kegiatan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang akan dilaksanakan terkait dengan implementasi strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, serta analisis dampak pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada berbagai aspek.

Bab XIRENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)

Berisiuraian tentang Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Muara Bungo dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2012 - 2016) dan secara tentatif untuk 5 tahun kedua, ketiga dan keempat atau sampai dengan tahun 2031 khususnya pada bidang keciptakaryaan antara lain bidang Permukiman dan Jalan Lingkungan, bidang Air Minum/Air Bersih, bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL).

Bab 2

PROFIL PERKOTAAN MUARA BUNGO, KONDISI PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

2.1 PROFIL PERKOTAAN MUARA BUNGO

2.1.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi Wilayah

Kota Muara Bungo merupakan sebagian dari wilayah Kabupaten Bungo, yang sekaligus ibukota Kabupaten Bungo, Berdasarkan revisi RUTR Perkotaan Muara Bungo terkait dengan telah dibangunnya jalan lingkar timur Kota Muara Bungo dan Bandara Muara Bungo, Wilayah Perkotaan Muara Bungo terdiri dari 5 wilayah kecamatan yakni:

1. Kecamatan Pasar Muara Bungo,
2. Kecamatan Rimbo Tengah,
3. Kecamatan Bungo Dani
4. Kecamatan Bathin III
5. Kecamatan Bathin II Babeko

Berdasarkan status administrasi kelurahan/ desa, wilayah Perkotaan Muara Bungo terdiri 12 kelurahan dan 15 desa. Sesuai luasan wilayah kecamatan, luas wilayah Perkotaan Muara Bungo kurang lebih **57.733,7** Ha. atau sekitar 577,337 Km², dengan proporsi wilayah terluas adalah Kecamatan Bathin II Babeko (sekitar 42 % dari luasan wilayah perkotaan Muara Bungo yang terdiri dari 5 wilayah kecamatan tersebut).

Adapun batas wilayah Perkotaan Muara Bungo adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Tebo

Sebelah Selatan : Kecamatan Pelepat dan Kecamatan Pelepat Ilir

Sebelah Timur : Kabupaten Tebo

Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Sepenggal dan Kec. Muko-Muko
BathinVII

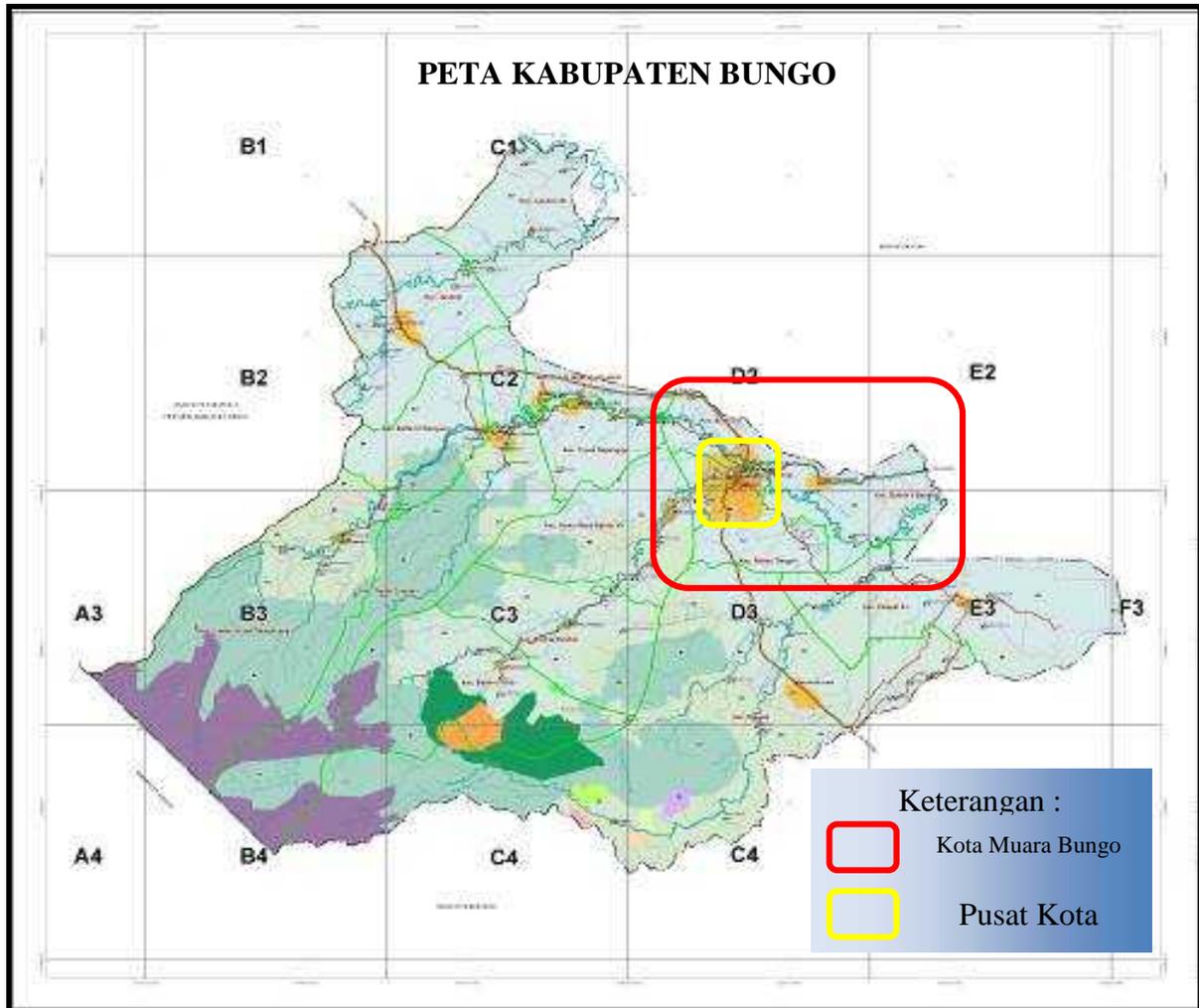
Gambaran mengenai batasan wilayah perkotaan Muara Bungo dapat diperhatikan pada Tabel 2-1, dan Gambar / Peta 2-1 sebagai berikut.:

Tabel 2-1
Luas Sementara Wilayah Kota Muara Bungo
Mengacu Revisi RUTR Perkotaan Muara Bungo terkait telah dibangunnya jalan
lingkar timur Kota Muara Bungo dan Bandara Muara Bungo
(Terdiri dari 5 wilayah Kecamatan)

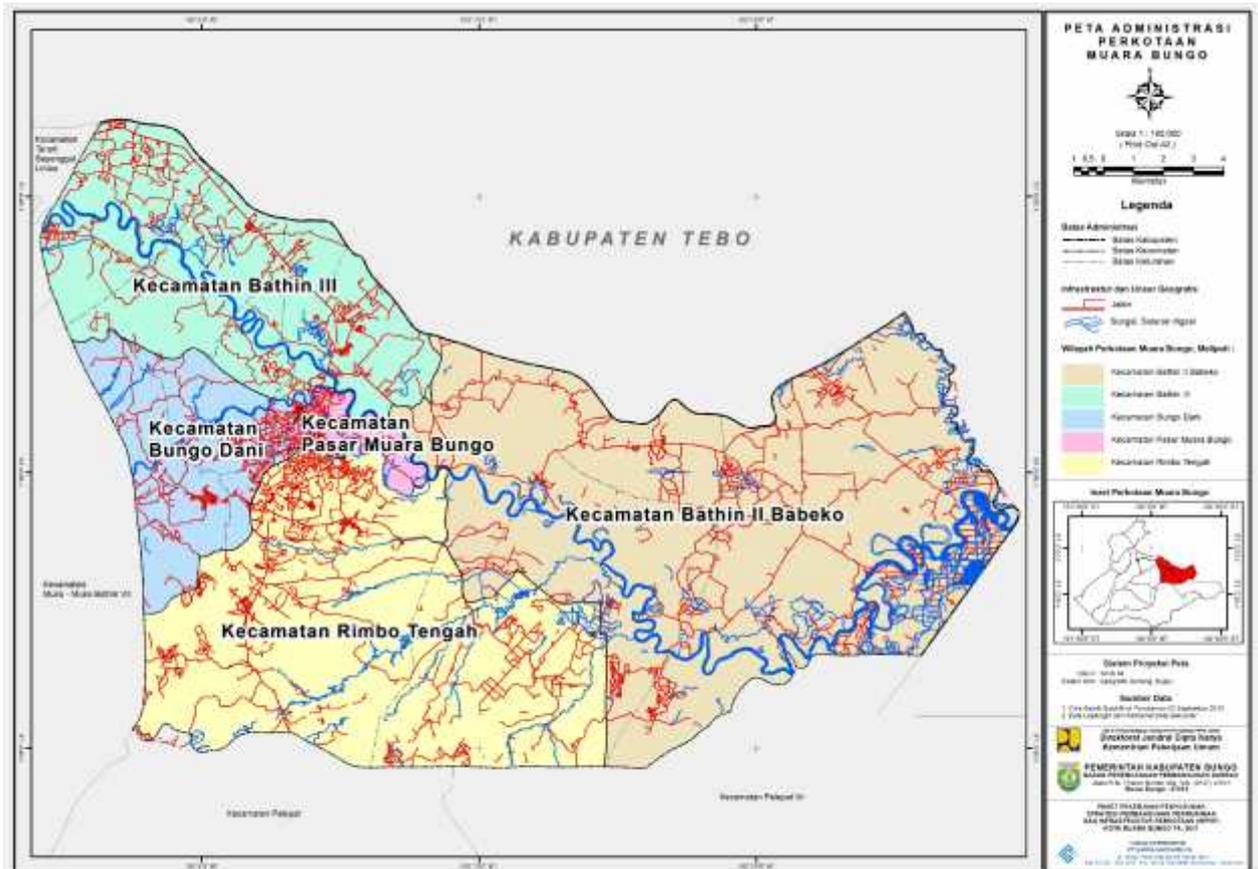
No	Kecamatan	Desa/Kel	Luas Wil (Ha.)	Dusun	RWT	RT
1.	Pasar Muara Bungo	1. Kel. Bungo Barat	169,7		3	8
		2. Kel. Batang Bungo	334,1		6	18
		3. Kel. Bungo Timur	362,5		5	15
		4. Kel. Jaya Setia	322,2		7	22
		5. Kel. Tanjung Gedang	514,2		4	13
		Jumlah.	1.702,7		25	75
2.	Rimbo Tengah	1. Sungai Mengkuang	6.002,0	7		17
		2. Sungai Buluh	3.670,0	4		15
		3. Kel. Pasir Putih	577,0		8	28
		4. Kel. Cadika	898,0		5	17
		Jumlah	11.147,0	11	13	77
3.	Bungo Dani	1. Kel. Sungai Kerjan	654,0		9	28
		2. Sungai Arang	2.728,0	6		13
		3. Talang Pantai	2.810,0	4		9
		4. Kel. Sungai Pinang	376,0		6	18
		5. Pulau Pekan *)				
		Jumlah	6.568,0	10	15	68
4.	Bathin III	1. Kel. Manggis	1.909,0			
		2. Kel. Sungai Binjai	567,0			
		3. Kel. Bungo Taman Agung	330,0			
		4. Purwo Bakti	1.430,0			
		5. Air Gemuruh	2.500,0			
		6. Teluk Panjang	1.450,0			
		7. Lubuk Benteng	430,0			
		8. Sarana Jaya	1,800,0			
		Jumlah	10.416,0			
5	Bathin II Babeko	1. Sepunggur	15.440,0	6		13
		2. Babeko	6.000,0	2		4
		3. Simpang Babeko	3.300,0	3		12
		4. Tanjung Menanti	3.160,0	1		6
		5. Suka Makmur *)		2		8
		Jumlah	27.900,0	14		43
Total			57.733,7			

*) Merupakan Kel./Desa pemekaran baru, dan data luas wilayah dan lain-lain masih bergabung dengan Kel./Desa asal
 Sumber: Kecamatan Dalam Angka, Tahun 2009, BPS Kabupaten Bungo

Gambar / Peta 2-1
Lokasi Kabupaten Bungo
(Berdasarkan Revisi RUTR Kota Muara Bungo terkait telah dibangunnya jalan lingkar timur Kota Muara Bungo)



Gambar / Peta 2-2
Kawasan Perkotaan Muara Bungo
(Berdasarkan Revisi RUTR Kota Muara Bungo terkait telah dibangunnya jalan lingkar timur Kota Muara Bungo)



2.1.2. Kondisi Fisik

a. Topografi

Topografi Wilayah Perkotaan Muara Bungo bervariasi mulai dari dataran rendah sampai berbukit/ bergelombang. Ketinggian permukaan tanah Wilayah Perkotaan Muara Bungo berkisar antara 100-500 m dpl dengan kemiringan lahan sebagai berikut::

Tabel 2-2
Kondisi Kelerengan Lahan Wilayah Perkotaan Muara Bungo

No	Tingkat Kemiringan Lahan (%)	Luas (Ha.)
1	0-3 %	17.890,37
2	3-15%	36.363,10
3	16-40%	3.463,15
4	> 40 %	17,08
	Jumlah	57,733,70

Sumber: Diolah dari data kontur RBI

Berdasarkan ketinggian dan kelerengan/ kemiringan lahan, wilayah Perkotaan Muara Bungo memiliki bentang alam bervariasi antara dataran rendah - daerah bergelombang – daerah berbukit – sampai daerah dengan kelerengan terjal. Semakin ke arah barat, timur dan selatan perkotaan Muara Bungo semakin bergelombang. Berdasarkan kondisi bentang alam atau morfologi tersebut, kawasan perkotaan Muara Bungo dapat dibagi menjadi beberapa satuan morfologi yaitu :

1. Satuan Morfologi Dataran

Satuan ini mempunyai bentuk yang hampir datar sampai datar dengan sudut kemiringan lereng 0 – 3 %, ketinggian dataran berkisar 100 – 150 m di atas permukaan laut. Penyebaran satuan ini terletak di bagian tengah yaitu di wilayah Kecamatan Pasar Muara Bungo yang sekaligus merupakan kawasan pusat kota. Dataran ke sisi sungai dibentuk oleh pasir, kerikil, sedikit lanau dan lempung ke arah timur sesuai aliran sungai. Sungai-sungai yang mengalir di daerah dataran ini umumnya mempunyai alur yang berkelok-kelok, arusnya sedang sampai deras sehingga daya kikisnya cukup tinggi.

2. Satuan Morfologi Bergelombang

Satuan ini mempunyai kemiringan lereng antara 3 – 10 %, dengan ketinggian tempat antara 150 – 250 m di atas permukaan laut. Penyebaran satuan ini terutama dibagian utara Perkotaan Muara Bungo ke arah timur. Sungai-sungai yang mengalir di daerah ini umumnya mempunyai lembah yang tidak terlalu lebar dan dangkal. Alirannya membentuk pola mendaun.

3. Satuan Morfologi Perbukitan Berelif Halus

Satuan ini mempunyai kelerengan 10 – 15 % dan ketinggian tempat 250 – 300 m diatas permukaan laut. Penyebarannya satuan ini dibagian barat, selatan dan timur kawasan perkotaan Muara Bungo.

4. Satuan Morfologi Perbukitan Berelif Sedang

Satuan ini mempunyai lereng antara 15 % - 30 % dengan ketinggian 300 – 450 m diatas muka laut. Penyebaran satuan ini terutama di bagian barat, selatan, dan tenggara Kota Muara Bungo.

5. Satuan morfologi perbukitan berelif kasar

Satuan ini mempunyai kemiringan > 30 % terletak pada ketinggian 450 – 500 m di atas permukaan laut. Penyebaran satuan ini terutama di bagian selatan, barat, dan tenggara.

Cepatnya kegiatan pembangunan di perkotaan Muara Bungo, seperti pembangunan permukiman, pertokoan/ ruko, pembangunan jalan, dan pembangunan bandar udara, dan pembangunan fisik kota yang banyak dilakukan dengan model pengurugancekungan dan pengeprasan bukit, akan menimbulkan perubahan bentang alam, stratifikasi batuan, profil tanah, struktur tanah, tingkat erosi dan kesuburan tanah. Perubahan bentang alam ini diperkirakan akan terjadi pada unsur-unsur bentang alam seperti sudut lereng, panjang lereng, bentuk lereng dan pola aliran, serta implikasi ikutan berupa berubahnya pola drainase aliran permukaan.

b. Pembentukan, Morfologi, Profil dan Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Perkotaan Muara Bungo yaitu tanah podsolik dan latosol. Jenis batuan di wilayah ini didominasi batuan kuartar tua. Jenis tanah podsolik biasanya ditandai dengan penyucian yang ekstensif terhadap unsur hara dan basa tanah sehingga menjadi tanah breksi masam dengan kejenuhan basa yang rendah yang mengakibatkan pelapukan terhadap mineral. Penggunaan lahan yang sesuai untuk jenis tanah ini adalah lahan pertanian, namun produksi pertanian yang baik hanya terjadi pada beberapa tahun pertama saja, yaitu selama unsur-unsur hara dipermukaan tanah belum habis. Untuk memperoleh hasil yang baik diperlukan pengapuran, pemupukan dan pengolahan yang tepat.

Jenis tanah latosol memiliki bagian yang cukup luas. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang telah mengalami pelapukan stadium lanjut, dan telah mengalami pencucian unsur-unsur hara. Kedalaman tanah jenis ini relatif dalam dengan tekstur yang bervariasi dari liat berlempung hingga liat. Jenis tanah ini memiliki laju infiltrasi dan perkolasi lambat.

Tanah di perkotaan Muara Bungo memiliki sifat kelerengan relatif datar, tekstur tanah halus sampai sedang, drainase sedang, dan struktur tanah agak lemah, sehingga kemungkinan terjadi erosi dan gerakan tanah ataupun runtuh batuan relatif cukup besar.

c. Hidrologi

Ketersediaan air di kawasan perkotaan Muara Bungo lebih dipengaruhi oleh curah hujan. Kondisi hidrologi di Perkotaan Muara Bungo terdiri dari 2 jenis perairan, yaitu perairan sungai dan anak sungai. Air permukaan, merupakan sumber air yang paling banyak dan paling mudah pengambilannya untuk dimanfaatkan dalam upaya pemenuhan berbagai kebutuhan. Air permukaan yang utama adalah air sungai yang mengalir melalui wilayah perkotaan Muara Bungo antara lain sungai Batang Bungo dan sungai Batang Tebo dengan beberapa anak

sungainya, mengalir membelah Perkotaan Muara Bungo dari arah barat ke timur di bagian utara wilayah perkotaan Muara Bungo. Pola aliran sungai terutama pada daerah berbukit yang berelif kasar mengikuti pola aliran subdendritik.

Air permukaan ini dimanfaatkan oleh penduduk yang mendiami kawasan sekitar sungai, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kebutuhan pengairan daerah-daerah yang relatif datar dan rendah di sepanjang alur-alur sungai tersebut. Air tanah yang terdapat di perkotaan Muara Bungo adalah air tanah bebas atau air tanah dangkal, sedangkan air tanah dalam atau air tanah tertekan kurang atau langka di daerah ini karena sebagian besar daerahnya dibentuk oleh batuan sedimen tersier yang berbutir halus sehingga bersifat kedap air. Air tanah bebas terutama terdapat di daerah daratan, yang dibentuk oleh endapan alluvial dan sedimen dari proses erosi berkelanjutan. Muka air tanah terletak pada kedalaman yang berkisar antara -1 hingga -2 m dari permukaan air setempat. Di daerah perbukitan bergelombang air tanah bebas umumnya terdapat dalam lapisan tanah penutup, di dalam rekahan-rekahan batuan, dan cekungan.

Perbedaan tinggi muka air tanah pada musim penghujan dan kemarau cukup besar, bahkan tidak jarang ada sumur gali di daerah ini yang kering di musim kemarau. Letak muka air tanah umumnya dalam, berkisar antara -5 m sampai -10 m di bawah permukaan tanah setempat. Pada umumnya kualitas air tanah di daerah ini cukup baik dan dapat dimanfaatkan untuk air minum. Mata air pada umumnya terdapat di daerah yang dibentuk oleh lava andesit yang banyak membentuk sesar dan retakan. Mata air terdapat di daerah yang masih tertutup oleh vegetasi, air keluar dari ujung-ujung lava di bagian kaki lereng perbukitan atau tekukan di bagian lereng. Mata air yang ada umumnya mempunyai kapasitas yang relatif kecil, berkisar antara 1 – 5 l/dt.

d. Iklim

Kawasan perkotaan Muara Bungo termasuk daerah berhawa panas, dengan suhu udara berkisar antara 22° C sampai dengan 39° C, tingkat kelembaban udara tergolong tinggi yang berada pada kisaran 70% - 90%, sedangkan tingkat curah hujan yang terjadi berada pada kisaran 2.200 – 3.000 mm/tahun dengan intensitas hari hujan 4-17 hari hujan. Tipe iklim di daerah ini menurut Koppen adalah alfa, yang berarti daerah hujan tropika dengan suhu rata-rata > 18°C dan curah hujan terkering > 60 mm/bulan dengan bulan terpanas > 32°C.

2.1.3. Pola Penggunaan Lahan

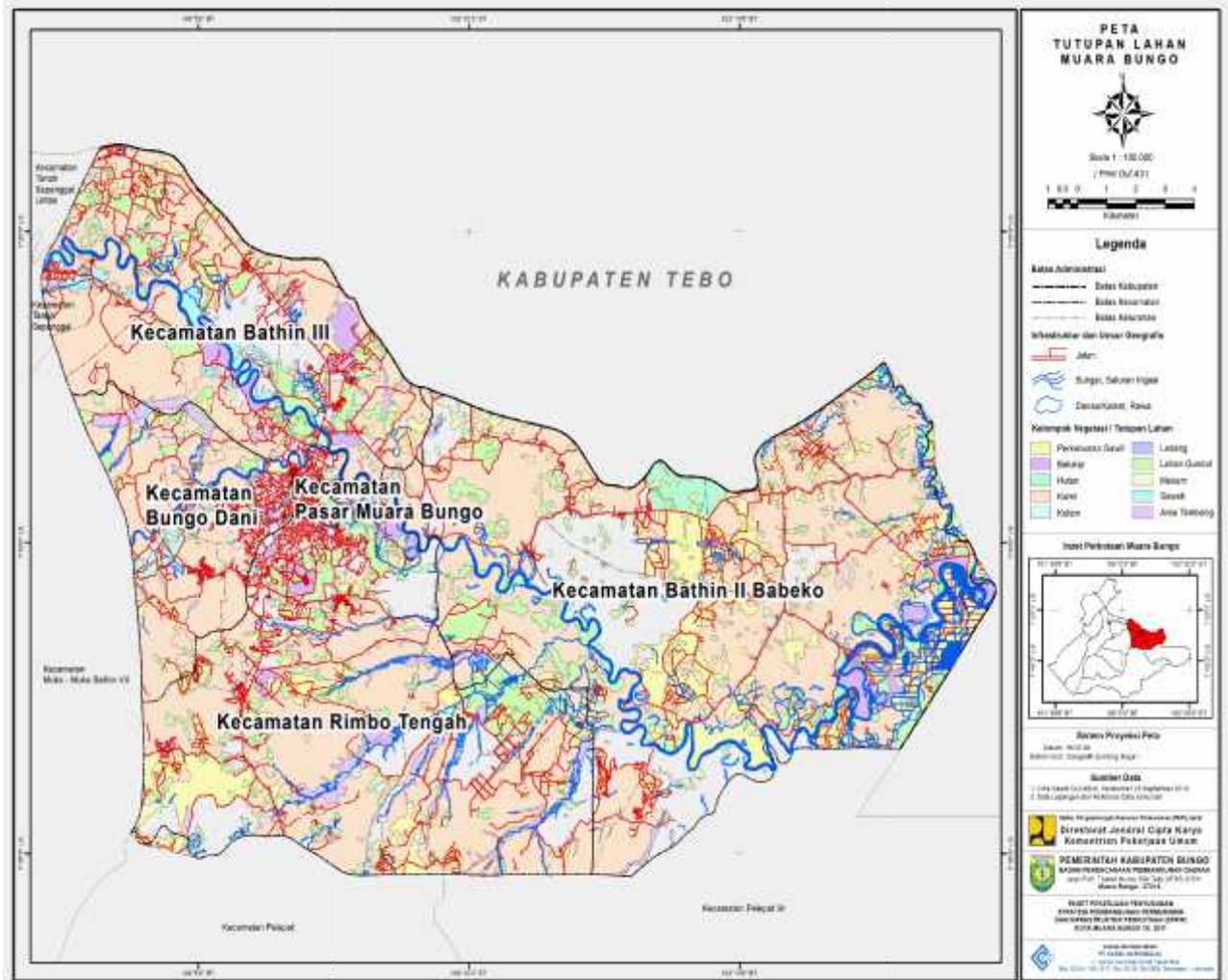
Secara umum, penggunaan lahan di Perkotaan Muara Bungo dapat dikelompokkan ke dalam penggunaan untuk permukiman dan lahan terbangun lainnya, kawasan pertanian berupa rawa, sawah, kebun campuran dan semak, dan kawasan hutan. Pemanfaatan lahan terbangun seperti perumahan, fasilitas sosial ekonomi, jasa, industri, dan pertokoan dan lain-lain



secara keseluruhan masih relatif rendah yakni sekitar 20% dari luas wilayah perkotaan Muara Bungo yang mencakup 5 wilayah Kecamatan, Namun di kawasan tertentu pemanfaatannya sudah relatif tinggi antara lain di kawasan pusat kota, kawasan perdagangan, dan kawasan permukiman. perkotaan

Kawasan permukiman di kota terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan persebaran administratif kota. Persebaran pemukiman lebih terkonsentrasi di bagian tengah Perkotaan Muara Bungo Pola persebaran pemukiman umumnya berbentuk radial konsentris, mengikuti pola jaringan jalan utama dan pola permukiman memusat pada pusat-pusat kegiatan kota.

Gambar2-3
Peta Tutupan Lahan Perkotaan Muara Bungo



Fasilitas perdagangan dan jasa utama kota tersebar di kawasan sepanjang Jln. Lintas Sumatera Sektor perdagangan dan jasa terkonsentrasi di Pusat Kota Muara Bungo yang ditandai adanya pasar, pertokoan, fasilitas jasa perbankan, perdagangan dan pusat perdagangan modern dengan



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

kepadatan bangunan sangat tinggi.

Di samping itu, bila dilihat aspek persebaran pemukiman dan tata bangunan, didapati bagian-bagian kawasan permukiman yang memiliki kecenderungan kumuh bila dibiarkan terus menerus, terutama pemukiman di bagian barat dan timur Kota Muara Bungo.

Sebagian besar fasilitas utama perkotaan (pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, hiburan dan rekreasi, serta sarana kelembagaan) dan kegiatan ekonomi terkonsentrasi di Kecamatan Pasar Muara Bungo dan Kecamatan Rimbo Tengah,

Di bagian timur laut dan tenggara Perkotaan Muara Bungo penggunaan lahan masih didominasi oleh semak belukar dan lahan tidur, dan khusus di bagian timur laut kota masih banyak yang berupa cekungan dan rawa.

2.1.4. Sosial Kependudukan

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Perkotaan Muara Bungo sampai dengan akhir tahun 2010 sebesar 98.481 jiwa tersebar di 5 Kecamatan dan 27 Dusun/ Desa/Kelurahan, sebagaimana terlihat pada lihat Tabel 2-3 berikut ini.

Tabel : 2- 3
**Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Perkotaan Muara Bungo
(2007 s/d 2010)**

No	Kecamatan	Desa/Kel	Luas Wilayah (Ha.)	Jml Penduduk Th 2007	Jml Penduduk Th 2010	Pertumb Penduduk (%/Tahun)
1.	Pasar Muara Bungo	1. Kel. Bungo Barat	169,7	3.778	4.415	5,62
		2. Kel. Batang Bungo	334,1	4.386	5.531	8,70
		3. Kel. Bungo Timur	362,5	2.810	3.758	11,25
		4. Kel. Jaya Setia	322,2	5.519	5.815	1,79
		5. Kel. Tanjung Gedang	514,2	2.335	2.747	5,88
		Jumlah.	1.702,7	18.828	22.266	6,09
2.	Rimbo Tengah	1. Sungai Mengkuang	6.002,0	3.593	5.581	18,44
		2. Sungai Buluh	3.670,0	1.688	1.985	5,86
		3. Kel. Pasir Putih	577,0	6.943	9.820	13,81
		4. Kel. Cadika	898,0	3.812	6.374	22,40
		Jumlah	11.147,0	16.036	23.760	16,06
3.	Bungo Dani	1. Kel. Sungai Kerjan	654,0	4.228	7.069	22,40
		2. Sungai Arang	2.728,0	4.732	3.549	(8,33)
		3. Talang Pantai	2.810,0	2.801	2.778	(0,27)
		4. Kel.Sungai Pinang	376,0	7.985	9.134	4,80
		5. Pulau Pekan *)		510	678	10,98
		Jumlah	6.568,0	20.256	23.208	4,86
4.	Bathin III	1. Kel. Manggis	1.909,0	3.645	5.125	13,53
		2. Kel. Sungai Binjai	567,0	3.229	3.443	2,21
		3. Kel. Bungo Taman Agung	330,0	1.371	2.212	20,45
		4. Purwo Bakti	1.430,0	1.750	1.867	2,23
		5. Air Gemuruh	2.500,0	1.477	2.686	27,29
		6. Teluk Panjang	1.450,0	1.029	1.208	5,80
		7. Lubuk Benteng	430,0	816	862	1,88
		8. Sarana Jaya	1.800,0	1.102	1.311	6,32
		Jumlah	10.416,0	14.419	18.714	9,93
5	Bathin II Babeko	1. Sepunggur	15.440,0	3.112	3.941	8,88
		2. Babeko	6.000,0	1.029	1.466	14,16
		3. Simpang Babeko	3.300,0	2.044	2.617	9,34
		4. Tanjung Menanti	3.160,0	963	1.233	9,35
		5. Suka Makmur *)		988	1.276	9,72
		Jumlah	27.900,0	8.136	10.533	9,82
TOTAL			57.733,7	77.675	98.481	8,93

Sumber: BPS Kabupaten Bungo Tahun 2010



Pertumbuhan penduduk Kota Muara Bungo dari tahun 2007 s/d 2009 rata-rata 3,08 % per tahun, sedangkan pertumbuhan dari tahun 2009 ke 2010 mencapai 13,68%, atau rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2007 s/d 2010 sekitar 8,93 % pertahun,

b. Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk perkotaan Muara Bungo tidak merata, dan sebagian besar terkonsentrasi kawasan pusat kota terutama di wilayah Kecamatan Pasar Muara Bungo, Bungo Dani, dan Rimbo Tengah yang ketiganya dengan luasan wilayahnya relatif lebih kecil dari Kecamatan lain yakni Kecamatan Bathin III dan Kecamatan Bathin II Babeko yang relatif luas.

1). Perbandingan Jumlah Penduduk Kota dan Kabupaten Bungo

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk se Kabupaten Bungo pada tahun 2006 yaitu sebesar **251.096** orang, dan hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bungo adalah sebanyak **302.558** jiwa maka pertumbuhan penduduk rata per tahun untuk tingkat Kabupaten Bungo mencapai 3,08% pertahun selama periode 2006 – 2010. .Sementara jumlah penduduk perkotaan Muara Bungo sendiri yang pada tahun 2007 sebanyak **80.086** Jiwa menjadi **98.481** jiwa pada tahun 2010, berarti hampir 1/3 jumlah penduduk wilayah Kabupaten Bungo terkonsentrasi di Perkotaan Muara Bungo yang mencakup 5 wilayah Kecamatan dengan luas wilayah yang hanya sekitar 10 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bungo yang terdiri dari 17 Kecamatan.

Tabel : 2 - 4

Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Muara Bungo dengan Jumlah Penduduk se Kabupaten Bungo

No	Satuan Wilayah	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kabupaten Bungo	251.096	257.087	264.389		302.558
	<i>Pertumbuhan</i>					3,08% / Thn
2	Kota Muara Bungo		80.086		86.004	98.481
	<i>Pertumbuhan</i>					8,93% / Thn

Sumber: BPS Kabupaten Bungo

Tabel : 2- 5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Perkotaan Muara Bungo Tahun 2010

No	Kecamatan	Desa/Kel	Luas Wilayah (Ha.)	Jml Penduduk Th 2007	Jumlah penduduk (Th. 2010)			Kepadatan Penduduk (Jiwa / Ha)
					L	P	JML	
1.	Pasar Muara Bungo	1. Kel. Bungo Barat	169,7	3.778	2.339	2.076	4.415	26,0
		2. Kel. Batang Bungo	334,1	4.386	2.941	2.590	5.531	16,6
		3. Kel. Bungo Timur	362,5	2.810	1.920	1.838	3.758	10,4
		4. Kel. Jaya Setia	322,2	5.519	2.948	2.867	5.815	18,0
		5. Kel. Tanjung Gedang	514,2	2.335	1.378	1.369	2.747	5,3
		Jumlah.	1.702,7	18.828	11.526	10.740	22.266	13,0
2.	Rimbo - Tengah	1. Sungai Mengkuang	6.002,0	3.593	2.910	2.671	5.581	0,9
		2. Sungai Buluh	3.670,0	1.688	1.008	977	1.985	0,5
		3. Kel. Pasir Putih	577,0	6.943	5.102	4.718	9.820	17,0
		4. Kel. Cadika	898,0	3.812	3.125	3.249	6.374	7,1
		Jumlah	11.147,0	16.036	12.145	11.615	23.760	2,1
3.	Bungo Dani	1. Kel. Sungai Kerjan	654,0	4.228	3.758	3.311	7.069	10,8
		2. Sungai Arang	2.728,0	4.732	1.795	1.754	3.549	1,3
		3. Talang Pantai	2.810,0	2.801	1.395	1.383	2.778	1,0
		4. Kel.Sungai Pinang	376,0	7.985	4.773	4.361	9.134	24,3
		5. Pulau Pekan*)			340	338	678	
Jumlah	6.568,0	19.746	11.721	10.809	23.208	3,34		
4.	Bathin III	1. Kel. Manggis	1.909,0	3.645	2.693	2.432	5.125	2,6
		2. Kel. Sungai Binjai	567,0	3.229	1.693	1.750	3.443	6,1
		3. Kel. Bungo Taman Agung	330,0	1.371	1.147	1.065	2.212	6,7
		4. Purwo Bakti	1.430,0	1.750	960	907	1.867	1,3
		5. Air Gemuruh	2.500,0	1.477	1.365	1.321	2.686	1,1
		6. Teluk Panjang	1.450,0	1.029	643	565	1.208	0,8
		7. Lubuk Benteng	430,0	816	432	430	862	2,0
		8. Sarana Jaya	1,800,0	1.102	682	629	1.311	0,7
		Jumlah	10.416,0	14.419	9.615	9.099	18.714	1,8
5	Bathin II - Babeko	1. Sepunggur	15.440,0	3.112	2.013	1.928	3.941	0,3
		2. Babeko	6.000,0	1.029	736	730	1.466	0,2
		3. Simpang Babeko	3.300,0	2.044	1.359	1.258	2.617	0,8
		4. Tanjung Menanti	3.160,0	963	618	615	1.233	0,4
		5. Suka Makmur*)		988	669	607	1.276	
		Jumlah	27.900,0	8.136	5.395	5.138	10.533	0,4
TOTAL			57.733,7	77.165	50.402	47.401	98.481	1,7

Sumber: BPS Kabupaten Bungo Tahun 2010

Keterangan: *) Desa/ Kelurahan pemekaran baru, sementara data luas wilayah belum ada dan masih mengikut kelurahan/ Desa asal pemekaran

2). Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio antara penduduk laki-laki dengan perempuan adalah **50.402** penduduk laki-laki dan **47.401** penduduk perempuan, ini menandakan bahwa sampai saat ini jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding

jumlah penduduk perempuan, secara terinci dapat dilihat dalam Tabel : 2 -6 berikut :

Tabel : 2 - 6
Rasio Penduduk Laki-Laki Dibanding Perempuan Tahun 2010

No	Kecamatan	Desa/Kel	Jumlah penduduk Th.2010			Rasio Jns kelamin
			L	P	JUMLAH	
1.	Pasar Muara Bungo	1. Kel. Bungo Barat	2.339	2.076	4.415	1,13
		2. Kel. Batang Bungo	2.941	2.590	5.531	1,14
		3. Kel. Bungo Timur	1.920	1.838	3.758	1,04
		4. Kel. Jaya Setia	2.948	2.867	5.815	1,03
		5. Kel. Tanjung Gedang	1.378	1.369	2.747	1,01
		Jumlah.	11.526	10.740	22.266	1,07
2.	Rimbo Tengah	1. Sungai Mengkuang	2.910	2.671	5.581	1,09
		2. Sungai Buluh	1.008	977	1.985	1,03
		3. Kel. Pasir Putih	5.102	4.718	9.820	1,08
		4. Kel. Cadika	3.125	3.249	6.374	0,96
		Jumlah	12.145	11.615	23.760	1,05
3.	Bungo Dani	1. Kel. Sungai Kerjan	3.758	3.311	7.069	1,14
		2. Sungai Arang	1.795	1.754	3.549	1,02
		3. Talang Pantai	1.395	1.383	2.778	1,01
		4. Kel. Sungai Pinang	4.773	4.361	9.134	1,09
		5. Pulau Pekan*)	340	338	678	1,01
		Jumlah	11.721	10.809	23.208	1,08
4.	Bathin III	1. Kel. Manggis	2.693	2.432	5.125	1,11
		2. Kel. Sungai Binjai	1.693	1.750	3.443	0,97
		3. Kel. Bungo Taman Agung	1.147	1.065	2.212	1,08
		4. Purwo Bakti	960	907	1.867	1,06
		5. Air Gemuruh	1.365	1.321	2.686	1,03
		6. Teluk Panjang	643	565	1.208	1,14
		7. Lubuk Benteng	432	430	862	1,00
		8. Sarana Jaya	682	629	1.311	1,08
		Jumlah	9.615	9.099	18.714	1,06
5	Bathin II Babeko	1. Sepunggur	2.013	1.928	3.941	1,04
		2. Babeko	736	730	1.466	1,01
		3. Simpang Babeko	1.359	1.258	2.617	1,08
		4. Tanjung Menanti	618	615	1.233	1,00
		5. Suka Makmur*)	669	607	1.276	1,10
		Jumlah	5.395	5.138	10.533	1,05
		TOTAL	50.402	47.401	98.481	1,06

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS Kabupaten Bungo 2011

2.1.5. Kondisi Sosial Budaya

Penduduk Perkotaan Muara Bungo relatif heterogen ada etnik Minangkabau, Palembang, Jawa, Cina, dan lain sebagainya, yang telah berbaur termasuk bahasa komunikasi sehari-hari yang logatnya campuran logat Minangkabau, Palembang, Jawa dan Cina dan lain-lain, Kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual juga masih kental dimasyarakat setempat.

Penduduk di perkotaan Muara Bungo sebagian besar memeluk Agama Islam. Agama kedua terbesar yang dianut oleh penduduk perkotaan Muara Bungo adalah Agama Budha, kemudian penduduk yang memeluk Agama Kristen Protestan, disusul Agama Kristen Katolik .Sedangkan Agama Hindu merupakan agama yang paling sedikit pemeluknya

Sehingga tempat ibadat yang paling banyak adalah Masjid dan Mushola sedangkan untuk Gereja Proyestan / Katolik, Pura dan Viara relati sedikit. Rincian data tempat ibadat (masjid, mushola, gereja, pura dan viaha) disajikan pada Tabel 2 – 7 berikut ini..

Tabel 2 - 7
Jumlah Tempat Ibadat di Perkotaan Muara Bungo Tahun 2009

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Viara	Jumlah
1	Pasar Muara Bungo	13	25	1	0	0	24
2	Rimbo Tengah	23	36	0	0	0	59
3	Bungo Dani	15	18	3	0	1	37
4	Bathin III	14	27	0	0	0	43
5	Bathin II Babeko	12	10	0	0	0	22
Jumlah		77	116	4	0	1	198

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, BPS Kabupaten Bungo 2009

2.1.6.Kondisi Perekonomian

Untuk memahami kondisi perekonomian Kota Muara Bungo dapat dikaji dari kondisi perekonomian Kabupaten Bungo, terutama untuk sektor ekonomi sekunder dan tersier, mengingat pusat kegiatan ekonomi sekunder dan tersier Kabupaten Bungo lebih banyak terkonsentrasi di Kota Muara Bungo yang juga menjadi ibukota Kabupaten Bungo..

Perekonomi Kabupaten Bungo telah tumbuh dan berkembang cepat selama 6 (enam) tahun terakhir. Perkembangan perekonomian ini dapat diamati dan dianalisis dalam 9 (Sembilan) sektor lapangan usaha. yang dapat menggambarkan sektor-sektor ekonomi yang menentukan dan berpengaruh besar dalam pembangunan Kabupaten Bungo, sehingga sektor tersebut merupakan sektor unggulan dalam perekonomian daerah.Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo selama Tahun 2004 – 2009 dapat diamati tabel 2 – 8 berikut :

Tabel : 2 - 8
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo
 Atas Dasar Harga Konstan 2000
 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2009**

Lapangan Usaha	Tahun						Rata rata
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1.Pertanian,Peternakan,Kehutanan dan perikanan	1,54	2,92	3,00	1,89	3,01	5,12	2,9
2.Pertambangan dan penggalian	22,94	25,03	163,40	80,47	62,82	-8,71	57,7
3.Industri Pengolahan	3,08	2,48	2,41	4,91	6,03	6,97	4,3
4.Listrik, Gas dan Air bersih	11,88	16,76	14,53	12,15	11,10	12,29	13,1
5.Bangunan	52,79	24,05	18,65	11,18	13,65	14,87	22,5
6.Perdagangan, Hotel &Restoran	6,13	6,89	9,48	11,06	13,92	14,06	10,3
7.Pengangkutan dan Komunikasi	2,38	10,37	3,04	4,05	4,65	6,88	5,2
8.Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,71	7,38	4,21	4,24	4,28	7,97	5,6
9.Jasa-jasa	1,29	7,23	2,81	4,67	4,16	7,23	4,6

Sumber : BPS Kabupaten Bungo, 2010

Data tabel 2–8 diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo dari tahun 2004 – 2009 yang tertinggi adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 57,7% kemudian diikuti oleh sektor Bangunan 22,5%, Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 13,1%, Perdagangan, Hotel dan Restoran 10,3%, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 5,6%, Pengangkutan dan Komunikasi 5,2%, sektor Jasa-jasa 4,6% dan sektor industri Pengolahan sebesar 4,3% serta Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,9%.

Struktur perekonomian Kabupaten Bungo terlihat dari data distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bungo dari tahun 2004 – 2009 memberikan gambaran adanya sektor unggulan yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Data distribusi PDRB Kabupaten Bungo Atas Dasar Harga Konstan Periode Tahun 2004 – 2009 dapat dilihat tabel 2 – 9 berikut ini :

Tabel : 2 - 9
Distribusi PDRB Kabupaten Bungo
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Masa Berlaku Tahun 2004 – 2009

Lapangan Usaha	Tahun						Rata-rata
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1.Pertanian,Peternakan, Kehutanan dan perikanan	46,18	44,68	42,45	39,76	36,85	36,41	41,1
2.Pertambangan dan Penggalian	1,73	2,03	4,93	8,18	11,99	10,29	6,5
3.Industri Pengolahan	5,33	5,14	4,85	4,68	4,46	4,49	4,8
4.Listrik, Gas dan Air Bersih	0,44	0,48	0,50	0,52	0,52	0,55	0,5
5.Bangunan	4,90	5,71	6,25	6,38	6,53	7,05	6,1
6.Perdagangan, Hotel & Restoran	18,34	18,43	18,61	18,99	19,47	20,87	19,1
7.Pengangkutan dan Komunikasi	8,48	8,80	8,36	8,00	7,53	7,56	8,1
8.Keuangan,Persewaan danJasa Perusahaan	4,92	4,97	4,78	4,58	4,29	4,37	4,7
9.Jasa-jasa	9,69	9,77	9,26	8,91	8,35	8,42	9,1

Sumber : BPS Kabupaten Bungo, 2009

Data tabel 2-9diatas memberikan gambaran bahwa sektor ekonomi yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bungo adalah sektor Pertanian, yakni sebesar 41,1%. Selanjutnya diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 19,1%. Sektor Jasa-jasa sebesar 9,1% sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 8,1%, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,5%, sektor Bangunan sebesar 6,1%, sektor Industri Pengolahan sebesar 4,8% dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 4,7% serta sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 0,5%.

2.2. PROFIL PERMUKIMAN KOTA MUARA BUNGO

2.2.1 Eksisting Arah Perkembangan Permukiman

Gambar 2 - 4.
Citra Eksisting Pusat Kota Muara Bungo



2.2.2 Ketersediaan Sarana Pendidikan

Tersedia sarana pendidikan yang relatif lengkap di Perkotaan Muara Bungo dimulai dari tingkatan dasar (TK) sampai tingkat lanjutan atas (SLA) bahkan perguruan tinggi. Data ketersediaan sarana pendidikan di Perkotaan Muara Bungo sebagaimana disajikan pada Tabel 2 -10 berikut..

Tabel: 2 - 10

Sarana Pendidikan di Perkotaan Muara Bungo Tahun 2009

No	Kec.	TK	SD/M.Ib	SLTP/M.Ts	SLTA/M.AI	PT			
1	Pasar Muara Bungo	0	7	0	3	2	0	1	1
2	Rimbo Tengah	6	15	7	4	5	6	2	3
3	Bungo Dani	0	11	3	2	3	0	3	0
4	Bathin III	0	0	0	2	0	2	0	0
5	Bathin II Babeko	0	7	12	2	2	1	1	0
	Jumlah	6	40	22	13	12	9	7	4

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2009, BPS Kabupaten Bungo

Tabel: 2 - 11
Jumlah Murid dan Guru di Perkotaan Muara Bungo Tahun 2009

No	Kec.	TK		SD/M.Ib		SLTP/M.Ts		SLTA/M.AI		PT	
		Mrd	Guru	Mrd	Guru	Mrd	Guru	Mrd	Guru	Mhs	Dosen
1	Pasar Muara Bungo	0	0	2355	112	1504	125	24	15	824	30
2	Rimbo Tengah	415	43	4771	252	1573	146	2821	275	3344	307
3	Bungo Dani	0	0	3345	203	1287	114	399	56	0	0
4	Bathin III	0	0	0	0	892	90	1297	130	0	0
5	Bathin II Babeko	0	0	2346	151	393	50	200	29	0	0
	Jumlah	415	43	12817	718	5649	515	4741	505	4168	337

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2009, BPS Kabupaten Bungo

Rasio banyaknya murid terhadap 1 orang guru, untuk tingkatan TK adalah sekitar 10, SD dan sederajat sebesar 17, SMP dan sederajat sebesar 11, dan untuk SMU adalah sebesar 10 sedangkan untuk Perguruan Tinggi sebesar 13. Lihat Tabel 2 -12.

Tabel 2 - 12
Rasio Guru Murid di Perkotaan Muara Bungo Tahun 2009

No	Uraian	TK	SD	SLTP	SLTA	PT
1	Jumlah Murid	415	12.817	5.649	4.741	4.168
2	Jumlah Guru	43	718	515	505	337
3	Rasio Murid/Guru	9,7	16,4	11,0	9,4	12,4

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2009, BPS Kabupaten Bungo

2.2.3.Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Kota Muara Bungo adalah 1 (satu) unit rumah sakit yang terletak di Kecamatan Pasar Muara Bungo, 2 (dua) buah Puskesmas dan 8 (delapan) Puskesmas Pembantu. Selain itu juga ada dokter praktek, Posyandu dan pos KB, sebagaimana tabel 2-13 berikut :



Tabel 2 - 13
Sarana Kesehatan di Perkotaan Muara Bungo Tahun 2009

No.	Kec.	Jenis Sarana Kesehatan						
		RSU	Rs Swasta	Klinik	RS Bersalin	Pus kesmas	Pustu	Praktek Dokter
1	Pasar Muara Bungo	1				1		4
2	Rimbo Tengah	1					3	4
3	Bungo Dani					1	2	2
4	Bathin III	1					3	5
5	Bathin II Babeko					1		
	Jumlah	3				3	8	15

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2009, BPS Kabupaten Bungo

2.2.4 Sarana Peribadatan

Dengan dominannya penduduk Perkotaan Muara Bungo yang memeluk Agama Islam maka ketersediaan sarana peribadatan didominasi oleh jenis sarana ibadah Masjid dan Musholla yang menyebar secara rata di seluruh wilayah perkotaan. Masjid Utama (Masjid Agung) terletak di pusat kota. Ketersediaan jenis sarana peribadatan lainnya adalah berupa Gereja yang keseluruhannya terletak di Kecamatan Bungo Dani. Bagi umat Budha dalam melaksanakan ibadahnya terdapat 1 Vihara. Bagi keperluan penduduk untuk menjalankan ibadahnya, ketersediaan sarana sudah cukup memadai. Secara lebih jelas ketersediaan sarana peribadatan diuraikan pada Tabel 2 - 14 berikut :

Tabel 2-14
Sarana Peribadatan di Perkotaan Muara Bungo Tahun 2009

No.	Kec.	Jenis Sarana Peribadatan					
		Masjid	Mussola	Langgar	Wihara	Gereja	Lainnya
1	Pasar Muara Bungo	9	22	11			
2	Rimbo Tengah	9	18	13			
3	Bungo Dani	17	13	12			
4	Bathin III	14	13	19	1	3	
5	Bathin II Babeko	4	8	11			
	Jumlah	53	76	66	1	3	

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2009, BPS Kabupaten Bungo

2.2.5 Sarana Perdagangan dan Jasa

Ketersediaan sarana perekonomian bagi kegiatan perdagangan dan jasa di Perkotaan Muara Bungo terdiri dari sarana pasar kota, pasar kecamatan, bangunan pertokoan, warung, bangunan perbankan, KUD dan fasilitas perekonomian lainnya. Ditetapkannya Perkotaan Muara Bungo sebagai Pusat Pengembangan Utama setelah Kota Jambi maka fasilitas ini merupakan sentra utama kegiatan perekonomian penduduk Perkotaan Muara Bungo.

2.2.6 Sarana Rekreasi dan Olahraga

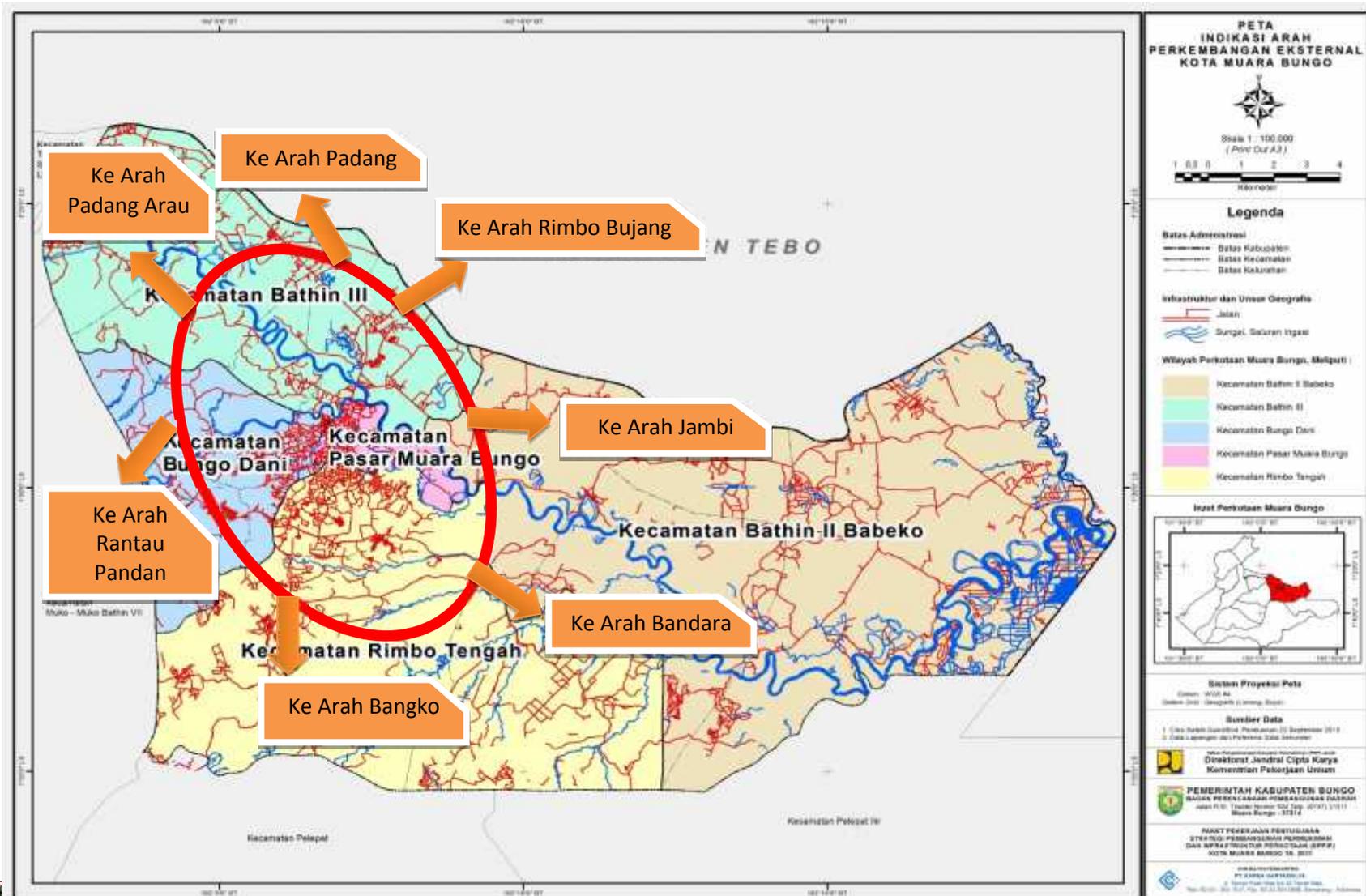
Ketersediaan sarana rekreasi dan olahraga penduduk di Perkotaan Muara Bungo sangatlah memadai. Bagi kebutuhan rekreasi dan hiburan, penduduk memanfaatkan obyek-obyek wisata yang terdapat di sepanjang wilayah sungai dan danau/situ. Bagi kebutuhan olahraga penduduk selain memanfaatkan prasarana yang sudah disiapkan pemerintah juga memanfaatkan lapangan-lapangan olahraga yang tersebar di setiap kelurahan/desa, seperti lapangan sepakbola, bola volley dan badminton.

2.2.7 Kecenderungan Arah Perkembangan Kota

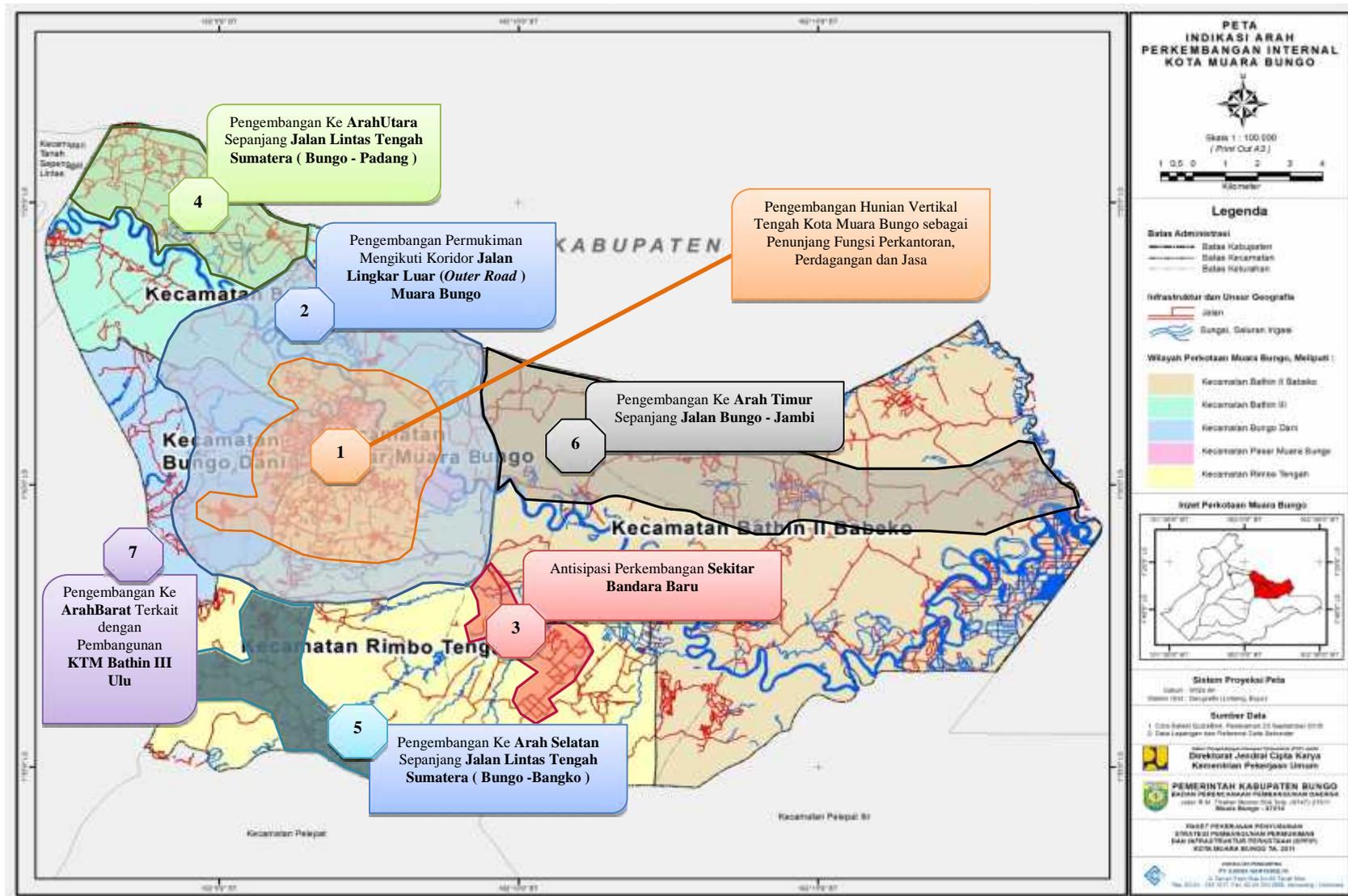
Perkotaan Muara Bungo mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sebagai dampak kondosisi perekonomian Kabupaten Bungo yang baik dan kondusif, peluang usaha/investasi yang variatif dan menjanjikan di berbagai bidang, serta terbukanya lapangan kerja luas, menjadikan Kota Muara Bungo sebagai kota tujuan arus urbanisasi besar-besaran dan kebanjiran investor dari luar/ daerah lain, dan semuanya terkonsentrasi di Kota Muara Bungo.

Arah perkembangan Kota Muara Bungo secara eksternal mengarah ke kawasan sekitar mengikuti akses keluar, dan secara internal sementara masih terkonsentrasi di pusat kota dan mulai menyebar mengikuti akses utama kota, Gambaran kecederungan arah perkembangan sebagaimana disajikan pada gambar/ peta : 2-5 dan 2 - 6. berikut ini :

Gambar : 2-5
Arah Perkembangan Eksternal Kota Muara Bungo



Gambar/ Peta : 2-6
Arah Perkembangan Internal Perkotaan Muara Bungo



2.2.8 Kondisi Permukiman Muara Bungo

Eksisting sebaran dan Kecenderungan Pertumbuhan

Kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat dan investor berjalan sangat cepat, baik dalam bentuk pembangunan ruko dan bangunan lain yang menjadikan Kota Muara Bungo memperoleh predikat Kota Seribu Ruko, juga pembangunan permukiman baik oleh masyarakat dalam bentuk rumah swadaya maupun yang dibangun oleh Developer/ pengembang dalam skala besar dan luar tumbuh di berbagai bagian kawasan perkotaan Muara Bungo.

Belum lagi tumbuhnya suburnya usaha-usaha rumah sewa perorangan yang tersebar hampir di seluruh perkampungan di kawasan perkotaan Muara Bungo yang di tandai banyaknya papan – papan promosi yang menawarkan pondokan dan rumah sewa, memberikan gambaran bahwa jumlah rumah belum sebanding dengan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk ditandai derasnya arus pendatang yang memerlukan hunian baik untuk sementara maupun menetap permanen..

Sejalan dengan sebaran dan pertumbuhan penduduk, kondisi permukiman di perkotaan Muara Bungo dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok atau tipe sesuai dengan persebarannya. Perkembangan pemukiman dan bangunan lain yang tumbuh dan berkembang lebih terkonsentrasi di bagian tengah/ Pusat kota Muara Bungo terutama di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Rimbo Tengah, dan sebagian Kecamatan Bungo Dani. Pola persebaran pemukiman dan bangunan lain umumnya dengan pola radial konsentris mengikuti pola jaringan jalan utama, sedangkan pola permukiman memusat terutama di kawasan pusat kegiatan perkotaan, kawasan perumahan baru skala besar dan luas, dan sebagian permukiman yang terkonentrasi di pinggiran sungai.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

Demikian pula hanya dengan ketersediaan fasilitas utama perkotaan (pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, hiburan dan rekreasi, serta sarana kelembagaan) dan kegiatan ekonomi ekonomi juga terkonsentrasi di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Rimbo Tengah, dan di sebagian wilayah Kecamatan Bungo Dani.

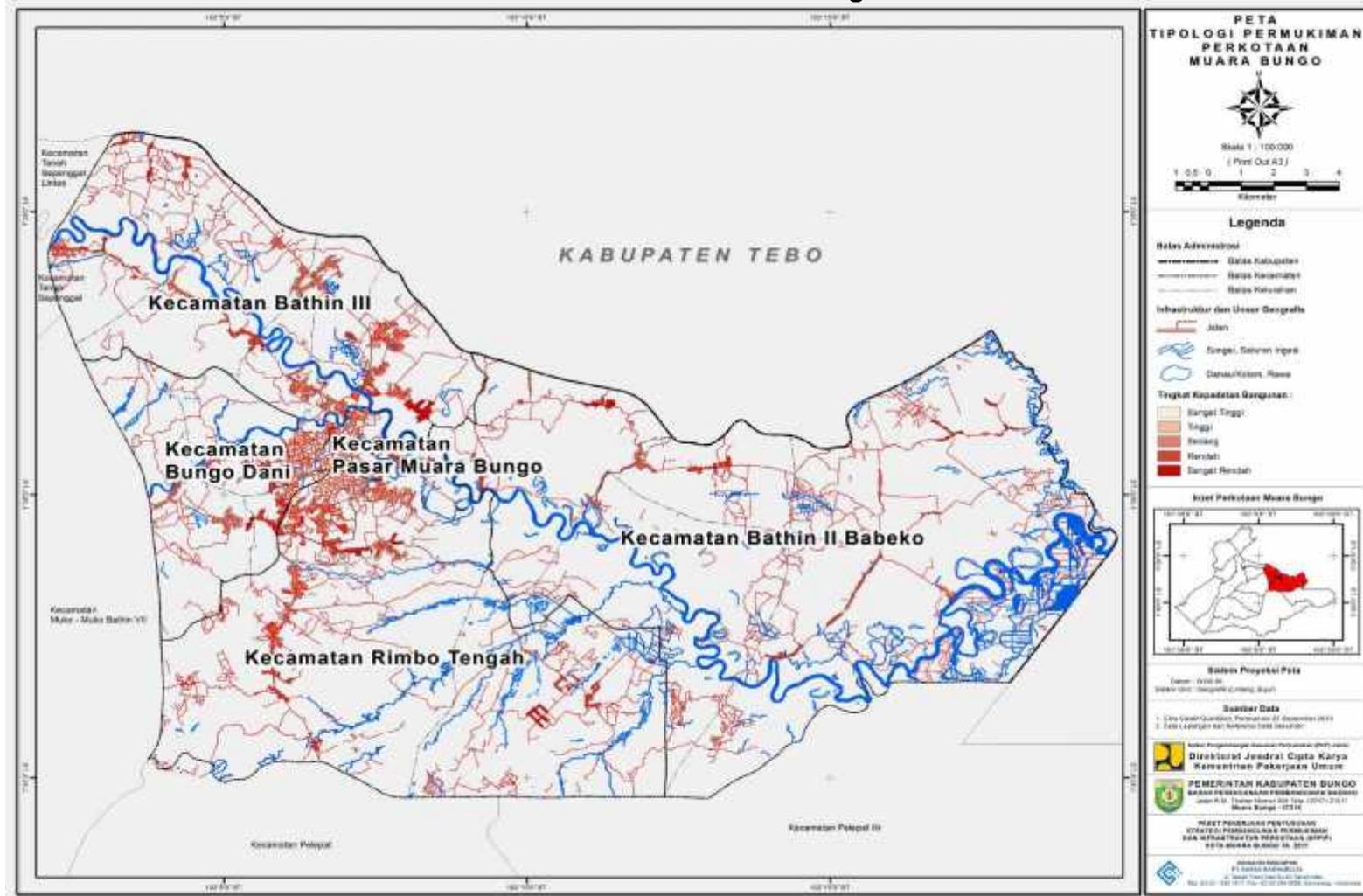
Fasilitas perdagangan dan jasa utama perkotaan terkonsentrasi di kawasan sekitar Jln. Lintas Sumatera, terutama di Pusat Kota Muara Bungo yang ditandai adanya pasar, pertokoan, fasilitas jasa perbankan, perdagangan dan pusat perdagangan modern dengan kepadatan bangunan sangat tinggi.

Di samping itu, bila dilihat aspek persebaran pemukiman dan tata bangunan, pada bagian-bagian kawasan permukiman tertentu yang memiliki kecenderungan kumuh bila dibiarkan terus menerus, terutama pemukiman di kawasan pusat kota Muara Bungo bagian barat yang di tandai dengan kepadatan bangunan, hunian dan kegiatan ekonomi yang sangat tinggi dan di kawasan pusat kota Muara Bungo bagian timur.yang ditandai dengan kawasan permukiman yang rawan genangan.

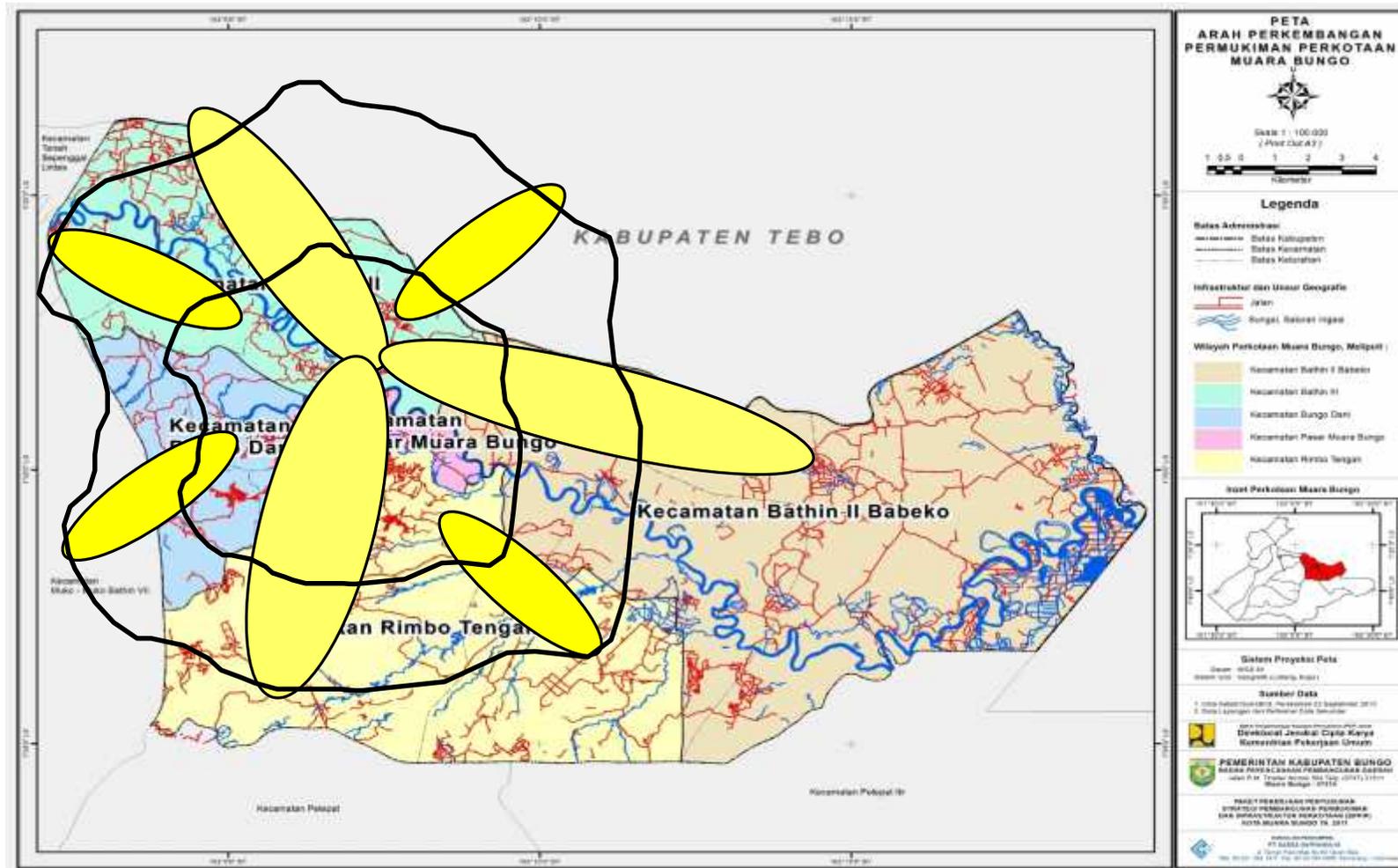
Sementara di kawasan lainnya seperti di Wilayah Kecamatan Bathin III, Kecamatan Bathin II Babeko, dan sebagian wilayah Kecamatan Rimbo Tengah, dan sebagian wilayah Kecamatan Bungo Dani, kepadatan permukiman dan bangunan lain masih relatif rendah dan ketersediaan lahan kosong/ belum terbangun relatif luas.

Gambaran mengenai sebaran dan arah perkembangan permukiman di perkotaan Muara Bungo sebagaimana disajikan pada gambar/ peta 2-7 dan 2-8, dan gambaran sebaran perijinan bangunan sebagaimana tabel 2-15 :

Gambar/ Peta : 2-7
Peta Eksisting Sebaran dan Tipologi Permukiman
di Perkotaan Muara Bungo



Gambar/ Peta : 2 - 8
Peta Arah Perkembangan Permukiman
di Perkotaan Muara Bungo



Tabel2-15
Sebaran Perijinan bangunan di Perkotaan Muara Bungo

No	Kecamatan	No	Kelurahan/Desa	Jumlah Bangunan (IMB)
1	Pasar Muara Bungo	(1)	Batang Bungo	226
		(2)	Bungo Barat	341
		(3)	Bungo Timur	176
		(4)	Jaya Setia	91
		(5)	Tanjung Gedang	121
		Sub Total		
2	Rimbo Tengah	(1)	Pasir Putih	664
		(2)	Cadika	201
		(3)	Sungai Buluh	1
		(4)	Sungai Mengkuang	151
		Sub Total		
3	Bungo Dani	(1)	Sungai Pinang	148
		(2)	Sungai Kerjan	111
		(3)	Talang Pantai	47
		(4)	Sungai Arang	6
		(5)	Pulau Pekan	0
Sub Total			312	
4	Bathin III	(1)	Manggis	427
		(2)	Lubuk Benteng	1
		(3)	Bungo Taman Agung	9
		(4)	Air Gemuruh	18
		(5)	Sarana Jaya	3
		(6)	Teluk Panjang	1
		(7)	Purwo Bakti	324
		(8)	Sungai Binjai	53
Sub Total			836	
5	Batin II Babeko	(1)	Babeko	9
		(2)	Sepunggur	3
		(3)	Simpang Babeko	4
		(4)	Tanjung Menanti	3
		(5)	Suka Makmur	1
		Sub Total		
T O T A L				3.140

Sumber : Kompilasi Data IMB SUBDIN PERIJINAN BANGUNAN Kota Muara Bungo Tahun 2003 s/d Tahun 2010



2.3. PROFIL INFRASTRUKTUR PERKOTAAN MUARA BUNGO

2.3.1. Sistem Transportasi dan Perhubungan

Sistem transportasi paling dominan yang terdapat di Perkotaan Muara Bungo adalah transportasi darat yang dilayani oleh ketersediaan jaringan jalan dengan kelas dan kondisi yang bervariasi. Total keseluruhan panjang jalan di Perkotaan Muara Bungo adalah 150,63 km, sebagian besar jalan dengan kondisi permukaan beraspal yaitu sekitar 50,26 % sisanya berupa jalan batu/kerikil dan jalan tanah..

Dalam menunjang aktivitas pergerakan penduduk sehari-hari, terutama pergerakan internal belum dilayani angkutan umum massal perkotaan yang murah seperti angkutan kota/ bus kota yang menjangkau seluruh bagian wilayah perkotaan.. Moda transportasi umum massal dalam kota belum ada, sementara mobilitas penduduk di internal perkotaan Muara Bungo dilayani jasa ojek perorangan dengan biaya yang relatif mahal,

2.3.2. Prasarana Penerangan (Jaringan Listrik)

Jaringan pelayanan PT PLN telah menyebar hampir di seluruh bagian wilayah kota. Rumah tangga yang telah memanfaatkan jasa PLN ini hampir 100 % dari total penduduk di Perkotaan Muara Bungo. Pelanggan PLN di Perkotaan Muara Bungo hampir seluruhnya menggunakan untuk kebutuhan rumah tangga biasa, untuk kegiatan usaha umumnya mereka menggunakan diesel, karenanya pasokan listrik yang ada sekarang dirasakan belum mencukupi untuk menunjang kegiatan usaha.

2.3.3 Prasarana Telekomunikasi

Kantor Telkom yang berlokasi di Kecamatan Pasar Muara Bungo merupakan sarana penting bagi pengembangan sarana telekomunikasi di Perkotaan Muara Bungo. Selain jaringan telekomunikasi yang berbentuk SST (Satuan Sambungan Telepon) ke rumah-rumah, kantor-kantor, jasa, industri dan sebagainya sarana telepon umum juga sudah

tersedia meskipun belum memadai. Sedangkan sistem telekomunikasi yang melewati surat telah dilayani oleh PT POSINDO.

Sejalan dengan menglobalnya revolusi telekomunikasi, sarana komunikasi lain yang cukup merakyat adalah telpon seluler, sudah mencangkau ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak kecil sampai orang tua, didukung dengan menjammurnya bisnis telpon seluler di kota Muara Bungo, baik berupa conter hp di kompleks pertokoan maupun di perkampungan..

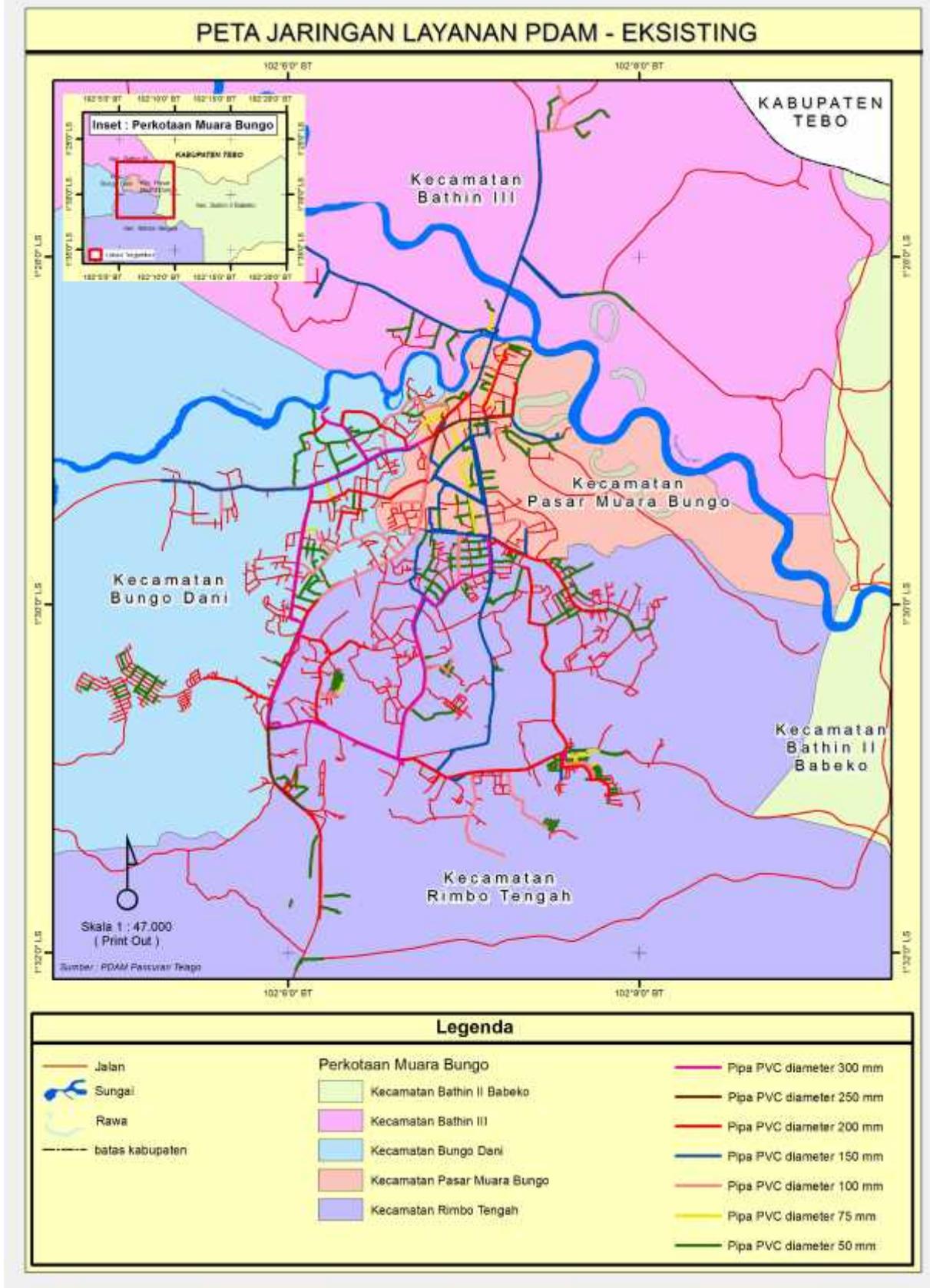
2.3.4 Prasarana Air Bersih (Jaringan PDAM)

Kebutuhan air bersih perpipaan di Perkotaan Muara Bungo dilayani oleh PDAM Pancuran Talago Kabupaten Bungo saat ini baru mampu melayani sekitar 40 % penduduk perkotaan Muara Bngo. Penyediaan air bersih Perkotaan Muara Bungo memanfaatkan sumber air permukaan Batang Bungo melalui intake pada sumber air. Dari intake, air baku dipompa ke instalasi pengolahan air bersih, hasil pengolahan ditampung di ground reservoir yang berfungsi sebagai reservoir transport, kemudian air dipompa ke reservoir distribusi / upper reservoir untuk didistribusikan ke daerah pelayanan.

Sementara sebagian besar penduduk Perkotaan Muara Bungo memenuhi kebutuhan air bersih dengan menggunakan air sumur gali dan sebagian dengan sumur bor.atau sumur artetis.

Khusus kebutuhan air minum sebagian besar penduduk menggunakan air minum kemasan atau isi ulang yang sudah mulai memasyarakat, yang di tandai dengan banyaknya usaha perdagangan air minum kemasan/ galonan isi ulang yang banyak dipasarkan di kawasan pertokoan dan kawasan pusat perdagangan Kota Muara Bungo.

Gambar/ Peta : 2-9
Peta Jaringan Pelayanan Air Bersih PDAM Pancuran Talago Kabupaten Bungo di Kawasan Perkotaan Muara Bungo



2.3.5 Prasarana Pengelolaan Persampahan

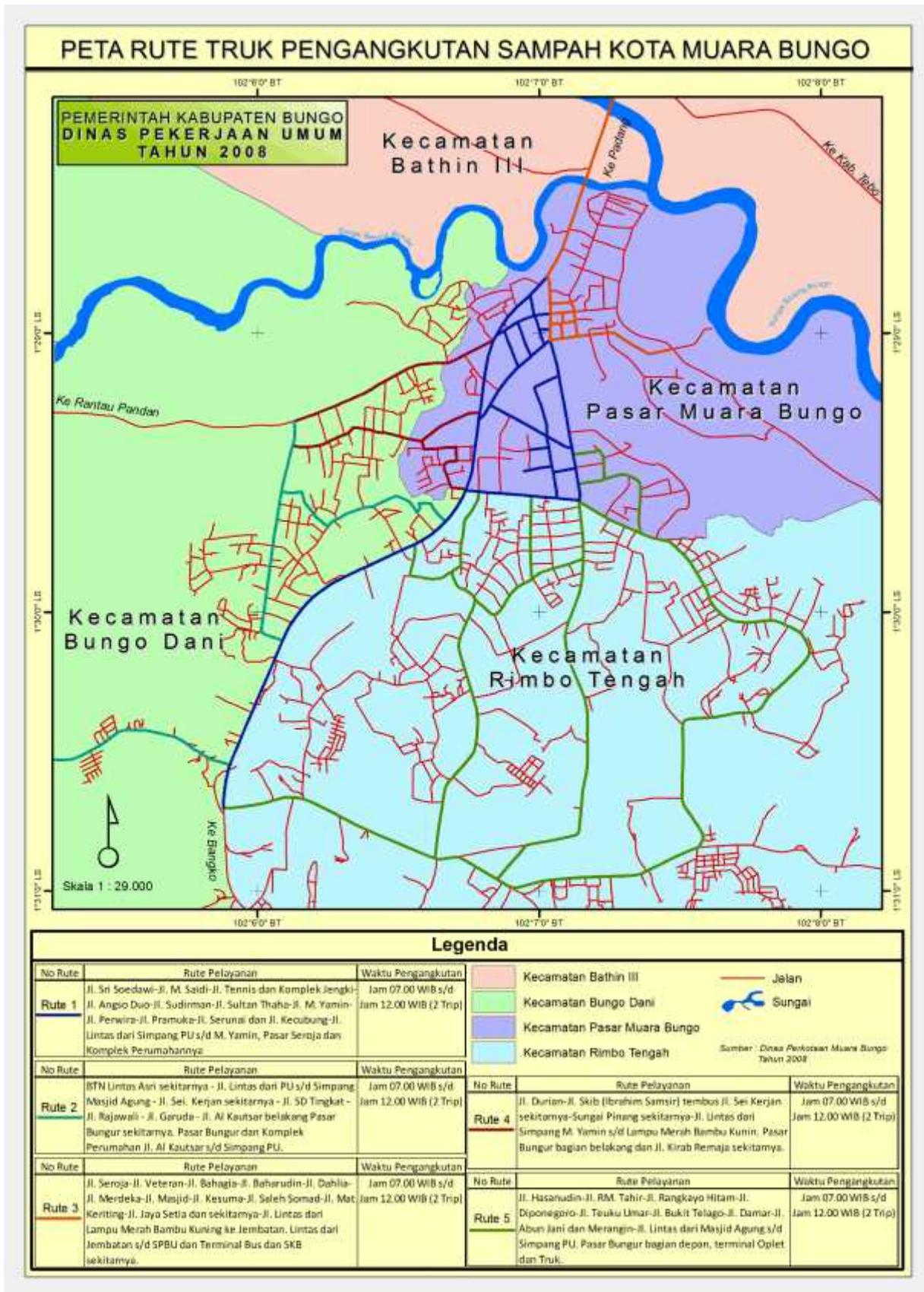


Sistem pengelolaan persampahan di pusat kota dan sekitarnya sudah berjalan relatif baik, dengan dukungan bak-bak penampungan yang berupa transfer depo, sehingga memudahkan pengambilan dan

pengangkutan ke TPA, petugas penyapu jalan, petugas dan armada angkut dan lain sebagainya, sehingga kawasan perkotaan Muara Bungo relatif bersih. Pengelolaan persampahan Perkotaan Muara Bungo dikelola oleh Dinas Perkotaan Kabupaten Bungo yang saat ini baru mampu melayani sekitar 50 % dari seluruh sampah penduduk kota.. Pengelolaan sampah penduduk yang tidak terlayani oleh sistem pelayanan pengelolaan sampah perkotaan Muara Bungo, oleh masyarakat dilakukan pengelolaan secara mandiri yaitu sampah dikumpulkan dan kemudian dibakar atau ditimbun di lubang tanah.

TPA yang dimanfaatkan di Perkotaan Muara Bungo berada di Desa Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko dengan sistem open dumping yang memanfaatkan daerah cekungan di pinggir jalan raya dengan luas 5 ha dan status lahan milik pemda saat ini sudah mulai penuh, lokasi berdekatan/ berada di dalam kawasan Perkotaan Muara Bungo, dan sudah saatnya dicarikan pengganti TPA yang lebih luas dan jauh dari perkotaan Muara Bungo.

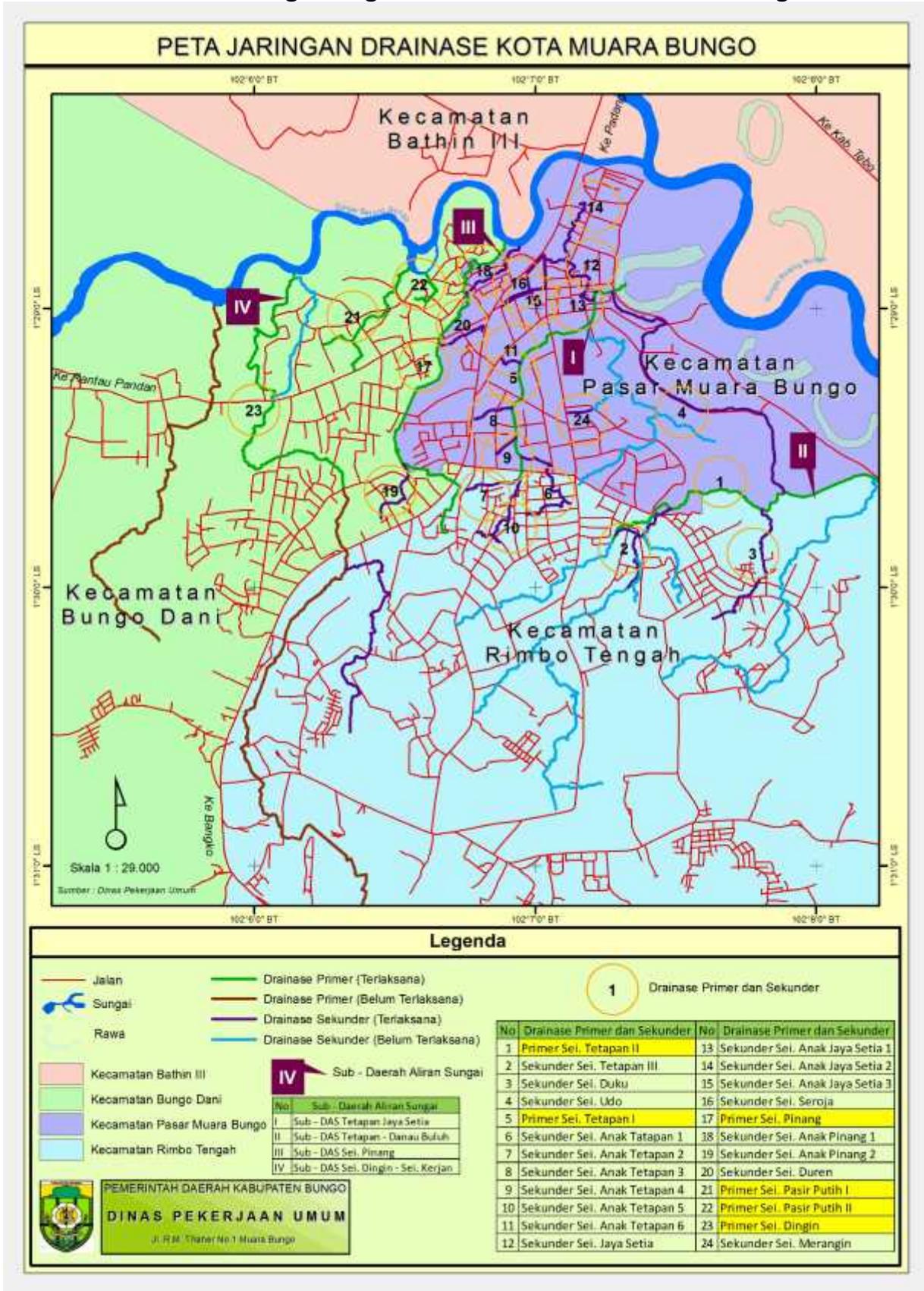
Gambar/ Peta : 2-10
 Peta Jaringan Pelayanan Pengelolaan Sampah Perkotaan Muara Bungo



2.3.6 Prasarana Drainase dan Pengendalian Banjir

Genangan masih menjadi permasalahan pada sistem drainase Perkotaan Muara Bungo. Masalah utama yang mengakibatkan genangan adalah bersumber dari kondisi alam yaitu daerah cekungan, pemanfaatan alur sungai sebagai saluran drainase induk atau pembuangan akhir sementara kondisi sungai berkelok-kelok dan sebagian mengalami pendangkalan di bagian muaranya. Jaringan drainase Perkotaan Muara Bungo didominasi oleh jenis saluran alam dan tanah, drainase jalan yang sudah berupa saluran beton hanya terdapat di sebagian ruas jalan utama kota. Sistem drainase ruas-ruas jalan utama kota terutama di sepanjang ruas jalan lintas sumatera yang merupakan jalan arteri primer, saat ini kondisi saluran drainasenya banyak yang rusak, kurang lebar, tertimbun material erosi dan gangguan aliran lainnya..

Gambar/ Peta : 2-11
 Peta Eksisting Jaringan Drainase Perkotaan Muara Bungo



2.4 POTENSI DAN PERSOALAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR**2.4.1. Potensi Permukiman dan Infrastruktur Permukiman**

Kawasan Perkotaan		
1	Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk lahan permukiman 2. Kepadatan penduduk tergolong masih sedang dan rendah 3. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 4. Banyak tumbuhnya rumah-rumah sewa di Kota Muara Bungo
2	Jalan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi jalan lingkungan di wilayah perkotaan umumnya cukup baik 2. Lebar jalan lingkungan di kompleks perumahan cukup memenuhi syarat untuk lalu lintas kendaraan 3. Umumnya jalan lingkungan terhubung dengan jalan utama 4. Adanya pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan
3	Drainase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat jaringan drainase di wilayah permukiman perkotaan 2. Jaringan drainase telah terhubung dengan drainase utama 3. Telah terdapat Masterplan jaringan drainase Kota Muara Bungo Telah dilakukan pembangunan/peningkatan drainase
4	Air Bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat jaringan air bersih dari PDAM 2. Terdapat sumber air di wilayah Kab. Bungo yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk peningkatan dan perluasan jangkauan layanan kepada masyarakat 3. Jumlah penduduk yang semakin banyak dan terus meningkat yang membutuhkan layanan air bersih
5	Air Limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian penduduk membuang limbah cair ke saluran drainase 2. Umumnya penduduk membuang limbah padat (tinja manusia) ke tempat septic tank 3. Tersedia Prasarana penanganan air limbah (truk tinja) 4. Terdapat IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja)
6	Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sarana dan prasarana sampah seperti armada, bak sampah, TPS dan TPA 2. Sebagian penduduk perkotaan telah mendapat pelayanan sampah Sebagian penduduk yang memiliki pekarangan luas, mengelola sampah rumah tangga da sampah pekarangan dengan ditimbun di dalam tanah dan sebagian dibakar di pekarangan

2.4.2. Persoalan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman

a. Persoalan pada Kawasan Perkotaan

Kawasan Perkotaan		
1	Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya lahan permukiman berpotensi genangan akibat air hujan 2. Pengembangan perumahan skala besar terkendala adanya lahan 3. Terdapat permukiman padat di sekitar pusat kota 4. Terdapat permukiman yang padat dan cenderung kumuh 5. Masih terdapat rumah-rumah yang tidak layak huni
2	Jalan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih dijumpai jalan lingkungan yang rusak dan jalan tanah 2. Banyak ditemui jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar terutama badan jalan yang kurang lebar 3. Sebagian Jalan didaerah perumahan hanya ada satu sisi saluran samping saja, sehingga berpotensi menimbulkan genangan disisi jalan yang tidak ada salurannya, mengakibatkan kerusakan jalan. 4. Fasilitas jalan seperti penerangan dan trotoar masih kurang. 5. Masih ditemui jalan yang rusak
3	Drainase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi penyempitan badan saluran drainase (penampang basah saluran yang kurang) 2. Pada wilayah dengan topografi dataran dan cekungan, air sulit mengalir sehingga terjadi genangan, dan pada daerah permukiman sebagian drainase hanya ada satu sisi. 3. Banyaknya sampah dan sedimentasi pada saluran 4. Kurang adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase
4	Air minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debit aliran air yang tidak merata 2. Kebocoran pipa 3. Air bawah tanah tidak dapat dikonsumsi
5	Air limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuangan langsung limbah domestik ke saluran air terbuka khususnya <i>Grey Water</i> 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat 3. Umumnya septic tank warga belum sesuai standar teknis
6	Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kepedulian warga dalam mengurangi sampah melalui penanganan sampah dengan pola 3 R 2. Belum semua sampah kota terangkut ke TPA 3. Sarana pendukung pengelolaan sampah masih kurang 4. Minimnya sarana tong sampah yang dipasang di pingir jalan

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

Kawasan Perkotaan		
7	Kelembagaan dan Pendanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya pemahaman dari para stakeholder mengenai pentingnya pengelolaan infrastruktur regional.2. Belum memadainya pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang lembaga/ badan/SKPD penyelenggara permukiman dan infrastruktur perkotaan.3. Belum optimalnya kemampuan SDM lembaga penyelenggara permukiman dan infrastruktur perkotaan4. Terbatasnya anggaran yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah di bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan.5. Masih terbatasnya pemahaman para stakeholder tentang keikutsertaan swasta melalui KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) untuk mendanai, mengembangkan dan mengoperasikan dan memelihara prasarana permukiman dan infrastruktur perkotaan6. Belum adanya ketentuan/ peraturan daerah yang dapat memayungi dan memfasilitasi kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta .

b. Persoalan pada Kawasan Prioritas

A	Kelurahan Jaya Setia	
1	Permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Ada permukiman padat dan cenderung kumuh di RT 12 s/d RT 14, ada beberapa rumah semi permanen, kurang layak huni, jalan sempit, drainase kecil, air limbah menggenang dan banyak jentik-jentik nyamuk, dll
		<ul style="list-style-type: none">• Sebagian kawasan permukiman tidak padat tetapi rawan genangan dan banjir di musim hujan terutama RT 2 s/d RT 06
2	Drainase	<ul style="list-style-type: none">• Drainase tidak normal, sering tergenang akan menjadi sarang tumbuhnya jentik nyamuk• Setiap hujan rumah penduduk sering terendam
3	Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Tidak tersedia tong sampah di tiap rumah• Tidak tersedia TPS sampah• Belum ada petugas pengangkut sampah
4	Sanitasi	<ul style="list-style-type: none">• Sebagian penduduknya belum mempunyai WC sendiri

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

B	Kelurahan Batang Bungo	
1	Permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Di belakang kiri Pasar Atas.ada sebagian rumah semi permanen, lantai tanah & kurang layak huni
2	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Ada sebagian jalan lingkungan masih berupa tanah• Saat musim hujan sebagian jalan tanah becek dan aktivitas penduduk terganggu
3	Drainase	<ul style="list-style-type: none">• Di belakang Pasar Atas, jaringan drainase sekaligus saluran buangan air limbah masih berupa tanah, banyak sampah, air kotor menggenang dan meluap walaupun di musim kemarau• Banyak saluran drainase tumbuh rumput dan banyak sampah
4	Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Di belakang Pasar Atas. saluran air hujan/ drainase banyak sampah sehingga• Sampah berserakan tidak terkumpul pada suatu tempat• Belum setiap rumah menyediakan bak sampah
5	Air Bersih	<ul style="list-style-type: none">• Sebagian masyarakatnya masih menggunakan air sumur
6	Sanitasi dan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none">• Di belakang kiri Pasar Atas saluran buangan air limbah mepet pintu rumah dan air limbah menggenang, kotor, dan bau tidak sedap, sebagian rumah tidak ada saluran air limbah

C	Kelurahan Pasir Putih	
1	Permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Permukiman lama yang tergerus dengan oleh perkembangan kehidupan pusat kota, dan sebagian permukiman cenderung padat dan cenderung kumuh
2	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Sebagian jalan lingkungan rusak dan sebagian setapak masih berupa tanah
3	Drainase	<ul style="list-style-type: none">• Ada saluran drainase sekaligus saluran buangan air limbah sepanjang sekitar 350 m masih berupa tanah, berkelok-kelok, penyempitan, bila musim hujan air sering meluap, dan sering menjadi WC umum,
4	Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Belum setiap rumah penduduk menyediakan bak sampah
5	Sanitasi dan air limbah	<ul style="list-style-type: none">• Hampir setiap rumah sudah memiliki WC

Bab 3

REVIEW KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Muara Bungo akan menguraikan tentang kebijakan, strategi dan program yang terkait dengan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang didasarkan pada Kebijakan pembangunan Perkotaan Muara Bungo, yang akan dibahas dalam review meliputi :

1. Kebijakan dalam **Spasial Plan** antara lain Penataan Ruang (RTRW Kab. Bungo Th 2010-2029)
2. Kebijakan dalam **Development Plan** antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bungo Tahun 2012 – 2016
3. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Perkotaan Muara Bungo

Selengkapnya arah kebijakan pembangunan Perkotaan Muara Bungo yang mencakup kebijakan, strategi dan program dapat dilihat posisi strategis , fungsi dalam arahan sistem pusat kegiatan sebagai berikut :

1. Posisi Strategis Kota Muara Bungo

- a. Berada di wilayah Kabupaten Bungo yang berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat
- b. Berada pada persimpangan jalur Lintas tengah Sumatera yang menghubungkan Kota Muara Bungo – Padang, Muara Bungo – Bangko, dan Muara Bungo – Jambi.

2. Fungsi Kota Muara Bungo dalam Arahan Sistem Pusat Kegiatan

- a. Sebagai Pusat Kegiatan Nasional Wilayah Pulau Sumatera (PKNP)
- b. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Propinsi Jambi Bagian Barat

- Pengembangan sistem pusat pelayanan didukung dengan mengembangkan sistem jaringan yang berfungsi kolektor yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan. Pengembangan sistem jaringan dengan memperhatikan jaringan arteri primer Jalur Jalan Raya Lintas Sumatera yang merupakan bagian dari sistem regional – nasional.

2) Kebijakan Pola Ruang

- Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau pada pusat-pusat pelayanan. Pengembangan ruang terbuka non hijau dapat diintegrasikan pada pengembangan fungsi komersial, sebagai ruang sosial yang sekaligus berfungsi komersial.
- Mengembangkan pemanfaatan ruang pada kawasan sub pusat wilayah guna mendorong desentralisasi pemanfaatan ruang secara lebih merata melalui pemanfaatan bagi kegiatan perdagangan, jasa dan fasilitas pelayanan.

b. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bungo sebagai berikut:

1. Mengembangkan Jalan Lingkar Kota Muara Bungo sebagai alternatif untuk mengatasi kepadatan lalu-lintas pada jalur arteri primer, jalur Jalan Raya Lintas Sumatera yang membelah Kota Muara Bungo.
2. Meningkatkan fungsi dan peran Kota Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Utama Kabupaten Bungo melalui peningkatan kualitas lingkungan kawasan Pusat Kota Muara Bungo yang sudah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Propinsi Jambi bagian barat, dan Pusat Kegiatan Nasional di Pulau Sumatera (PKNP).
3. Mendorong terciptanya Sub Pusat Kegiatan yang sudah berkembang maupun yang akan berkembang untuk memacu Desentralisasi pusat-pusat pelayanan, Mengembangkan Sub-Sub

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo - 2011

- pusat sebagai pusat pelayanan sesuai dengan Sistem Pelayanan dan Hiraki Kota – Kota di wilayah Kabupaten Bungo
4. Mengembangkan Sistem Pusat Pelayanan yang didukung dengan mengembangkan Sistem Jaringan yang berfungsi Kolektor yang menghubungkan antar Pusat-Pusat Pelayanan, dengan tetap memperhatikan Jaringan Arteri Primer Jalan Lintas Sumatera yang merupakan jaringan jalan regional dan nasional..
 5. Membatasi perkembangan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan genangan dan kawasan berpotensi genangan sementara.
 6. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada pusat – pusat pelayanan.
 7. Mengembangkan dan mencari Sumber Air Baku, untuk meningkatkan pelayanan air bersih perkotaan maupun pedesaan

c. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Bungo

Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Bungo tampak dari Pembagian Kawasan/ Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

1) WP I (Ibukota Kab.), meliputi:

- ❖ Kec. Pasar Muara Bungo
- ❖ Kec. Bungo Dani
- ❖ Kec. Rimbo Tengah
- ❖ Kec. Bathin III
- ❖ Kec. Bathin II Bebeko

2) WP II, meliputi:

- ❖ Kec. Jujuhan
- ❖ Kec. Tanah Tumbuh
- ❖ Kec. Limbur Lubuk Mengkuang

3) WP III), meliputi:

- ❖ Kec. Rantau Pandan
- ❖ Kec. Palepat
- ❖ Kec. Palepat Ilir

d. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bungo

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang Kabupaten Bungo meliputi:
 - a. Peningkatan sistem pusat kegiatan, berupa pemantapan peran dan fungsi wilayah Kota Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang menjadi pusat orientasi pelayanan bagi kawasan barat Provinsi Jambi dan salah satu Pusat Pelayanan Primer Provinsi Jambi;
 - b. Peningkatan sistem jaringan prasarana wilayah, berupa peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bungo;
2. Kebijakan pengembangan pola ruang Kabupaten Bungo, meliputi:
 - a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi:
 - Pelestarian dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
 - Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
 - Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Bungo, meliputi:
 - Mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo;
 - Mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Bungo;

- Mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah Kabupaten Bungo;
- Mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Bungo; dan
- Mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah Kabupaten Bungo.

3.1.2. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Bungo

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten Bungo meliputi strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.

1. Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Strategi penyusunan struktur ruang Kabupaten Bungo dilakukan untuk peningkatan sistem pusat permukiman dan peningkatan sistem jaringan prasarana wilayah.

a. Strategi Peningkatan Sistem Pusat Pemukiman

Strategi untuk peningkatan sistem pusat pemukiman, meliputi :

- 1) Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Muara Bungo sebagai PKW dan PKNP
- 3) Mendorong kawasan perkotaan lainnya sesuai hirarki yang telah ditetapkan, yaitu kota PKL, PPK dan PPL.

b. Strategi Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Strategi untuk peningkatan sistem jaringan prasarana wilayah, meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana wilayah dan mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem jaringan transportasi;
- 2) Mendorong pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- 3) Meningkatkan sistem jaringan energi dan kelistrikan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan energi dan kelistrikan; dan
- 4) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

2. Strategi Penyusunan Pola Ruang

a. Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

Strategi untuk pengembangan kawasan lindung, meliputi:

- 1) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kawasan lindung meliputi :
 - a) Menetapkan kawasan lindung di ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b) Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kabupaten Bungo; dan
 - c) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- 2) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 - a) Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

- c) Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- d) Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f) Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan
- g) Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.

b. Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

Strategi pengembangan kawasan budidaya meliputi :

- 1) Strategi pengembangan untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya meliputi:
 - a) Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b) Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo - 2011

- c) Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d) Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- 2) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
- a) Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b) Mengembangkan kawasan permukiman dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak;
 - c) Mengembangkan kawasan budidaya dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, yang dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan penduduk tanpa menimbulkan kerusakan alam/lingkungan.
 - d) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - e) Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - f) Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan; dan
 - g) Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

c. Strategi Penetapan Kawasan Strategis

Strategi Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bungo, meliputi :

- 1) Mengakomodisikan kawasan strategis yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
- 2) Mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo;
- 3) Mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Bungo;
- 4) Mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah Kabupaten Bungo;
- 5) Mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Bungo; dan
- 6) Mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah Kabupaten Bungo.

Strategi Penetapan masing-masing Kawasan Strategis Kabupaten Bungo, meliputi

- a. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :
 1. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 3. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 4. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 5. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo - 2011

6. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- b. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi :
1. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional;
 2. Peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
 3. Melindungi dan melestarikan aset nasional atau internasional;
 4. Memberikan perlindungan peninggalan budaya nasional;
 5. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; dan
 6. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional.
- c. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi :
1. Pengembangan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis kabupaten;
 2. Mengembangkan sumber daya alam strategis kabupaten; dan
 3. Mengembangkan penggunaan teknologi tinggi strategis.
- d. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sumber daya buatan meliputi :
1. Mengembangkan lokasi sumber daya buatan yang ada di Kabupaten Bungo;
 2. Meningkatkan dukungan sumber daya alam; dan
 3. Meningkatkan fungsi sebagai pusat kegiatan utama;
- e. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :
1. Menetapkan kawasan strategis berfungsi lindung;

2. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
3. Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
4. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
5. Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
6. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.

4. Strategi Pemanfaatan Ruang

Strategi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bungo, berfungsi memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama yang meliputi :

- a. Mendukung terwujudnya struktur ruang;
- b. Mendukung terwujud pola ruang; dan
- c. Mendukung terwujudnya kawasan strategis;

5. Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Strategi pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Bungo, berfungsi sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bungo, meliputi :

- a. Memberikan arahan bagi peraturan zonasi;
- b. Memberikan arahan ketentuan perizinan;
- c. Memberikan arahan insentif dan disinsentif; dan
- d. Memberikan arahan sanksi.

3.1.3. Arahan Struktur Pelayanan Kabupaten Bungo

a. Arahan Sistem Pusat Kegiatan

Pengembangan pusat kegiatan diarahkan mengikuti hirarki fungsional yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

- a) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dikembangkan untuk pelayanan administrasi, transportasi, perdagangan, distribusi dan koleksi barang dan jasa
- b) Pengembangan PKW ini dilaksanakan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah
- c) Pengembangan PKW di Kabupaten Bungo diarahkan sebagai pintu gerbang utama distribusi barang ekspor Kabupaten Bungo terhadap wilayah segitiga pertumbuhan SIBAJO (Singapura – Batam – Johor).
- d) Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan kota-kota utama di Sumatera dan Jawa, bahkan Indonesia Bagian Barat, baik melalui peningkatan sarana prasarana darat, udara dan sungai.
- e) Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi perkotaannya.
- f) Peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana perkotaan.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

- a) Pusat Kegiatan Lokal dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya.
- b) Prioritas kegiatan yang dikembangkan meliputi kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan pengumpul serta tidak tertutup kemungkinan untuk pengembangan aktifitas sekunder dan tersier dengan skala pelayanan regional.
- d) Pemantapan keterkaitan antar kota-kota PKL dengan daerah sekitarnya baik melalui peningkatan sarana prasarana perhubungan darat maupun sungai.
- e) Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsinya.

- f) Peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana perkotaan.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

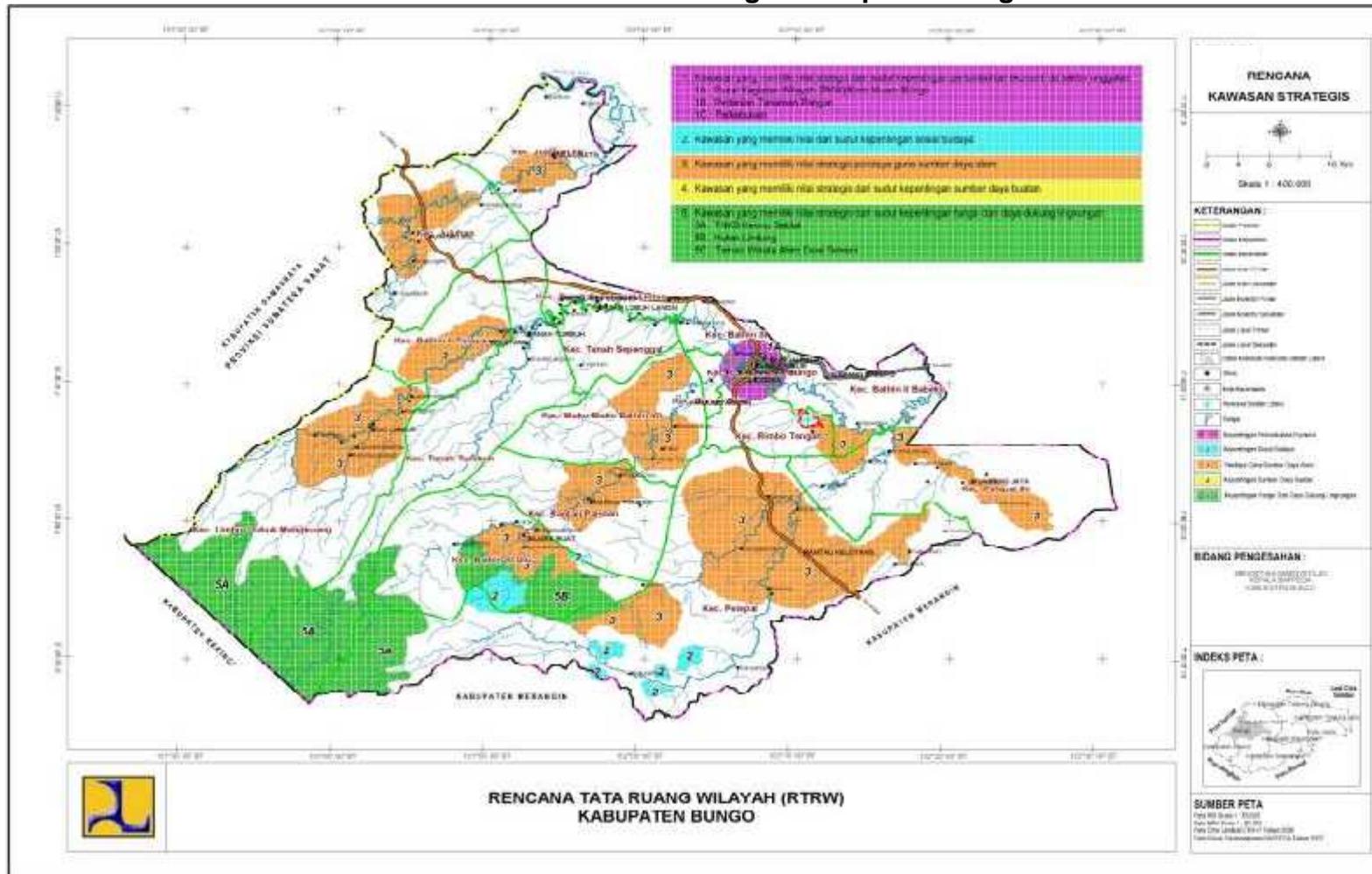
- a) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya.
- b) Prioritas kegiatan yang dikembangkan meliputi kegiatan pusat perdagangan dan pengumpul serta tidak tertutup kemungkinan untuk pengembangan aktifitas sekunder dan tersier dengan skala pelayanan skala kecamatan.
- c) Pemantapan keterkaitan antar kota PKL dengan desa sekitarnya baik melalui peningkatan sarana prasarana perhubungan darat maupun sungai
- d) Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsinya.
- e) Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan sarana-prasarana perkotaan.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

- a) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dikembangkan sebagai pusat pelayanan antar desa disekitarnya.
- b) Prioritas kegiatan yang dikembangkan meliputi kegiatan perdagangan dan pengumpul serta tidak tertutup kemungkinan untuk pengembangan aktifitas sekunder dan tersier dengan skala pelayanan lingkungan.
- c) Pemantapan keterkaitan antar desa-desa sekitarnya baik melalui peningkatan sarana prasarana perhubungan darat maupun sungai
- d) Penyediaan prasarana permukiman sesuai dengan fungsinya.
- e) Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan sarana-prasarana permukiman.

Gambar : 3 - 3.
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bungo



3.1.4. Arahannya Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

a. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Kabupaten Bungo memiliki sarana dan prasarana infrastruktur dibidang transportasi darat yang dapat diterintegrasikan dengan transportasi sungai dan transportasi udara. Sarana transportasi darat sangat memegang peranan penting untuk melayani transportasi wilayah di Kabupaten Bungo saat ini berupa kendaraan bus antar kota dan bus antar kota antar provinsi dan kendaraan angkutan jenis lainnya.

Kabupaten Bungo (Kota Muara Bungo) merupakan salah satu wilayah yang dilintasi oleh rencana jalur kereta api nasional, hal ini tertuang dalam *Sumatera Railway Development Project* dimana terdapat dua lintasan rencana jaringan kereta api di Kabupaten Bungo dan melintasi Kota Muara Bungo yaitu jaringan rencana KA Teluk Kuantan – Muara Bungo – Jambi (sepanjang 370 km) dan Lubuk Linggau – Bangko – Muara Bungo (sepanjang 273 km).

Di Kota Muara Bungo terdapat Sungai Batang Tebo dan Batang Bungo yang menyatu dengan Sungai Batanghari sebagai salah satu sungai besar di Indonesia, sedangkan di wilayah Kabupaten Dharmasraya (pecahan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung) terdapat 29 sungai besar dan kecil yang beberapa dari sungai tersebut bermuara ke Sungai Batanghari (Jambi) dan Sungai Indragiri (Riau).

Tujuan Pengembangan sistem Jaringan Transportasi :

Mendukung peningkatan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Bungo secara serasi dengan wilayah-wilayah lainnya yang meliputi :

- Meningkatkan eksternalitas Kabupaten Bungo;
- Menunjang kegiatan ekspor impor Kabupaten Bungo dengan wilayah lainnya; dan
- Menunjang perkembangan sektor-sektor utama di Kabupaten Bungo yaitu sektor pertanian, agro-industri, pariwisata, pertambangan dan kehutanan.

Mendukung pemerataan pembangunan yang meliputi :

- Memperlancar kegiatan koleksi dan distribusi arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas penduduk Kabupaten Bungo; dan
- Meningkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/sentra produksi yang masih terisolasi.

Agar tujuan pengembangan sistem jaringan transportasi tersebut diatas dapat mencapai hasil optimal, diperlukan pengembangan transportasi terpadu dalam suatu kesatuan sistem transportasi darat, sungai dan udara yang terintegrasi dalam struktur ruang wilayah Kab. Bungo.

Dalam strategi pengembangan tata ruang Kabupaten Bungo disebutkan bahwa sistem prasarana transportasi darat di Kabupaten Bungo diarahkan untuk tujuan pemerataan pengembangan intra wilayah di Kabupaten Bungo dengan cara meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman, dengan daerah belakangnya (hinterland), meningkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/ sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar regional, nasional dan internasional.

Prasarana transportasi yang akan dikembangkan untuk mendukung pemerataan pembangunan intra wilayah di Kabupaten Bungo adalah prasarana transportasi darat yang ditunjang dengan sistem prasarana transportasi sungai untuk menghubungkan wilayah-wilayah terisolir yang belum dapat dihubungkan dengan transportasi darat.

Selain itu juga akan dikembangkan prasarana transportasi darat yang menghubungkan wilayah-wilayah potensial yang masih terisolir di Kabupaten Bungo dengan mengembangkan jaringan jalan regional dan jaringan jalan lokal yang menghubungkan pusat-pusat permukiman di sepanjang Sungai Batang Bungo, Batang Tebo, Senamat, Jujuhan dan Pelepat.

Untuk mendorong struktur ruang yang lebih berkesinambungan sesuai dengan konsep hirarkhi pelayanan, maka diciptakan jaringan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Bungo, khususnya menuju

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo - 2011

sentra produksi dari masing-masing pusat pelayanan serta antar pusat pelayanan.

Sistem jaringan prasarana transportasi jalan terdiri atas :

1. Jaringan jalan arteri primer menghubungkan:
 - a. Kota Muaro Bungo dengan Kota Jambi; Kota Muaro Bungo dengan Kota Padang dan Kota Muaro Bungo dengan Kota Merangin
 - b. Kota Muaro Bungo dengan Kota PKN lainnya.

Jaringan jalan arteri primer yang dimaksud adalah jalan Lintas Tengah Sumatera.

2. Jaringan jalan kolektor primer menghubungkan :

- a. Kota Muaro Bungo dengan Kota PKW lainnya; dan
- b. Kota Muaro Bungo dengan Kota PKL.

Jaringan jalan kolektor primer yang dimaksud adalah jalan Kota Muara Bungo-Jambi.

3. Jaringan jalan arteri sekunder menghubungkan :

- a. Kawasan primer ke kawasan sekunder 1;
- b. Kawasan sekunder 1 ke kawasan sekunder 1; dan
- c. Kawasan sekunder 1 ke kawasan sekunder 2.

Jaringan jalan arteri sekunder yang dimaksud adalah jalan Kota Muaro Bungo – Bandara Bungo.

4. Jaringan jalan kolektor sekunder menghubungkan :

- a. Kawasan sekunder 2 ke kawasan sekunder 2; dan
- b. Kawasan sekunder 2 ke kawasan sekunder 3.

Jaringan jalan kolektor sekunder yang dimaksud adalah :

- a. Jalan yang menghubungkan Kota PKL dengan kawasan perkotaan PKL lainnya yaitu : Kuamang Jaya – Bandara; Kuamang Jaya – Rantau Kelayang; Bathin III Ulu – rantau Pandan; Kota Rantau Kelayang - Kuamang Jaya, Talang Pantai - Ambacang Gedang, Tanah Tumbuh - Rantau Ikil
- b. Jalan yang menghubungkan Kota Candika dengan kota PPK lainnya;

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo - 2011

- c. Jalan yang menghubungkan Kota Sungai Binjai dengan kota PPK lainnya;
- d. Jalan yang menghubungkan kota PPK dengan Kota PPK lainnya;
- 5. Jaringan jalan lokal primer menghubungkan PKL dengan PKL, dan PKL dengan PPK dan/atau PPL.

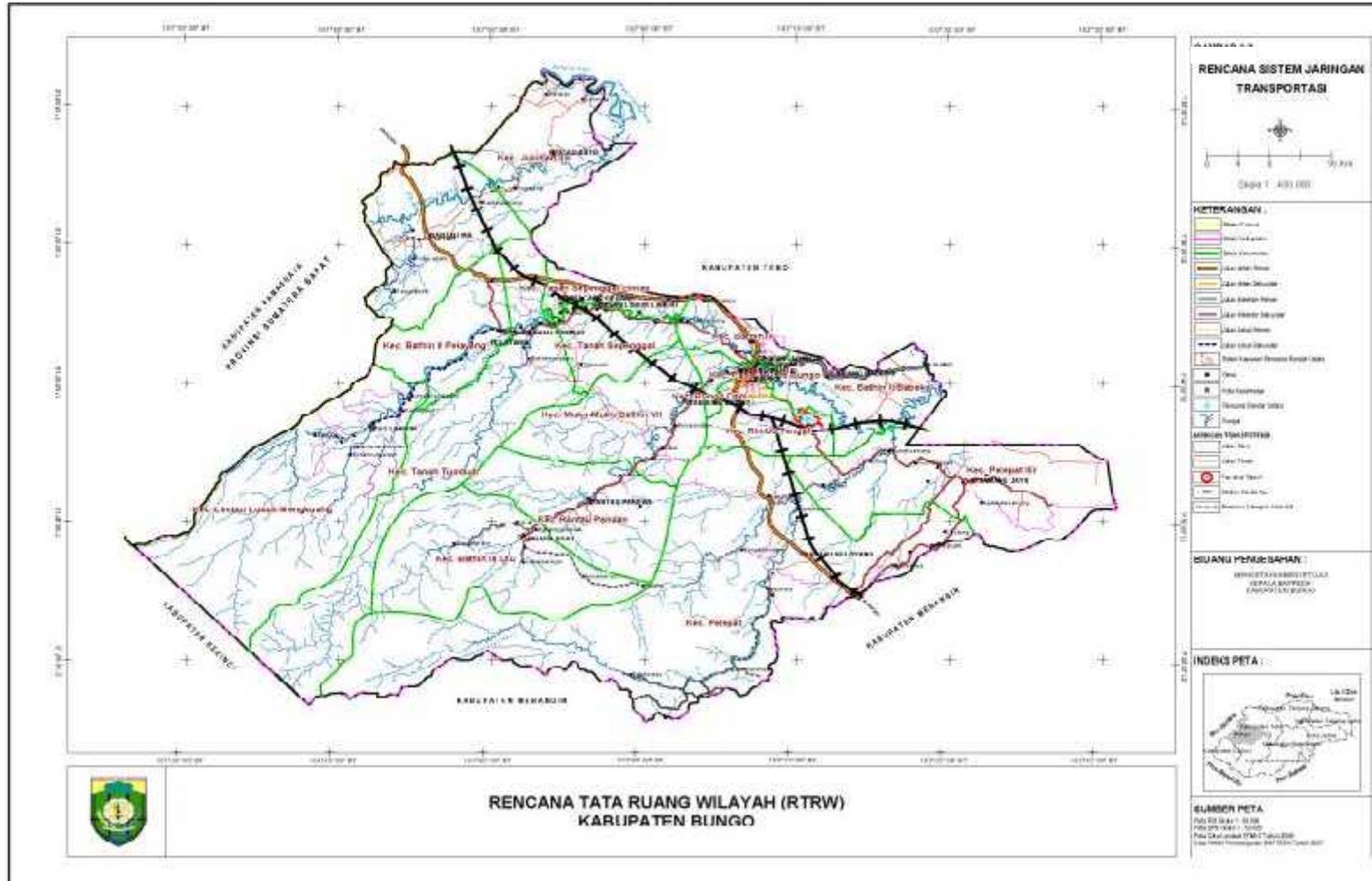
Jaringan jalan lokal primer yang dimaksud adalah:

- a. Jalan yang menghubungkan Kota Candika dengan Kota Sungai Binjai;
 - b. Jalan yang menghubungkan Kota Candika dengan kota PPK lainnya;
 - c. Jalan yang menghubungkan Kota Sungai Binjai dengan kota PPK lainnya;
 - d. Jalan yang menghubungkan Kota PPK dengan kota PPK lainnya.
- 6. Jaringan jalan lokal sekunder menghubungkan:
 - a. Kawasan sekunder 3 ke kawasan sekunder 3; dan
 - b. Kawasan sekunder 3 ke kawasan perumahan.

Jaringan jalan lokal sekunder yang dimaksud adalah:

- a. Jalan yang menghubungkan kota PPK dengan kota PPK lainnya;
- b. Jalan yang menghubungkan kota PPK dengan kota PPL lainnya;
dan
- c. Jalan yang menghubungkan kota PPL dengan kota PPL lainnya.

Gambar : 3 - 4.
Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Bungo



b. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air

Sistem jaringan prasarana sumber daya air yang melayani Kabupaten Bungo terdiri atas sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku, dan sistem pengendalian banjir; Sistem jaringan prasarana sumber daya air menggunakan pendekatan DAS dan cekungan air tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan neraca penatagunaan air. Dalam rangka pengembangan penatagunaan air pada DAS diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan sumber daya air dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang penatagunaan air.

Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian Sumberdaya Air melalui pemantapan kawasan lindung dan konservasi, penghutanan kembali kawasan-kawasan konservasi dalam kondisi kritis, mengendalikan penggunaan air dari eksploitasi secara besar-besaran dan mengamankan daerah sempadan sungai dan mata air dari kegiatan yang merusak kualitas air; Mengamankan kawasan-kawasan resapan air, khususnya pada zona resapan tinggi untuk mencegah kekeringan di musim kemarau dan erosi di musim hujan serta menghindari terjadinya bencana alam akibat fluktuasi aliran air permukaan yang bersifat ekstrim, seperti: banjir, longsor, dan kekeringan;

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan air tanah pada kawasan perkotaan dengan akifer terbatas, air tanah langka dan zona resapan rendah;

A. Sistem Jaringan Sungai

Sistem jaringan sungai merupakan sumber air untuk wilayah Kabupaten Bungo meliputi Sungai Batang Bungo, Sungai Batang Tebo, Sungai Batang Pelepat, dan Sungai Jujuhan.

Sistem jaringan sungai memiliki fungsi sebagai sumber air untuk pertanian, sumber air permukiman, transportasi, dan pembangkit listrik.

B. Sistem Jaringan Irigasi

Sistem jaringan irigasi yang mendukung kegiatan pertanian di

Kabupaten Bungo terdiri atas irigasi teknis dan semi teknis. Jaringan irigasi teknis di Kabupaten Bungo adalah Dam Semagi. Jaringan irigasi Dam Semagi berfungsi untuk melayani kegiatan pertanian di Kabupaten Bungo. Sedangkan jaringan irigasi semi teknis berfungsi untuk mendukung kegiatan pertanian di Kabupaten Bungo.

C. Sistem Jaringan Air Baku

Sistem jaringan air baku di Kabupaten Bungo terdiri atas jaringan prasarana air baku untuk penyediaan air minum, jaringan prasarana air baku untuk industri, dan jaringan prasarana air baku untuk pertanian.

Sistem jaringan air baku bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan domestik/rumah tangga, kegiatan sentra industri, kegiatan perkotaan, dan kegiatan pertanian. Pemenuhan air bersih/air minum masyarakat diutamakan dilayani melalui jaringan perpipaan.

D. Sistem Jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir

Sistem pengendalian banjir di Kabupaten Bungo terdiri atas sistem pengendalian banjir Sungai Batang Bungo, sistem pengendalian banjir Sungai Batang Tebo, sistem pengendalian banjir Sungai Batang Pelepat, dan sistem pengendalian banjir Sungai Jujuhan . Fungsi masing-masing sistem pengendalian banjir adalah :

- a. Sistem pengendalian banjir Sungai Batang Bungo berfungsi untuk pengendalian banjir di Kota Muaro Bungo.
- b. Sistem pengendalian banjir Sungai Batang Tebo berfungsi untuk pengamanan kawasan rawan banjir di Kota Kuamang Jaya.
- c. Sistem pengendalian banjir Sungai Batang Pelepat berfungsi untuk pengamanan kawasan rawan banjir di Kota Rantau Kelayang.
- d. Sistem pengendalian banjir Sungai Jujuhan berfungsi untuk pengamanan kawasan rawan banjir di Kota Rantau Ikil.

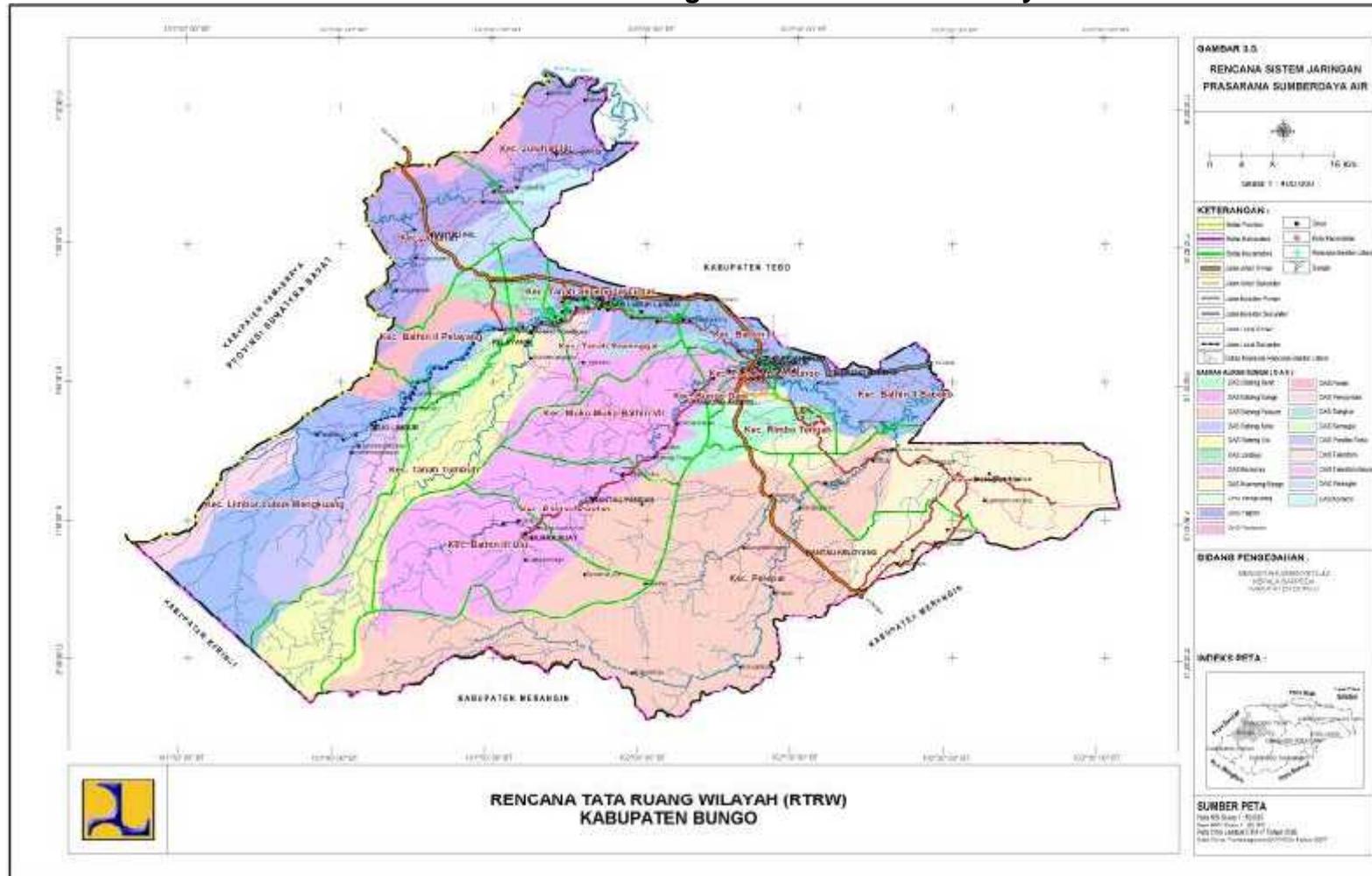
Secara visual perumusan rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada gambar berikut

:

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo - 2011

Gambar : 3 - 5
Peta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air



c. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Persampahan

Sistem pengelolaan persampahan dikembangkan secara terpadu untuk melayani wilayah Kabupaten Bungo melalui kerja sama antardaerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha.

Sistem pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Bungo diselenggarakan untuk meminimalkan volume sampah, memanfaatkan kembali sampah, mendaur ulang, dan mengolah sampah sesuai dengan ketentuan kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.

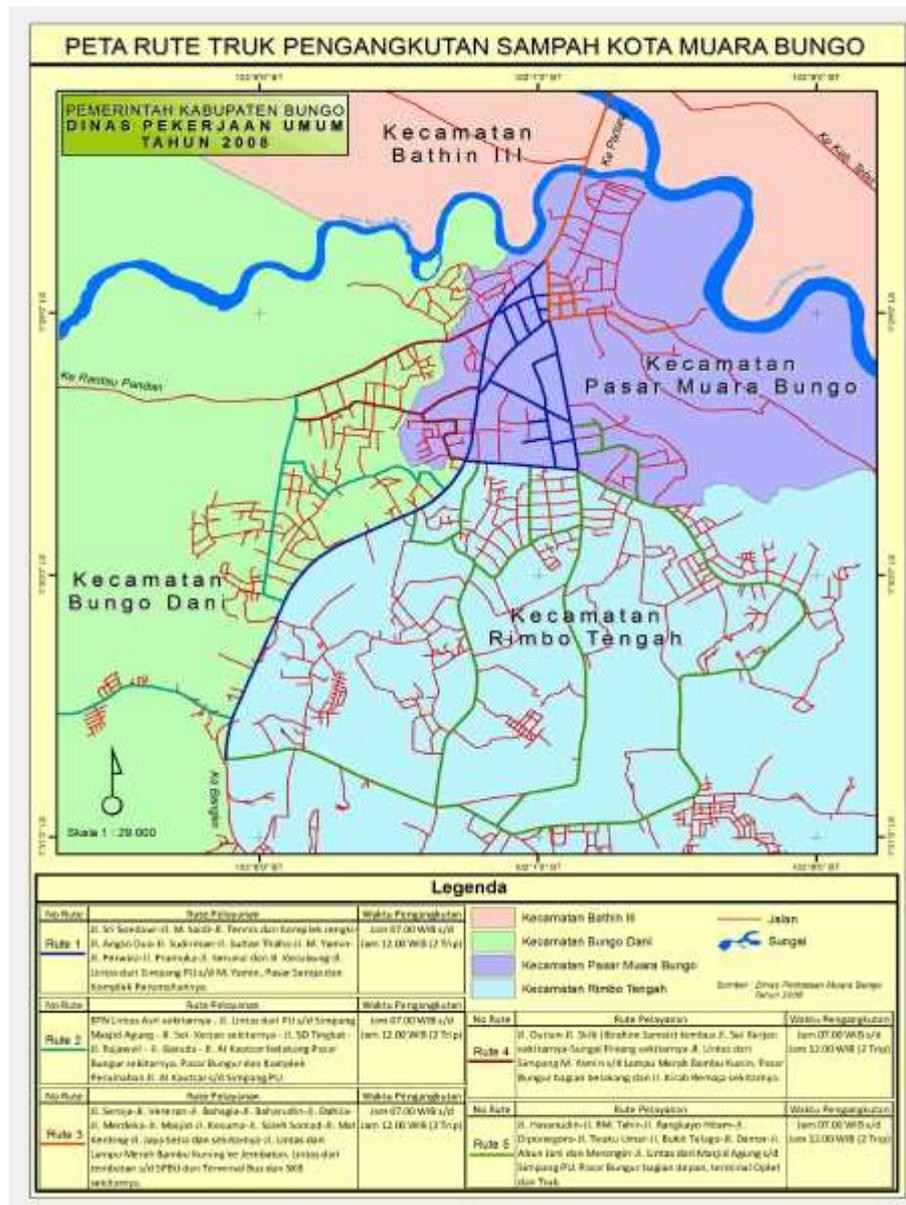
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas

1. Pengurangan sampah,
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah, dan/atau;
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
2. Penanganan sampah.
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan hasil sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah akan ditentukan melalui Peraturan/Keputusan Bupati.

Kawasan Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPA) dengan radius 3 km pada wilayah Kabupaten Bungo, dilarang mendirikan bangunan berupa permukiman dan atau bangunan lainnya yang bertentangan dengan fungsi TPA.

Gambar : 3 - 6.
Peta Rute Truk Pengangkutan Sampah Kota Muara Bungo



3.2 Kebijakan dalam Development Plan / Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bungo Tahun 2012 – 2016

3.2.1 Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk meningkatkan capaian keberhasilan pembangunan Kabupaten Bungo maka prioritas pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2012 – 2016 adalah :

- 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia melalui peningkatan masyarakat yang beragama dan berbudaya**, dengan fokus kepada :
 - a. Peningkatan Layanan Kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.
 - b. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya.
 - c. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat

- 2. Peningkatan penguatan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah**, dengan fokus kepada :
 - a. Peningkatan aktivitas usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam perekonomian daerah.
 - b. Peningkatan daya saing dari produk unggulan daerah melalui agroindustri.

- 3. Peningkatan infrastruktur pelayanan masyarakat yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih luas**
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, listrik dan air bersih.
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan untuk rakyat.

3.2.2. Program Pembangunan Daerah

Program prioritas di atas akan didukung pula oleh program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. Adapun penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pemerintahan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

- 1. Misi Pertama** : Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan YME serta meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan

2. **Misi Kedua** : Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan udara yang mendorong sekaligus mendukung kemajuan perekonomian daerah
3. **Misi Ketiga** : Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah, efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara prima
4. **Misi Keempat** : Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri kecil, perdagangan dan jasa, serta koperasi
5. **Misi Kelima** : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara cerdas dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan hidup
6. **Misi Keenam** : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja
7. **Misi Ketujuh** : Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui partisipasi aktif masyarakat
8. **Misi Kedelapan** : Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan beragama, adat istiadat dan budaya guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat

Program prioritas di atas yang sesuai dengan kebijakan pembangunan Perkotaan Muara Bungo tentang kebijakan, strategi dan program yang terkait dengan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Kebijakan pembangunan Perkotaan Muara Bungo adalah misi ke-2 (dua) dan misi ke-7 (tujuh) yang terurai lebih lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan udara yang mendorong sekaligus mendukung kemajuan perekonomian daerah (misi kedua) sebagaimana tabel 3 -1 berikut ini :

Tabel: 3-1

Program Pembangunan Perwujudan Misi Ke Dua

No	Urusan	Program
1	Urusan Wajib Pekerjaan Umum Bina Marga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Inspeksi Jalan dan Jembatan 3. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5. Program Pembebasan Lahan Untuk Jalan dan Jembatan 6. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 7. Program Pembangunan Sistem informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
2	Urusan Wajib Pekerjaan Umum Cipta Karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan perkotaan 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Pengembangan Kawasan Permukiman 4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minuman dan Air Limbah 6. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Bidang ke Cipta Karya 7. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3	Urusan Wajib Pekerjaan Umum Pengairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan , dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya 3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku/ Air Tanah 4. Program Pengendalian Banjir 5. Program Pembangunan Talud/Turap dan Bronjong 6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/ Bronjong
4	Urusan Wajib Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Program Pengembangan Transportasi Perkotaan 3. Program Pengembangan Terminal Terpadu Multi Moda 4. Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan 5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 6. Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan 7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 8. Program Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Perhubungan 9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 10. Program, Pembangunan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

Sumber: RPJM Kabupaten Bungo 2012 - 2016

2. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui partisipasi aktif masyarakat (misi ketujuh) sebagaimana tabel 3-2 berikut ini:

Tabel: 3- 2
Program Pembangunan Perwujudan Misi Ke Tujuh

No	Urusan	Program
1	Urusan Wajib Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Penataan Kawasan 3. Program Pemanfaatan Ruang 4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6. Program Pengembangan Data/ Informasi 7. Program Kerjasama Pembangunan 8. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 9. Program Perencana Pengembangan Kota – kota Menengah dan Besar 10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 12. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Agro Industri dan Optimalisasi Penggunaan Lahan
3	Urusan Wajib Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran tanah 2. Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 3. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
4	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 4. Program Pengembangan Pemetaan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi 5. Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan 6. Program Pengakajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

5	Urusan Pilihan Ketrasmigrasian	1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
---	---------------------------------------	--

Sumber: *RPJM Kabupaten Bungo 2012 – 2016*

3.3. Review Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Muara Bungo

Arahan yang dapat dijelaskan terkait dengan kegiatan penyusunan Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan Muara Bungo dari RTRW kabupaten Bungo 2015 diantaranya adalah rencana pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan seperti berikut.

3.3.1. Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Sesuai dengan rencana struktur pemanfaatan ruang yang menyangkut hirarki pusat-pusat pelayanan wilayah atau pusat permukiman perkotaan, maka pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Bungo diarahkan pada tiga tipologi :

a. Kawasan Perkotaan Muara Bungo

Pengembangan kawasan perkotaan ini diarahkan sesuai dengan kedudukannya sebagai ibukota kabupaten yang secara fungsional merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat permukiman perkotaan, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan transportasi antar moda dan antar wilayah serta pusat komunikasi antar wilayah.

b. Kawasan Perkotaan Rantau Ikil dan Rantau Kelayang

Pengembangan kawasan perkotaan Rantau Ikil terkait dengan pengembangan kegiatan industri dan kegiatan perdagangan untuk mengimbangi perkembangan kawasan perbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya sekaligus diharapkan dapat memacu pertumbuhan wilayah belakangnya dengan memanfaatkan potensinya sebagai pusat

kegiatan yang dilewati jalur transportasi regional sekaligus memperkuat koridor dan segitiga pertumbuhan Rantau Ikil – Rimbo Bujang – Muara Bungo. Fungsi kawasan perkotaan ini diarahkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, dan pusat permukiman, pusat pendidikan sampai dengan tingkat atas dan pusat komunikasi antar wilayah.

Pengembangan kawasan perkotaan Rantau Kelayang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan di wilayah bagian Selatan dan Tenggara Kabupaten Bungo, memperkuat pengembangan potensi wilayah belakangnya, mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, dan mencegah perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan TNKS dari intervensi kegiatan budidaya. Fungsi yang diarahkan untuk dikembangkan di Rantau Ikil adalah sebagai pusat permukiman, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala sub wilayah, pendidikan sampai dengan tingkat atas, pusat komunikasi antar wilayah.

c. Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Bathin II Babeko, Pelepat Ilir, Rantau Pandan, Tanah Sepenggah, Tanah Tumbuh, Muko-Muko Bathin VII dan Limbur Lubuk Mengkuang.

Pengembangan kawasan perkotaan ini lebih diarahkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat permukiman.

Dengan mempertimbangkan hasil analisis, kemudian untuk mencapai struktur ruang yang dituju, maka kawasan perkotaan di Kabupaten Bungo yang dapat diidentifikasi sampai dengan tahun 2015 adalah perkotaan Muara Tebo, Rantau Ikil dan Rantau Kelayang. Sedangkan ibukota kecamatan lainnya dapat dikategorikan sebagai kawasan perkotaan ibukota kecamatan.

3.3.2. Rencana Pengelolaan Kawasan Pedesaan

Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dengan definisi ini maka wilayah di luar kawasan perkotaan dapat dikatakan seluruhnya menjadi kawasan pedesaan, tetapi karena posisi kawasan masih dalam bingkai wilayah

perkotaan Muara Bungo, diarahkan menjadi bagian wilayah Kota Muara Bungo di masa yang akan datang..

Pengelolaan kawasan perdesaan ini lebih diarahkan pada pusat permukimannya sebagai pusat terkonsentrasinya jumlah penduduk, arah persebaran limpahan penduduk dari pusat kota dan kelengkapan fasilitas, yang dapat berupa desa-desa ibukota kecamatan atau desa-desa pusat pertumbuhan. Pusat permukiman perdesaan ini merupakan kawasan dengan dominasi kegiatan masih di sektor pertanian, tetapi secara fisik sudah menunjukkan sebagai embrio perkotaan. Penetapan pusat-pusat permukiman perdesaan ini mempertimbangkan potensi, persebaran ruang desa dan sistem kota-kota. Adapun kriterianya adalah :

- a. Desa-desa yang mempunyai potensi untuk tumbuh dengan investasi kecil
- b. Dapat berfungsi sebagai tempat penyedia pelayanan pada desa-desa sekitarnya
- c. Dapat berfungsi sebagai pusat perantara antar kota dengan desa-desa
- d. Jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa lainnya
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dibandingkan dengan desa-desa lainnya.

Arahan yang diperlukan dari Review RTR Muara Bungo untuk identifikasi kawasan cenderung kumuh diantaranya adalah arahan pengembangan dan distribusi penduduk, pengembangan kegiatan perumahan, pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, dan pengembangan utilitas kota yang meliputi air bersih, limbah domestik, persampahan, drainase, dan jaringan listrik.

3.3.3. Arahan Pengembangan dan Distribusi Penduduk

1. Perkiraan Jumlah Penduduk

Menurut Revisi RUTR Kota Muara Bungo, laju pertumbuhan penduduk Kota Bungo dalam kurun waktu 2007-2009 adalah sebesar 3,08% per tahun. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi

diharapkan ruang di kawasan budidaya dapat menampung penduduk sampai akhir tahun 2031. Hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan tahun dasar 2010 (dari hasil sensus penduduk tahun 2010) menunjukkan bahwa sampai tahun 2031 jumlah penduduk Kota Muara Bungo diperkirakan akan berjumlah 173.165 jiwa (rata-rata proyeksi dengan metode bunga berganda dan metode regresi linier).

Tabel : 3 - 3.
Perkiraan Jumlah Penduduk Kota Muara Bungo Tahun 2012-2031

No	Tahun Proyeksi	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Keterangan
		Bunga Berganda	Regresi Linier	Rata-Rata	
1	2012	100.815	100.815	100.815	Dihitung dengan Metode Bunga Berganda dengan Laju Pertumbuhan 3,08% Pertahun dengan tahun dasar 2010
2	2016	117.327	115.877	116.602	
3	2021	135.395	134.972	135.183	
4	2026	156.246	150.497	153.372	
5	2031	180.308	166.023	173.165	

Sumber : Hasil Perhitungan Proyeksi

2. Arahkan Kepadatan Penduduk

Rencana kepadatan penduduk dimaksudkan agar distribusi terhadap penggunaan lahan yang tersedia di kawasan perkotaan Muara Bungo dapat merata. Sehingga perbandingan antara lahan yang tersedia dengan perkembangan penduduk berada dalam proporsi yang seimbang. Ini dilakukan dengan melihat kenyataan, pemusatan penduduk disekitar pusat aktivitas dan disepanjang jaringan jalan.

Arahkan pdistribusi enduduk diperlukan orientasi terhadap daerah di luar pusat aktivitas. Ada dua strategi yang dapat dilakukan, yaitu :

- a. Distribusi penduduk ke kaawasan sekitar pusat kota, yang dikaitkan dengan pembentukan lingkungan-lingkungan yang masing-masingnya dilengkapi dengan pusat-pusat lingkungan.
- b. Distribusi penduduk ke kawasan yang kepadatan penduduknya rendah, tetapi berada pada jangkauan pelayanan pusat fasilitas yang berbeda.

Penyebaran kepadatan penduduk didasarkan kepada faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Fungsi yang telah atau akan diberikan kepada setiap kawasan
- b. Perkiraan kecenderungan jumlah penduduk dibandingkan dengan luas kawasan
- c. Daya dukung lahan, dinilai berdasarkan jumlah fasilitas yang ada, ketersediaan utilitas, kesediaan sarana dan prasarana, kondisi fisik lahan dan lingkungan
- d. Rencana-rencana pengembangan utilitas yang disediakan oleh pemerintah kota, seperti telepon, listrik dan air minum
- e. Lokasi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya
- f. Struktur tata ruang yang telah ditetapkan

Sesuai dengan daya tampung kepadatan maksimal yang diperbolehkan di Kota Muara Bungo yaitu untuk kota kecil berorientasi pertanian sebesar 45 jiwa per hektar, maka pertimbangan-pertimbangan bagi distribusi kepadatan penduduk di Kota Muara Bungo, terbagi dalam 3 klasifikasi yaitu :

- a. Kepadatan rendah : < 25 jiwa/Ha
Diarahkan pada kawasan/lingkungan yang dominasi pemanfaatan lahan dengan intensitas kegiatan rendah serta lahan yang dapat dikembangkan masih cukup luas.
- b. Kepadatan sedang : 25-45 jiwa/Ha
Diarahkan pada kawasan/lingkungan yang berada antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan (wilayah transisi) dan kawasan perkotaan dimana pemanfaatan lahan masih dapat dimungkinkan.
- c. Kepadatan tinggi : > 45 jiwa/Ha
Diarahkan pada kawasan/lingkungan yang mempunyai intensitas kegiatan cukup tinggi di seputar pusat kota

Kepadatan penduduk di Kota Muara Bungo pada tahun 2010 adalah 147 Jiwa/Km² (1,48 jiwa/ha). Dengan laju pertumbuhan yang tinggi



yaitu 3,08% pertahun, maka penambahan penduduk Kota Muara Bungo ini diperkirakan akan cukup besar tiap tahunnya. Diprediksikan pada tahun 2011 kepadatan penduduk Kota Muara Bungo akan mencapai 152 Jiwa/Km² (1,52 jiwa/ha) dan tahun 2031 kepadatannya mencapai 271 Jiwa/Km² (2,71 jiwa/ha).

Keterpusatan kepadatan penduduk di beberapa lokasi secara langsung cukup mendukung rencana untuk mewujudkan pola tata ruang yang efektif dan efisien, karena sejumlah penduduk dengan segala dinamikanya sudah mulai dibagi (terbagi) secara menyebar di beberapa lokasi/kelurahan.

3.3.4. Arahan Pengembangan Perumahan

Secara keseluruhan tingkat pelayanan perumahan di Kota Muara Bungo dinilai cukup baik. Namun dinilai dari kualitas perumahan tersebut perlu peningkatan. Untuk itu dalam perencanaannya diperlukan strategi yaitu :

- a. Meningkatkan dan mendukung pengadaan rumah tinggal hingga tercapainya pemenuhan kebutuhan yang layak huni.
- b. Mengatur distribusi jumlah dan kepadatan tempat tinggal sesuai dengan distribusi pusat-pusat pelayanan.
- c. Membagi wilayah pemukiman menjadi unit-unit pemukiman dan masing-masing unit memiliki pusat pelayanan.
- d. Membentuk wilayah permukiman yang layak dan nyaman melalui pengaturan pengembangan lokasi pemukiman baru di wilayah perencanaan.

Untuk kebutuhan fasilitas perumahan di kota Muara Bungo ditetapkan 3 (tiga) klasifikasi kebutuhan kapling perumahan yaitu :

- a. Rumah besar dengan luas kapling 400-600 m², diperuntukkan bagi penduduk yang berpendapatan tinggi.
- b. Rumah sedang dengan luas kapling 250-400 m², diperuntukkan bagi penduduk dengan pendapatan sedang.
- c. Rumah kecil dengan luas kapling < 250 m², diperuntukkan bagi penduduk yang berpendapatan rendah.

Sampai saat ini telah tumbuh pusat-pusat pemukiman baru di Kota Muara Bungo. Pembangunan pemukiman/perumahan tersebut seyogyanya

mengacu kepada RUTR yang ada, khususnya lokasi peruntukan lahannya serta peraturan tentang hunian berimbang serta keharusan membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Perkiraan kebutuhan lahan perumahan di Kota Muara Bungo terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk beserta kegiatan sosial ekonominya. Asumsi yang akan dipergunakan adalah setiap rumah tangga terdapat 5 jiwa dengan perbandingan luas kapling besar 400-600 m² mencakup 10% dari total jumlah rumah tangga, kapling sedang 250-400 m² mencakup 30% dari total jumlah rumah rumah tangga dan kapling kecil < 250 m² mencakup 60% dari total rumah tangga.

Pada tahun 2016 diperkirakan jumlah penduduk di Kota Muara Bungo sekitar kurang lebih 116.602 jiwa, dengan jumlah rumah tangga/rumah tinggal sejumlah kurang lebih 23.320 unit, maka luas kebutuhan lahan untuk perumahan adalah sekitar 711,3 Ha. Pada tahun 2031 diperkirakan jumlah penduduk sekitar kurang lebih 173.164 jiwa, dengan jumlah rumah tangga/rumah tinggal sejumlah kurang lebih 34.633 unit, maka luas kebutuhan lahan untuk perumahan adalah sekitar 1.056,3 Ha. Lebih jelas lihat Tabel 3 – 4 berikut in

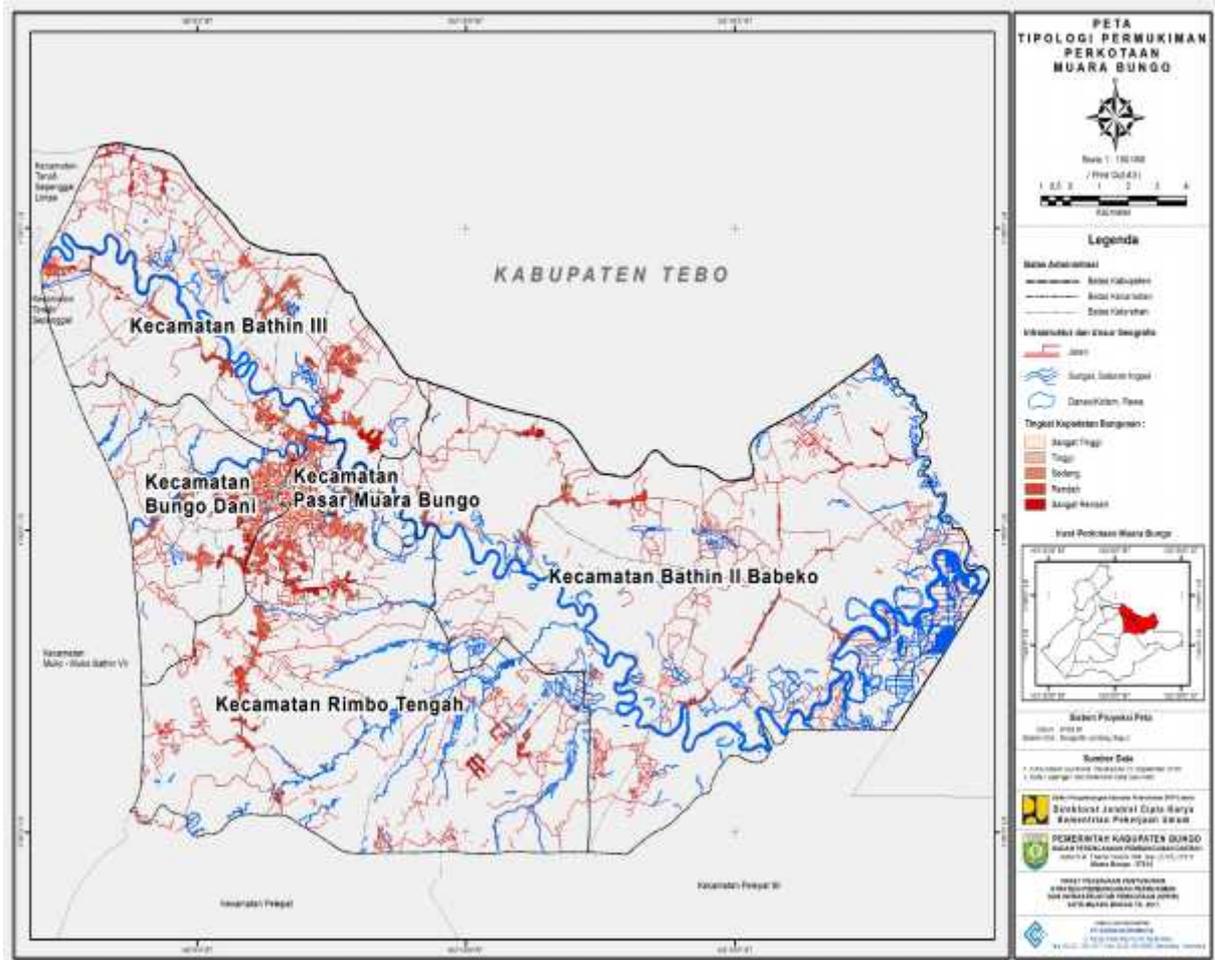
i.

Tabel 3 - 4.
Perkiraan Kebutuhan Rumah dan Kebutuhan Ruangnya
Di Kota Muara Bungo Sampai Tahun 2031

No	Tahun Proyeksi	Jumlah Penddk	Jumlah Rumah	Kebutuhan (Unit)			Kebutuhan Ruang (Ha)		
				Type Besar	Type Sedang	Type Kecil	Type Besar	Type Sedang	Type Kecil
1	2011	100.815	20.163	2.016	6.048	12.096	10,08	242,0	362.9
2	2016	116.602	23.320	2.332	6.996	13.982	11,66	279,8	419.8
3	2021	135.183	27.036	2.704	8.112	16.224	13,52	324,4	486.7
4	2026	153.372	30.674	3.067	9.201	18.402	15,34	368,1	552.1
5	2031	173.165	34.633	3.463	10.389	20.778	17,32	415,6	623.4

Sumber : Hasil Perhitungan Proyeksi

Gambar 3 - 7.
Peta Tipologi Permukiman Kawasan Perkotaan Muara Bungo



3.3.5. Arah Pengembangan Perdagangan dan Jasa

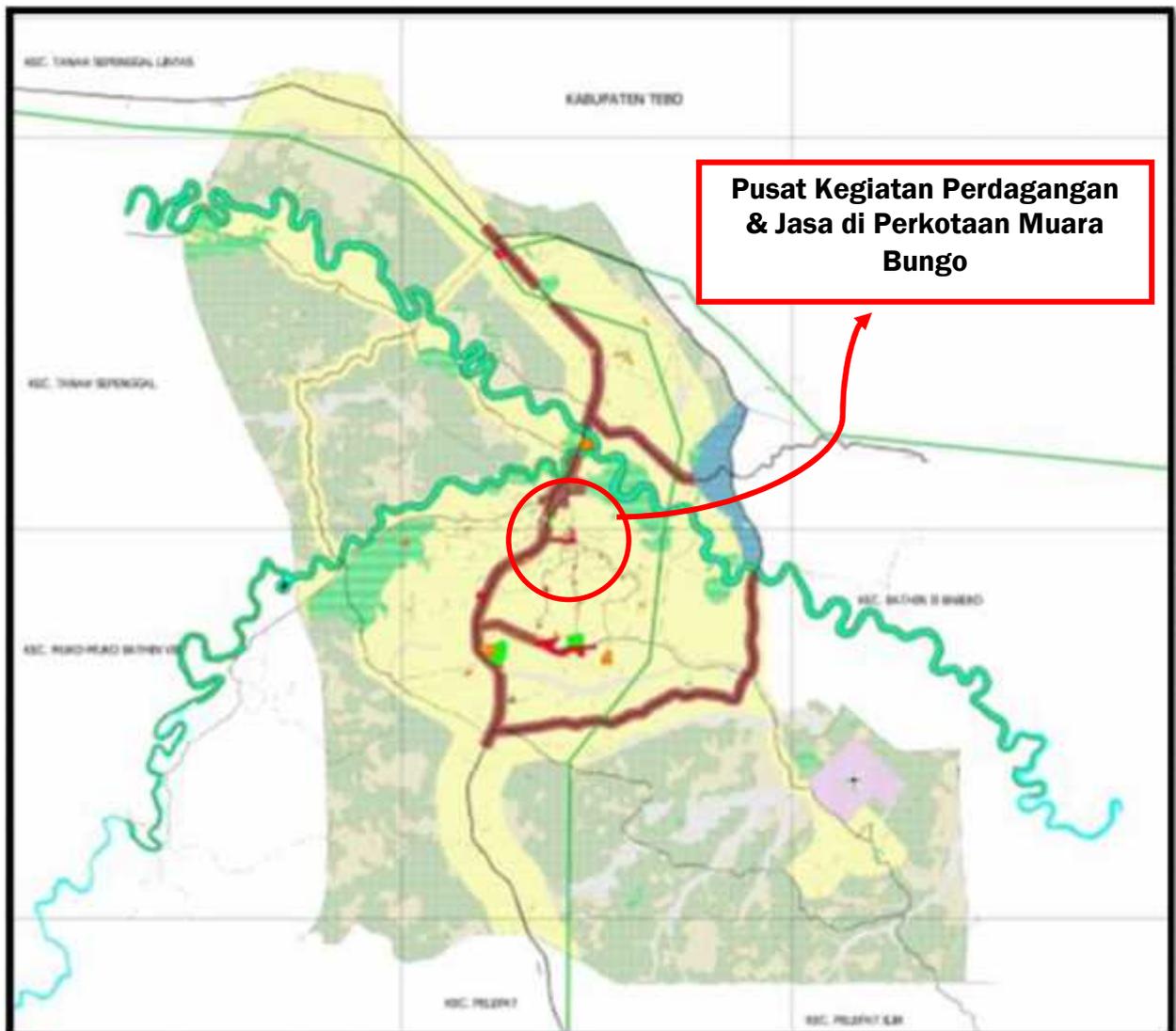
Kebutuhan akan sarana perdagangan dan jasa ekonomi pada masa yang akan datang yaitu tahun 2012-2031, untuk fasilitas pasar skala pelayanan kota dibutuhkan 1 unit di kawasan pusat kota, sedangkan untuk pasar grosir/pasar induk dibutuhkan 1 buah yang dialokir di Kecamatan Bathin III (Sub BWK C2), Pasar harian 3-4 unit yang berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo, pertokoan yang meliputi 29-48 unit yang menyebar di setiap kecamatan, dan warung meliputi 285-477 unit, yang tersebar di setiap kelurahan dan atau desa. Rincian kebutuhan fasilitas untuk menunjang perekonomian di Kota Muara Bungo sampai dengan tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 3 - 5.

Tabel : 3 - 5.
Kebutuhan Fasilitas Perdagangan Di Kota Muara Bungo Tahun 2012-2031

No	Tahun	Jumlah Penddk (jiwa)	Psr Induk/Grosir		Pasar Kota		Pasar Harian		Pertokoan		Warung	
			Stand.Pe ndk Penduku ng	Luas Lahan (m2)	Stand.Pe ndk Penduku ng	Luas Lahan (m2)	Stand. Pendk Pendu kung	Luas Lahan (m2)	Stand. Pendk Pendu kung	Luas Lahan (m2)	Stand. Pendk Pendu kung	Luas Lahan (m2)
			240.000	96.000	120.000	20.000	30.000	13.500	2.500	1.200	250	100
1	2012	100.815	1	96.000	1	20.000	3	40.500	40	48.000	403	40.300
2	2016	116.602	1	96.000	1	20.000	3	40.500	46	55.200	466	46.600
3	2021	135.183	1	96.000	1	20.000	4	54.000	54	64.800	541	54.100
4	2026	153.372	1	96.000	1	20.000	5	67.500	61	73.200	614	61.400
5	2031	173.165	1	96.000	1	20.000	6	81.000	69	82.800	693	69.300

Sumber : Hasil Perhitungan Proyeksi

Gambar : 3 - 8.
Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Perkotaan Muara Bungo



3.3.6. Arahana Pengembangan Utilitas Kota

1. Rencana Pengembangan Air Bersih

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, penduduk di Kota Muara Bungo telah terlayani melalui sistem perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan memanfaatkan sumber dari air tanah.

Pengelolaan air minum di Kota Muara Bungo dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago yang berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Perda No.2/1993. Saat ini PDAM Pancuran Telago mempunyai sistem penyediaan air bersih untuk kabupaten Bungo dengan kapasitas sebesar 142,5 lt/det, dengan total sambungan rumah (SR) sebanyak 4.000 sambungan.

Sumber air baku yang digunakan untuk system penyediaan air minum berasal dari air permukaan berupa sungai dan embung serta air tanah.

Saat ini PDAM Pancuran Telago Kabupaten Bungo dalam melayani kebutuhan air bersih di Kabupaten Bungo memiliki instalasi pengolahan air (IPA) dengan kapasitas terpasang 100 lt/det, 20 lt/det, 5 lt/det, dan 2,5 lt/det.

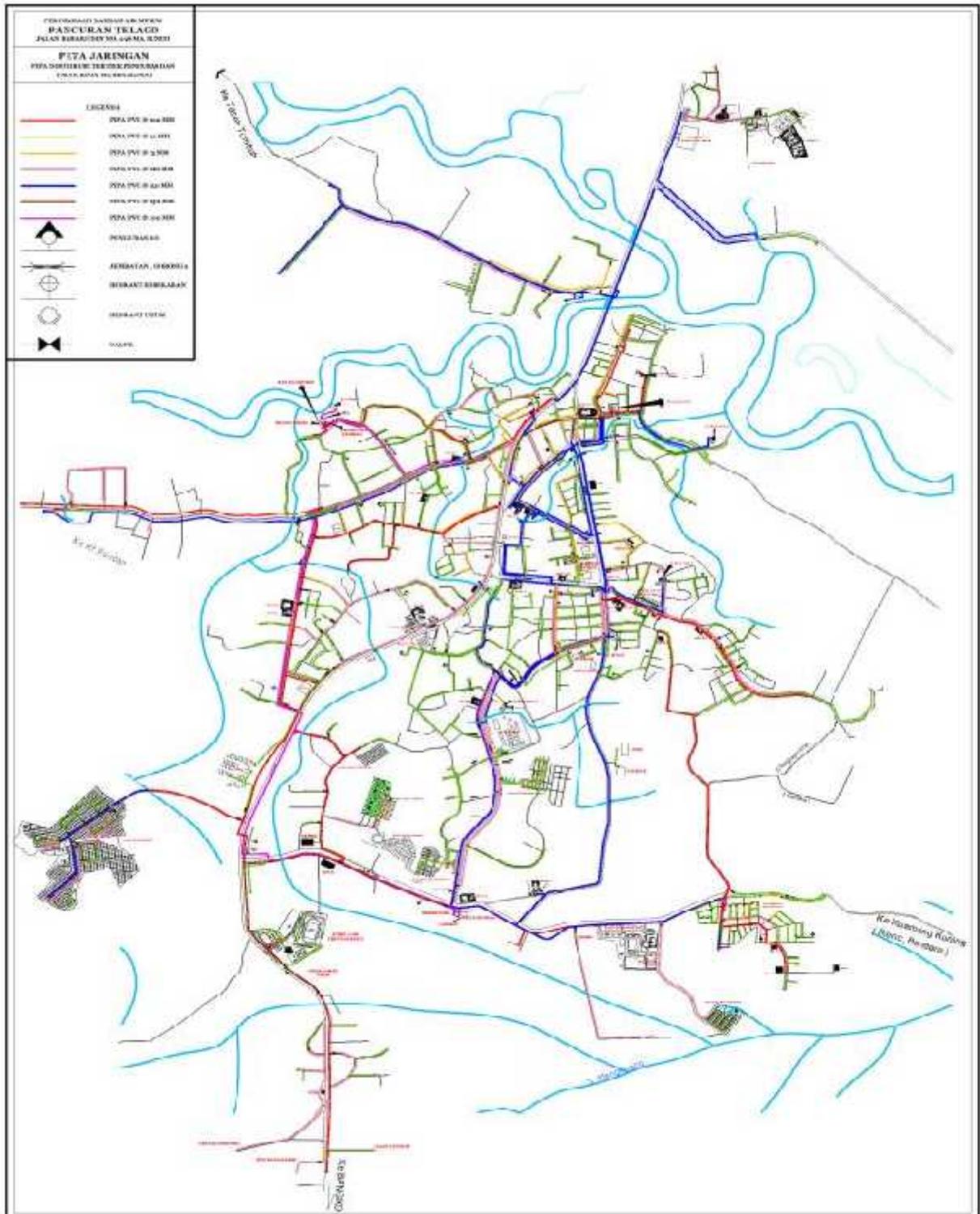
Instalasi Pengolahan Air yang terdapat di Kabupaten Bungo ada yang sudah tidak berfungsi karena mengalami kerusakan yang disebabkan umur teknis sehingga proses pengolahan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada tabel 3 - 6 disajikan sistem dan kapasitas unit instalasi pengolahan air yang ada di Kabupaten Bungo saat ini.

Tabel 3 - 6.
Kondisi Instalasi Pengolahan Air di Kabupaten Bungo

Kecamatan	Kapasitas (lt/det)	Kondisi
Muara Bungo	100	Baik
Rantau Pandan	20 dan 2,5	20 proses fisik, 2,5 rusak
Pelepat Ilir (Kuamang Kuning)	5	Proses fisik
Tanah Tumbuh	2,5	Rusak
Limbur Lubuk Mengkuang	2,5	Baik
Jujuhan	5 dan 2,5	5 baik, 2,5 baik dan 2,5 rusak

Sumber : PDAM "Pancuran Talago" Kabupaten Bungo.

Gambar 3 - 9.
Peta Jaringan Pipa Distribusi Tertier Penguras dan Valve Kota Muara Bungo



Sumber: PDAM Pancuran Talago Kabupaten Bungo

Diperkirakan tingkat kebocoran PDAM Pancuran Telago saat ini cukup tinggi yaitu sekitar 37%. Hal ini disebabkan antara lain :

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo - 2011

1. Sistem pengaliran yang belum 24 jam (intermittent), sehingga sering terjadi kebocoran akibat pecahnya pipa transmisi dan distribusi.
2. Pipa transmisi dan distribusi masih banyak yang berada dibawah badan jalan dimana kondisi pipa mudah pecah apabila dilalui kendaraan berat.
3. Instalasi sambungan rumah yang kurang sempurna dan sudah lama sehingga konsumen dengan mudah melakukan pencurian air.

Bila ditinjau dari permasalahan, system penyediaan air minum di Kabupaten Bungo mempunyai beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber air baku yang pada musim kemarau berkurang serta kualitas air terpengaruh oleh aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
2. Terbatasnya daya listrik dari PLN.
3. Terbatasnya jaringan pipa transmisi dan distribusi.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana laboratorium.
5. Terbatasnya anggaran untuk menekan angka kehilangan air (NRW).
6. Ketersediaan SDM yang kurang mampu mendukung operasional dan program PDAM.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan system penyediaan air minum di Kabupaten Bungo diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Membuat kebijakan yang melindungi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai sumber air baku untuk penyediaan air minum di Kabupaten Bungo.
2. Penggantian beberapa material yang sudah tidak layak pakai pada Instalasi Pengolahan Air, sehingga proses pengolahan air menjadi maksimal sesuai yang diharapkan.
3. Penyesuaian tariff sehingga biaya produksi dapat teratasi.
4. Pembangunan sarana laboratorium yang merupakan sarana penunjang agar proses pengolahan pada unit produksi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis dan kualitas air yang dihasilkan dapat dipantau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

5. Perlu adanya Pelatihan teknis terhadap karyawan PDAM sehingga operasional dapat berjalan dengan baik.

Di dalam perencanaan sistem jaringan air bersih Kota Muara Bungo ini, untuk menambah kapasitas pelayanan sampai akhir tahun perencanaan yang memerlukan debit penambahan sebesar 136,22 liter/det akan diambil dari sumber air permukaan yang sudah ada yaitu sungai. Air permukaan sungai ini merupakan sumber air bersih yang saat ini digunakan oleh PDAM Pancuran Telago untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Muara Bungo.

A. Alternatif Sistem Sumber Air Baku

Sumber air baku yang direncanakan untuk system penyediaan air bersih Kota Muara Bungo berdasarkan potensi sumber yang dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat hingga akhir tahun perencanaan adalah air permukaan dan air tanah. Hal tersebut berdasarkan data sumber air yang ada pada daerah rencana serta hasil kunjungan lapangan pada beberapa lokasi di Kota Muara Bungo yang melihat kemampuan sumber secara :

1. Kuantitas sumber air

Dimana debit sumber yang ada dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum yang harus lebih besar dari debit maksimum pemakaian air per hari agar ketersediaan air selalu ada.

2. Kualitas sumber air

Diupayakan kualitas air yang cukup baik, sehingga dapat dilakukan pengolahan sederhana untuk menekan besarnya biaya operasional.

3. Lokasi sumber air

Sumber air yang akan dimanfaatkan sebagai air baku diutamakan yang dekat dengan daerah pelayanan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menekan biaya serta kemudahan operasi dan pemeliharaan.

B. Rekomendasi Sistem Yang Dipilih

Berdasarkan kajian teknis dan ekonomis, untuk keperluan sistem, sumber air bakunya adalah sungai, karena selain debit sungai yang besar, biayanya relatif murah (dekat dengan daerah pelayanan).

Sistem penyediaan air bersih terdiri dari :

1. **Intake** : Adalah bangunan tempat pengambilan air dari sumber (sungai), dengan dasar-dasar perencanaan sebagai berikut :
 - a. Kapasitas pengambilan disesuaikan dengan debit pengambilan sumber air baku.
 - b. Bangunan intake yang digunakan adalah bangunan statis di tepi sungai pada daerah aliran tempat yang lurus,
 - c. Pengambilan air baku dari sungai dilakukan dengan system pemompaan, menggunakan pompa jenis submersible non-clogging.
2. **Instalasi Pengolahan Air** : Dari intake air baku dialirkan (cara pemompaan) menuju instalasi pengolahan air. Proses pengolahan dilakukan dengan cara konvensional yang terdiri dari koagulasi/flokulasi, sedimentasi, filtrasi, netralisasi dan desinfeksi.
3. **Reservoir** : Air yang telah diolah, dialirkan menuju reservoir (ground reservoir) distribusi yang berfungsi mengatasi fluktuasi pemakaian air.
4. **Distribusi** : Air didistribusikan ke konsumen melalui pipa distribusi yang dipasang dengan system cabang.
5. **Sambungan Pelayanan** : Jenis sambungan yang akan digunakan, yaitu sambungan rumah.

2. Rencana Pengelolaan Limbah Domestik

A. Limbah Cair Domestik

Jaringan penyaluran limbah cair adalah sarana untuk menyalurkan air bekas aktivitas yang berasal dari berbagai aktivitas baik limbah cair domestik maupun non domestik. Kegiatan dan aktivitas yang ada di

wilayah perencanaan terus berkembang sehingga sistem pengelolaan limbah cair bagi satu wilayah sangatlah penting. Hal ini didasarkan atas beberapa faktor :

- Semakin bertambahnya kuantitas air buangan sesuai dengan perkembangan penduduk dan peningkatan kondisi sosial ekonomi.
- Semakin buruknya kualitas buangan sebagai akibat peningkatan aktivitas manusia.
- Kemungkinan adanya pencemaran terhadap badan air penerima.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dan pengolahan limbah cair adalah :

1. Jenis dan Kapasitas Limbah Cair

Limbah cair domestik wilayah perencanaan terdiri dari air bekas (air bekas mandi, cuci dan lainnya) dan air kotor (air bekas yang berasal dari kamar mandi) dan timbulannya sebagian besar dari kawasan permukiman. Kapasitas air limbah yang dihasilkan adalah $\pm 80 \%$ dari jumlah air bersih yang dikonsumsi untuk domestik.

Limbah cair non domestik berasal dari air bekas produksi industri atau pabrik dan lainnya, jenis limbah cair dan jumlah limbahnya pun beragam tergantung kepada jenis industri dan kapasitas produksi.

2. Sistem Pengumpul dan Penyaluran

Sistem pengumpul limbah cair umumnya digunakan pipa atau sistem rioolering, dalam sistem penyaluran limbah cair dapat digunakan 2 (dua) sistem penyaluran yaitu penyaluran tercampur dan penyaluran terpisah, pada sistem penyaluran tercampur limbah cair domestik yang berasal dari air bekas cuci dan air hujan disalurkan melalui satu saluran. Sedangkan pada saluran terpisah, limbah cair domestik (air bekas dan air kotor) disalurkan terpisah dengan air hujan.

Penggunaan sistem pengumpul dan penyalur air limbah harus terpisah, hal ini disebabkan kualitas dan kuantitas air limbah yang

dihasilkan dari berbagai aktivitas di Kota Muara Bungo memiliki kecenderungan bertambah sehingga membutuhkan treatment dan perlakuan khusus dalam pengelolaannya.

3. Sistem Pengolahan Limbah Cair

Sistem pembuangan air limbah di Kota Muara Bungo berupa air limbah domestik. Pengelolaan air limbah domestik umumnya dilakukan dengan menggunakan sistem sanitasi setempat (on site sanitation) berupa jamban, baik yang dikelola secara individu maupun secara komunal, yang dilengkapi dengan tangki septik atau cubluk.

Mengingat penyediaan WC yang dilengkapi tangki septik ini tidak semua golongan mampu menyediakannya karena harus tersedia lahan yang cukup luas, maka dalam pengadaanya dibutuhkan bantuan Pemerintah Daerah yang berupa penyediaan WC atau MCK Umum.

Penggunaan tangki septik ini diharapkan kotoran zat-zat organik yang diendapkan setelah beberapa waktu akan mengalami pembusukan yang tidak akan mencemari lingkungan.

Bila akan dibangun suatu fasilitas jamban komunal maka sebaiknya diterapkan pada kampung yang penduduknya berpenghasilan rendah khususnya :

1. Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi sehingga tidak tersedia tempat untuk fasilitas pembuangan setempat pribadi.
2. Penyediaan air bersih terbatas dan terutama bila sumur setempat tidak bias digunakan untuk keperluan rumah tangga (sebagai contoh tercemar atau payau), maka jamban umum dapat digabungkan dengan kran umum.
3. Kampung yang sudah mempunyai fasilitas jalan masuk untuk kendaraan penyedotan Lumpur tinja dalam jarak 50 meter.

Banyaknya unit jamban yang dianjurkan dalam fasilitas jamban komunal disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 - 7.
Banyaknya Unit Jamban Yang Dianjurkan Dalam Fasilitas Jamban Komunal

Fasilitas	Jumlah Pemakai	Banyaknya Jamban	
		Laki-laki	Wanita
Jamban keluarga dan MCK keluarga	25 – 35 jiwa (5 – 7 keluarga)	1	1
Jamban Jamak dan MCK Umum	Sampai 100 jiwa (s/d 20 keluarga)	3 (di daerah pemukiman), atau 1 + tempat buang air memanjang (di pasar dan terminal)	3

Sumber : Petunjuk Teknis Pengelolaan Air Limbah

Sebagai pelengkap dalam fasilitas jamban komunal ini dibangun suatu sistem tangki septik/bidang resapan. Tangki septik ini dapat dibangun untuk satu atau lebih keluarga, atau untuk umum. Mengenai besaran dan ukuran tangki septik yang bisa digunakan di suatu wilayah perencanaan berdasarkan jumlah jiwa dapat dilihat dalam Tabel 3 - 8 berikut ini.

Tabel 3 - 8. Ukuran Tangki Septik

No	Jumlah Pemakai (Jiwa)	Kebutuhan Ruang Lumpur (m ²)		Kebutuhan Ruang Basah (m ²)	Ruang Bebas Air (m ²)	Volume Total (m ²)		Ukuran (m)					
		2 tahun	3 tahun			2 tahun	3 tahun	2 tahun			3 tahun		
								P	L	T	P	L	T
1	5	0.4	0.6	1	0.25	1.65	1.85	1.60	0.80	1.30	1.70	0.85	1.30
2	10	0.8	1.2	2	0.50	3.30	3.70	2.20	1.10	1.40	2.30	1.15	1.40
3	15	1.2	1.8	3	0.75	4.95	5.55	2.60	1.30	1.50	2.75	1.35	1.50
4	20	1.6	2.4	4	1.00	6.60	7.40	3.00	1.50	1.50	3.20	1.55	1.50
5	25	2	3	5	1.25	8.25	9.25	3.25	1.60	1.60	3.40	1.70	1.60

Sumber : Standar SNI-T-08-1989

B. Pengolahan Lumpur Tinja

Alternatif lain yang diusulkan konsultan dalam rencana sistem jaringan air limbah di Kota Muara Bungo ini dengan menggunakan sistem Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT). Limbah yang masuk ke IPLT dapat melalui sistem perpipaan atau memakai sarana pengangkutan dengan memakai truk tinja.

Sistem jaringan pipa air limbah yang direncanakan akan melalui jalur jalan yang ada, dengan sistem jaringan mulai dari jaringan pipa air kotor primer, jaringan pipa air kotor sekunder, dan jaringan pipa air kotor tertier.

Dalam kaitannya dengan masalah sistem jaringan ini, maka dalam implementasi rencana tersebut perlu dilakukan upaya :

- a. Penyuluhan kepada penduduk dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan dengan menghilangkan kebiasaan untuk membuang kotorannya di sembarang tempat. Sebagai konsekuensinya penduduk diharapkan untuk membangun sendiri sarana sanitasi di tempat tinggalnya masing-masing serta pembangunan utilitas MCK untuk penduduk di daerah padat atau penduduk golongan ekonomi lemah.
- b. Penyediaan kendaraan pengangkut tinja untuk membersihkan dan menguras lumpur tinja pada tangki septik yang sudah penuh.
- c. Monitoring untuk memantau pengelolaan air limbah domestik, serta kualitas dan kuantitas badan-badan air yang ada di perkotaan.

3. Rencana Pengelolaan Persampahan

Saat ini secara Nasional hanya 40 % dari sampah kota yang terlayani oleh fasilitas umum, sisanya dimusnahkan/dibuang dengan cara yang tidak sehat seperti : dibakar, dibuang ke sungai atau ke lahan terbuka. Rendahnya tingkat pelayanan tersebut telah mengakibatkan tingkat pencemaran air, udara dan tanah melampaui baku mutu lingkungan.

Pengelolaan sampah di Kota Muara Bungo saat ini tidak jauh berbeda dengan uraian di atas, pada umumnya dalam pengelolaan sampah penduduk masih menggunakan dengan cara tradisional yaitu dengan cara dibakar atau langsung dibuang ke sungai.

Produksi sampah di Kota Muara Bungo dihasilkan dari berbagai macam aktifitas seperti perumahan, pasar, pertokoan, sekolah, fasilitas sosial, dan lain-lain. Perkiraan produksi sampah yang dihasilkan di Kota Muara Bungo sampai pada akhir tahun 2031, dengan asumsi setiap orang menghasilkan sampah 2,5 l/hari dapat dilihat dalam Tabel 3 - 9 berikut ini.

Tabel 3 - 9. Perkiraan Volume Sampah Tahun 2011 – 2031

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Perkiraan Volume Sampah (m ³ /hari)
1	2011	100.815	252,04
2	2016	116.602	291,51
3	2021	135.183	337,95
4	2026	153.372	383,43
5	2031	173.165	432,92

Sumber : Hasil Analisa Proyeksi

Meskipun saat ini Kota Muara Bungo termasuk dalam kelompok kota kecil, karena mempunyai jumlah penduduk kurang dari 100.000 jiwa namun masalah sampah perlu pengelolaan dengan sistem yang tepat, sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan penghuni maupun penduduk disekitarnya atau berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sistem pengelolaan sampah yang akan dikembangkan tidak lagi berdasarkan konsep pengelolaan konvensional; kumpul – angkut – buang, tetapi menitik beratkan kepada upaya memperpanjang umur penggunaan barang dan bahan sebelum dibuang sebagai sampah. Upaya tersebut lebih dikenal dengan 3 R (Reduce= Mereduksi produksi sampah/ mengurangi timbunan sampah, Reuse = Menggunakan kembali barang yang telah digunakan,

Recycling = Memanfaatkan kembali barang yang telah digunakan untuk kepentingan lain/daur ulang).

Pelaksanaan pengelolaan sampah dengan menggunakan sistem 3 R, menuntut peran aktif baik dari penghasil sampah, maupun pengelola sampah, karena pada dasarnya dalam mengelola sampah, kegiatan pengurangan volume sampah dan pemilahan sampah awal dilakukan pertama kali oleh penghasil sampah sejak barang diproduksi sampai dikonsumsi dan kemudian sisanya dilakukan oleh pengelola sampah.

4. Rencana Pengembangan Drainase

Pengelolaan sistem drainase di Kawasan Kota Muara Bungo saat ini belum maksimal, cenderung bersifat parsial dan seadanya serta sistem drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai akibat dari tidak sesuainya dimensi saluran yang ada dengan lebar jalan dan kapasitas air limbah yang masuk ke saluran drainase, dan sebagian lokasi tidak mempunyai sistem drainase. Sehingga mengakibatkan terjadinya genangan di beberapa lokasi. Secara lebih rinci, masalah jaringan drainase adalah :

1. Pengelolaan sistem drainase di wilayah perencanaan belum maksimal, cenderung bersifat parsial dan seadanya serta sistem drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai akibat dari tidak sesuainya dimensi saluran yang ada.
2. Sebagian lokasi tidak mempunyai sistem drainase sehingga terdapat genangan air.
3. Sistem drainase baik saluran primer, sekunder maupun tersier tidak terpelihara dengan baik, dimana terdapat tumpukan sampah, serta terjadi pendangkalan akibat endapan tanah/Lumpur.

Rencana sistem drainase yang diusulkan, terlebih dahulu disusun Master plan Drainase Kota yang mencakup 5 wilayah Kecamatan, yang akan menjadi acuan penanganan drainase secara menyeluruh dan komprehensif. Penanganan mndesak lebih diutamakan pada beberapa lokasi yang sering tergenang dengan waktu yang relatif lebih lama.

Alternatif penanganan yaitu dengan dibuatkan saluran baru, yang menghubungkan saluran yang terputus dengan saluran baru, sehingga aliran pembuangan sampai ke pembuangan akhir (*out fall*).

Saluran yang direncanakan menggunakan saluran terbuka karena selain memudahkan kontrol dan perawatan, juga ketersediaan lahan masih relatif cukup.

Ditinjau dari bentuknya, pada umumnya saluran terbuka terdiri dari 2 macam saluran yaitu :

a. Saluran berbentuk segi empat

Saluran berbentuk segi empat lebih cocok digunakan pada daerah padat (kurang lahan) dan mempunyai debit relatif kecil.

b. Saluran berbentuk trapesium

Saluran trapesium lebih banyak digunakan untuk daerah yang kurang padat (cukup banyak lahan). Type ini bisa untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang.

Dengan mengacu pada uraian diatas dengan menyesuaikan bentuk saluran yang sudah ada maka, bentuk saluran terbuka yang direncanakan, yaitu bentuk saluran trapesium digunakan pada daerah yang cukup lahan (kurang padat) dan bentuk saluran segiempat digunakan untuk daerah yang kurang lahan (padat).

5. Rencana Pengembangan Jaringan Listrik

Sistem jaringan listrik merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan sarana penerangan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada saat ini jaringan listrik di Kota Muara Bungo sudah dapat melayani seluruh kelompok pemukiman yang ada. Untuk rencana masa mendatang hanya perlu peningkatan pelayanannya.

Rencana pengembangan jaringan listrik di Kota Muara Bungo diprioritaskan untuk melayani wilayah permukiman baru serta dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan kota dan terpadu dengan

pengembangan jaringan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk dalam hal penerangan, maka pada rencana pengembangan Kota Muara Bungo ini harus diikuti pula dengan rencana penerangan listrik dari PLN.

Sesuai dengan misi PLN sendiri bahwa 75 tahun Indonesia merdeka penerangan listrik akan mencapai 100 % dari total penduduk di wilayah nusantara ini. Dengan demikian rencana penerangan listrik dari PLN harus mencapai lebih 50 % dari penduduk kota Muara Bungo. Rencana pengembangan sistem jaringan penerangan dari PLN ini akan mengikuti jaringan jalan, karena selain tidak menimbulkan kesemrawutan, juga dimaksudkan untuk mengarahkan pada perkembangan kota.

Untuk penanganan dibawah SUTT atau SUTET mengacu pada Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET untuk penyaluran tenaga listrik. Ruang bebas adalah ruang di sekeliling kawat (penghantar) yang dibentuk oleh jarak bebas minimum di sepanjang SUTT atau SUTET. Jarak minimum tersebut adalah jarak terpendek antara penghantar SUTT atau SUTET dengan permukaan tanah atau benda-benda dan kegiatan lain di sekitarnya. SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) telanjang di udara dengan tegangan antara 35 – 245 kv. SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) telanjang di udara dengan tegangan di atas 245 kv.

Bab 4

IDENTIKASI POTENSI DAN PERSOALAN PEMBANGUNAN

4.1. Identifikasi Potensi Dan Persoalan Pembangunan Kota

Identifikasi potensi dan persoalan pembangunan kota menekankan pada bidang permukiman dan infrastruktur. Dalam identifikasi ini selain diuraikan potensi dan persoalan juga dijelaskan tentang peluang pembangunan serta tantangan pembangunan. Dengan adanya identifikasi ini diharapkan menjadi masukan dalam perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Secara lebih rinci identifikasi potensi, persoalan, peluang dan tantangan dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dapat dilihat pada tabel 4 -1 berikut ini.

Tabel: 4-1
Potensi dan Persoalan Pembangunan Kota Muara Bungo

No	Aspek	Potensi	Permasalahan	Peluang Pembangunan	Tantangan Pembangunan
1	Pembangunan Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regional dan Nasional (jalur Padang – Muara Bungo - Bangko dan Muara Bungo - Jambi) 2. Pertumbuhan penduduk sangat tinggi, di atas 3 % pertahun 3. Kota Muara Bungo berada pada jalan Arteri Primer Jalan Raya Lintas Sumatera, yang merupakan bagian dari sistem jaringan Jalur Nasional di Pulau Sumatera/ Trans Sumatera. 4. Kota Muara Bungo didukung oleh jaringan transportasi darat (jaringan Jalan, dan Bandara yang akan segera dioperasikan pada tahun 2012). 5. Masih banyak mempunyai wilayah kosong yang dapat dikembangkan untuk wilayah perkotaan Kota Muara Bungo (fasilitas, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan lahan perkotaan terbatas dan harga semakin tinggi 2. Kapasitas Jalan Arteri Primer Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera yang melewati Kota Muara Bungo (JALUR Padang – Bangko) kurang memadai, belum ada median jalan, trotoar, landscape jalan, dll sehingga sering terjadi hambatan arus lalu lintas di wilayah kota. 3. Adanya konsentrasi pemanfaatan lahan perkotaan pada kawasan tertentu (Pusat Kota), dan kawasan sekitar jalan lintas Sumatera, sehingga perlu adanya keseimbangan pemanfaatan lahan perkotaan pada kawasan - kawasan lain yang masih berpeluang besar untuk dikembangkan, untuk mendukung perkembangan kota yang lebih merata. 4. Belum adanya sistem layanan transportasi massal perkotaan yang murah dan menjangkau ke seluruh bagian wilayah kota (sementara ini dilayani ojek yang relatif mahal) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layak dikembangkan bangunan vertikal untuk menghemat lahan kota yang terbatas dan makin mahal. 2. Telah terbangunnya jaringan jalan lingkaran kota dan Bandara Muara Bungo. 3. Kota Muara Bungo dilalui Jalan Arteri Primer jalur Jalan Raya Lintas Timur Sumatera, sehingga memberikan peluang sebagai Kota Transit. 4. Ditetapkannya Kota Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Propinsi Jambi bagian Barat dan segera dimantapkannya posisi dan Fungsi Kota Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Pulau Sumatera, maka Kota Muara Bungo memiliki peluang besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan kota semakin tinggi dan semakin kompleks 2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk memenuhi tuntutan kebutuhan layanan perkotaan yang semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk yang cepat, dan derasnya arus pendatang baru, baik yang menetap maupun menetap sementara. 3. Masih banyak bagian-bagian wilayah perkotaan yang belum berkembang, sementara prasarana kawasan sudah mulai disediakan 4. Masih dominannya fungsi aliran sungai yang sebagai induk drainase, dan belum dimanfaatkan untuk kegiatan lain sebagai pendukung layanan perkotaan, seperti

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

No	Aspek	Potensi	Permasalahan	Peluang Pembangunan	Tantangan Pembangunan
		<p>sarana dan prasarana perkotaan)</p> <p>6. Berada pada lahan dengan topografi relatif datar, sehingga mudah dikembangkan sebagai wilayah perkotaan baik untuk permukiman, fasilitas maupun untuk sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>7. Kota Muara Bungo dilalui aliran sungai besar yang dapat dikembangkan sebagai kota pinggir sungai (Water Front City) yang menjanjikan di masa yang akan datang.</p>	<p>menjadikan beban ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat</p> <p>5. Pusat – pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota yang dikembangkan kurang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai.</p> <p>6. Terdapat kendala dengan pengembangan lahan permukiman akibat lahan yang masih kosong umumnya berupa cekungan dan perbukitan.</p> <p>7. Adanya sebagian kawasan yang rawan genangan akibat luapan air sungai (terutama pada musim hujan).</p> <p>8. Keterbatasan sumber air baku untuk mengembangkan layanan air bersih.</p>	<p>untuk mengembangkan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sesuai dengan fungsi yang diemban tersebut.</p> <p>5. Mulai banyaknya penduduk pedatang yang menetap dan melakukan kegiatan ekonomi, serta investor yang menanamkan investasinya di Kota Muara Bungo atau di sekitarnya akan semakin membangkitkan kegiatan ekonomi wilayah ini.</p>	<p>pembangkit listrik, wisata sungai, taman kota di bantaran sungai, sebagai sumber air baku untuk pelayanan air bersih, baik untuk keperluan rumah tangga maupun kegiatan lain seperti kegiatan industri dan lain sebagainya, dan belum dikembangkannya Kota Pinggir Sungai (Water Front City) yang menjanjikan dan layak jual di masa yang akan datang.</p> <p>5. Perlu penataan jalur jalan utama dalam kota khususnya ruas jalan lintas Padang – Bangko yang berada di dalam kota Muara Bungo, mulai pembangunan median jalan, trotoar, pemisahan jalur kendaraan besar dan kendaraan kecil, demi kelancaran, kenyamanan, keamanan dan keselamatan sesama pengguna jalan.</p>
2	Pembangunan Permukiman	<p>1. Terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan permukiman.</p>	<p>1. Lahan permukiman berpotensi genangan / banjir akibat air hujan</p> <p>2. Pengembangan perumahan skala besar terkendala adanya lahan perkebunan kelapa sawit dan karet.</p>	<p>1. Adanya pengembang perumahan yang akan membangun perumahan di Perkotaan Muara Bungo.</p>	<p>1. Terjadinya air genangan / banjir yang dapat menggenangi area permukiman</p>

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

No	Aspek	Potensi	Permasalahan	Peluang Pembangunan	Tantangan Pembangunan
		<ol style="list-style-type: none">2. Kepadatan penduduk tergolong masih sedang dan rendah3. Umumnya kepadatan bangunan termasuk dalam kategori sedang dan rendah4. Aksesibilitas daya hubung permukiman cukup mudah5. Jarak jangkauan permukiman dengan pusat kota mempunyai radius yang relatif cukup dekat	<ol style="list-style-type: none">3. Terdapat permukiman padat di sekitar pusat kota4. Terdapat permukiman yang padat dan cenderung kumuh di wilayah sekitar bantaran sungai.5. Masih terdapat rumah-rumah yang tidak layak huni	<ol style="list-style-type: none">2. Bantuan pemugaran/renovasi rumah dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, lembaga sosial maupun bantuan dari luar.3. Bantuan penataan perumahan terhadap kawasan permukiman yang tidak teratur	<ol style="list-style-type: none">2. Adanya air hujan yang dapat menggenangi wilayah permukiman
3	PembangunanInfrastruktur a. Jalan lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Kondisijalan lingkungan di wilayah perkotaan umumnya cukup baik2. Lebar jalan lingkungan di komplek pertokoan cukup memenuhi untuk lalu lintas kendaraan3. Umumnya jalan lingkungan terhubung dengan jalan utama4. Terdapat lahan yang masih kosong untuk pembuatan jalan akses baru	<ol style="list-style-type: none">1. Masih banyak dijumpai jalan lingkungan yang rusak di wilayah Perkotaan Muara Bungo dan jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar2. Sebagian Jalan didaerah perumahan hanya ada satu sisi drainase saja, sehingga berpotensi menimbulkan genangan disisi jalan yang tidak ada drainasenya yang mengakibatkan kerusakan jalan.3. Fasilitas jalan seperti penerangan masih sedikit. Material atau bahan pembuat jalan yang mudah didapatkan disekitar Perkotaan Muara Bungo.	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya bantuan pembangunan/peningkatan jalan lingkungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, lembaga sosial2. Integrasi jaringan jalan lingkungan dengan Jalan Lokal, Jalan Kolektor dan Jalan Arteri	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya genangan air pada jalan lingkungan, sehingga menyebabkan jalan rusak2. Adanya beban kendaraan yang terlalu berat, sehingga menyebabkan jalan cepat rusak3. Sebagian tanah dasar untuk jalan lunak, sehingga memerlukan biaya yang cukup tinggi

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

No	Aspek	Potensi	Permasalahan	Peluang Pembangunan	Tantangan Pembangunan
	b. Drainase	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat jaringan drainase di wilayah permukiman perkotaan2. Jaringan drainase telah terhubung dengan drainase utama3. Telah terdapat Masterplan jaringan drainase Kota Muara Bungo	<ol style="list-style-type: none">1. Terjadi penyempitan badan saluran drainase2. Banyaknya sampah dan sedimentasi pada badan saluranKurang adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase	<ol style="list-style-type: none">1. Penataan sistem jaringan drainase secara terpadu2. Integrasi sistem drainase dengan wilayah sekitar Kota Muara Bungo3. Adanya bantuan pembangunan/ peningkatan saluran drainase dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, lembaga sosial maupun bantuan dari luar negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya potensi luapan banjir dari sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Muara Bungo2. Terjadinya hujan yang deras, mengakibatkan kapasitas saluran drainase tidak mampu menampung air hujan, sehingga terjadi genangan.
	c. Air Bersih	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat jaringan air bersih dari PDAM2. Terdapat sumber air di wilayah Kab. Bungo yang dapat dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih untuk peningkatan dan perluasan jangkauan layanan kepada masyarakat perkotaan3. Pertumbuhan penduduk dan bangunan yang tinggi semakin banyak dan terus meningkat yang membutuhkan layanan air bersih	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kemungkinan kebocoran air perpipaan2. Kualitas air bersih masih perlu ditingkatkan3. Kuantitas dan kontinuitas kapasitas produksi air bersih masih terbatas4. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan pelayanan air bersih perkotaan3. Semakin tingginya animo masyarakat mengkonsumsi air kemasan4. Banyak masyarakat yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air bersih (dengan membuat sumur gali, sumur bor dan sejenisnya)	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kemungkinan kerjasama pengelolaan air bersih dengan wilayah kecamatan sekitar Kota Muara Bungo2. Adanya peluang bantuan pembangunan/ peningkatan jaringan air bersih dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, lembaga sosial maupun bantuan dari luar negeri3. Kerjasama dengan lembaga lembaga lingkungan dalam pengelolaan air bersih	<ol style="list-style-type: none">1. Terjadinya pencemaran terhadap sumber baku untuk air bersih2. Adanya kemungkinan kerusakan jaringan air bersih akibat penggalian tanah untuk bangunan, kegiatan lain, dan umur jaringan

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

No	Aspek	Potensi	Permasalahan	Peluang Pembangunan	Tantangan Pembangunan
				4. Pelayanan air bersih masih terbatas, baru 14 % untuk tingkat Kabupaten, dan 40 % untuk skala Kota Muara Bungo, sehingga masih banyak yang membutuhkan pelayanan air bersih sekaligus sebagai peluang bisnis investasi bagi PDAM.	
	d. Air Limbah	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagian penduduk membuang limbah cair ke saluran drainase2. Umumnya penduduk membuang limbah padat (tinja manusia) ke tempat septic tank3. Tersedia Prasarana penanganan air limbah (truk tinja)	<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah2. Tidak semua bangunan rumah tangga mempunyai prasarana dan sarana air limbah3. Sebagian masyarakat membuang limbah cair maupun limbah padat langsung ke sungai4. Belum ada IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja) terpusat dan IPAL (Instalasi Pengolahan limbah) di Kota Muara Bungo Masyarakat belum biasa memanfaatkan jasa pengurusan septic tank secara periodek misalnya 5 tahun sekali	<ol style="list-style-type: none">1. Kerjasama dengan lembaga lembaga lingkungan dalam pengelolaan air limbah perkotan2. Adanya bantuan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, lembaga sosial maupun bantuan dari luar negeri Dimungkinkan adanya kerjasama dengan wilayah disekitar Kota Muara Bungo dalam penyediaan lahan lokasi pengelolaan air limbah	<ol style="list-style-type: none">1. Terjadi pencemaran lingkungan terhadap pengelolaan air limbah2. Timbulnya dampak lingkungan akibat pencemaran air limbah

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

No	Aspek	Potensi	Permasalahan	Peluang Pembangunan	Tantangan Pembangunan
				perkotaan	
	e. Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sarana dan prasarana sampah seperti armada, bak sampah, TPS dan TPA 2. Sebagian penduduk perkotaan telah mendapat pelayanan sampah 3. Sebagian penduduk yang memiliki pekarangan luas, mengelola sampah rumah tangga dan sampah pekarangan dengan ditimbun di dalam tanah dan sebagian dibakar di pekarangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sampah masih terbatas, belum menjangkau seluruh wilayah 2. Produksi timbulan ada sebagian yang liar dan belum diwadahi, dan belum dipisah-pisah antara sampah organik dan non organik atau sampah padat dan sampah lainnya 3. Armada angkutan sampah terbatas 4. Perlu diterapkannya pengelolaan sampah dengan model 3 R (Re-just, Re-use dan Re-cycle) 5. Kapasitas TPA sekarang memiliki masa pemakaian terbatas dan lokasinya di dalam kawasan perkotaan, perlu Yang lebih perluas dan lokasinya jauh dari kawasan perkotaan Muara Bungo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bantuan pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana persampahan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, lembaga sosial maupun bantuan dari luar negeri 2. Masih dimungkinkan dimasyarakatkannya pengelolaan sampah secara mandiri bagi penduduk yang memiliki kavling/ pekarangan luas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu antisipasi timbulnya pencemaran lingkungan akibat pengelolaan persampahan dan peningkatan produksi sampah
4	Penataan Bangunan dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan bangunan di Perkotaan Muara Bungo 2. Tingginya animo kegiatan mendirikan bangunan dan ketersediaan lahan kosong masih cukup luas 3. Banyak kawasan strategis yang perlu disusun dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) seperti kawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar bangunan belum memiliki ijin bangunan 2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk identifikasi dan inspeksi pertumbuhan bangunan 3. Belum diterapkannya sistem terpadu pelayanan perijinan bangunan berbasis Geographic Information System/ sistem informasi geografi 4. Banyak pertumbuhan bangunan di kawasan yang belum terencana dan belum tertata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat untuk memiliki ijin bangunan semakin tinggi 2. Bisa menjadi sumber peningkatan pendapatan asli daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu antisipasi maraknya bangunan tanpa IMB

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

No	Aspek	Potensi	Permasalahan	Peluang Pembangunan	Tantangan Pembangunan
		Pusat Perdagangan, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Pingiran Sungai, Kawasan Sekitar Jalan Lintas, kawasan sekitar Bandara dan lain sebagainya	5. Sebagian besar kawasan belum disusun dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)		

4.2. Identifikasi Potensi Dan Persoalan Pembangunan Kawasan Prioritas

Identifikasi potensi dan persoalan pembangunan kota menekankan pada bidang permukiman dan infrastruktur. Dalam identifikasi ini selain diuraikan potensi dan persoalan juga dijelaskan tentang peluang pengembangan serta tantangan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada tingkat kawasan.. Dengan adanya identifikasi ini diharapkan menjadi masukan dalam perumusan strategi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Secara lebih rinci identifikasi potensi, persoalan, peluang dan tantangan dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dapat dilihat pada tabel 4-2 berikut ini.

. Tabel: 4-2

Potensi dan Persoalan Pembangunan Kota Pada Tingkat Kawasan Prioritas

1. Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo

No	Aspek	Potensi	Permasalahan
1	Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Letak permukiman dekat dengan pusat kota Aksesibilitas permukiman mudah dijangkau 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya permukiman di lahan cekungan, dekat danau dan sungai, serta rawan genangan
	Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> Air PDAM untuk keperluan minum dan masak Potensi pelanggan cukup tinggi Sudah terpasang pipa distribusi PDAM 	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat terjadi banjir/ genangan, sebagian besar instalasi air seperti meteran air, kran air dan bak penampung air PDAM tergenang Sebagian warga memanfaatkan air bawah tanah dengan membuat sumur gali
	Limbah	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang terus digalakkan oleh dinas terkait di tiap kelurahan Black water sudah dikelola berdasarkan on-site system 	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran sebagian warga untuk menjaga kebersihan relatif kurang Warga yang tidak memiliki lahan untuk membuat septiktank membuang Grey water langsung ke saluran terbuka Septik tank yang dibangun umumnya belum memenuhi standar teknis Septik tank individu belum pernah disedot selama lebih dari 5 tahun
	Sampah.	<ul style="list-style-type: none"> Sudah tersedia sarana TPS sederhana Sosialisasi PHBS serta program 3 R sampah perlu terus digalakkan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada warga yang membuang sampah ditempat terbuka Sarana pendukung pengelolaan sampah masih kurang Warga belum minat mengelola sampah dengan pola penanganan 3R. Masih banyak warga yang mengelola sampahnya sendiri dengan cara dibakar/ ditimbun terutama yang memiliki lahan pekarangan relatif luas
	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan drainase telah terhubung dengan drainase utama, sebagian masih drainase alam (tanah) Saluran drainase jalan lingkungan relatif kecil Kemiringan saluran drainase cukup 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi penyempitan badan saluran drainase Topografi wilayah relatif datar, air sulit mengalir sehingga terjadi genangan Banyaknya sampah dan sedimentasi pada saluran dan kekurangan cross drain Sebagian saluran drainase di wilayah padat penduduk ukurannya relatif kecil dan kurang lancar, ada genangan, dan banyak jentik-jentik nyamuk.
	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Lebar jalan lingkungan di kawasan padat penduduk dan padat bangunan relaif kurang memenuhi syarat dan hanya pas-pasan untuk dilalui lintas kendaraan roda 4 Umumnya jalan lingkungan terhubung dengan jalan utama 	<ul style="list-style-type: none"> Masih ditemui jalan yang rusak terutama didaerah padat penduduk Banyak ditemui jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar Sebagian jalan didaerah perumahan hanya ada satu sisi saluran samping jalan, berpotensi menimbulkan genangan disisi lain jalan mengakibatkan kerusakan jalan, sementara penerangan masih kurang

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo 2011

1. Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo

No	Aspek	Potensi	Permasalahan
1	Permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Letak permukiman dekat sekali / bahkan berada di pusat kota, dekat dengan pasar kota (Pasar Atas)• Aksesibilitas permukiman mudah sekali dijangkau• Sebagian besar permukiman cukup teratur	<ul style="list-style-type: none">• Adanya permukiman yang kurang layak huni• Tidak terdapat lahan untuk pengembangan permukiman
	Air Bersih	<ul style="list-style-type: none">• PDAM minded untuk keperluan minum dan masak• Potensi pelanggan cukup tinggi• Sudah terpasang sistem perpipaan distribusi PDAM namun terbatas	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya sumber air baku• Air yang mengalir ke konsumen relatif kecil• Sumber air bawah tanah tidak dapat dikonsumsi
	Limbah	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang terus digalakkan oleh dinas terkait di tiap kelurahan• Black water sudah dikelola berdasarkan on-site system	<ul style="list-style-type: none">• Kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan relatif kurang khususnya air limbah• Grey water langsung dibuang ke saluran terbuka bahkan kecenderungan dengan black water bagi warga yang tidak memiliki lahan untuk membuat septiktank• Septik tank umumnya belum memenuhi standar teknis dan belum pernah disedot selama lebih dari 5 tahun (kecenderungan cubluk)
	Sampah.	<ul style="list-style-type: none">• Sudah tersedia sarana TPS sederhana• Sosialisasi PHBS serta program 3R sampah domestik yang terus disosialisasikan oleh dinas terkait di tiap kelurahan	<ul style="list-style-type: none">• Masih ada warga yang membuang sampah ditempat terbuka• Kesadaran warga menyediakan sarana tempat sampah relatif kurang• Sarana pendukung pengelolaan sampah masih kurang• Belum adanya minat warga mengelola sampah dengan pola 3R.• Banyak warga mengelola sampahnya sendiri dengan cara dibakar
	Drainase	<ul style="list-style-type: none">• Jaringan drainase terhubung drainase utama• Kemiringan saluran drainase cukup	<ul style="list-style-type: none">• Terjadi penyempitan badan saluran drainase• Banyaknya sampah dan sedimentasi rumput tumbuh di saluran
	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Lebar jalan lingkungan di komplek perumahan cukup memenuhi untuk lalu lintas kecuali jalan setapak• Umumnya jalan lingkungan terhubung dengan jalan utama	<ul style="list-style-type: none">• Masih ditemui jalan yang rusak terutama didaerah yang berdekatan dengan pasar, bahkan sebagian masih jalan tanah• Banyak ditemui jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar• Sebagian jalan lingkungan hanya ada satu sisi saluran samping jalan, dan sebagian tidak ada saluran drainase jalan,

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo 2011

1. Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah

No	Aspek	Potensi	Permasalahan
1	Permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Letak permukiman dekat dengan pusat kota• Aksesibilitas permukiman mudah sekali dijangkau• Sebagian besar permukiman sudah teratur	<ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan lahan lahan untuk pengembangan permukiman relatif sangat terbatas
	Air Bersih	<ul style="list-style-type: none">• PDAM untuk keperluan minum dan masak• Potensi pelanggan cukup tinggi• Sudah terpasang sistem perpipaan distribusi PDAM namun terbatas	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya sumber air baku• Sebagian warga memanfaatkan air bawah tanah dengan membuat sumur gali
	Limbah	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi PHBS perlu terus digalakkan oleh dinas terkait di tiap kelurahan• Black water sudah dikelola berdasarkan on-site system	<ul style="list-style-type: none">• Kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan relatif kurang• Septik tank yang dibangun umumnya belum memenuhi standar teknis• Septik tank individu belum pernah disedot selama lebih dari 5 tahun
	Sampah.	<ul style="list-style-type: none">• Sudah tersedia sarana TPS sederhana• Sosialisasi PHBS, program 3R sampah domestik, dan kerja bakti rutin membersihkan saluran secara periodik perlu terus digalakkan	<ul style="list-style-type: none">• Masih ada warga membuang sampah ditempat terbuka dan saluran drainase• Sarana pendukung pengelolaan sampah masih kurang• Belum adanya minat warga mengelola sampah dengan pola 3R.• Masih banyak warga mengelola sampahnya sendiri dengan cara dibakar
	Drainase	<ul style="list-style-type: none">• Jaringan drainase telah terhubung drainase utama• Kemiringan saluran drainase cukup sehingga aliran air cukup lancar	<ul style="list-style-type: none">• Terjadi penyempitan badan saluran drainase• Banyaknya sampah pada saluran dan kekurangan cross drain• Sebagian saluran drainase masih saluran tanah
	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Umumnya jalan lingkungan relatif lebar, cukup dilalui kendaraan roda empat dan terhubung dengan jalan utama	<ul style="list-style-type: none">• Masih ditemui jalan yang rusak• Banyak ditemui jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar• Sebagian Jalan didaerah perumahan hanya ada satu sisi saluran samping jalan,• Fasilitas jalan seperti penerangan masih kurang.• Fasilitas trotoar masih tidak ada• Lebar jalan lingkungan di kompleks perumahan kurang cukup memenuhi syarat untuk lalu lintas kendaraan

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Sppip Kota Muara Bungo 2011



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO
TIM POKJANIS PENYUSUNAN SPPIP DAN RPKPP
KOTA MUARA BUNGO**

Bab 5

ANALISIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

5.1. Identifikasi Sebaran Permukiman

Perkembangan permukiman di Perkotaan Muara Bungo diawali dengan adanya permukiman disekitar pusat perkotaan di Kecamatan Pasar Muara Bungo dan sekitarnya. Perkembangan permukiman selanjutnya kearah kecamatan-kecamatan sekelilingnya. Seiring dengan perkembangan permukiman tersebut, maka sebaran permukiman dan kepadatan perumahan membentuk pola yang berbeda dan dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) tipologi kawasan permukiman, yaitu :

1. Tipologi kawasan permukiman cenderung padat dan cenderung kumuh.

Tipologi kawasan permukiman cenderung padat dan cenderung kumuh secara terpusat berada pada kawasan permukiman daerah perdagangan dekat pertokoan dan pasar di Kecamatan Pasar Muara Bungo dan sebagian di Kecamatan Rimbo Tengah dan sekitarnya. Kondisi perumahan pada kawasan ini adalah cenderung padat dan cenderung kumuh, tata letak bangunan rumah cenderung tidak teratur, jalan lingkungan relatif sempit, drainase kurang tersedia, sarana dan prasarana permukiman dan perkotaan kurang, dan ada beberapa wilayah pada kawasan ini terkena genangan air / banjir.

Tipologi kawasan permukiman cenderung padat dan cenderung kumuh sebagaimana tabel 5-1 berikut ini

Tabel: 5-1

Kawasan cenderung padat dan cenderung kumuh

Cenderung Padat	Cenderung Kumuh
Kec. Pasar Muara Bungo	Kec. Pasar Muara Bungo
Kelurahan Batang Bungo	Kelurahan Batang Bungo
Kelurahan Bungo Barat	Kelurahan Jaya Setia
Kec. Rimbo Tengah	Kec. Rimbo Tengah
Kelurahan Pasir Putih	Kelurahan Pasir Putih

Sumber: Data Citra Satelit Oktober 2010 dan pengamatan lapangan Juli 2011

2. Tipologi kawasan permukiman tidak padat.

Tipologi kawasan permukiman yang tidak padat berada tersebar di kawasan permukiman daerah pinggiran perkotaan, daerah perkebunan dan hutan, dan desa dekat sungai yang sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Bathin II Babeko, Kecamatan Bathin III dan Kecamatan Bungo Dani. Kondisi perumahan pada kawasan pemukiman tidak padat biasanya tidak kumuh karena bangunan yang adasangat jarang, meskipun tata letak bangunan rumah cenderung tidak teratur, jalan lingkungan relatif sempit dan masih berupa jalan tanah, saluran drainase masih alami berupa saluran tanah , sarana dan prasarana permukiman dan perkotaan kurang tersedia, dan ada beberapa wilayah rawan genangan air / banjir namun tidak menimbulkan kekumuhan sebagaimana tabel 5-2 berikut ini..

Tabel: 5-2

Kawasan Pemukiman Tidak Padat di Kota Muara Bungo

a. Kec. Pasar Muara Bungo	d. Kec. Bathin III
1. Kel. Bungo Timur	1. Kel. Manggis
2. Kel. Tanjung Gedang	2. Kel. Sungai Binjai
	3. Kel. Bungo Taman Agung
b. Kec. Rimbo Tengah	4. Dsn Purwo Bakti
1. Kel. Cadika	5. Dsn Air Gemuruh
2. Dsn Sungai Mengkuang	6. Dsn Teluk Panjang
3. Dsn Sungai Buluh	7. Dsn Lubuk Benteng
4. Dsn Pulau Pekan	8. Dsn Sarana Jaya
c. Kec. Bungo Dani	e. Kec. Bathin II Babeko
1. Kel. Sungai Kerjan	1. Dsn Sepunggur
2. Dsn Sungai Arang	2. Dsn Babeko
3. Dsn Talang Pantai	3. Dsn Simpang Babeko
4. Kel.Sungai Pinang	4. Dsn Tanjung Menanti
5. Dsn Pulau Pekan	5. Dsn Suka Makmur

Sumber: Data Citra Satelit Oktober 2010 dan pengamatan lapangan Juli 2011

5.2. Kriteria, Indikator dan Variabel Dalam Penentuan Kawasan Prioritas

5.2.1 Kriteria Kawasan Prioritas

Kriterian kawasan prioritas didasarkan pada penilaian gabungan antara indikator kepemilikan kawasan permukiman cenderung kumuh, kondisi sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman, dan indikator

tingkat kesestrategisan posisi kawasan dan resiko bencana. Masing-masing indikator terdiri dari beberapa variabel yang masing-masing variabel memiliki bobot nilai tertentu. Bila nilai akhir atau nilai gabungan lebih besar atau sama dengan angka 5,00 dianggap memenuhi syarat sebagai kawasan prioritas, sebaliknya bila nilai akhir kurang dari angka 5,00 dianggap memenuhi syarat sebagai kawasan prioritas

5.2.2 Indikator dan Variabel

A. Indikator kepemilikan kawasan kecenderungan kumuh meliputi 9 variabel sebagai berikut:

1. Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/ha) (bobot 10 %)
2. Jumlah penduduk miskin (bobot 5 %)
3. Usaha ekonomi penduduk sektor informal (bobot 5 %)
4. Kepadatan rumah/bangunan (bobot 15 %)
5. Kondisi rumah tidak layak huni (bobot 15 %)
6. Kondisi tata letak rumah/bangunan (bobot 10 %)
7. Kondisi prasarana dan sarana lingkungan (bobot 30 %)
8. Kerawanan kesehatan & lingkungan (bobot 5 %)
9. Kerawanan sosial (bobot 5 %)

B. Indikator Ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana lingkungan permukiman meliputi 6 variabel sebagai berikut:

1. Penyediaan air bersih (bobot: 20 %)
2. Saluran air limbah/Jamban (bobot 20 %)
3. Pengelolaan Sampah (bobot : 15 %)
4. Drainase (bobot : 15 %)
5. Jalan setapak (bobot : 20 %)
6. Jalan lingkungan (bobot : 10 %)

C. Indikator Ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana lingkungan permukiman meliputi 6 variabel dengan sub variabel lebih dari 18 sub variabel sebagai berikut:

1. Urgenitas penanganan (Bobot : 60 %)
 - a. Kawasan kumuh (Bobot 60 %)
 - 1) Kesesuaian lokasi dengan tata ruang (bobot 30 %)
 - 2) Status kepemilikan lahan (bobot 10 %)

- 3) Letak/kedudukan lokasi kawasan kumuh (bobot 10 %)
- 4) Tingkat/derajat kekumuhan (bobot 50 %)
- b. Kawasan rawan bencana (bobot 40 %)
 - 1) Bencana genangan (bobot 70 %)
 - 2) Bencana banjir (bobot 30 %)
2. Kontribusi Dalam Penanganan Permasalahan Kota (Bobot : 10 %)
 - a. Dapat menanggulangi permasalahan kota (bobot 100 %)
 - 1) Masalah genangan (bobot 70 %)
 - 2) Masalah banjir (bobot 30 %)
3. Kontribusi dalam stimulasi pembangunan dan pengembangan kota (Bobot : 10 %)
 - a. Membantu pembangunan & pengembangan kota (bobot 100 %)
 - 1) Pembangunan dan pengembangan permukiman (bobot 40 %)
 - 2) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur (bobot 60 %)
4. Sesuai kebijakan pengembangan dan pembangunan kota (Bobot:10%)
 - a) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang (bobot 100 %)
 - b) Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Muara Bungo (bobot 100%)
5. Dominasi permasalahan terkait dengan keciptakaryaan Bobot:5 %
 - a. Permasalahan terkait dengan permukiman dan infrastruktur (bobot100%)
 - b. Umumnya permasalahan adalah permukiman, jalan lingkungan, drainase, air bersih, air limbah, sampah (bobot 100 %)
6. Dominasi penanganan melalui bidang keciptakaryaan (Bobot : 5 %)
 - a. Penanganan melalui bidang permukiman dan infrastruktur bobot 100 %
 - b. Umumnya penanganan melalui bidang permukiman, jalan lingkungan, drainase, air bersih, air limbah, sampah (bobot100%)

Tabel: 5-3 Contoh Skoring Tingkat/Derajat Kekumuhan Lingkungan

No	Indikator	Skala Indikator	Nilai	Hasil Nilai (n)	Bobot (b)	Skoring (n x b)
1	Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/ha) (bobot 10 %)	Sangat tinggi (> 250 jiwa/ha)	5	3	0,1	0,30
		Tinggi (250 - 150 jiwa/ha)	3			
		Sedang (149 - 100 jiwa)	1			
2	Jumlah penduduk miskin (bobot 5 %)	Sangat tinggi (>65 %)	5	3	0,05	0,15
		Tinggi (65 - 50 %)	3			
		Sedang (< 50 %)	1			
3	Usaha ekonomi penduduk sektor informal (bobot 5 %)	Sangat tinggi (> 70 %)	5	3	0,05	0,15
		Tinggi (70 - 50 %)	3			
		Sedang (< 50 %)	1			
4	Kepadatan rumah/bangunan (bobot 15 %)	Sangat tinggi (> 70 %)	5	5	0,15	0,75
		Tinggi (70 - 50 %)	3			
		Sedang (< 50 %)	1			
5	Kondisi rumah tidak layak huni (bobot 15 %)	Sangat tinggi (> 70 %)	5	3	0,15	0,45
		Tinggi (70 - 50 %)	3			
		Sedang (< 50 %)	1			
6	Kondisi tata letak rumah/bangunan (bobot 10 %)	Sangat tinggi (> 70 %)	5	3	0,1	0,30
		Tinggi (70 - 50 %)	3			
		Sedang (< 50 %)	1			
7	Kondisi prasarana dan sarana lingkungan (bobot 30 %)	Sangat kurang (> 70 %)	5	3	0,3	0,90
		Kurang (70 - 50 %)	3			
		Sedang (< 50 %)	1			
8	Kerawanan kesehatan & lingkungan (bobot 5 %)	Sangat tinggi (> 70 %)	5	3	0,05	0,15
		Tinggi (70 - 50 %)	3			
		Sedang (< 50 %)	1			
9	Kerawanan sosial (bobot 5 %)	Sangat tinggi (> 70 %)	5	3	0,05	0,15
		Tinggi (70 - 50 %)	3			
		Sedang (< 50 %)	1			
JUMLAH SKORING						3,30

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

Keterangan: Ketersediaan lahan kosong sekitar 5 %

Tabel: 5-4 Contoh Skoring Kondisi Prasarana Dan Sarana Lingkungan

No	Indikator	Skala Indikator	Nilai	Hasil Nilai (n)	Bobot (b)	Skoring (n x b)
1	Penyediaan air bersih (bobot: 20 %)	Sangat kurang	5	3	0,2	0,6
		Kurang	3			
		Cukup	1			
2	Saluran air limbah/Jamban (bobot 20 %)	Tidak sesuai	5	3	0,2	0,6
		Kurang sesuai	3			
		Sesuai ketentuan	1			
3	Pengelolaan Sampah (bobot : 15 %)	Buruk	5	3	0,15	0,45
		Sedang	3			
		Baik	1			
4	Drainase (bobot : 15 %)	Kurang	5	3	0,15	0,45
		Sedang	3			
		Baik	1			
5	Jalan setapak (bobot : 20 %)	Rusak berat	5	3	0,2	0,6
		Rusak	3			
		Sedang	1			
6	Jalan lingkungan (bobot : 10 %)	Rusak berat	5	3	0,1	0,3
		Rusak	3			
		Sedang	1			
JUMLAH SKORING						3,00

Tabel: 5-5 Contoh Skoring Posisi Strategis Kawasan dan Resiko Bencana

No	Karakteristik	Kriteria	Indikator	Skala Indikator	Nilai	Hasil Nilai (n)	Bobot (b)	Skoring (n x b)
1	Urgenitas penanganan (Bobot : 60 %)	Kawasan kumuh (Bobot 60 %)	1 Kesesuaian lokasi dengan tata ruang (bobot 30 %)	Sesuai	5	5	0,108	0,54
				Kurang sesuai (dapat revisi/review)	3			
				Tidak sesuai	1			
			2 Status pemilikan lahan (bobot 10 %)	Tanah Negara/Badan Usaha	5	1	0,036	0,036
				Milik masyarakat (bukan penghuni)	3			
				Milik masyarakat (penghuni)	1			
			3 Letak/kedudukan lokasi kawasan kumuh (bobot 10 %)	Sangat strategis	5	5	0,036	0,18
				Cukup strategis	3			
				Kurang strategis	1			
		4 Tingkat/derajat kekumuhan (bobot 50 %)	Sangat tinggi (sangat kumuh)	5	3	0,18	0,54	
			Cukup tinggi (cukup kumuh)	3				
			Kumuh rendah	1				
		Kawasan rawan bencana (bobot 40 %)	1 Bencana genangan (bobot 70 %)	Terkena genangan (> 70 %)	5	1	0,168	0,168
				Terkena genangan (50 - 70 %)	3			
Terkena genangan (< 50 %)	1							
2 Bencana banjir (bobot 30 %)	Terkena banjir (> 70 %)		5	1	0,072	0,072		
	Terkena banjir (50 - 70 %)		3					
	Terkena banjir (< 50 %)		1					
2	Kontribusi Dalam Penanganan Permasalahan Kota (Bobot : 10 %)	Dapat menanggulangi permasalahan kota (bobot 100 %)	1 Masalah genangan (bobot 70 %)	Menanggulangi masalah genangan (> 70 %)	5	1	0,07	0,07
				Menanggulangi masalah genangan (50-70 %)	3			
				Menanggulangi masalah genangan (< 50 %)	1			
			2 Masalah banjir (bobot 30 %)	Menanggulangi masalah banjir (> 70 %)	5	1	0,03	0,03
				Menanggulangi masalah banjir (50	3			

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

					- 70 %)						
					Menanggulangi masalah banjir(< 50 %)	1					
3	Kontribusi dalam stimulasi pembangunan dan pengembangan kota (Bobot : 10 %)	Membantu pembangunan & pengembangan kota (bobot 100 %)	1	Pembangunan dan pengembangan permukiman (bobot 40 %)	Membantu pembangunan. dan pengembang an permukiman (> 70 %)	5	1	0,04	0,04		
					Membantu pembangunan. dan pengembang an permukiman (50 - 70 %)	3					
					Membantu pembangunan. dan pengembang an permukiman (< 50 %)	1					
			2	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur (bobot 60 %)	Membantu pemb. dan pengemb. Infrastruktur (> 70 %)	5	1	0,06	0,06		
					Membantu pemb. dan pengemb. infrastruktur (50 - 70 %)	3					
Membantu pemb. dan pengemb. infrastruktur (< 50 %)	1										
4	Sesuai kebijakan pengembangan dan pembangunan kota (Bobot:10%)	Sesuai dengan Rencana Tata Ruang (bobot 100 %)	Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Muara Bungo (bobot 100 %)	Penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang (> 70 %)	5	3	0,1	0,3			
				Penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang (50 - 70 %)	3						
				Penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang (< 50 %)	1						
5	Dominasi permasalahan terkait dengan keciptakaryaan (Bobot : 5 %)	Permasalahan terkait dengan permukiman dan infrastruktur (bobot 100 %)	Umumnya permasalahan adalah permukiman, jalan lingkungan, drainase, air bersih, air limbah,	Permasalahan permukiman dan infrastruktur (> 70 %)	5	3	0,05	0,15			
				Permasalahan permukiman dan infrastruktur (50 - 70 %)	3						
				Permasalahan permukiman dan	1						

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			sampah (bobot 100 %)	infrastruktur (< 50 %).				
6	Dominasi penanganan melalui bidang keciptakaryaan (Bobot : 5 %)	Penanganan melalui bidang permukiman dan infrastruktur (bobot 100 %)	Umumnya penanganan melalui bidang permukiman, jalan lingkungan, drainase, air bersih, air limbah, sampah (bobot 100 %)	Penanganan permukiman dan infrastruktur (> 70 %)	5	3	0,05	0,15
				Penanganan bidang permukiman dan infrastruktur (50 - 70 %)	3			
				Penanganan bidang permukiman dan infrastruktur (< 50 %)	1			
JUMLAH SKORING								2,336



5.2.3 Hasil Penilaian

Rekapitulasi hasil penilaian terhadap kondisi permukiman di 27 kelurahan/ desa dari 5 wilayah Kecamatan se Kota Muara Bungo dengan menggunakan kriteria, indikator dan variabel sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, diperoleh hasil sebagaimana tabel 5-6 berikut ini.

Tabel: 5-6

Rekap Hasil Skoring Tingkat Potensi Kepemilikan Kawasan Cenderung Kumuh Per Wilayah Kelurahan/ Desa di Kawasan Pembangunan Perkotaan Muara Bungo

No	Kecamatan	No	Kelurahan/Desa	Hasil Skoring			Total Nilai	Rang king	Keterse diaan Lahan kosong
				Derajat Keku muhan	Kondisi Sapras Lingk	Tingkat strategis dan resiko kawasan			
1	Pasar Muara Bungo	1	Batang Bungo	3,3	3,0	2,336	8,636	2	5%
		2	Bungo Barat	2,4	1,0	2,232	5,632	9	5%
		3	Bungo Timur	2,1	1,0	2,232	5,332	10	10%
		4	Jaya Setia	3,0	3,0	3,696	9,696	1	60%
		5	Tanjung Gedang	2,7	2,6	2,296	7,596	7	30%
2	Rimbo Tengah	1	Pasir Putih	3,1	3,0	2,376	8,476	3	40%
		2	Cadika	1,0	1,0	2,232	4,232	15	90%
		3	Sungai Buluh	1,0	1,0	1,832	3,832	20	85%
		4	Sungai Mengkuang	1,0	1,0	1,632	3,632	21	85%
3	Bungo Dani	1	Sungai Pinang	2,7	2,4	2,328	7,428	8	15%
		2	Sungai Kerjan	1,0	1,0	1,616	3,616	22	90%
		3	Talang Pantai	1,0	1,0	2,304	4,304	13	40%
		4	Sungai Arang	1,0	1,0	2,512	4,512	12	45%
		5	Pulau Pekan *)	1,0	1,0	2,000	4,000	14	60%
4	Bathin III	1	Manggis	2,2	3,0	2,656	7,856	5	80%
		2	Lubuk Benteng	1,0	1,1	1,804	3,904	19	95%
		3	Bungo Taman Agung	1,7	2,8	3,176	7,676	6	80%
		4	Air Gemuruh	1,0	1,0	2,088	4,088	17	95%
		5	Sarana Jaya	1,0	1,0	2,004	4,004	18	90%
		6	Teluk Panjang	1,0	1,0	2,204	4,204	16	85%
		7	Purwo Bakti	2,6	3,7	2,040	8,340	4	95%
		8	Sungai Binjai	1,0	1,0	2,844	4,844	11	90%
5	Batin II Bebeko	1	Babeko	1,0	1,0	1,416	3,416	24	80%
		2	Sepunggur	1,0	1,0	1,604	3,604	23	95%
		3	Simpang Babeko	1,0	1,0	1,400	3,400	27	90%
		4	Tanjung Menanti	1,0	1,0	1,412	3,412	26	95%
		5	Suka Makmur*)	1,0	1,0	1,342	3,342	25	90%

Keterangan: *) Desa/ Kelurahan pemekaran baru

Nilai akhir kurang dari angka 5,00 dianggap tidak memiliki permukiman cenderung kumuh

Sumber : Hasil Analisis terhadap data citra Oktober 2010, Survey lapangan bersama pejabat kelurahan setempat pada bulan Juli 2011

5.2.4.Rangking Kawasan Prioritas

Dari hasil penilaian terhadap 27 kelurahan/ desa di 5 Kecamatan se Kota Muara Bungo, terdapat 10 kelurahan/ Desa yang memiliki nilai akhir lebih besar atau sama dengan angka 5,00, dengan rangking nilai dari yang tertinggi sampai yang tertendah sebagaimana tabel 5 - 7 berikut ini.

Tabel: 5-7

Rangking 10 besar Hasil Penilaian Kelurahan Prioritas

No	Kelurahan/ Desa / Dusun	Hasil Skoring			Total Nilai	Rang king	Keterse diaan lahan kosong
		Derajat kecende rungan Kumuh	Kondisi Sapras Lingk	Tingkat Strategis dan Resiko Kawasan			
1	Jaya Setia	3,0	3,0	3,696	9,696	1	60%
2	Batang Bungo	3,3	3,0	2,336	8,636	2	5%
3	Pasir Putih	3,1	3,0	2,376	8,476	3	40%
4	Purwo Bakti	2,6	3,7	2,040	8,340	4	95%
5	Manggis	2,2	3,0	2,656	7,856	5	80%
6	Bungo Taman Agung	1,7	2,8	3,176	7,676	6	80%
7	Tanjung Gedang	2,7	2,6	2,296	7,596	7	30%
8	Sungai Pinang	2,7	2,4	2,328	7,428	8	15%
9	Bungo Barat	2,4	1,0	2,232	5,632	9	5%
10	Bungo Timur	2,1	1,0	2,232	5,332	10	10%

Sumber : Hasil Analisis terhadap data citra Oktober 2010, Survey lapangan bersama pejabat kelurahan setempat pada bulan Juli 2011

Keterangan: Disarikan dari hasil penilaian tabel 5-6

5.2.4.Kawasan Prioritas Terpilih

Dari 10 kawasan prioritas atau Kelurahan prioritas kemudian dipilih 3 kelurahan prioritas terpilih 3 kelurahan yang memiliki nilai tertinggi sebagaimana tabel 5-8 berikut.

Tabel: 5-8

Kawasan Prioritas Terpilih

No	Kelurahan/ Desa / Dusun	Hasil Skoring			Total Nilai	Rang king	Ketersed iaan lahan kosong
		Derajat Kekumuh an	Kondisi Sapras Ling Kungan	Posisi Strategis dan Resiko Bencana			
1	Jaya Setia	3,0	3,0	3,696	9,696	1	60%
2	Batang Bungo	3,3	3,0	2,336	8,636	2	5%
3	Pasir Putih	3,1	3,0	2,376	8,476	3	40%

Sumber: Disarikan dari hasil penilaian dari tabel 5-7

5.3. Analisis Strategi Penanganan Kawasan Prioritas

Strategi penanganan kawasan prioritas terpilih lebih didasarkan pada issue utama atau permasalahan di masing-masing kawasan prioritas terpilih, yang meliputi 3 kelurahan/ Desa/ Dusun, yakni kelurahan Jaya Setia di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kelurahan Batang Bungo di Kecamatan Pasar Muara Bungo, dan Kelurahan Pasir Putih di Kecamatan Rimbo Tengah.

:



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

5.3.1 Kelurahan Jaya Setia :

No	Bidang	Permasalahan	Kegiatan Prioritas	Strategi	Hasil	Perolehan Manfaat
1	Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Ada permukiman padat dan cenderung kumuh di RT 12 s/d RT 14, ada beberapa rumah semi permanen, kurang layak huni, jalan sempit, drainase kecil, air limbah menggenang dan banyak jentik-jentik nyamuk, dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan lingkungan permukiman dan pemugaran rumah kurang layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya lingkungan permukiman yang bersih, sehat, dan layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya lingkungan permukiman yang bersih, sehat, dan layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi luasan kawasan permukiman yang kurang bersih, kurang sehat dan kurang layak huni
		<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian kawasan permukiman tidak padat tetapi rawan genangan dan banjir di musim hujan terutama RT 2 s/d RT 06 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembenahan drainase makro dan mikro dan peninggian lantai bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya lingkungan permukiman bebas dari resiko genangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya dan tertatanya saluran drainase kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Mengurangi resiko genangan dan penyelamatan jiwa, harta dan asset lainnya
2	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Drainase tidak normal, sering tergenang akan menjadi sarang tumbuhnya jentik nyamuk • Setiap hujan rumah penduduk sering terendam 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Drainase/Saluran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan cakupan pelayanan Jaringan Drainase, berkurangnya luasan wilayah tergenang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya peningkatan saluran drainase 	<ul style="list-style-type: none"> • Menanggulangi terhadap banjir pada daerah sekitar • Kondisi lingkungan menjadi bersih, nyaman dan sehat • Meningkatkan kesehatan masyarakat
3	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedia tong sampah di tiap rumah • Tidak tersedia TPS sampah • Belum ada petugas pengangkut sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan cakupan pelayanan persampahan, berkurangnya luasan wilayah cemaran sampah di masing-masing keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya alat penampungan sampah di setiap rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan persampahan oleh pemerintah kota ke masyarakat dalam masalah persampahan • Kondisi lingkungan menjadi bersih, nyaman dan sehat • 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4	Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian penduduknya belum mempunyai WC sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu bantuan WC untuk rumah tidak memiliki WC sendiri • Pembuatan MCK 	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan cakupan pelayanan air limbah, berkurangnya luasan wilayah cemaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Limbah terpusat pada skala kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Agar limbah terpusat hanya terletak skala kawasan tertentu • Meningkatkan Kesehatan Masyarakat • Kondisi lingkungan menjadi bersih, dan nyaman

5.3.2 Kelurahan Batang Bungo :

No	Bidang	Permasalahan	Kegiatan Prioritas	Strategi	Hasil	Perolehan Manfaat
1	Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Di belakang kiri Pasar Atas ada sebagian rumah semi permanen, lantai tanah & kurang layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemugaran rumah kurang layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan rumah sehat dan layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya jumlah rumah yang kurang sehat dan kurang layak huni
2	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada sebagian jalan lingkungan masih berupa tanah • Saat musim hujan sebagian jalan tanah becek dan aktivitas penduduk terganggu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan lingkungan dan jalan setapak 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersediannya jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas permukiman pada kawasan Perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya mobilitas dan memperlancar kegiatan masyarakat • Kondisi lingkungan menjadi bersih, nyaman dan sehat
3	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Di belakang Pasar Atas, jaringan drainase sekaligus saluran buangan air limbah masih berupa tanah, banyak sampah, air kotor menggenang dan meluap walaupun di musim kemarau • Banyak saluran drainase tumbuh rumput dan banyak sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan saluran drainase permanen 	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan cakupan pelayanan Jaringan Drainase, berkurangnya luasan wilayah tergenang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersediannya peningkatan saluran drainase 	<ul style="list-style-type: none"> • Menanggulangi banjir pada daerah sekitar kawasan permukiman • Kondisi lingkungan menjadi bersih, nyaman dan sehat • Meningkatkan derajat kesehatan
4	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Di belakang Pasar Atas, saluran air hujan/ drainase banyak sampah sehingga • Sampah berserakan tidak terkumpul pada suatu tempat • Belum setiap rumah menyediakan bak sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan cakupan pelayanan persampahan, berkurangnya luasan wilayah cemaran akibat sampah di lingkungan dan di masing-masing keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersediannya alat penampungan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lingkungan menjadi bersih, nyaman dan sehat • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5	Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian masyarakatnya masih menggunakan air sumur 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan jaringan rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya layanan Air Bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
6	Sanitasi dan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Di belakang kiri Pasar Atas saluran buangan air limbah mepet pintu rumah dan air limbah menggenang, kotor, dan bau tidak sedap, sebagian rumah tidak ada saluran air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan saluran buangan air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya peningkatan cakupan pelayanan air limbah, berkurangnya luasan wilayah cemaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersediannya Limbah terpusat pada skala kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Agar limbah terpusat hanya terletak skala kawasan tertentu • Meningkatkan Kesehatan Masyarakat • Kondisi lingkungan menjadi bersih, nyaman dan sehat

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

5.3.3 Kelurahan Pasir Putih :

No	Bidang	Permasalahan	Kegiatan Prioritas	Strategi	Hasil	Perolehan Manfaat
1	Permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Permukiman lama yang tergerus dengan oleh perkembangan kehidupan pusat kota, dan sebagian permukiman cenderung padat dan cenderung kumuh	<ul style="list-style-type: none">• Gerakan rumah sehat dan layak huni	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan permukiman sehat dan layak huni	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Kenyamanan dan kekrasaranan penghuni rumah
2	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Sebagian jalan lingkungan rusak dan sebagian setapak masih berupa tanah	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Jalan Lingkungan dan Jalan setapak	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan infrastruktur jalan lingkungan permukiman yang memadai	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kualitas Jalan Lingkungan dan Jalan setapak	<ul style="list-style-type: none">• kelancaran mobilitas dan kegiatan masyarakat
3	Drainase	<ul style="list-style-type: none">• Ada saluran drainase sekaligus saluran buangan air limbah sepanjang sekitar 350 m masih berupa tanah, berkelok-kelok, penyempitan, bila musim hujan air sering meluap, dan sering menjadi WC umum,	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan saluran drainase permanen sepanjang 350 m	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan kelancaran aliran drainase dan air limbah,	<ul style="list-style-type: none">• Terbangunnya saluran drainase permanen yang memadai	<ul style="list-style-type: none">• Menanggulangi banjir / genangan.• Kebersihan dan kesehatan lingkungan
4	Persampahan	<ul style="list-style-type: none">• Belum setiap rumah penduduk menyediakan bak sampah	<ul style="list-style-type: none">• Gerakan kerja bakti berkala membersihkan saluran drainase dari sampah dan timbunan tanah	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat serta bebas dari polusi sampah	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya tong sampah di setiap rumah penduduk	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan lingkungan dan masyarakat serta terbebas dari polusi sampah
5	Sanitasi dan air limbah	<ul style="list-style-type: none">• Hampir setiap rumah sudah memiliki WC	<ul style="list-style-type: none">• Gerakan kebersihan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan derajat kebersihan dan kesehatan lingkungan dan masyarakat

Bab 6

ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN

6.1. Identifikasi Permasalahan Dan Kajian Keselarasan Kebijakan Dan Strategi

Dalam rangka pengembangan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, diperlukan dasar kebijakan, dan perlu dilakukan kajian keselarasan kebijakan, strategi dan program yang ada. Dalam kajian keselarasan kebijakan, strategi dan program menyangkut kebijakan dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan penataan ruang. Kebijakan perencanaan pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Memengah RPJMD, serta kebijakan penataan ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kajian keselarasan antar kebijakan dan program disajikan pada tabel 6-1. dan 6-2, sedangkan kajian keselarasan kebijakan dengan kondisi eksisting dapat dilihat tabel 6-3.

Tabel : 6 - 1.

Matriks Keselarasan Antar Kebijakan dan Program Bidang Permukiman

		PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
		Kebijakan	Program
<p>PJPD Kab. Bungo (2005 – 2025) dan RPJM Kab. Bungo 2012 - 2016</p> <p>RTRW Kab. Bungo (2010 – 2029) dan Revisi RUTR Perkotan Muara Bungo</p>		<p>Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Mewujudkan sistem data base perumahan sebagai dasar perencanaan. 2). Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan bagi masyarakat Kota Muara Bungo. 3). Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman. 4). Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan sesuai dengan daya beli masyarakat Kota Muara Bungo. 	<p>Program</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terpenuhinya kebutuhan perumahan melalui partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat. 2) Terimplementasinya data base dan sistem informasi perumahan. 3) Terwujudnya peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman. 4) Tersusunnya dan tersosialisasi kebijakan penyusunan rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) pada kawasan padat penduduk dan padat bangunan 5) Terbangunnya rusunami dan rusunawa di kawasan padat penduduk dan efisiensi pemanfaatan lahan kota yang terbatas.
PENATAAN RUANG	<p>Kebijakan</p> <p>Membatasi perkembangan pemanfaatan ruang pada wilayah pinggiran sungai dan kawasan rawan genangan/ banjir,</p>	<p>Pembatasan dan pengendalian pengembangan dan pembangunan permukiman beserta infrastruktur pendukungnya pada wilayah pinggiran sungai dan kawasan rawan genangan/ banjir</p>	<p>Pembatasan dan pengendalian program pembangunan permukiman maupun bangunan lain wilayah pinggiran sungai dan kawasan rawan genangan/ banjir</p>
	<p>Program</p> <p>Perwujudan kawasan budidaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penataan kawasan perdagangan 2) Pembangunan fasilitas pelayanan 3) Penataan kawasan permukiman 	<p>Segala kebijakan pengembangan dan pembangunan permukiman ditujukan untuk perwujudan kawasan budidaya, terutama untuk penataan kawasan permukiman</p>	<p>program pembangunan rusunami dan rusunawa merupakan perwujudan kawasan budidaya, terutama untuk penataan kawasan permukiman yang padat penduduk dan bangunan dengan lahan terbatas</p>

Tabel : 6 - 2.
Matriks Keselarasan Antar Kebijakan dan Program Bidang Infrastruktur

		PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
		Kebijakan	Program
<p>RPJPD Kab. Bungo 2005 – 2025 dan RPJM Kab. Bungo 2012 - 2016</p> <p>RTRW Kab. Bungo (2010 – 2029) dan RUTR Perkotaan Muara Bungo</p>		<p>1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.</p> <p>2) Meningkatkan penyediaan air bersih secara merata.</p> <p>3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem dan pengelolaan drainase dan air limbah.</p> <p>4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perkantoran.</p> <p>5) Meningkatkan sistem informasi data base sarana dan prasarana ke-PU an.</p> <p>6) Meningkatkan pengelolaan sampah ramah lingkungan.</p> <p>7) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penyediaan lahan dan manajemen pengelolaan persampahan.</p>	<p>1) Terlaksananya perbaikan kerusakan jalan dan jembatan dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.</p> <p>2) Meningkatnya pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui pembangunan dan pengelolaan air bersih yang baik.</p> <p>3) Dapat berfungsinya secara optimal sarana dan prasarana drainase dan air limbah perkotaan.</p> <p>4) Terbangunnya sarana dan prasarana pengendali rob dan teroptimalisasinya sistem drainase di seluruh Kota Muara Bungo.</p> <p>5) Tersosialisasikannya dan terimplementasikannya pengelolaan sampah dg 3 R (reuse, reduce, dan recycle).</p> <p>6) Terwujudnya koordinasi dengan daerah wilayah bregas (Brebes, Muara Bungo dan Slawi) dalam rangka mewujudkan kerja sama antar daerah dalam penyediaan dan manajemen pengelolaan sampah.</p>
PENATAAN RUANG	<p>Kebijakan Pengembangan sistem pusat pelayanan didukung dengan mengembangkan sistem jaringan yang berfungsi kolektor yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan. Pengembangan sistem jaringan dengan memperhatikan jaringan arteri primer yang merupakan bagian dari sistem regional – nasional,</p>	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama pada pusat-pusat pelayanan.	Terwujudnya pusat-pusat pelayanan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai
	<p>Program 1) Perwujudan sistem jaringan a. Perencanaan peningkatan jalan • Arteri Primer</p>	Terlaksananya sistem jaringan dengan peningkatan/pembangunan infrastruktur	Terwujudnya sistem jaringan yang memadai terutama jaringan jalan, drainase, air minum, pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

	<ul style="list-style-type: none">• Arteri Skunder• Kolektor Sekunder <ol style="list-style-type: none">2) Rencana pembangunan IPAL dan IPLT3) Perluasan pembangunan jaringan air bersih<ol style="list-style-type: none">a. Jaringan primerb. Jaringan sekunder4) Pembangunan jaringan drainase<ol style="list-style-type: none">a. Jaringan drainase primerb. Jaringan drainase sekunderc. Jaringan drainase kwarterd. Jaringan drainase tertier5) Pembangunan prasarana persampahan<ol style="list-style-type: none">a. Penyebaran Pembangunan TPSb. Pembangunan TPA sampah baru yang lebih luas dan lokasinya jauh dari kawasan perkotan		
--	---	--	--



Tabel : 6 - 3

Matrik Keselarasan Antara Kebijakan dan Kondisi Eksisting

No	Sumber	Kategori	Arahan Kebijakan	Kondisi Eksisting	Sintesa
1	RPJPD Kota Muara Bungo (2006–2025)	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan sistem data base perumahan sebagai dasar perencanaan. Mewujudkan sistem data base Bidang ke Cipta Karya 	<ul style="list-style-type: none"> Data base perumahan belum tersusun Data base Bidang ke Cipta Karya belum tersusun 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyusunan data perumahan dalam bentuk data base
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan bagi masyarakat Kota Muara Bungo. Mendorong tumbuhnya kegiatan Pengembangan Perumahan skala besar dan perumahan swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi pengembangan perumahan belum maksimal dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan fasilitasi dalam pengembangan perumahan
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya keterbatasan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman terutama air minum 	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi keterbatasan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman secara bertahap
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan sesuai dengan daya beli masyarakat Kota Muara Bungo. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan perumahan belum menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pendatang
		Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan perkotaan Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Masih ditemui jalan dan jembatan yang rusak Terdapat jalan-jalan yang butu 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan/pembangunan jalan-jalan yang rusak Pembangunan baru jalan tembus maupun jalan-jalan alternatif
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penyediaan air bersih secara merata. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minuman dan Air Limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Ada keterbatasan dalam penyediaan air minum 	<ul style="list-style-type: none"> Sangat diperlukan penyediaan air minum yang menjangkau wilayah Kota Muara Bungo
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem dan pengelolaan drainase dan air limbah. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sistem drainase belum dilakukan secara terpadu Pengelolaan sistem air limbah belum dilakukan secara maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan/pembangunan sistem drainase Peningkatan/pembangunan sistem air limbah
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengelolaan sampah yang ramah 	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan sampah belum 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sampah dilakukan secara



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

			lingkungan.	menjangkau seluruh wilayah Kota Muara Bungo	terpadu secara menyeluruh
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penyediaan lahan dan manajemen pengelolaan sampah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kerjasama antar daerah dalam penyediaan lahan dan pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan lahan dan pengelolaan sampah
2	RPJMD Kota Muara Bungo (2012 - 2016)	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan perumahan baru untuk masyarakat menengah dan kurang mampu; • Penataan lingkungan kawasan kumuh perumahan di Kota Muara Bungo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Jumlah KK dan jumlah rumah eksisting, masih dibutuhkan rumah baru terutama masyarakat menengah dan kurang mampu • Adanya permukiman padat dan kumuh di sekitar wilayah pantai • Adanya permukiman padat di pusat kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan rumah baru untuk golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah • Penanganan lingkungan kawasan padat dan kumuh di wilayah pantai • Penanganan lingkungan kawasan padat di pusat kota
		Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kondisi kualitas dan kuantitas jaringan jalan di Kota Muara Bungo; • Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan saluran drainase kota dengan perencanaan penataan ruang kota; • Meningkatkan dan memperhatikan relevansi kondisi kontur dalam perencanaan saluran drainase/gorong yang masih kurang diperhatikan; • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan saluran drainase/gorong-gorong perkotaan dengan meningkatkan ketegasan sanksi dalam mengoptimalkan fungsi saluran drainase; • Meningkatkan kualitas dan kuantitas saluran drainase perkotaan di wilayah Kota Muara Bungo; • Mewujudkan sistem jaringan dan manajemen pengolahan air baku secara terpadu; • Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan prasarana air minum; • Meningkatkan kapasitas Air Minum; • Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat jalan-jalan yang rusak • Terjadi kemacetan lalu lintas • Pembangunan saluran drainase belum terpadu secara menyeluruh • Arah aliran air saluran drainase kurang sesuai dengan kondisi kontur secara menyeluruh • Kapasitas saluran drainase kurang mampu menampung air akibat penyempitan saluran oleh tanah dan sampah • Dibeberapa tempat belum terdapat saluran drainase sehingga menimbulkan genangan • Keterbatasan sumber air baku untuk air minum • Cakupan pelayanan air kurang • Kebocoran air perpipaan • Adanya swadaya masyarakat dalam pembangunan prasarana air minum • Pencemaran air limbah pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pembangunan jalan • Pembangunan jalan baru lingkaran • Penyusunan Masterplan drainase di Kota Muara Bungo secara menyeluruh • Perencanaan arah aliran air secara akurat sesuai dengan kondisi kontur • Normalisasi saluran drainase • Pembangunan saluran drainase perkotaan di wilayah Kota Muara Bungo • Penambahan supply sumber air baku • Peningkatan cakupan pelayanan air minimum • Penanganan kebocoran air perpipaan • Penanganan air limbah pada perumahan



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

			<p>sanitasi kota melalui rencana induk sistem sanitasi kota Muara Bungo;</p> <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komunitas;	<p>perumahan padat</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembuangan air limbah tidak pada tempatnya• Keterbatasan prasarana air limbah	<p>padat</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan cakupan pelayanan septic tank komunal• Peningkatan pelayanan• Peningkatan kepemilikan septic tank keluarga
3	RPJM Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Muara Bungo (2010 – 2029)	Perumahan	<ul style="list-style-type: none">• Terpenuhinya pembangunan infrastruktur perumahan• Menciptakan kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan pemukiman• Pemenuhan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman• Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir• Meningkatkan peyediaan prasarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat• Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat• Membatasi perkembangan pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir, karena ketinggian peil lahan yang rendah dan kemungkinan adanya abrasi, dan membatasi intensitas pemanfaatan pada lahan dengan potensi genangan/ banjir.	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan Jumlah KK dan jumlah rumah eksisting, masih dibutuhkan rumah baru terutama masyarakat menengah dan kurang mampu• Adanya permukiman padat dan kumuh di sekitar wilayah pantai• Adanya permukiman padat di pusat kota	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan rumah baru untuk golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah• Penanganan lingkungan kawasan padat dan kumuh di wilayah pantai• Penanganan lingkungan kawasan padat di pusat kota



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

		<p>Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan daerah belakangnya meningkatkan akses ke potensial/sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar • Pengembangan system prasarana transportasi terpadu, prasarana transportasi yang akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan secara serasi dengan daerah lain • Meningkatkan akses ke daerah-daerah potensial/sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar • Pengembangan bandara sebagai salah satu landasan • Pengembangan sistem pusat pelayanan didukung dengan mengembangkan sistem jaringan yang berfungsi kolektor yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan. Pengembangan sistem jaringan dengan memperhatikan jaringan arteri primer yang merupakan bagian dari sistem regional – nasional, 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat jalan-jalan yang rusak • Terjadi pelambatan arus lalu lintas dan kemacetan di kawasan tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pembangunan jalan • Pembangunan jalan baru lingkaran kota
		<p>Pembangunan fasilitas layanan transportasi daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya infrastruktur pedesaan melalui pendekatan daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal • Pengembangan prasarana transportasi yang akan mendukung pemerataan pembangunan intra yang ditunjang dengan system prasarana transportasi sungai • Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu : penataan system jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu jala, penegakan hukum dan disiplin di jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan saluran drainase belum terpadu secara menyeluruh • Arah aliran air saluran drainase kurang sesuai dengan kondisi kontur secara menyeluruh • Kapasitas saluran drainase kurang mampu menampung air akibat penyempitan saluran oleh tanah dan sampah • Dibeberapa tempat belum terdapat saluran drainase sehingga menimbulkan genangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Masterplan drainase di Kota Muara Bungo secara menyeluruh • Perencanaan arah aliran air secara akurat sesuai dengan kondisi kontur • Normalisasi saluran drainase • Pembangunan saluran drainase perkotaan di wilayah Kota Muara Bungo
		<p>Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mensinergikan system infrastruktur dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran air limbah pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan air limbah pada perumahan



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

		<p>tur: Pengembangan dan penataan infrastruktur yang telah dibangun</p>	<p>konsep tata ruang daerah</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengharmonisasikan keterpaduan system dengan kebijakan tata ruang daerah• Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan non formal milik pemerintah• Pengembangan bandara sebagai salah satu landasan Pengembangan sistem pusat pelayanan didukung dengan mengembangkan sistem jaringan yang berfungsi kolektor yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan. Pengembangan sistem jaringan dengan memperhatikan jaringan arteri primer yang merupakan bagian dari sistem regional – nasional,	<p>perumahan padat</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembuangan air limbah tidak pada tempatnya• Keterbatasan prasarana air limbah	<p>padat</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan cakupan pelayanan septic tank komunal• Peningkatan pelayanan• Peningkatan kepemilikan septic tank keluarga
--	--	---	---	---	---

Sumber : Hasil Identifikasi Permasalahan dan Kajian Keselarasan Kebijakan, Strategi dan Program, 2011



6.2. Analisis Permasalahan Dan Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Pendukung Perkotaan

Analisis permasalahan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman di Kota Muara Bungo dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama pada kondisi permukiman, kondisi sebaran permukiman dan kondisi infrastruktur perkotaan, untuk itu permasalahan dan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan untuk wilayah perkotaan Kota Muara Bungo sebagaimana disajikan pada tabel 6-4.

Tabel : 6-4
Permasalahan dan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan

Permukiman/ Infrastruktur		Permasalahan	Pembangunan
Kawasan Perkotaan			
1	Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya lahan permukiman berpotensi genangan akibat air hujan • Pengembangan perumahan skala besar terkendala adanya lahan • Terdapat permukiman padat di sekitar pusat kota • Terdapat permukiman yang padat dan cenderung kumuh • Masih terdapat rumah-rumah yang tidak layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penanggulangan terhadap kawasan permukiman yang tergenang akibat genangan air hujan. • Melakukan pengembangan dan pembangunan permukiman terhadap lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Muara Bungo • Melakukan penanganan terhadap kawasan yang padat di pusat kota • Melakukan penanganan terhadap kawasan yang padat dan cenderung kumuh • Melakukan pemugaran maupun renovasi terhadap rumah yang tidak layak huni
2	Jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih dijumpai jalan lingkungan yang rusak dan jalan tanah • Banyak ditemui jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar terutama badan jalan yang kurang lebar • Sebagian Jalan didaerah perumahan hanya ada satu sisi saluran samping saja, sehingga berpotensi menimbulkan genangan disisi jalan yang tidak ada salurannya, mengakibatkan kerusakan jalan. • Fasilitas jalan seperti penerangan dan trotoar masih kurang. • Masih ditemui jalan yang rusak 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Pemeliharaan Jalan, Perbaikan Jalan, dengan cara tambal sulam), maupun dilapis ulang. • Standardisasi Jalan lingkungan terutama pada badan jalan • Melakukan penataan jaringan jalan lingkungan dan Penanganan kebutuhan pembangunan jalan lingkungan baru • Penambahan saluran samping jalan dan penambahan lobang air kearah saluran. • Melakukan pembangunan bangunan pelengkap jalan seperti trotoar, saluran, dan gorong – gorong serta ditambah penerangan jalan.
3	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi penyempitan badan saluran drainase (penampang basah saluran yang kurang) • Pada wilayah dengan topografi dataran dan cekungan, air sulit mengalir sehingga terjadi genangan, dan pada daerah permukiman sebagian drainase hanya ada satu sisi. • Banyaknya sampah dan sedimentasi pada saluran • Kurang adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase 	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase. • Membuat kemiringan yang ideal air supaya kearah saluran drainase, dan pembuatan / penambahan saluran samping jalan serta penambahan gorong – gorong. • Pemeliharaan Rutin terutama untuk mengatasi sedimentasi dengan melibatkan masyarakat. • Mendesak kepada pihak-pihak terkait agar segera menangani permasalahan saluran drainase agar dapat difungsikan secara maksimal dan normalisasi sungai. • Membuat green drainage (Lubang Resapan Biopori) di setiap pekarangan rumah
4	Air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Debit aliran air yang tidak merata • Kebocoran pipa • Air bawah tanah tidak dapat dikonsumsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan debit air baku dengan mencari alternatif sumber air baku baru • Penurunan tingkat kebocoran baik secara teknis maupun non teknis • Rehabilitasi pipa distribusi

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

Permukiman/ Infrastruktur		Permasalahan	Pembangunan
Kawasan Perkotaan			
5	Air limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuangan langsung limbah domestik ke saluran air terbuka khususnya <i>Grey Water</i> • Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat • Umumnya septic tank warga belum sesuai standar teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan septic tank komunal • Penutupan saluran air terbuka yang menjadi tempat buangan limbah domestik • Pembangunan IPAL dan IPLT sistem kolam • Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat melalui media massa maupun temu warga
6	Sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kepedulian warga dalam mengurangi sampah melalui penanganan sampah dengan pola 3 R • Belum semua sampah kota terangkut ke TPA • Sarana pendukung pengelolaan sampah masih kurang • Minimnya sarana bin/tong sampah yang dipasang di pinggir jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi penanganan sampah dengan pola 3 R kepada masyarakat baik melalui media massa maupun temu warga • Penambahan sarana pendukung pengelolaan sampah, misal penambahan armada angkut sampah • Pengadaan sarana bin/tong yang terpasang secara terintegrasi dan terpantau
7	Kelembagaan dan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya pemahaman dari para stakeholder mengenai pentingnya pengelolaan infrastruktur regional. • Belum memadainya pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang lembaga/ badan/SKPD penyelenggara permukiman dan infrastruktur perkotaan. • Belum optimalnya kemampuan SDM lembaga penyelenggara permukiman dan infrastruktur perkotaan • Terbatasnya anggaran yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah di bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan. • Masih terbatasnya pemahaman para stakeholder tentang keikutsertaan swasta melalui KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) untuk mendanai, mengembangkan dan mengoperasikan dan memelihara prasarana permukiman dan infrastruktur perkotaan • Belum adanya ketentuan/ peraturan daerah yang dapat memayungi dan memfasilitasi kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta . 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan penuh dari Walikota dan DPRD terhadap pengelolaan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang lintas wilayah administratif (regional). • Perlunya fasilitasi koordinasi yang terencana antar lembaga atau badan daerah. • Meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan. • Mengundang keikutsertaan swasta melalui kegiatan KPS untuk ikut dalam merencanakan, memba-ngun, mengoperasikan prasarana permukiman dan infrastruktur perkotaan. • Sosialisasi mengenai KPS sebagai alternatif sumber pendanaan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan permukiman dan infrastruktur perkotaan. • Menyusun rancangan Peraturan Daerah sebagai payung penyelenggaraan KPS di bidang prasarana permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kota Muara Bungo.

Sumber : Hasil analisis permasalahan dan pembangunan, 2011

6.3. Analisis Permasalahan dan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Pendukung Kawasan Prioritas

Permasalahan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur pendukung kawasan prioritas dipengaruhi oleh faktor fisik, yaitu faktor kondisi topografi lahan, faktor kondisi tata letak lahan terhadap kondisi geografis dan lain sebagainya,

Kajian permasalahan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur pendukung kawasan prioritas sebagaimana disajikan pada tabel 6-5.



Tabel : 6-5
Permasalahan dan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Pendukung Kawasan Prioritas

Permukiman/ Infrastruktur		Permasalahan	Pembangunan
Kawasan Prioritas			
1	Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Adanya permukiman yang tergenang akibat air hujan Pengembangan permukiman terkendala lahan cekungan dan perbukitan Permukiman sebagian padat dan cenderung kumuh Tata letak permukiman tidak teratur dan ada yang terpencar-pencar. Adanya sebagian rumah-rumah yang tidak layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penanggulangan terhadap kawasan permukiman yang rawan genangan Melakukan pengembangan dan pembangunan permukiman pada lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Muara Bungo Melakukan penanganan terhadap kawasan yang padat dan cenderung kumuh Melakukan penataan permukiman agar lebih teratur Melakukan pemugaran maupun renovasi terhadap rumah yang tidak layak huni
2	Jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Banyak ditemui jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar terutama badan jalan yang kurang lebar Sebagian Jalan didaerah perumahan hanya ada satu sisi saluran samping saja, sehingga berpotensi menimbulkan genangan disisi jalan yang lain dan mengakibatkan kerusakan jalan. Masih dijumpai jalan lingkungan rusak karena pondasi jalan yang labil 	<ul style="list-style-type: none"> Standardisasi Jalan lingkungan terutama pada badan jalan Penambahan saluran samping jalan dan penambahan lobang air kearah saluran. Penanganan Pemeliharaan Jalan, Perbaikan Jalan, dengan cara dilapis ulang maupun dibongkar diganti dengan konstruksi pondasi yang lebih kuat.
3	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi penyempitan badan saluran drainase (penampang basah saluran yang kurang) Topografi wilayah yang sebagian berupa dataran, cekungan dan lereng perbukitan, mengakibatkan air sulit mengalir sehingga terjadi genangan, dan pada daerah perumahan sebagian drainase hanya ada satu sisi. Banyaknya sampah dan sedimentasi pada saluran Kurang adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi dan normalisasi saluran drainase Membuat kemiringan yang ideal air supaya kearah saluran drainase, dan pembuatan / penambahan saluran samping jalan serta penambahan gorong – gorong. Pemeliharaan Rutin terutama untuk mengatasi sedimentasi dengan melibatkan masyarakat. Mendesak kepada pihak-pihak terkait agar segera menangani permasalahan saluran drainase agar dapat difungsikan secara maksimal dan normalisasi sungai. Membuat green drainage (Lubang Resapan Biopori) Mempercepat penanganan sistem drainase
4	Air minum	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian kawasan belum terpasang pipa distribusi dari PDAM 	<ul style="list-style-type: none"> Memperluas cakupan pelayanan dengan cara mengembangkan jalur distribusi perpipaan
5	Air limbah	<ul style="list-style-type: none"> Umumnya memanfaatkan sungai sebagai ujung pembuangan air limbah Rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan IPAL dan IPLT komunal yang dapat mengolah buangan limbah Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat melalui media massa dan temu warga
6	Sampah	<ul style="list-style-type: none"> Sarana pendukung penge-lolaan sampah masih kurang Penanganan sampah individu atau komunal dilakukan dengan cara dibakar/ditimbun di lahan kosong Rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan sarana pendukung pengelolaan persampahan Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat khususnya dalam penanganan sampah melalui pola penanganan 3R kepada masyarakat baik melalui media massa maupun temu warga
7	Kelembagaan dan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Belum memadainya koordinasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang lembaga/ badan/SKPD penye-lenggara permukiman dan infrastruktur perkotaan. Belum optimalnya kemampuan SDM lembaga penyelenggara permukiman dan infrastruktur perkotaan Terbatasnya anggaran yang dapat disediakan oleh pemerintah melalui SKPD penyelenggara permukiman dan infrastruktur perkotaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlunya tim fasilitasi yang terpadu antar lembaga atau badan daerah. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan. Pemilihan lingkup kegiatan berdasarkan prioritas yang telah disepakati dengan indikator yang terukur. Memfasilitasi keikutsertaan masyarakat untuk ikut dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Sumber : Hasil analisis permasalahan dan pengembangan, 2010

6.4. Identifikasi Dan Perumusan Strategi Pembangunan Kota

Perumusan strategi pembangunan kota dengan penekanan pada potensi dan persoalan bidang permukiman dan infrastruktur dilakukan dengan pembuatan matrik SWOT (*strength/kekuatan, weaknes/kelemahan, oppotunity/peluang, threat/tantangan*). Perumusan strategi dilakukan dengan persilangan antara :

1. *Strength(S)* dengan *Opportunity (O)* atau dinamakan strategi SO
2. *Weaknes (W)* dengan *opportunity (O)* atau dinamakan strategi WO
3. *Strength(S)* dengan *Threat (T)* atau dinamakan strategi ST
4. *Weaknes (W)* dengan *Threat (T)* atau dinamakan strategi WO

Kajian matrik SWOT Pembangunan Kota MuaraBungo disajikan pada tabel 6-6, bidang permukiman disajikan pada tabel 6-7, bidang infrastruktur jalan disajikan pada tabel 6-8, bidang drainase disajikan pada tabel 6-9, bidang air minum disajikan pada tabel 6-10, bidang air limbah disajikan pada tabel 6-11 dan bidang sampah disajikan pada tabel 6-12.

Tabel: 6-6
Matrik Analisis SWOT Pembangunan Kota Muara Bungo

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p>Kekuatan /Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Muara Bungo berada pada jalan Arteri Primer Lintas Tengah Sumatera, (Jalur Padang – Bangko) yang melewati Kota Muara Bungo yang merupakan bagian dari sistem Regional - Nasional 2. Kota Muara Bungo didukung oleh jaringan transportasi darat Lintas Tengah Sumatera dan Bandara yang akan segera beroperasi 3. Masih banyak lahan belum terbangun dan potensial terbangun yang dapat dikembangkan untuk wilayah perkotaan Kota Muara Bungo (fasilitas, sarana dan prasarana perkotaan) 4. Berada pada lahan dengan topografi relatif datar (Kota Bawah/ Pusat perdagangan dan jasa) dan kawasan berbukit (Kota atas sebagai pusat pemerintahan), sehingga mudah dikembangkan sebagai wilayah perkotaan nyaman dan aman dari resiko bencana 	<p>Kelemahan/Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas Jalan Arteri Primer J Lintas Timur Sumatera yang melewati Kota Muara Bungo kurang memadai, sehingga sering terjadi pelambatan lalu lintas di wilayah kota. 2. Adanya konsentrasi pemanfaatan lahan perkotaan pada kawasan tertentu (Pusat Kota) 3. Pusat – pusat pelayanan perkotaan dan sub pusat pelayanan perkotaan yang dikembangkan kurang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. 4. Terdapat kendala dengan pengembangan lahan permukiman akibat lahan yang masih kosong cekungan dan perbukitan 5. Keterbatasan sumber air baku untuk air bersih
<p>Peluang/Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pembangunan Jalan lingkaran kota dan bandara yang ditargetkan menjadi bandara internasional akan memudahkan aksesibilitas ke dan dari Kota Muara Bungo. 2. Kota Muara Bungo dilalui Jalan Arteri Primer jalur Lintas Timur Sumatera, sehingga memberikan peluang sebagai Kota Transit. 3. Ditetapkannya Kota Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus PKNP, maka Kota Muara Bungo dapat mengembangkan kegiatan prasarana dan sarana sesuai dengan fungsi pusat yang 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan adanya jalan lingkaran kota dan bandara untuk memudahkan aksesibilitas Kota Muara Bungo 2. Mendayagunakan lahan-lahan relatif masih kosong dan mempunyai topografi yang relatif datar untuk pengembangan wilayah perkotaan 3. Memaksimalkan Kota Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus PKNP 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peningkatan jalan dengan pelebaran Jalan Arteri Primer Lintas Tengah Sumatera untuk semakin memantapkan posisi Kota Muara Bungo sebagai Kota transit. 2. Mengurangi konsentrasi pemanfaatan lahan di Pusat Kota untuk pengembangan kota 3. Melengkapi sarana dan prasarana pada pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan untuk mendukung Kota Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus PKNP

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

<p>diemban tersebut.</p> <p>4. Mulai banyaknya investor ke Kota Muara Bungo, akan semakin menggerakkan perekonomian di Kota Muara Bungo</p>		<p>4. Mencari sumber-sumber air baku untuk air bersih dalam usaha memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan</p>
<p>Tantangan/Threats (T)</p> <p>1. Tingginya arus pendatang yang tinggal dan melakukan usaha di Bungo, akan menembah beban pelayanan kota</p> <p>2. Adanya air hujan yang dapat menggenangi beberapa titik di Kota Muara Bungo</p> <p>3. Air sungai yang mengalir di Kota Muara Bungo kurang cocok untuk dijadikan sumber air baku untuk air bersih.</p>	<p>Startegi ST</p> <p>1. Mengusahakan peningkatan pelayanan kota dalam bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan, yang semakin menjadikan masyarakat merasa aman, nyaman dan krasan bertempat tinggal dan melakukan kegiatan usaha di Kota Muara Bungo</p> <p>2. Memanfaatkan lahan kosong yang aman untuk pengembangan kota</p> <p>3. Menghindari pengembangan kota pada wilayah-wilayah perbukitan</p>	<p>Strategi WT</p> <p>1. Menangulangi munculnya bangunan-bangunan liar yang tidak sesuai dengan kebijakan peruntukan ruang kota</p> <p>2. Segera dilakukan antisipasi terhadap kawasan-kawasan yang terindikasi memiliki kecenderungan menjadi kumuh</p>

Tabel : 6-7

Matrik Analisis SWOT Pembangunan Permukiman Kota Muara Bungo

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p>Kekuatan /Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk lahan permukiman 2. Kepadatan penduduk tergolong masih sedang dan rendah 3. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 4. Banyak tumbuhnya rumah-rumah sewa di Kota Muara Bungo 	<p>Kelemahan/Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya jumlah pemukiman yang kurang sebanding dengan arus pertambahan penduduk 2. Pengembangan perumahan skala besar terkendala sulitnya mendapatkan lahan datar yang luas 3. Adanya beberapa kawasan permukiman yang mulai atau cenderung menjadi kumuh
<p>Peluang/Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengembang perumahan yang sudah dan akan membangun perumahan di Kota Muara Bungo 2. Tersedianya fasilitas kredit pemilikan rumah dengan bunga yang relatif rendah 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan lahan kosong untuk dibangun perumahan oleh para pengembang perumahan guna memenuhi kebutuhan rumah yang terus meningkat akibat tingginya pertumbuhan penduduk pendatang 2. Melakukan penataan rumah yang belum padat penghuninya 3. Memanfaatkan bantuan pemerintah untuk membangun rumah susun sewa (rusunawa) 4. Memanfaatkan kredit pemilikan rumah dengan bunga yang relatif rendah untuk pembangunan perumahan 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pengembang perumahan untuk membangun perumahan 2. Membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah dengan kredit bunga yang rendah
<p>Tantangan/Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan kebutuhan permukiman yang semakin tinggi sejalan dengan tingginya pertumbuhan penduduk 2. Masih banyak lahan-lahan belum terbangun yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusahakan peningkatan pelayanan kota dalam bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan, yang semakin menjadikan masyarakat merasa aman, nyaman dan kersan 2. Mendorong tumbuhnya kegiatan pembangunan permukiman perkotaan baik yang dilakukan oleh masyarakat dan pengusaha maupun kemungkinan dibangunnya rumah susun sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peran serta masyarakat dan investor untuk membangun permukiman di Kota Muara Bungo

Tabel : 6-8

Matrik Analisis SWOT Jalan Lingkungan Kota Muara Bungo

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p>Kekuatan /Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi jalan lingkungan di wilayah perkotaan umumnya cukup baik 2. Lebar jalan lingkungan di komplek perumahan cukup memenuhi syarat untuk lalu lintas kendaraan 3. Umumnya jalan lingkungan terhubung dengan jalan utama 4. Adanya pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan 	<p>Kelemahan/Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada wilayah perkampungan maupun pinggiran kota masih dijumpai jalan lingkungan yang rusak 2. Umumnya lebar jalan lingkungan wilayah perkampungan maupun pinggiran kota kurang memenuhi syarat keamanan lalu lintas kendaraan 3. Pada wilayah komplek perumahan tertentu, jalan lingkungan langsung terhubung jalan utama, sehingga akan membahayakan kendaraan 4. Program pembangunan/ peningkatan jalan lingkungan belum menjangkau seluruh wilayah Kota Muara Bungo
<p>Peluang/Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bantuan pembangunan/peningkatan jalan lingkungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, lembaga sosial maupun bantuan dari luar negeri 2. Integrasi jaringan jalan lingkungan dengan Jalan Arteri I 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan jalan lingkungan di wilayah perkotaan yang mempunyai kondisi yang cukup baik 2. Memanfaatkan lebar jalan lingkungan di komplek perumahan yang cukup memenuhi lalu syarata kelancaran dan keamanan lintas kendaraan 3. Melakukan integrasi jaringan jalan lingkungan dengan Jalan Arteri 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembangunan/peningkatan jalan lingkungan di wilayah perkampungan maupun pinggiran kota dengan memanfaatkan berbagai dana bantuan 2. Melakukan penataan sirkulasi jalan lingkungan dengan jalan-jalan utama 3. Melakukan pemerataan pembangunan/peningkatan jalan-jalan lingkungan diseluruh wilayah Kota Muara Bungo
<p>Tantangan/Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai munculnya beberapa ruas jalan lingkungan yang mengalami kerusakan. 2. Kurang sinkronisasi antar programr terkait terhadap kebutuhan pembangunan/peningkatan jalan lingkungan 2. Koordinasi pembangunan/penigkatan jalan lingkungan belum maksimal 	<p>Startegi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meperbaiki jalan jalan lingkungan yang rusak 2. Melakukan sinkronisasi antar program untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan/peningkatan jalan lingkungan 3. Meningkatkan koordinasi pembangunan/penigkatan jalan lingkungan 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendorong peran serta masyarakat setempat untuk turut berpartisipasi memelihara jalan lingkungan 2. Segera dilakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk program pembangunan/peningkatan jalan lingkungan di seluruh wilayah Kota Muara Bungo

Tabel : 6-9
Matrik Analisis SWOT Drainase

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p>Kekuatan /Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat jaringan drainase di wilayah permukiman perkotaan 2. Jaringan drainase telah terhubung dengan drainase utama 3. Telah terdapat Masterplan jaringan drainase Kota Muara Bungo 4. Telah dilakukan pembangunan/peningkatan drainase 	<p>Kelemahan/Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi penyempitan badan saluran drainase 2. Banyaknya sampah dan sedimentasi pada badan saluran 3. Kurang adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase
<p>Peluang/Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan sistem jaringan drainase secara terpadu 2. Integrasi sistem drainase dengan wilayah sekitar Kota Muara Bungo 3. Adanya bantuan pembangunan/peningkatan saluran drainase dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, lembaga sosial maupun bantuan dari luar negeri 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan jaringan drainase di wilayah permukiman perkotaan 2. Memanfaatkan jaringan drainase yang sudah terhubung dengan drainase utama 3. Melakukan identifikasi terhadap program-program pembangunan/peningkatan drainase 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penataan jaringan drainase secara terpadu dan terintegrasi 2. Melakukan review terhadap jaringan drainase yang mengalami permasalahan 3. Melakukan pembangunan/peningkatan jaringan drainase dengan memanfaatkan bantuan dari luar
<p>Tantangan/Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya potensi luapan banjir dari sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Muara Bungo 2. Terjadinya hujan yang deras, mengakibatkan kapasitas saluran drainase tidak mampu menampung air hujan, sehingga terjadi genangan. 	<p>Startegi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan normalisasi sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Muara Bungo 2. Melakukan penanganan sistem drainase akibat terjadinya banjir dan pengaruh pasang surut 3. Melakukan penanganan sistem drainase akibat hujan yang deras 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendesak kepada pihak-pihak terkait agar segera menangani permasalahan saluran drainase agar dapat difungsikan secara maksimal 2. Mempercepat penanganan sistem drainase yang terkait dengan rob/air pasang maupun air hujan.

Tabel : 6-10
Matrik Analisis SWOT Air Bersih

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p>Kekuatan /Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat jaringan air bersih dari PDAM 2. Terdapat sumber air di wilayah Kab. Bungo yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk peningkatan dan perluasan jangkauan layanan kepada masyarakat 3. Jumlah penduduk yang semakin banyak dan terus meningkat yang membutuhkan layanan air bersih 	<p>Kelemahan/Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kemungkinan kebocoran air perpipaan 2. Kualitas air bersih masih perlu ditingkatkan 3. Kuantitas dan kontinuitas air bersih masih terbatas 4. Keterbatasan sarana dan prasarana 4. Semantik tingginya animo masyarakat mengkonsumsi air kemasan 5. Banyak masyarakat yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air bersih (dengan membuat sumur gali, sumur bor dan sejenisnya)
<p>Peluang/Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama pengelolaan air bersih dengan wilayah sekitar Kota Muara Bungo 2. Adanya peluan bantuan pembangunan/peningkatan jaringan air bersih dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, lembaga sosial maupun bantuan dari luar negeri 3. Kerjasama dengan lembaga lembaga lingkungan dalam pengelolaan air bersih 4. Pelayanan air bersih masih terbatas, baru 14 % untuk tingkat Kabupaten, dan 40 % untuk skala Kota Muara Bungo, sehingga masih banyak yang membutuhkan pelayanan air bersih sekaligus sebagai peluang bisnis investasi bagi PDAM. 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan memluas jaringan pelayanan air bersih dari PDAM dan melakukan kerjasama dengan wilayah sekitar untuk pengembangannya 2. Memanfaatkan sungai-sungai di wilayah Kota Muara Bungo yang masih memungkinkan dikembangkan pemanfaatannya sebagai sumber air bersih 3. Memanfaatkan jumlah penduduk di Kota Muara Bungo yang cukup banyak sebagai konsumen air bersih 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan inventarisasi kemungkinan kebocoran-kebocoran air perpipaan 2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas layanan air bersih dengan memanfaatkan bantuan pembangunan/ peningkatan jaringan air bersih dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, lembaga sosial maupun bantuan dari luar negeri 3. Meningkatkan sumber air baku dengan melakukan kerjasama dengan wilayah disekitar Kota Muara Bungo 4. Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih dengan memanfaatkan berbagai sumber bantuan dari luar
<p>Tantangan/Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya pencemaran terhadap sumber air bersih 2. Adanya kerusakan jaringan air bersih akibat penggalian tanah untuk bangunan dan kegiatan lain. 	<p>Startegi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menanggulangi terjadinya pencemaran air bersih terhadap jaringan perpipaan yang sudah ada 2. Menghindari/ mengantisipasi kemungkin kerusakan jaringan air bersih, kebocoran, pencurian air bersih, dan sejenisnya. 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sanksi kepada konsumen akibat adanya pencurian air bersih 2. Melakukan uji laboratorium secara berkala terhadap kualitas air bersih utamanya air minum 3. Memberikan sanksi kepada pelaku pengambilan air tanah

dalam secara berlebihan

Tabel : 6-11
Matrik Analisis SWOT Air Limbah

<p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p>	<p>Kekuatan /Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian penduduk membuang limbah cair ke saluran drainase 2. Umumnya penduduk membuang limbah padat (tinja manusia) ke tempat septic tank 3. Tersedia Prasarana penanganan air limbah (truk tinja) 4. Terdapat IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja) 	<p>Kelemahan/Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana infrastruktur pengolahan air limbah 2. Tidak semua bangunan rumah tangga mempunyai prasarana dan sarana air limbah 3. Adanya kebocoran sarana dan prasarana air limbah 4. Belum ada IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja) terpusat di Kota Muara Bungo
<p>Peluang/Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan lembaga lembaga lingkungan dalam pengelolaan air limbah 2. Adanya bantuan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air limbah dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, lembaga sosial maupun bantuan dari luar negeri 3. Kerjasama dengan wilayah disekitar Kota Muara Bungo dalam mengelola air limbah 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan saluran drainase untuk buangan air limbah cair 2. Memanfaatkan septic tank yang ada untuk membuang limbah padat (tinja manusia) 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang ada seperti truk tinja dan IPLT dan melakukan kerjasama dengan lembaga lembaga lingkungan maupun kerjasama dengan wilayah sekitar Kota Muara Bungo untuk pengembangannya. 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana air limbah dengan memanfaatkan bantuan dari luar 2. Menanggulangi kerusakan/kebocoran air limbah 3. Memperbaiki kerusakan IPLT serta melakukan kerjasama dengan lembaga lingkungan dalam pengelolaan air limbah
<p>Tantangan/Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi pencemaran lingkungan terhadap pengelolaan air limbah 2. Timbulnya dampak lingkungan akibat pencemaran air limbah 	<p>Startegi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan terhadap pengelolaan air limbah 2. Melakukan analisa dampak lingkungan untuk mengantisipasi pencemaran air limbah 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera melakukan perbaikan sarana dan prasarana air limbah untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan 2. Segera melakukan penanggulangan dampak lingkungan akibat pencemaran air limbah

Tabel : 6-12
Matrik Analisis SWOT Persampahan

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p>Kekuatan /Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sarana dan prasarana sampah seperti armada, bak sampah, TPS dan TPA 2. Sebagian penduduk perkotaan telah mendapat pelayanan sampah 3. Sebagian penduduk yang memiliki pekarangan luas, mengelola sampah rumah tangga da sampah pekarangan dengan ditimbun di dalam tanah dan sebagian dibakar di pekarangan 	<p>Kelemahan/Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sampah masih terbatas, belum menjangkau seluruh wilayah 2. Produksi timbulan ada sebagian yang liar dan belum diwadahi, dan belum dipisahkan antara sampah organik dan non organik atau sampah padat dan sampah lainnya 3. Armada angkutan sampah terbatas 4. Belu diterapkannya pengelolaan sampah dengan model 3 R (Re-just, Re-use dan Re-cycle) 5. Kapasitas TPA memiliki masa pemakaian terbatas, masih perlu diperluas
<p>Peluang/Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bantuan pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana persampahan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, swasta, lembaga sosial maupun bantuan dari luar negeri 2. Masih dimungkinkan dimasyarakatkannya pengelolaan sambah secara mandiri bagi penduduk yang memiliki kavling/ pekarangan luas. 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana sampah yang ada 2. Memaksimalkan pelayanan sampah yang telah dilakukan 3. Meningkatkan dan meremajakan prasarana dan sarana yang sudah tua dan menambah sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan prima bidang pengelolaan persampahan kota Muara Bungo 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan sampah dengan memanfaatkan berbagai bantuan dari luar 2. Menambah jumlah alat angkutan untuk mengangkut timbulan sampah yang semakin bertambah 3. Melakukan kerjasama dengan wilayah disekitar Kota Muara Bungo, untuk menyediakan TPA yang lebih luas dan jangka panjang umur pemanfatan dan lokasinya yang jauh dari kawasan perkotan Muara Bungo
<p>Tantangan/Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu antisipasi timbulnya pencemaran lingkungan akibat pengelolaan persampahan 	<p>Startegi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan terhadap pengelolaan sampah 2. Melakukan analisa dampak lingkungan untuk mengantisipasi pencemaran sampah 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera melakukan penambahan sarana dan prasarana sampah untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan 2. Segera melakukan penanggulangan dampak lingkungan akibat pencemaran sampah

6.5. Identifikasi Kebutuhan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, maka dihasilkan rumusan strategi pembangunan kota dibidang permukiman dan infrastruktur. Dari rumusan strategi tersebut, maka dapat diidentifikasi kebutuhan strategi pembangunan kota bidang permukiman dan infrastruktur yang diuraikan sebagai berikut:

A. Identifikasi Kebutuhan Strategi Pembangunan Permukiman

1. Strategi pembangunan permukiman bagi masyarakat menengah dan berpenghasilan rendah
2. Strategi penanganan permukiman padat dan kumuh di wilayah pantai dan permukiman padat di pusat kota
3. Strategi penanganan permukiman yang tidak layak huni
4. Strategi penanganan kawasan permukiman yang terkena rob/genangan
5. Strategi pendanaan melalui keikutsertaan masyarakat dan swasta
6. Strategi kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam menangani prasarana permukiman

B. Identifikasi Kebutuhan Strategi Pembangunan Infrastruktur

1. Air Minum
 - a. Strategi penambahan supply sumber air baku baru
 - b. Strategi pengembangan cakupan pelayanan
 - c. Strategi peningkatan kinerja PDAM
 - d. Strategi menangani kebocoran air
 - e. Strategi pendanaan melalui KPS
 - f. Strategi kelembagaan yang lintas sektoral dan lintas administratif

2. Air Limbah/ Jamban

- a. Strategi pembangunan pengelolaan system off-site skala kota untuk permukiman padat dan industri rumah tangga
- b. Strategi peningkatan cakupan kepemilikan jamban keluarga yang dilengkapi dengan septiktank
- c. Strategi peningkatan cakupan pelayanan septiktank komunal di wilayah permukiman padat
- d. Strategi sosialisasi kepada masyarakat
- e. Strategi pendanaan melalui keikutsertaan masyarakat dan swasta melalui KPS
- f. Strategi kelembagaan pengelola sistem off-site yang efektif

3. Sampah

- a. Strategi peningkatan cakupan pelayanan
- b. Strategi penanganan sampah 3R melalui partisipasi masyarakat
- c. Strategi manajemen pengelolaan persampahan
- d. Strategi kerjasama antar daerah
- e. Strategi pendanaan melalui keikutsertaan swasta melalui KPS
- f. Strategi kelembagaan yang dapat mengelola prasarana permukiman dan infrastruktur perkotaan yang efektif

4. Jalan Lingkungan

- a. Strategi penanganan jalan lingkungan yang rusak
- b. Strategi penanganan kebutuhan pembangunan jalan lingkungan baru
- c. Strategi standardisasi jalan lingkungan

- d. Strategi keikutsertaan masyarakat untuk ikut memelihara
- e. Strategi kelembagaan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang efektif

5. Drainase

- a. Strategi penanganan genangan sementara air hujan
- b. Strategi penanganan normalisasi saluran drainase
- c. Strategi pembuatan saluran drainase baru
- d. Strategi keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan drainase
- e. Strategi kelembagaan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang efektif

Tabel 6 - 13
**MATRIK ANALISIS KORELASI STRATEGI
DALAM SKEMA MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERKOTAAN**

No	Strategi	Aspek yang diamati	Program	Kesesuaian dengan Program Pusat	Kesesuaian dengan Program Kerja Pemerintah Kab./ Kota	Kebutuhan Sumber Pembiayaan	Kemungkinan Waktu Penerapan / Pelaksanaan	Keterangan
A STRATEGI SKALA KOTA								
1	Mengamankan fungsi sempadan Sungai Batang Bungo dan Batang Tebo	Fisik	Penataan/ Relokasi permukiman rawan bencana genangan dan banjir	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun keempat	
		Sosial Ekonomi Masyarakat	Menyelamatkan jiwa, harta masyarakat dan asset lainnya					
		Kelembagan	Dinas PU, Bappeda, Dinas Perkotaan, BPN, PDAM, BPN, Badan Pemberdayaan masyarakat, Camat dan Lurah setempat					
		Pembiayaan						
2	Penataan kawasan permukiman pinggir sungai di kawasan perkotaan	Fisik	Revitalisasi kawasan permukiman pinggir sungai / Pembangunan Kota Pinggir Sungai	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun Pertama dan Kedua	Keberadaan Sungai Batang Tebo dan sungai Batang Bungo di Kota Muara Bungo, mestinya dapat menjadi icon, citra dan wajah Kota Sungai bagi Kota Muara
		Sosial Ekonomi Masyarakat	Kawasan lebih berkembangnya fungsi tetapi fungsi utama sebagai lindung sungai tetap terjaga bahkan semakin kuat dengan bangunan yang memkuat konstruksi tebing, tanggul dan bantaran sungai,					
			sirkulasi pergerakan semakin luas dan mengurangi kepadatan sirkulasi pergerakan pusat kota dengan dibangunnya jaring-jaring jalan dan transportasi di kawasan pinggir					



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

			<p>sungai</p> <p>Pemanfaatan lahan kota yang lebih ekonomis sekaligus memperkuat konstruksi lindung sungai dan memngurangi kepadatan penduduk dan kegiatan pusat kota</p> <p>Perubahan citra kawasan pinggiran sungai dari halaman belakang menjadi halaman depan atau wajah kota, dan berkembangnya kegiatan wisata kota melalui pembangunan taman kota di pinggiran sungai, arena wisata sungai dll</p> <p>Pengembangan forum komunikasi dengan masyarakat yang melakukan kegiatan di sungai dan pinggiran sungai (penambangan emas liar, dan kegiatan lainnya yang bisa merusak aliran, mencemari air sungai, dan kerusakan lingkungan kawasan pingiran sungai) untuk solusi alih matapekerjaan</p>					Bungo
		Kelembagaan	Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas ESDM, Badan Pemberdayaan Masyarakat					
		Pembiayaan						
3	Penyediaan permukiman layak huni dan murah bagi penduduk pendatang dan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Muara Bungo	1	<p>Fisik</p> <p>Pembangunan rumah susun/ pondok boro murah bagi kaum pendatang dan masyarakat berpenghasilan rendah di dekat kawasan pusat kegiatan Kota Muara Bungo</p> <p>Sosial Ekonomi Masyarakat</p> <p>menyediakan hunian layak dan murah, serta meringankan beban ekonomi biaya tinggi bagi kaum pendatang/ penduduk boro dan masyarakat berpenghasilan rendah</p>	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim dan Kementerian an Perumahan Rakyat	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun Pertama dan Kedua	Pertumbuhan penduduk Kota Muara Bungo yang tinggi menuntut ketersediaan hunian yang layak dan sehat yang memadai
		Kelembagaan	Dinas Perkotaan, Dinas PU					
		Pembiayaan						

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

4	Penyediaan Tempat Pemakaman Umum yang terencana dan memadai untuk jangka panjang	1	Fisik	Pembangunan kawasan pemakaman umum Kota Muara Bungo	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun Pertama dan Kedua	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	tersedianya tempat pemakaman umum yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat					
			Kelembagaan	Dinas Perkotaan, Dinas PU					
			Pembiayaan						
5	Pemantapan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota Muara Bungo	1	Fisik	Penyusunan RP4D Kabupaten Bungo	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Memantapkan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota Muara Bungo					
			Kelembagaan	Bappeda. Dinas Perkotaan, Dinas PU					
			Pembiayaan						
6	Bidang Air Minum	1	Fisik	1) Bantek Penyusunan Master Plan Pengembangan Pelayanan Air bersih skala Perkotaan Muara Bungo yang mencakup 5 wilayah Kecamatan 2) Bantek Penyusunan Studi kelayakan penambahan investasi dan peningkatan kinerja pelayanan Air Minum Perkotaan Muara Bungo 3) Bantek Penyusunan Advisory peyehatan kelembagaan PDAM "PANCURAN TALAGO" Kab. Bungo	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat perkotaan Muara Bungo akan air bersih, yang saat ini baru terlayani sekitar 40 % Terjaminnya tingkat kebersihan konsumsi air minum masyarakat					
			Kelembagaan	PDAM "Pancuran Talago" Kabupaten Bungo					
			Pembiayaan						

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

		2	Fisik	Perluasan Pembangunan Jaringan pipa pelayanan air minum PDAM "Pancuran Talago" Kabupaten Bungo	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun keempat	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat perkotaan Muara Bungo akan air bersih, yang saat ini baru terlayani sekitar 40 % Terjaminnya tingkat kebersihan konsumsi air minum masyarakat					
			Kelembagaan	PDAM "Pancuran Talago" Kabupaten Bungo					
			Pembiayaan						
7	Bidang Drainase	3	Fisik	Bantek Penyusunan Mastplan Drainase Kota Muara Bungo	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Terhindarnya sebagian masyarakat dari resiko genangan/ banjir					
			Kelembagaan	Dinas PU					
			Pembiayaan						
		4	Fisik	Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Kuarter Kota Muara Bungo	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun ke empat	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Perluasan kawasan bebas genangan da banjir					
			Kelembagaan	Dinas PU					
			Pembiayaan						
8	Bidang Persampahan	1	Fisik	1) Bantek Penyusunan Mastplan Pengelolaan Persampahan Kota Muara Bungo yang Mencakup 5 wilayah kecamatan 2) Studi kelayakan dan Master Plan Pembangunan TPA sampah baru di luar kawasan perkotaan Muara Bungo 3) AMDAL TPA calon lokasi TPA baru di luar kawasan perkotaan Muara Bungo	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya	5 Tahun pertama	

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

			Sosial Ekonomi Masyarakat	Terencanakannya manajemen pengelolaan persampahan Kota secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan			Masyarakat		
			Kelembagaan	Dinas PU					
			Pembiayaan						
		2	Fisik	Pengadaan Lahan untuk TPA baru di luar kawasan perkotaan Muara Bungo	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Keberihan dan kesehatan kota					
			Kelembagaan	Dinas PU, BPN, Dinas Perkotan					
			Pembiayaan						
		4	Fisik	Pembangunan TPA baru di luar perkotaan Muara Bungo	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun ke dua	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Terhindarnya masyarakat kawasan perkotaan dari polusi sampah					
			Kelembagaan	Dinas Perkotaan					
			Pembiayaan						
		3	Fisik	Pengadaan baru dan peremajaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kota Muara Bungo	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun ke empat	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya dan meluasnya pelayanan pengelolaan persampahan bagi masyarakat Kota Muara Bungo					
			Kelembagaan	Dinas Perkotaan, Dinas PU, dan Kesehatan, PKK					
			Pembiayaan						
9	Bidang Sanitasi	1	Fisik	Bantek Penyusunan Mastplan Pengelolaan air limbah dan Sanitasi Kota Muara Bungo/ Rencana Induk Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Air Limbah Perkotaan	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn	5 Tahun pertama	

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

			Sosial Ekonomi Masyarakat	Terencanakannya manajemen pengelolaan air limbah dan sanitasi Kota secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan		Kota Muara Bungo	Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat		
			Kelembagaan	Dinas PU, Dinas Perkotaan					
			Pembiayaan						
		2	Fisik	Pembangunan IPAL dan IPLT Kota Muara Bungo	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun ke lima	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Terwujudnya lingkungan hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Muara Bungo secara berkelanjutan					
			Kelembagaan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, dan Kesehatan, PKK					
			Pembiayaan						
10	Bidang Jalan	1	Fisik	Bantek Penyusunan Mastplan Penataan Jalan Kota	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Terencanakannya kegiatan penataan jalan kota secara terpadu , sinergi dan terintegrasi					
			Kelembagaan	Dinas PU, Dinas Perkotaan					
			Pembiayaan						
		2	Fisik	Pembangunan Median jalan dan landscape jalan	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama sd 5 Tahun Kedua	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Terjaminnya kelancaran transportasi, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan dan pejalan kaki					
			Kelembagaan	Dinas PU, Dinas Perkotaan					
			Pembiayaan						
11	Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	Fisik	1. Bantek Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Perdagangan, Kawasan Pinggiran Sungai, dan Kawasan Pusat Pemerintahan, dan Kawasan Khusus lainnya	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn	5 Tahun pertama sd 5 Tahun Kedua	

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

			Sosial Ekonomi Masyarakat	Tertatanya lingkungan yang sehat, aman, nyaman dan serasi bagi masyarakat baik untuk bermukim maupun mengembangkan usaha ekonomi dan memelihara tata nilai budaya masyarakat, maupun pelayanan pemerintahan		Kota Muara Bungo	Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat		
			Kelembagan	Dinas PU, Bappeda, Dinas Perkotaan, BPN, PDAM, Badan Pemberdayaan masyarakat, Camat dan Lurah setempat					
			Pembiayaan						
		1	Fisik	1. Pengembangan Sistem Infirmasi Geografi (SIG) Perijinan Bangunan/ IMB berbasis GIS	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Mengantisipasi tertib bangunan, tertib lingkungan dan menghindari benturan kepentingan di kemudian hari					
			Kelembagan	Dinas Perkotaan dan Dinas PU					
			Pembiayaan						
B SKALA KAWASAN PRIORITAS TERPILIH									
1 Kelurahan Jaya Setya RT 02 s/d 06 dan RT 12 s/d 14									
1	Bidang Jalan	1	Fisik	Peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak (peninggian, pengaspalan/ betonisasi)	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	keteraturan lingkungan dan kelacaran mobilitas					
			Kelembagan	Dinas PU,					
			Pembiayaan						
2	Perumahan/	2	Fisik	Pemugaran rumah kurang layak huni	RENSTR	RPJMD,	BLN/ APBN/	5 Tahun	

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

	permukiman, terutama di RT 12 s/d 14		Sosial Ekonomi Masyarakat	Terwujudnya rumah sehat dan layak huni	A PU-CK Dit. Bangkim	RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	pertama	
			Kelembagaan	Dinas PU					
			Pembiayaan						
3	Bidang Drainase	3	Fisik	Pembangunan dan normalisasi saluran drainase primer dan sekunder	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Menyelamatkan jiwa, harta masyarakat dan asset sosial ekonomi lainnya dari resiko banjir dan genangan					
			Kelembagaan	Dinas PU,					
			Pembiayaan						
4	Bidang Sanitasi dan Air Limbah terutama di RT 12 s/d 14	4	Fisik	Pembangunan jamban jamak dan pemasyarakatan gotong royong kerja bakti pembersihan got/ saluran air limbah rumah tangga dan pemberantasan sarang nyamuk	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Kebersihan dan kesehatan lingkungan dan masyarakat					
			Kelembagaan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Dinas Kesehatan, PKK Kelurahan					
			Pembiayaan						
5	Bidang Persampahan terutama di RT 12 s/d 14	5	Fisik	Pemasyarakatan penyediaan bak sampah dan pengelolaan sampah secara mandiri, gerakan kebersihan lingkungan, dan penyediaan container sampah	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Kebersihan dan kesehatan lingkungan dan masyarakat					
			Kelembagaan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Dinas Kesehatan, PKK Kelurahan					
			Pembiayaan						

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

6	Bidang Air Minum	6	Fisik	Peningkatan dan Perluasan pelayanan air minum PDAM	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun keempat	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan air minum serta terjamainnya kesehatan masyarakat					
			Kelembagaan	PDAM					
			Pembiayaan						
7	Bidang Penataan bangunan dan Lingkungan	7	Fisik	Peninggian lantai bangunan	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun keempat	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Mewujudkan hunian yang sehat, aman, nyaman dan bebas genangan					
			Kelembagaan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Badan Pemberdayaan masyarakat,					
			Pembiayaan						
2	Kelurahan Batang Bungo, Kec. Pasar Muara Bungo, (RW.02 / RT.05, 06, 07) Permukiman di Sebelah belakang dan sebelah kiri Pasar Atas								
1	Bidang Jalan	1	Fisik	Peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak (pengaspalan/ betonisasi)	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Kebersihan dan kelancaran mobilitas					
			Kelembagaan	Dinas PU,					
			Pembiayaan						
2	Bidang Drainase	2	Fisik	Pembangunan dan normalisasi saluran drainase lingkungan sekaligus berfungsi sebagai saluran pembuangan air limbah	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya	5 Tahun pertama	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Perluasan kawasan bebas genangan dan luapan air kotor an air hujan Kebersihan dan kesehatan lingkungan dan masyarakat					
			Kelembagaan	Dinas PU					

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

		Pembiayaan				Masyarakat		
3	Bidang Sanitasi dan Air Limbah terutama di sekitar Pasar Atas	3	Fisik	Pembangunan jamban umum, kampanye kerja bakti gotong royong pembersihan saluran, dan gerakan pemgerantasan sarang nyamuk	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Kebersihan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan				
			Kelembagan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Dinas Kesehatan, PKK Kelurahan				
			Pembiayaan					
4	Bidang Persampahan	4	Fisik	Pemasyarakatan penyediaan bak sampah dan pengelolaan sampah secara mandiri, dan gerakan kebersihan lingkungan	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun keempat
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Kebersihan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan				
			Kelembagan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Dinas Kesehatan, PKK Kelurahan				
			Pembiayaan					
3	Kel. Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kp.Lorong Pepaya (RT.01, 02, 03, 04) di RW 2							
1	Bidang Drainase	1	Fisik	Pembangunan dan normalisasi saluran drainase lingkungan sekaligus berfungsi sebagai saluran pembuangan air limbah sepanjang sekitar 350 m	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Perluasan kawasan bebas genangan dan luapan air kotor an air hujan				
			Kelembagan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Dinas Kesehatan, PKK Kelurahan				
			Pembiayaan					
2	Bidang Sanitasi dan Air Limbah	2	Fisik	Pemasyarakatan gerakan kerja bakti gotong royong pembersihan saluran, dan gerakan pemgerantasan sarang nyamuk secara periodik	RENSTR A PU-CK Dit.	RPJMD, RTRW Kab.Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab.,	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo, 2011

			Sosial Ekonomi Masyarakat	Kebersihan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan	Bangkim	dan RUTR Kota Muara Bungo	Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	keempat	
			Kelembagan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Dinas Kesehatan, PKK Kelurahan					
			Pembiayaan						
3	Bidang Persampahan	3	Fisik	Pemasyarakatan penyediaan bak sampah dan pengelolaan sampah secara mandiri, dan gerakan kebersihan lingkungan	RENSTR A PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun keempat	
			Sosial Ekonomi Masyarakat	Menyelamatkan jiwa, harta masyarakat dan asset lainnya					
			Kelembagan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Dinas Kesehatan, PKK Kelurahan					
			Pembiayaan						

Bab 7

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

7.1. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Bungo 2012 - 2016

Berdasarkan pada maksud dan tujuan dari kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Muara Bungo adalah untuk Pengembangan dan Pembangunan Kota Muara Bungo selain selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) juga tetap harus sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Bungo tahun 2012 – 2016 yaitu :

7.1.1. Visi Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo 2012 - 2016

“Bungo Yang Mandiri, Aman, dan Sejahtera Tahun 2016”

(Bungo MAS 2016)

- Mandiri** : Kondisi yang menggambarkan terwujudnya kemandirian masyarakat dan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik, sehingga menjadikan masyarakat dan pemerintah yang tangguh dan mandiri.
- Aman** : Kondisi yang memperlihatkan perwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia yang tinggi.

Sejahtera : Kondisi semua lapisan masyarakat dapat terpenuhi hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang, dan perumahan secara merata.

7.1.2. Misi Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2012 – 2016 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa ke hadirat Allah SWT, serta meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan udara yang mendorong sekaligus mendukung kemajuan perekonomian daerah.
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah, efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara prima.
4. Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri kecil, perdagangan dan jasa, serta koperasi.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara cerdas dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
7. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui partisipasi aktif masyarakat.
8. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan beragama, adat istiadat dan budaya guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat



7.1.3. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bungo, maka ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam bentuk :

1. Terwujudnya pusat pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.
2. Terwujudnya pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas.
3. Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan dan keunggulan daerah.
4. Terwujudnya infrastruktur dasar layanan masyarakat yang berkualitas dan tersedia lengkap.
5. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan kepastian hukum.

7.1.4. Penjabaran Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo ke dalam Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Penjabaran Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo ke dalam Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) adalah pada Misi ke-2 (dua) dan Misi ke-7 (tujuh) yaitu :

Misi Kedua :

Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan udara yang mendorong sekaligus mendukung kemajuan perekonomian daerah

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terselenggaranya percepatan pembangunan Infrastruktur	Pemenuhan fasilitas infrastruktur pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan daerah belakangnya meningkatkan akses ke potensial/sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan system prasarana transportasi terpadu, prasarana transportasi yang akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan secara serasi dengan daerah lain• Meningkatkan akses ke daerah-daerah potensial/sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar• Pembangunan bandara sebagai salah satu landasan daerah
		Penyelenggaraan Pembangunan fasilitas layanan transportasi daerah	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya infrastruktur pedesaan melalui pendekatan daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal• Pembangunan prasarana transportasi yang akan mendukung pemerataan pembangunan intra yang ditunjang dengan system prasarana transportasi sungai• Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu : penataan system jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, fasilitas dan rambu jala, penegakan hukum dan disiplin di jalan
		Pembangunan dan penataan infrastruktur yang telah dibangun	<ul style="list-style-type: none">• Mensinergiskan system infrastruktur dengan konsep tata ruang daerah• dengan kebijakan tata ruang daerah Mengharmonisaisikan keterpaduan system• Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan non formal milik pemerintah
2	Terpenuhinya pembangunan Infrastruktur energy dan listrik	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energy dan terbarukan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan energi menciptakan alternative dari potensi setempat dan mengoptimalkan penggunaan energy terbarukan• Pemulihan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta keandalannya terutama di daerah krisis listrik serta daerah terpencil dan pedesaan• Peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumberdaya energy
3	Terciptanya kualitas dan	Ketersediaan jaringan irigasi dan	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan sumberday air dilaksanakan

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

	kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	kebutuhan air bersih yang merata	dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendaya gunaan <ul style="list-style-type: none">• Pendaya gunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi• Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan air irigasi• Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga di daerah rawan deficit air, daerah tertinggal dan strategis
		Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai pendukung system jaringan di daerah potensi	<ul style="list-style-type: none">• Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berbasis partisipasi masyarakat• Penataan system irigasi dalam mendukung peningkatan pemanfaatan lahan dan produksi pertanian• Meningkatkan upaya pengendalian kecenderungan alih fungsi lahan, dengan mengoptimalkan system jaringan irigasi yang telah ada dan yang akan dibangun
4	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur perumahan	Menciptakan kualitas dan kuantitas kebutuhan umum perumahan dan pemukiman	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman• Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan pesisir• Meningkatkan peyediaan prasarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat• Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam investasi dan pengelolaan bersama terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat

Misi Ketujuh:

Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui partisipasi aktif masyarakat

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh	Menciptakan pusat pertumbuhan daerah yang	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan daerah-daerah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

	daerah dan berkurangnya kesenjangan pembangunan daerah	berdaya saing	peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah tertinggal <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya
2	Terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan local akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan	Menciptakan system penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya daerah	<ul style="list-style-type: none">• Reaktulisasi nilai-nilai kearifan local sebagai salah satu dasar pengembangan etika pegaulan social untuk memperkuat identitas daerah• Mengembangkan modal social dengan mendorong terciptanya wadah yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan• Menjadikan budaya local sebagai salah satu promosi daerah dengan mengedepankan budaya leluhur

7.2. Visi dan Misi Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur (SPPIP)

Visi dan Misi Pembangunan Permukiman dan Infrstruktur Perkotaan Muara Bungo disarikan dan mengacu pada Visi dan Misi RPJM Kabupaten Bungo 2012-2016 (**Bungo MAS 2016**) dan semboyan **Muara Bungo Kota LINTAS** (Lancar, Indah, Nyaman, Tertib, Aman dan Sejahtera).

7.2.1 VISI

Terwujudnya permukiman di Perkotaan Muara Bungo yang layak huni melalui pembangunan yang partisipatif menuju masyarakat yang “Mandiri, Aman dan Sejahtera (MAS)”

7.2.2 MISI

1. Mewujudkan pembangunan permukiman yang layak huni dan sehat
2. Mewujudkan pembangunan kawasan permukiman yang aman,



- serasi, teratur dan berwawasan lingkungan
3. Mewujudkan penanganan secara komprehensif kawasan permukiman padat maupun kumuh secara berkelanjutan
 4. Mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan permukiman dan infrastruktur Perkotaan.
 5. Meningkatkan peran Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penanganan permukiman dan infrastruktur Perkotaan.
 6. Mewujudkan pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) permukiman sehingga memenuhi standar kebutuhan minimal.
 7. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 8. Mewujudkan pengendalian penyelenggaraan permukiman secara sinergi oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tujuan dan sasaran dari masing-masing Misi tersebut adalah :

MISI - 1 Mewujudkan pembangunan permukiman yang layak huni dan sehat

Tujuan • Terselenggaranya permukiman yang layak huni dan sehat

Sasaran • Terwujudnya pembangunan permukiman yang layak huni
:
• Terwujudnya pembangunan permukiman yang sehat

MISI - 2 Mewujudkan pembangunan kawasan permukiman yang aman, serasi, teratur dan berwawasan lingkungan

Tujuan • Terselenggaranya pembangunan kawasan permukiman yang serasi, teratur, dan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan RTRW Kab. Bungo dan RUTR Perkotaan Muara Bungo.

Sasaran • Terwujudnya permukiman yang aman terhadap bahaya bencana alam.
:
• Terwujudnya permukiman yang serasi dengan

Pola Ruang & Struktur Ruang RTRW Kab. Bungo dan RUTR Perkotaan Muara Bungo.

- Terwujudnya permukiman yang sesuai dengan daya dukung lahan dan kondisi lingkungan fisik Perkotaan Muara Bungo

MISI - 3 Mewujudkan penanganan secara komprehensif kawasan permukiman padat cenderung kumuh secara berkelanjutan

Tujuan • Terselenggaranya penataan dan penanganan : permukiman padat dan kumuh secara berkelanjutan

Sasaran • Terwujudnyapenataan danpenanganan : permukiman padat dan kumuh

- Terwujudnyapembangunan Rusunawa, dan Rusunawi, untuk menjawab penataan lingkungan permukiman padat

MISI - 4 Mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan permukiman dan infrastruktur Perkotaan.

Tujuan • Terselenggaranya peran aktif masyarakat dalam : penyelenggaraan permukiman dan infrastruktur Perkotaan.

Sasaran • Meningkatnya keikutsertaan masyarakat pada : penyelenggaraan Permukiman dan infrastruktur Perkotaan Muara Bungo

- Tersusunnya kelembagaan untuk mengontrol penyelenggaraan pengembangan Permukiman dan infrastruktur Perkotaan Muara Bungo.

MISI - 5 Meningkatkan peran Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penanganan permukiman dan infrastruktur Perkotaan.

Tujuan • Terselenggaranya akses peran Swasta dan

: Pemerintah dalam penyelenggaraan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Sasaran • Terwujudnya pemberdayaan komunitas perumahan dan permukiman di Perkotaan Muara Bungo

: • Terwujudnya regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung pembangunan permukiman & infrastruktur Perkotaan terhadap peran serta KPS

MISI - 6 Mewujudkan pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) permukiman sehingga memenuhi standar kebutuhan minimal

Tujuan • Terciptanya kuantitas dan kualitas Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Yang sesuai dengan standar kebutuhan minimal

Sasaran • Terwujudnya pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan & drainase yang sesuai dengan kebutuhan SPM jalan & Drainase Permukiman.

: • Terwujudnya pembangunan dan peningkatan Prasarana dan sarana Air Bersih, Persampahan, dan sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kualitas lingkungan

MISI - 7 Mewujudkan pembangunan dan pengembangan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tujuan • Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan permukiman bagi masyarakat

Sasaran • Terwujudnya Pembangunan dan pengembangan permukiman bagi MBR.

: • Terwujudnya pembangunan dan pengembangan RSH.

MISI - 8 Mewujudkan pengendalian penyelenggaraan permukiman secara sinergi oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tujuan • Terselenggaranya pengendalian penyelenggaraan

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

: permukiman secara sinergi oleh Pemerintah dan Swasta

- Sasaran
- Terwujudnya keikutsertaan masyarakat swasta dan pemerintah dalam pengendalian penyelenggaraan permukiman dan infrastruktur Perkotaan di Perkotaan Muara Bungo
 - Terwujudnya kelembagaan untuk pengendalian penyelenggaraan pengembangan permukiman dan infrastruktur Perkotaan.



Bab 8

PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN & INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

8.1. Daftar Kebutuhan Strategis Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan

8.1.1. Daftar Kebutuhan Strategis Pembangunan Permukiman:

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Penyediaan data base dan sistem informasi perumahan 2. Strategi penanganan terhadap permukiman padat maupun cenderung kumuh 3. Strategi pengadaan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah 4. Strategi penyediaan kebutuhan rumah 5. Strategi penanggulangan terhadap kawasan permukiman yang rawan bencana (genangan, banjir dan kebakaran) 6. Strategi penyiapan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat 7. Strategi penanganan rumah-rumah peninggalan. 8. Strategi penanganan rumah rumah didalam pemakaman 9. Strategi penanganan rumah rumah di bantaran sungai
2.	Kawasan Prioritas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi penanganan terhadap permukiman padat maupun cenderung kumuh 2. Strategi penanggulangan terhadap kawasan permukiman yang rawan bencana (genangan, banjir dan kebakaran) 3. Strategi penyiapan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat 4. Strategi penanganan permukiman dari kerawanan sosial 5. Strategi penanganan permukiman dari penyakit menular

8.1.2. Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bidang Jalan Lingkungan

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pengembangan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Jalan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi standardisasi jalan lingkungan 2. Strategi penanganan jalan lingkungan yang rusak 3. Strategi untuk memenuhi kebutuhan jalan lingkungan baru 4. Strategi penanganan pemeliharaan jalan lingkungan 5. Strategi penanggulangan jalan yang terkena genangan/ banjir. 6. Strategi memenuhi kebutuhan jembatan dan pelengkap jalan. 7. Strategi penanganan jalan lingkungan disekitar / drainase 8. Strategi pemanfaatan lahan untuk jaringan jalan baru 9. Strategi penanganan pengawasan dan perencanaan Jalan lingkungan secara optimal
2.	Kawasan Prioritas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi penanganan jalan lingkungan yang rusak 2. Strategi pemanfaatan lahan kosong secara optimal untuk jaringan jalan baru 3. Strategi penanganan pemeliharaan jalan lingkungan 4. Strategi penanggulangan jalan yang terkena genangan / banjir.

8.1.3. Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bidang Drainase

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Drainase	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi standardisasi saluran drainase 2. Strategi pengembangan dan pengelolaan sungai 3. Strategi pembuatan saluran drainase baru 4. Strategi penanganan genangan sementara air hujan 5. Strategi penanganan genangan akibat banjir dari sungai 6. Strategi penanganan saluran drainase yang berdekatan dengan jalan 7. Strategi penanganan bangunan diatas saluran drainase 8. Strategi optimalisasi fungsi jaringan irigasi sebagai jaringan drainase 9. Strategi penanganan saluran drainase / gorong – gorong yang rusak dan sedimentasi 10. Strategi penanggulangan sistem drainase yang terkena genangan / banjir secara komprehensif.
2.	Kawasan Prioritas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi penanganan genangan sementara air hujan 2. Strategi penanganan genangan akibat banjir dari sungai 3. Strategi penanganan saluran drainase yang berdekatan dengan jalan 4. Strategi penanganan bangunan diatas saluran drainase 5. Strategi penanganan saluran drainase / gorong – gorong yang rusak dan sedimentasi 6. Strategi penanggulangan sistem drainase yang terkena genangan / banjir secara komprehensif.

8.1.4. Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bidang Air Minum

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Peningkatan Suplai air baku. 2. Strategi Pengembangan cakupan Pelayanan air minum 3. Strategi Peningkatan Kinerja PDAM. 4. Strategi Penanganan kebocoran distribusi air minum 5. Strategi Pengembangan SPAM IKK 6. Strategi pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pengembangan SPAM 7. Strategi pengelolaan aset manajemen PDAM 8. Strategi peningkatan akses air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah 9. Strategi pengembangan sistem informasi manajemen penyediaan air minum 10. Strategi penanganan air minum pada daerah bencana genangan / banjir.
2.	Kawasan Prioritas	Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi kemudahan akses untuk air minum 2. Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas IPA Sederhana (sumur bor) eksisting 3. Strategi pengembangan aspek manajemen dan aspek legalitas pengelolaan IPA Sederhana (sumur bor) oleh masyarakat

8.1.5. Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bidang Pengelolaan Persampahan

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pembangunan pola kerjasama dengan daerah sekitar dalam penanganan sampah 2. Strategi peningkatan cakupan pelayanan persampahan 3. Strategi peningkatan pengelolaan persampahan melalui program 3 R 4. Strategi peningkatan fungsi kelembagaan pengelolaan persampahan 5. Strategi pembangunan perencanaan pengelolaan persampahan 6. Strategi peningkatan peran aktif swasta dalam pengelolaan sampah
2.	Kawasan Prioritas	Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pengurangan sampah rumah tangga 2. Strategi pengolahan sampah tingkat kelurahan melalui sistem 3R 3. Strategi peningkatan pelayanan sampah 4. Strategi peningkatan peran aktif swasta dalam pengelolaan sampah

8.1.6. Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Bidang



Pengelolaan Sanitasi/Air Limbah

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Pengelolaan Sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pengelolaan air limbah sistem offsite 2. peningkatan pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi yang telah dibangun 3. Strategi pemantapan kelembagaan pengelolaan air limbah 4. Strategi pengelolaan air limbah domestik skala komunal
2.	Kawasan Prioritas	Pengelolaan Sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pembangunan pengelolaan limbah domestik sistem on site 2. Strategi pembangunan pengelolaan limbah domestik 3. Strategi Pembangunan sarana dan prasarana air limbah komunal 4. Strategi peningkatan pemahaman pengelolaan air limbah rumah tangga 5. Strategi peningkatan kepemilikan jamban keluarga

8.1.7. Daftar Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan pada Pemberdayaan Masyarakat

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pembangunan informasi tentang RTRW Perkotaan Muara Bungo di kalangan masyarakat 2. Strategi pembangunan informasi tentang kawasan lindung (sempadan sungai dan kawasan hijau) yang dilarang mendirikan bangunan 3. Strategi pembangunan dan penguatan Forum Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Kelompok Swadaya Masyarakat dalam penangaman masalah pengelolaan permukiman dan infrastruktur 4. Strategi penguatan partisipasi masyarakat dalam pelibatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah 5. Strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan permukiman 6. Strategi penguatan kelembagaan di kelurahan (LPMK, PKK, Karang Taruna, RT/RW dan lain-lain) dalam pengelolaan permukiman dan infrastrukturnya. 7. Strategi penguatan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya menjaga kebersihan sungai 8. Strategi penguatan implementasi pengelolaan sampah dengan 3 R (reuse, reduce, dan recycle). 9. Strategi pembangunan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui pembangunan dan pengelolaan air bersih yang baik 10. Strategi penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam 11. Strategi mensosialisasikan kebijakan penyusunan rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) 12. Strategi mensinergikan program-program pemberdayaan

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			masyarakat dalam bidang permukiman dan infrastruktur permukiman
2.	Kawasan Prioritas		<ol style="list-style-type: none">1. Strategi pembangunan sumur bor dan jaringan distribusinya, dengan pengelolaan secara partisipatif oleh masyarakat.2. Strategi pembangunan MCK dan pembentukan pengelolaan secara partisipatif oleh masyarakat.3. Strategi penguatan kesadaran masyarakat dan implementasi pengelolaan sampah dengan 3 R (reuse, reduce, dan recycle).4. Strategi pembangunan informasi tentang kawasan lindung (sempadan sungai, tebing sungai dan kawasan hijau) yang dilarang mendirikan bangunan5. Strategi penguatan lembaga PKK, Karang Taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam penanganan masalah pengelolaan permukiman dan infrastruktur6. Strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan permukiman

8.1.8. Daftar Kebutuhan Pembangunan pada Aspek Kemampuan Keuangan

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Kemampuan keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi meningkatkan pendapatan PAD minimal sebesar 25% per tahun dengan penggalan dari pajak dan retribusi daerah dengan cara meningkatkan efisinsi penagihan dan tarif melalui intensifikasi atau menggali sumber-sumber pajak dan retribusi baru melalui ekstensifikasi.2. Strategi mengupayakan tambahan subsidi dari pemerintah pusat dan propinsi untuk menambah sumber penerimaan dalam rangka pembiayaan pembangunan.3. Strategi pengkajian sumber pendanaan baru melalui swadaya masyarakat terutama dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan dengan melibatkan aparat Kelurahan dan tokoh masyarakat disekitar proyek.4. Strategi melakukan kerjasama dengan pihak swasta melalui KPS.
2.	Kawasan Prioritas	Kemampuan keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi meningkatkan pendapatan PAD minimal sebesar 25% per tahun dengan penggalan dari pajak dan retribusi daerah dengan cara meningkatkan efisinsi penagihan dan tarif melalui intensifikasi atau menggali sumber-sumber pajak dan retribusi baru melalui ekstensifikasi.2. Strategi mengupayakan tambahan subsidi dari pemerintah pusat dan propinsi untuk menambah sumber penerimaan dalam rangka pembiayaan pembangunan.3. Strategi pengkajian sumber pendanaan baru melalui swadaya masyarakat terutama dalam kegiatan operasi dan



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			pemeliharaan dengan melibatkan aparat Kelurahan dan tokoh masyarakat disekitar proyek. 4. Strategi melakukan kerjasama dengan pihak swasta melalui KPS.
--	--	--	--

8.1.9. Daftar Kebutuhan Pembangunan pada Aspek Kelembagaan

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan2. Strategi meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah Strategi pengembangan leading sektor dalam penyusunan SPPIP;3. Strategi untuk mendorong pemahaman akan pentingnya visi dalam perencanaan investasi dengan langkah awal validasi data dan pembangunan system data daerah;4. Strategi menghilangkan ego sektoral dan ego kedaerahan yang masih hidup di dalam pemerintahan5. Strategi memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga dan anggaran yang tersedia dalam proses fasilitasi penyusunan SPPIP;6. Strategi memaksimalkan peran serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program validasi data daerah.
2.	Kawasan Prioritas	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan2. Strategi meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah Strategi pembangunan leading sektor dalam penyelenggaraan pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan3. Strategi memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga dan anggaran yang tersedia dalam proses fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan4. Strategi memaksimalkan peran serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program validasi data daerah.

8.2. Daftar Prioritas Kebutuhan Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan

8.2.1. Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Permukiman:

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Permukiman	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi Penyediaan data base dan sistem informasi perumahan2. Strategi penanganan terhadap permukiman padat maupun cenderung kumuh3. Strategi pengadaan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah4. Strategi penyediaan kebutuhan rumah5. Strategi penanggulangan terhadap kawasan permukiman



			yang rawan bencana (genangan, banjir dan kebakaran) 6. Strategi penyiapan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat
2.	Kawasan Prioritas	Permukiman	1. Strategi penanganan terhadap permukiman padat maupun cenderung kumuh 2. Strategi penanggulangan terhadap kawasan permukiman yang rawan bencana (genangan, banjir dan kebakaran) 3. Strategi penyiapan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat

8.2.2. Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman dibidang Jalan Lingkungan:

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Jalan Lingkungan	1. Strategi standardisasi jalan lingkungan 2. Strategi penanganan jalan lingkungan yang rusak 3. Strategi untuk memenuhi kebutuhan jalan lingkungan baru 4. Strategi penanganan pemeliharaan jalan lingkungan 5. Strategi penanggulangan jalan yang terkena genangan / banjir 6. Strategi memenuhi kebutuhan jembatan dan bangunan pelengkap jalan.
2.	Kawasan Prioritas	Jalan Lingkungan	1. Strategi penanganan jalan lingkungan yang rusak 2. Strategi penanganan pemeliharaan jalan lingkungan Strategi penanggulangan jalan yang terkena genangan / banjir

8.2.3. Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman dibidang Drainase

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Drainase	1. Strategi pembangunan dan pengelolaan sungai 2. Strategi penanganan genangan sementara air hujan 3. Strategi penanganan saluran drainase / gorong – gorong yang rusak dan sedimentasi 4. Strategi penanggulangan sistem drainase yang terkena genangan / banjir secara komprehensif.
2.	Kawasan Prioritas	Drainase	1. Strategi penanganan genangan sementara air hujan 2. Strategi penanganan saluran drainase / gorong – gorong yang rusak dan sedimentasi Strategi penanggulangan sistem drainase yang terkena genangan / banjir secara komprehensif.

8.2.4. Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman dibidang Air Minum

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi peningkatan suplai sumber air baku. 2. Strategi pembangunan cakupan pelayanan air minum 3. Strategi peningkatan kinerja PDAM. 4. Strategi penanganan kebocoran distribusi air minum
2.	Kawasan Prioritas	Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Kemudahan akses untuk air minum. 2. Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas IPA sederhana (sumur bor) eksisting. 3. Strategi pembangunan aspek manajemen dan aspek legalitas pengelolaan IPA sederhana (sumur bor) oleh masyarakat.

8.2.5. Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman dibidang Pengelolaan Persampahan

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Pembangunan Pola kerjasama regional penanganan sampah. 2. Strategi peningkatan cakupan pelayanan persampahan 3. Strategi pengelolaan persampahan melalui program 3R 4. Strategi peningkatan peran aktif swasta dalam pengelolaan sampah
2.	Kawasan Prioritas	Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pengolahan sampah melalui sistem 3R 2. Strategi peningkatan pelayanan sampah 3. Strategi peningkatan peran aktif swasta dalam pengelolaan sampah

8.2.6. Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman dibidang Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi.

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Pengelolaan Sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi perencanaan pengelolaan air limbah sistem offsite 2. Strategi peningkatan pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi yang telah dibangun 3. Strategi pemanfaatan kelembagaan pengelolaan air limbah.
2.	Kawasan Prioritas	Pengelolaan Sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pembangunan pengelolaan limbah domestik sistem on site 2. Strategi mengembangkan sarana dan prasarana air limbah komunal

8.2.7. Daftar Kebutuhan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Permukiman Pada Faktor Sosial & Pelibatan Masyarakat:

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pengembangan informasi tentang RTRW Perkotaan Muara Bungo di kalangan masyarakat 2. Strategi pengembangan dan penguatan Forum Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Kelompok Swadaya Masyarakat dalam penangaman masalah pengelolaan permukiman dan infrastruktur 3. Strategi pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan permukiman 4. Strategi penguatan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya menjaga kebersihan sungai 5. Strategi penguatan implementasi pengelolaan sampah dengan 3 R (reuse, reduce, dan recycle). 6. Strategi pengembangan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui pembangunan dan pengelolaan air bersih yang baik 7. Strategi men-sosialisasikan kebijakan penyusunan rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) 8. Strategi mensinergikan program-program pemberdayaan masyarakat dalam bidang permukiman dan infrastruktur permukiman
2.	Kawasan Prioritas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pembangunan sumur bor dan jaringan distribusinya, dengan pengelolaan secara partisipatif oleh masyarakat. 2. Strategi pembangunan MCK dan pembentukan pengelolaan secara partisipatif oleh masyarakat. 3. Strategi penguatan kesadaran masyarakat dan implementasi pengelolaan sampah dengan 3 R (reuse, reduce, dan recycle). 4. Strategi pengembangan informasi tentang kawasan lindung (sempadan sungai dan kawasan hijau) yang dilarang mendirikan bangunan 5. Strategi penguatan lembaga PKK, Karang Taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam penangaman masalah pengelolaan permukiman dan infrastruktur 6. Strategi men-sosialisasikan kebijakan penyusunan rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)

8.2.8. Daftar Kebutuhan Prioritas pada Aspek Kemampuan Keuangan

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Kemampuan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendapatan PAD minimal sebesar 25% per tahun dengan penggalan dari pajak dan retribusi daerah dengan cara meningkatkan efisiensi penagihan dan tarif melalui intensifikasi atau menggali sumber-sumber pajak dan retribusi baru melalui ekstensifikasi. 2. Mengkaji sumber pendanaan baru melalui swadaya masyarakat terutama dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan dengan melibatkan aparat Kelurahan dan tokoh masyarakat disekitar proyek.
2.	Kawasan Prioritas	Kemampuan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendapatan PAD minimal sebesar 25% per tahun dengan penggalan dari pajak dan retribusi daerah dengan cara meningkatkan efisiensi penagihan dan tarif melalui intensifikasi atau menggali sumber-sumber pajak dan retribusi baru melalui ekstensifikasi. 2. Mengkaji sumber pendanaan baru melalui swadaya masyarakat terutama dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan dengan melibatkan aparat Kelurahan dan tokoh masyarakat disekitar proyek.

8.2.9. Daftar Kebutuhan Prioritas pada Aspek Kelembagaan

No	Wilayah	Aspek	Kebutuhan Strategi Pembangunan
1.	Perkotaan Muara Bungo	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan 2. Strategi peningkatan kinerja aparat pemerintah daerah 3. Strategi pengembangan leading sektor pada penyelenggaraan pengembangan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan . 4. Strategi memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga dan anggaran yang tersedia dalam proses fasilitasi penyelenggaraan pengembangan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan; 5. Strategi memaksimalkan peran serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program validasi data daerah.
2.	Kawasan Prioritas	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga dan anggaran yang tersedia dalam proses fasilitasi penyelenggaraan pengembangan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan; 2. Strategi memaksimalkan peran serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program validasi data daerah.

8.3. Daftar Kebutuhan Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan

8.3.1. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman:

a. Skala Kota Muara Bungo

1. Memenuhi data base dan sistem informasi perumahan
2. Menyiapkan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat
3. Melakukan penanggulangan terhadap kawasan permukiman yang rawan bencana (genangan, banjir, dan kebakaran)
4. Melakukan penanganan terhadap permukiman padat cenderung kumuh secara berkelanjutan
5. Menyelenggarakan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Memenuhi kekurangan kebutuhan rumah

b. Skala Kawasan Prioritas Terpilih

1. Menyiapkan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat
2. Melakukan upaya penanggulangan terhadap kawasan permukiman yang rawan bencana (genangan, banjir dan kebakaran)
3. Melakukan penanganan terhadap permukiman padat cenderung kumuh

8.3.2. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan dibidang Jalan Lingkungan

a. Skala Kota Muara Bungo

1. Memenuhi standardisasi jalan lingkungan
2. Melakukan penanganan jalan lingkungan yang rusak
3. Memenuhi kebutuhan jaringan jalan lingkungan baru
4. Melakukan penanganan pemeliharaan jalan lingkungan
5. Menanggulangi jalan yang rawan genangan/ banjir.
6. Memenuhi kebutuhan jembatan dan bangunan pelengkap jalan.

b. Skala Kawasan Prioritas Terpilih

1. Melakukan penanganan jalan lingkungan yang rusak
2. Melakukan penanganan pemeliharaan jalan lingkungan
3. Menanggulangi jalan yang terkena genangan / banjir.

8.3.3. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan dibidang Drainase

a. Skala Kota Muara Bungo

- 1 Melakukan pengembangan dan pengelolaan sungai
- 2 Melakukan penanganan genangan sementara air hujan
- 3 Melakukan penanganan saluran drainase / gorong – gorong yang rusak dan penuh sedimentasi/ sampah
- 4 Melakukan penanggulangan sistem drainase yang rawan genangan / banjir secara komprehensif.

b. Skala Kawasan Prioritas Terpilih

1. Melakukan penanganan genangan sementara air hujan
2. Melakukan penanganan saluran drainase / gorong – gorong yang rusak dan penuh sedimentasi/ sampah
3. Melakukan penanggulangan sistem drainase yang rawan genangan / banjir secara komprehensif.

8.3.4. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan dibidang Air Minum

a. Skala Kota Muara Bungo

1. Meningkatkan supply sumber air baku
2. Mengembangkan cakupan pelayanan air minum
3. Meningkatkan kinerja PDAM
4. Menangani kebocoran distribusi Air minum

b. Skala Kawasan Prioritas Terpilih

1. Memudahkan akses untuk air minum
2. Meningkatkan Kualitas & Kuantitas IPA sederhana (sumur bor) eksisting
3. Mengembangkan aspek manajemen dan aspek legalitas pengelolaan IPA sederhana (sumur bor) oleh masyarakat

8.3.5. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan dibidang Pengelolaan Persampahan

a. Skala Kota Muara Bungo

1. Mengembangkan pola kerjasama regional dalam penanganan sampah
2. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan
3. Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan pola 3 R
4. Meningkatkan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah

b. Skala Kawasan Prioritas Terpilih

1. Meningkatkan pengolahan sampah dengan pola 3 R
2. Meningkatkan pelayanan sampah
3. Meningkatkan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah

8.3.6. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan dibidang Pengelolaan Air limbah/Sanitasi.

a. Skala Kota Muara Bungo

1. Merencanakan pengelolaan air limbah sistem offsite
2. Meningkatkan pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi yang telah dibangun
3. Memantapkan kelembagaan pengelolaan air limbah

b. Skala Kawasan Prioritas Terpilih

1. Mengembangkan pengelolaan limbah domestik sistem onsite
2. Mengembangkan sarana dan prasarana air limbah komunal

8.3.7. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan Pada Aspek Sosial (Pemberdayaan Masyarakat)

a. Skala Kota Muara Bungo

1. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan permukiman dan infrastruktur Perkotaan.
2. Melakukan penyiapan dan penguatan kelembagaan masyarakat lokal dalam menyelenggarakan layanan air minum atau memenuhi kebutuhan air minum, pengelolaan sampah, pemeliharaan saluran drainase, dan pengelolaan sanitasi dan air limbah
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, drainase, air minum, sanitasi dan air limbah,.
4. Melakukan penyebaran informasi tentang kebijakan pembangunan rumah vertikal, susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)
5. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang permukiman dan infrastruktur Perkotaan.
6. Meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat luas tentang larangan mendirikan bangunan di kawasan lindung (sempadan sungai, tebing sungai, kawasan hijau, bukit terjal dan sejenisnya)

b. Skala Kawasan Prioritas Terpilih

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan air minum, drainase, sanitasi/ air limbah rumah tangga, dan sampah secara mandiri berkelanjutan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan implementasi pengelolaan sampah dengan pola 3 R (*reuse, reduce, dan recycle*).
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan air minum, drainase, sanitasi/ air limbah rumah tangga, dan sampah secara mandiri berkelanjutan I.
4. Meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat luas tentang larangan mendirikan bangunan di kawasan lindung (sempadan sungai, tebing sungai, kawasan hijau, bukit terjal dan sejenisnya)
5. Melakukan penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan masalah pengelolaan permukiman dan infrastruktur lingkungan perkotaan

8.3.8. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan Pada Aspek Kemampuan Keuangan

a. Skala Kota Muara Bungo

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD seperti pajak dan retribusi daerah.
2. Mengajukan tambahan subsidi dari pemerintah pusat dan propinsi untuk menambah sumber penerimaan dalam rangka pembiayaan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
3. Mengkaji sumber pendanaan baru untuk pembangunan baik melalui melalui pengalakan peran swadaya masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta melalui KPS.

b. Skala Kawasan Prioritas Terpilih

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD seperti pajak dan retribusi daerah.
2. Mengajukan tambahan subsidi dari pemerintah pusat dan propinsi untuk menambah sumber penerimaan dalam rangka pembiayaan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

3. Mengkaji sumber pendanaan baru untuk pembangunan baik melalui melalui pengalakan peran swadaya masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta melalui KPS.

8.3.9. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan Pada Aspek Kelembagaan

a. Skala Kota Muara Bungo

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan
2. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah
3. Memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga dan anggaran yang tersedia dalam proses fasilitasi penyelenggaraan pengembangan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan.
4. Mengidentifikasi leading sektor dalam penyelenggaraan pengembangan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan
5. Mendorong pemahaman akan pentingnya visi dalam perencanaan investasi dengan langkah awal validasi data dan pembangunan system data daerah
6. Pemberdayaan bahwa visi dan misi daerah akan terwujud bilamana dapat mengesampingkan ego sektoral dan ego kedaerahan yang masih hidup di dalam pemerintah daerah.

b. Skala Kawasan Prioritas Terpilih

1. Memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga dan anggaran yang tersedia dalam proses fasilitasi penyelenggaraan pengembangan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan
2. Mengidentifikasi leading sektor dalam penyelenggaraan pengembangan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan
3. Mendorong pemahaman akan pentingnya visi dalam perencanaan investasi dengan langkah awal validasi data dan pembangunan system data daerah
4. Pemberdayaan bahwa visi dan misi daerah akan terwujud bilamana dapat mengesampingkan ego sektoral dan ego kedaerahan yang masih hidup di dalam pemerintah daerah

8.4. Daftar Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan

8.4.1. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman:

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER PENDANAAN
Skala Kota Muara Bungo	Permukiman	Memenuhi data base dan sistem informasi perumahan	Penyediaan data base perumahan	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Kimtaru Kab, Dinas PU Cipta Karya Kab, BPMPKB Kab, BAPPEDA Kab, BPS Kab, Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Perkotaan, Swasta, Masyarakat
			Penyediaan sistem informasi perumahan	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab..	APBN, APBD Prov, APBD Kab.
		Menyiapkan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat	Pengelolaan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Dinas Kesehatan Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
			Pengelolaan lingkungan perumahan dari pencemaran	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Dinas Kesehatan Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
		Melakukan penanggulangan terhadap kawasan permukiman yang rawan bencana	Perbaikan dan peninggian rumah yang terkena genangan /banjir	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
			Peningkatan kegiatan dan pelayanan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.,
		Melakukan penanganan terhadap permukiman padat maupun cenderung kumuh	Renovasi/pemugaran rumah yang yang tidak layak huni	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
			Peremajaan lingkungan perumahan dan permukiman	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
			Pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta,	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta,

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER PENDANAAN
			permukiman	POKMAS/KSM	Masyarakat
		Menyelenggarakan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta
			Pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta
		Memenuhi kekurangan kebutuhan rumah	Pembangunan kawasan permukiman baru	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
			Pembangunan Rusunawa /Rusunami	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta.	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta
Sakala Kawasan Prioritas Terpilih	Permukiman	Menyiapkan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat	Pengelolaan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Dinas Kesehatan Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
			Pengelolaan lingkungan perumahan dari pencemaran	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Dinas Kesehatan Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
		Melakukan penanggulangan terhadap kawasan permukiman yang rawan bencana	Perbaikan dan peninggian rumah yang terkena genangan / banjir	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
			Peningkatan kegiatan dan pelayanan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.,
		Melakukan penanganan terhadap permukiman padat maupun cenderung kumuh	Renovasi/pemugaran rumah yang yang tidak layak huni	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
			Peremajaan lingkungan perumahan dan permukiman	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
			Pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan permukiman	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Swasta, Masyarakat

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

8.4.2. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan dibidang Jalan Lingkungan

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER PENDANAAN
Skala Kota Muara Bungo	Jalan Lingkungan	Memenuhi Sistem Informasi / Data Base Jalan Lingkungan	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Lingkungan	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab..
		Melakukan penanganan jalan lingkungan yang rusak	Program Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan yang Rusak	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
		Memenuhi kebutuhan jalan lingkungan baru	Program Pembangunan Jalan Lingkungan Baru	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., Swasta	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Swasta
		penanganan pemeliharaan jalan lingkungan	Program Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBD Provinsi, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
		Memenuhi kebutuhan penanggulangan jalan yang terkena genangan / banjir.	Program Peningkatan Jalan Lingkungan yang terkena genangan / banjir.	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
		Memenuhi kebutuhan jembatan	Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
Sakala Kawasan Prioritas Terpilih	Jalan Lingkungan	Melakukan penanganan jalan lingkungan yang rusak	Program Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan yang Rusak	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
		penanganan pemeliharaan jalan lingkungan	Program Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBD Provinsi, APBD Kab., Swasta, Masyarakat
		Memenuhi kebutuhan penanggulangan jalan yang terkena genangan / banjir.	Program Peningkatan Jalan Lingkungan yang terkena genangan / banjir.	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Swasta, Masyarakat

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

8.4.3. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan dibidang Drainase

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER PENDANAAN
Skala Kota Muara Bungo	Drainase	Melakukan pengembangan dan pengelolaan sungai	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sungai	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab..
		Melakukan penanganan genangan air hujan	Program Pengendalian Banjir / Genangan	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., POKMAS/KSM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Masyarakat
		Melakukan penanganan saluran drainase / gorong – gorong yang rusak dan sedimentasi	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong – Gorong	Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., POKMAS/KSM	APBD Provinsi, APBD Kab., Masyarakat
			Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., POKMAS/KSM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.. Masyarakat
		Melakukan penanggulangan sistem drainase yang terkena genangan / banjir. secara komprehensif.	Program Pembangunan Pengaman Tebing sungai dan Penanggulangan genangan / banjir.	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., Swasta	BLN, APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Swasta
Sakala Kawasan Prioritas Terpilih	Drainase	Melakukan penanganan genangan air hujan	Program Pengendalian Banjir / Genangan	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., POKMAS/KSM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Masyarakat
		Melakukan penanganan saluran drainase / gorong – gorong yang rusak dan sedimentasi	Program Rehabilitasi / pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong – Gorong	Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., POKMAS/KSM	APBD Provinsi, APBD Kab., Masyarakat
			Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., POKMAS/KSM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.. Masyarakat
		Melakukan penanggulangan sistem drainase yang terkena genangan / banjir. secara komprehensif.	Program Pembangunan Pengaman Tebing sungai dan Penanggulangan genangan / banjir.	Kementrian PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., Swasta	BLN, APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., Swasta

8.4.4. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan dibidang Air Minum

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER DANA
Skala Kota Muara Bungo	Air Minum	a. Meningkatkan suplai air baku	Mencari sumber air baru	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., BAPPEDA Kab., PDAM, Dinas Kesehatan Kab.	APBN, APBD Prov
		b. Mengembangkan cakupan pelayanan air minum	Menambah jaringan perpipaan distribusi	BPS Kab., PDAM,	APBD Kab., PDAM
			Menambah pelanggan baru	PDAM, BPS Kab.	PDAM
		c. Meningkatkan kinerja PDAM	Memberikan bantuan teknis penyehatan PDAM	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., BAPPEDA Kab.,	APBN, APBD Prov, APBD Kab., PDAM
d. Menangani kebocoran distribusi air minum	Melakukan analisis kebocoran	PDAM, Dinas Cipkataru Kab.	APBD Kab., PDAM		
	Memperbaiki dan meningkatkan sistem perpipaan transmisi dan distribusi	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., BAPPEDA Kab.,	APBD Prov, APBD Kab., PDAM		
Sakala Kawasan Prioritas Terpilih	Air Minum	a. Memudahkan akses untuk air minum	Kemudahan untuk mendapatkan air minum PDAM	PDAM, swasta	PDAM, swasta
		b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas IPA	Peningkatan IPA sumur bor menjadi pelayanan air minum	Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab.,	APBD Kab., Swasta, asyarakat
		c. Mengembangkan aspek mana- jemen dan aspek legalitas IPA sederhana oleh masyarakat	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia	Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., POKMAS/KSM	APBD Kab., Swasta, asyarakat
			Mengembangkan peraturan yang sudah dibuat oleh pengelola	Dinas Cipkataru Prov, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., POKMAS/KSM	APBD Kab., Swasta, asyarakat

8.4.5. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan dibidang Air Limbah

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER DANA
Skala Kota Muara Bungo	Air Limbah	a. Perencanaan pengelolaan air limbah sistem off site	Penyediaan konsep perencanaan pengelolaan air limbah Perencanaan pilot project	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Ciptataru Prov, Dinas Perkotaan, BAPPEDA Kab., BPS Kab., Swasta	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Dinas Perkotaan.
		b. Meningkatkan pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana anitasi yang telah terbangun	Optimalisasi IPLT Muarareja	Dinas Ciptataru Prov, Dinas Perkotaan, BAPPEDA Kab.,	APBD Prov, APBD Kab., Dinas Perkotaan.
			Penambahan sarana dan prasarana pendukung sanitasi	Dinas Ciptataru Prov, Dinas Perkotaan, BAPPEDA Kab., BPS Kab.	APBD Prov, APBD Kab., Dinas Perkotaan.
		c. Memantapkan kelembagaan dan peraturan pengelolaan air limbah	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Ciptataru Prov, Dinas Perkotaan, BAPPEDA Kab.,	APBD Kab., Dinas Perkotaan.
Mengembangkan dan melaksanan peraturan yang sudah ada	Dinas Ciptataru Prov, Dinas Perkotaan, BAPPEDA Kab.,		APBD Kab., Dinas Perkotaan.		
Sakala Kawasan Prioritas Terpilih	Air Limbah	a. Mengembangkan engelolaan limbah domestik sistem onsite	Meningkatkan jumlah pengguna tangki septik Individu	Dinas Ciptataru Prov, Dinas Perkotaan,	APBD Kab., Masyarakat
			Membangun MCK plus	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Ciptataru Prov, Dinas Perkotaan, BAPPEDA Kab.	APBD Prov, APBD Kab., Masyarakat
		b. Mengembangkan sarana dan prarana air limbah komunal	Membangun septik tank komunal	Dinas Perkotaan, BPMPKB Kab., BAPPEDA Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBD Kab., Masyarakat

8.4.6. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan dibidang Persampahan

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER DANA
Skala Kota Muara Bungo	Persampahan	a. Mengembangkan pola kerja sama regional dalam penanganan sampah	Pengembangan kerja sama pengelolaan TPA Regional	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, BAPPEDA Kab.	APBN, APBD Prov, APBD Kab., Dinas Kimtaru
		b. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan	Optimalisasi TPA	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, BAPPEDA Kab.,	APBD Prov, APBD Kab., Dinas Perkotaan.
			Penambahan sarana pendukung pengangkutan sampah	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BAPPEDA Kab., Kantor Lingkungan Hidup	APBD Prov, APBD Kab., Dinas Perkotaan.
		c. Meningkatkan Pengelolaan persampahan melalui program 3R	Menerapkan Teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah melalui program 3R	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan,	APBD Prov, APBD Kab., Dinas Perkotaan.
Menyediakan informasi pengelolaan sampah 3R	Dinas Perkotaan, BAPPEDA Kab.		Dinas Perkotaan., APBD Kab.		
		d. Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan persampahan	Meningkatkan peran aktif swasta dalam pengelolaan sampah	Dinas Perkotaan Swasta, POKMAS/KSM	Swasta
Sakala Kawasan Prioritas Terpilih	Persampahan	a. Meningkatkan pengolahan sampah melalui sistem 3R	Membangun sarana pengolahan sampah dengan pola 3R	Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, BAPPEDA Kab., Swasta, POKMAS/KSM	APBD Prov, APBD Kab., Dinas Kimtaru Swasta,
		b. Meningkatkan pelayanan sampah	Menambahkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan sampah	Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, BAPPEDA Kab.	APBD Prov, APBD Kab., Dinas Perkotaan., Swasta , Masyarakat
		c. meningkatkan peran aktif swasta dalam pengelolaan sampah	Meningkatkan peran aktif swasta dalam pengelolaan sampah	Dinas Perkotaan., Swasta	Swasta

8.4.7. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan pada Pemberdayaan masyarakat

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER DANA
Skala Kota Muara Bungo	Sosial & Partisipasi Masyarakat	Menyediakan informasi tentang RTRW Kab. Bungo dan RUTR/RDTR Perkotaan Muara Bungo bagi masyarakat	Pemasangan peta RTRW Kab. Bungo dan RUTR/RDTR Perkotaan Muara Bungo di beberapa kawasan strategis	Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., Bappeda Kab.	APBD Prov, APBD Kab.,
			Penyebaran informasi tentang RTRW Kab. Bungo dan RUTR/RDTR Perkotaan Muara Bungo dalam bentuk pamflet.	Dinas Cipkataru Prov, Dinas Cipkataru Prov, Bappeda Kab., Dinas Perkotaan Kab	APBD Prov, APBD
		Menyediakan informasi tentang kawasan lindung (sempadan sungai, tebing sungai dan kawasan hijau) yang dilarang mendirikan bangunan	Pemasangan papan larangan mendirikan di kawasan lindung (sempadan sungai, tebing sungai, kawasan hijau, bukit terjal dll)	Dinas Cipkataru Prov, Dinas Cipkataru Prov, Bappeda Kab., Dinas Perkotaan.,	APBD Prov, APBD Kab.
			Penyuluhan di kawasan permukiman sekitar sungai dan kawasan hijau / lindung.	Dinas Cipkataru Prov, Dinas Cipkataru Prov, Bappeda Kab., Dinas Perkotaan., LSM	APBD Prov, APBD Kab.,
			Penyuluhan di sekolah-sekolah setingkat SLTA dan perguruan tinggi tentang pentingnya kawasan hijau / lindung	BPMPKB Kab., BAPPEDA Kab., Dinas Pendidikan Kab., KLH Kab.	APBD Prov, APBD Kab.,
		Mensinergikan forum Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Kelompok Swadaya Masyarakat dalam penangaman masalah pengelolaan permukiman dan infrastruktur	Pembinaan manajemen dan teknis bagi KSM/ Pokmas pengelola air bersih komunal	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., BAPPEDA Kab., Swasta, POKMAS/KSM, Dinkes Kab., KLH Kab.	APBD Prov, APBD Kab.,
			Pembinaan manajemen dan teknis KSM/ Pokmas pengelola sarana dan prasarana sanitasi	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta, POKMAS/KSM, Dinkes Kab., KLH Kab. , LSM	APBD Prov, APBD Kab., APBN
		Penguatan implementasi pengelolaan sampah dengan 3 R (reuse, reduce, dan recycle).	Penyuluhan pengelolaan sampah dengan 3 R di tingkat rumah tangga melalui kegiatan PKK dan Karang Taruna	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta, POKMAS/KSM,	APBD Prov, APBD Kab., APBN
			Pelatihan pemanfaatan sampah	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov,	APBD Prov, APBD

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER DANA
			organik untuk pembuatan kompos dan pemanfaatan sampah plastik untuk dijadikan kerajinan dll	Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., KLH Kab. , Swasta, POKMAS/KSM,	Kab., APBN
		Pengembangan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui pembangunan dan pengelolaan air bersih yang baik	Pembangunan sumur bor yang dilakukan secara partisipatif dan berbasis komunitas.	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., BAPPEDA Kab., Swasta, POKMAS/KSM, Dinkes Kab., KLH Kab.	APBD Prov, APBD Kab., APBN
			Pembentukan pengelolaan air minum secara partisipatif dan demokratis	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., POKMAS/KSM,	APBD Prov, APBD Kab., APBN, Swasta
Sakala Kawasan Prioritas Terpilih	Sosial dan partisipasi masyarakat	Pembangunan sumur bor dan jaringan distribusinya, dengan pengelolaan secara partisipatif oleh masyarakat	Pembangunan sumur bor yang dilakukan secara partisipatif dan berbasis komunitas.	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., BAPPEDA Kab., Swasta, POKMAS/KSM, Dinkes Kab., KLH Kab.	APBD Prov, APBD Kab., APBN, Swasta (Program CSR)
			Pembentukan pengelolaan air minum secara partisipatif dan demokratis	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Swasta, POKMAS/KSM, KLH Kab.	APBD Prov, APBD Kab., APBN, Swasta (Program CSR)
		Penguatan implementasi pengelolaan sampah dengan 3 R (reuse, reduce, dan recycle).	Penyuluhan pengelolaan sampah dengan 3 R di tingkat rumah tangga melalui kegiatan PKK, Karang Taruna, KSM/ Pokmas	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., POKMAS/KSM,	APBD Prov, APBD Kab., APBN
			Pelatihan pemanfaatan sampah organik untuk pembuatan kompos dan pemanfaatan sampah plastik untuk dijadikan kerajinan	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., POKMAS/KSM, KLH Kab. , Swasta,	APBD Prov, APBD Kab., APBN, Swasta (Program CSR)
		Penyediaan informasi tentang kawasan lindung (sempadan sungai dan kawasan hijau) yang dilarang mendirikan bangunan	Pemasangan papan larangan mendirikan di kawasan lindung (sempadan sungai, dll)	Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., POKMAS/KSM, KLH Kab.,Swasta,	APBD Prov, APBD Kab.,
			Penyuluhan di kawasan permukiman sekitar sungai dan kawasan hijau / lindung.	Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., KLH Kab., Swasta, POKMAS/KSM,	APBD Prov, APBD Kab.,
		Penguatan lembaga KSM/ Pokmas dalam penanganan masalah	Pembinaan manajemen dan teknis KSM/ Pokmas pengelola air bersih komunal bila ada	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., KLH Kab., Dinkes Kab.Swasta,POKMAS/KSM,	APBD Prov, APBD Kab., APBN, Swasta (CSR)

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER DANA
		pengelolaan permukiman dan infrastruktur	Pembinaan manajemen dan teknis KSM/ Pokmas pengelola sarana dan lingkungan permukiman	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Ciptakaru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., KLH Kab., Dinkes Kab. Swasta, POKMAS/KSM,	APBD Prov, APBD Kab., APBN, Swasta (CSR)
		Penguatan dan sosialisasi kebijakan pembangunan rumah vertikal untuk penghematan lahan koya dan peningkatan kapasitas daya tampung, seperti rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan sejenisnya	Penyuluhan tentang Rusunami dan Rusunawa kepada masyarakat	Kemenpera, Kemen PU Ciptakarya, Dinas Ciptakaru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Bappeda Kab.,	APBD Prov, APBD Kab., APBN

8.4.8. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan Aspek Kemampuan Keuangan

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER DANA
Skala Kota Muara Bungo	Kemampuan Keuangan	Meningkatkan penerimaan daerah	Program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan Retribusi daerah	Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah	APBD Kab.
		Menggali sumber-sumber pendanaan	Program kerjasama dengan swasta	Dinas PU, Dinas Permukiman dan Tata Ruang dan PDAM	APBD Kab. dan Swasta
Sakala Kawasan Prioritas Terpilih	Kemampuan Keuangan	Meningkatkan penerimaan daerah	Program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan Retribusi daerah	Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah	APBD Kab.
		Menggali sumber-sumber pendanaan	Program kerjasama dengan swasta	Dinas PU, Dinas Permukiman dan Tata Ruang dan PDAM	APBD Kab. dan Swasta

8.4.9. Konsep Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur PerkotaanAspek Kelembagaan

WILAYAH	ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER DANA
Skala Kota Muara Bungo	Kelembagaan	Meningkatkan Kualitas SDM	Melakukan pelatihan bagi Aparat Pemerintahan Perkotaan Muara Bungo	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Dinkes Kab., KLH Kab.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab..
		Meningkatkan Kinerja Aparat	Melakukan pelatihan bagi Aparat Pemerintahan Perkotaan Muara Bungo	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Dinkes Kab., KLH Kab.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.,
		Membentuk kelembagaan yang terintegrasi	Membentuk Satuan Tugas Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Dinkes Kab., KLH Kab.	APBD Provinsi, APBD Kab.
Sakala Kawasan Prioritas Terpilih	Kelembagaan	Meningkatkan Kualitas SDM	Melakukan pelatihan bagi pelaksana BKM, KSM dan Kelembagaan Lokal pengelola infrastruktur komunal	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Dinkes Kab., KLH Kab., Swasta, LSM, POKMAS/KSM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab..
		Meningkatkan Kinerja kelembagaan logal	Melakukan pelatihan bagi pelaksana BKM, KSM dan Kelembagaan Lokal pengelola infrastruktur komunal	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Dinkes Kab., KLH Kab., Swasta, LSM, POKMAS/KSM	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.,
		Membentuk kelembagaan yang terintegrasi	Membentuk Satuan Tugas Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan	Kemen PU Ciptakarya, Dinas Cipkataru Prov, Dinas Perkotaan, Dinas PU Kab., BPMPKB Kab., Dinkes Kab., KLH Kab., Swasta, LSM, POKMAS/KSM	APBD Provinsi, APBD Kab.

Bab 9

ANALISIS KORELASI STRATEGI

9.1. Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Pembangunan Permukiman

Berdasarkan kajian dan perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang telah dilakukan, maka kebutuhan infrastruktur pendukung pembangunan permukiman dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Jalan lingkungan
2. Drainase
3. Air Minum
4. Persampahan
5. Sanitasi/Air Limbah

Masing-masing infrastruktur pendukung tersebut mempunyai korelasi yang cukup signifikan di dalam pembangunan permukiman. Namun demikian ada diantara infrastruktur pendukung yang sangat kuat korelasinya terhadap pembangunan permukiman. Hubungan korelasi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam sub berikut.

Dari beberapa aspek tersebut dapat dilakukan penilaian skala prioritas terhadap kebutuhan infrastruktur pendukung pembangunan permukiman. Penilaian dilakukan dengan penjabaran aspek dengan kriteria dan indikatornya, dengan melakukan pembobotan tiap aspek serta penilaian indikatornya. Hasil dari pembobotan aspek dan penilaian indikator selanjutnya dikalikan untuk mendapatkan skoring. Hasil penjumlahan skoring adalah merupakan nilai dari infrastruktur pendukung pembangunan permukiman.

Untuk lebih jelasnya perumusan penilaian infrastruktur pendukung pembangunan permukiman dapat dilihat pada tabel 9-1.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

Tabel : 9 - 1

Perumusan Penilaian Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Terhadap Pembangunan Permukiman

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Nilai	Hasil Nilai (n)	Bobot (b)	Skoring (n x b)
1	Urgenitas Kebutuhan (Bobot : 50 %)	Infrastruktur pendukung sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari	Sangat diperlukan	5		0.5	
			Diperlukan	3			
			Kurang diperlukan	1			
2	Skala Pelayanan (Bobot : 20 %)	Dapat melayani wilayah yang lebih luas	Dapat melayani wilayah kota	5		0.2	
			Dapat melayani wilayah kawasan	3			
			Dapat melayani wilayah lingkungan	1			
3	Pembiayaan (Bobot : 30 %)	Pembiayaan dapat terjangkau oleh Pemerintah	Terjangkau Pemerintah Kota	5		0.3	
			Terjangkau Pemerintah Kota/Provinsi	3			
			Terjangkau Pemerintah Kota/Provinsi/Pusat	1			
4	Tingkat Kesulitan Pelaksanaan Pembangunan (Bobot : 10 %)	Pembangunan dapat dilaksanakan dengan bahan, peralatan dan tenaga dari lokal	Bahan, peralatan, tenaga dari lokal	5		0.1	
			Bahan, peralatan, tenaga dari lokal dan luar	3			
			Bahan, peralatan, tenaga dari luar	1			
5	Keterkaitan Dengan Program Pembangunan Lainnya (Bobot : 10 %)	Terkait dengan program pembangunan lain	Sangat terkait	5		0.1	
			Terkait	3			
			Kurang terkait	1			
JUMLAH SKORING							

Berdasarkan rumusan penilaian tersebut, maka dapat dilakukan penilaian untuk tiap-tiap infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, air limbah/sanitasi dan sampah. Hasil penilaian dapat dijadikan acuan dalam menetapkan skala prioritas kebutuhan infrastruktur pendukung pengembangan permukiman. Dari gambaran penilaian ini dapat dibuat daftar kebutuhan infrastruktur pendukung pembangunan permukiman berdasarkan skala prioritasnya, untuk wilayah Kota dapat dilihat tabel 9-2 dan kawasan prioritas tabel 9-3.

Tabel : 9-2
Daftar Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Pembangunan Permukiman Berdasarkan Skala Prioritasnya

No	Infrastruktur Pendukung Pembangunan Permukiman	Nilai
1	Air minum	5,6
2	Jalan	5,2
3	Drainase	5,0
4	Sampah	4,6
5	Air Limbah/Sanitasi	4,0

Sumber : Hasil Penilaian

Tabel : 9 - 3
Daftar Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Pembangunan Permukiman Berdasarkan Skala Prioritasnya di Kawasan Prioritas

No	Infrastruktur Pendukung Pembangunan Permukiman	Nilai
1	Air minum	5,6
2	Drainase	5,0
3	Jalan	4,6
4	Sampah	4,6
5	Air Limbah/sanitasi	4,0

Sumber : Hasil Penilaian

9.2. Analisis Korelasi Strategi Pembangunan Permukiman Terhadap Kebutuhan Infrastruktur Pendukung

Dalam analisis korelasi strategi pembangunan permukiman terhadap kebutuhan infrastruktur pendukung ini dapat dilihat dari beberapa aspek :



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

- Urgenitas kebutuhan
- Skala Pelayanan
- Pembiayaan
- Tingkat Kesulitan pelaksanaan pembangunan
- Keterkaitan dengan program pembangunan perkotaan yang lain

Berdasarkan rumusan penilaian tersebut, maka dapat dilakukan analisis korelasi strategi baik untuk skala kota maupun skala kawasan prioritas, sebagaimana disajikan pada tabel 9-4 dan seterusnya berikut ini.

Tabel : 9-4

MATRIK ANALISIS KORELASI STRATEGI DALAM SKEMA MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

No	Strategi	Aspek yang diamati	Program	Kesesuaian dengan Program Pusat	Kesesuaian dengan Program Kerja Pemerintah Kab./ Kota	Kebutuhan Sumber Pembiayaan	Kemungkinan Waktu Penerapan/ Pelaksanaan	Keterangan
A STRATEGI SKALA KOTA								
1	Mengamankan fungsi sempadan Sungai Batang Bungo dan Batang Tebo	Fisik	Penataan/ Relokasi permukiman rawan bencana genangan dan banjir	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun keempat	
		Sosekmas	Menyelamatkan jiwa, harta masyarakat dan asset lainnya					
		Kelembagaan	Dinas PU, Bappeda, Dinas Perkotaan, BPN, PDAM, BPN, Badan Pemberdayaan masyarakat, Camat dan Lurah setempat					
		Pembiayaan						
2	Penataan kawasan permukiman pinggir sungai di kawasan perkotaan	1 Fisik	Revitalisasi kawasan permukiman pinggir sungai / Pembangunan Kota Pinggir Sungai	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor,	5 Tahun Pertama dan Kedua	Keberadaan Sungai Batang Tebo dan sungai Batang
		Sosial Ekonomi Masyarakat	Kawasan lebih berkembangnya fungsi tetapi fungsi utama sebagai lindung					

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			<p>sungai tetap terjaga bahkan semakin kuat dengan bangunan yang memperkuat konstruksi tebing, tanggul dan bantaran sungai,</p>			Swadaya Masyarakat		Bungo di Kota Muara Bungo, mestinya dapat menjadi icon, citra dan wajah Kota Sungai bagi Kota Muara Bungo
			<p>sirkulasi pergerakan semakin luas dan mengurangi kepadatan sirkulasi pergerakan pusat kota dengan dibangunnya jaring-jaring jalan dan transportasi di kawasan pinggiran sungai</p>					
			<p>Pemanfaatan lahan kota yang lebih ekonomis sekaligus memperkuat konstruksi lindung sungai dan memngrangi kepadatan penduduk dan kegiatan pusat kota</p>					
			<p>Perubahan citra kawasan pinggiran sungai dari halaman belakang menjadi halaman depan atau wajah kota, dan berkembangnya kegiatan wisata kota melalui pembangunan taman kota di pinggiran sungai, arena wisata sungai dll</p>					



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			<p>Pengembangan forum komunikasi dengan masyarakat yang melakukan kegiatan di sungai dan pinggiran sungai (penambangan emas liar, dan kegiatan lainnya yang bisa merusak aliran, mencemari air sungai, dan kerusakan lingkungan kawasan pingiran sungai) untuk solusi alih matapencaharian</p>					
		Kelembagan	Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas ESDM, Badan Pemberdayaan Masyarakat					
		Pembiayaan						
3	Penyediaan permukiman layak huni dan murah bagi penduduk pendatang dan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Muara Bungo	1	<p>Fisik</p> <p>Pembangunan rumah susun/pondok boro murah bagi kaum pendatang dan masyarakat berpenghasilan rendah di dekat kawasan pusat kegiatan Kota Muara Bungo</p>	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim dan Kementerian Perumahan Rakyat	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun Pertama dan Kedua	Pertumbuhan penduduk Kota Muara Bungo yang tinggi menuntut ketersediaan hunian yang layak dan sehat yang memadai
		Sosekmas	Menyediakan hunian layak dan murah, serta meringankan beban ekonomi biaya tinggi bagi kaum pendatang/ penduduk boro dan masyarakat berpenghasilan rendah					



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			Kelembagan	Dinas Perkotaan, Dinas PU					
			Pembiayaan						
4	Penyediaan Tempat Pemakaman Umum yang terencana dan memadai untuk jangka panjang	1	Fisik	Pembangunan kawasan pemakaman umum Kota Muara Bungo	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun Pertama dan Kedua	
			Sosekmas	Tersedianya tempat pemakaman umum yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat					
			Kelembagan	Dinas Perkotaan, Dinas PU					
			Pembiayaan						
5	Pemantapan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota Muara Bungo	1	Fisik	Penyusunan RP4D Kabupaten Bungo	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
			Sosekmas	Memantapkan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kota Muara Bungo					
			Kelembagan	Bappeda. Dinas Perkotaan, Dinas PU					
			Pembiayaan						

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

6	Bidang Air Minum	1	Fisik	<p>1) Bantek Penyusunan Master Plan Pengembangan Pelayanan Air bersih skala Perkotaan Muara Bungo yang mencakup 5 wilayah Kecamatan</p> <p>2) Bantek Penyusunan Studi kelayakan penambahan investasi dan peningkatan kinerja pelayanan Air Minum Perkotaan Muara Bungo</p> <p>3) Bantek Penyusunan Advisory peyehatan kelembagaan PDAM "PANCURAN TALAGO" Kab. Bungo</p>	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama
			Sosekmas	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat perkotaan Muara Bungo akan air bersih, yang saat ini baru terlayani sekitar 40 % Terjaminnya tingkat kebersihan konsumsi air minum masyarakat				
			Kelembagan	PDAM "Pancuran Talago" Kabupaten Bungo				
			Pembiayaan					
		2	Fisik	Perluasan Pembangunan Jaringan pipa pelayanan air	RENSTRA PU-CK	RPJMD, RTRW	BLN/ APBN/ APBD Propinsi,	5 Tahun pertama

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			minum PDAM "Pancuran Talago" Kabupaten Bungo	Dit. Bangkim	Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	s/d 5 Tahun keempat	
		Sosekmas	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat perkotaan Muara Bungo akan air bersih, yang saat ini baru terlayani sekitar 40 % Terjaminnya tingkat kebersihan konsumsi air minum masyarakat					
		Kelembagan	PDAM "Pancuran Talago" Kabupaten Bungo					
		Pembiayaan						
7	Bidang Drainase	3	Fisik	Bantek Penyusunan Mastplan Drainase Kota Muara Bungo	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama
			Sosekmas	Terhindarnya sebagian masyarakat dari resiko genangan/ banjir				
			Kelembagan	Dinas PU				
			Pembiayaan					
		4	Fisik	Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Kuarter Kota Muara Bungo	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor,	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun keempat
			Sosekmas	Perluasan kawasan bebas genangan da banjir				
Kelembagan	Dinas PU							

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			Pembiayaan			Swadaya Masyarakat		
8	Bidang Persampahan	1	Fisik	1) Bantek Penyusunan Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Muara Bungo yang mencakup 5 wilayah kecamatan 2) Studi kelayakan dan Master Plan Pembangunan TPA sampah baru di luar kawasan perkotaan Muara Bungo 3) AMDAL TPA calon lokasi TPA baru di luar kawasan perkotaan Muara Bungo	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama
			Sosekmas	Terencanakannya manajemen pengelolaan persampahan Kota secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan				
			Kelembagan	Dinas PU				
			Pembiayaan					
	2	Fisik	Pengadaan Lahan untuk TPA baru di luar kawasan perkotaan Muara Bungo	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor,	5 Tahun pertama	
		Sosekmas	Keberihan dan kesehatan kota					
		Kelembagan	Dinas PU, BPN, Dinas					

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			Perkotan			Swadaya Masyarakat		
			Pembiayaan					
		4	Fisik	Pembangunan TPA baru di luar perkotaan Muara Bungo	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun ke dua
			Sosekmas	Terhindarnya masyarakat kawasan perkotaan dari polusi sampah				
			Kelembagan	Dinas Perkotaan				
			Pembiayaan					
		3	Fisik	Pengadaan baru dan peremajaan sarana dan prasaraa pengelolaan persampahan Kota Muara Bungo	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun ke empat
			Sosekmas	Meningkatnya dan meluasnya pelayanan pengelolaan persampahan bagi masyarakat Kota Muara Bungo				
			Kelembagan	Dinas Perkotaan, Dinas PU, dan Kesehatan, PKK				
			Pembiayaan					
9	Bidang Sanitasi	1	Fisik	Bantek Penyusunan Mastrplan Pengelolaan air limbah dan Sanitasi Kota Muara Bungo/ Rencana Induk Sistem Sanitasi dan Pengelolaan Air Limbah Perkotaan	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/	5 Tahun pertama

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			Sosekmas	Terencanakannya manajemen pengelolaan air limbah dan sanitasi Kota secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan		Bungo	Investor, Swadaya Masyarakat						
			Kelembagan	Dinas PU, Dinas Perkotaan									
			Pembiayaan										
		2	Fisik	Pembangunan IPAL dan IPLT Kota Muara Bungo	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun ke lima					
			Sosekmas	Terwujudnya lingkungan hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Muara Bungo secara berkelanjutan									
			Kelembagan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, dan Kesehatan, PKK									
			Pembiayaan										
			Fisik	Bantek Penyusunan Mastrplan Penataan Jalan Kota									
			Sosekmas	Terencanakannya kegiatan penataan jalan kota secara terpadu , sinergi dan terintegrasi									
10	Bidang Jalan	1	Kelembagan	Dinas PU, Dinas Perkotaan	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama					
			Pembiayaan										
			Fisik	Pembangunan Median jalan dan landscape jalan						RENSTRA PU-CK	RPJMD, RTRW	BLN/ APBN/ APBD Propinsi,	5 Tahun pertama sd

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			Sosekmas	Terjaminnya kelancaran transportasi, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan dan pejalan kaki	Dit. Bangkim	Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun Kedua	
			Kelembagan	Dinas PU, Dinas Perkotaan					
			Pembiayaan						
11	Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	Fisik	Bantek Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Perdagangan, Kawasan Pinggiran Sungai, dan Kawasan Pusat Pemerintahan, dan Kawasan Khusus lainnya	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama sd 5 Tahun Kedua	
			Sosekmas	Tertatanya lingkungan yang sehat, aman, nyaman dan serasi bagi masyarakat baik untuk bermukim maupun mengembangkan usaha ekonomi dan memelihara tata nilai budaya masyarakat, maupun pelayanan pemerintahan					
			Kelembagan	Dinas PU, Bappeda, Dinas Perkotaan, BPN, PDAM, Badan Pemberdayaan masyarakat, Camat dan Lurah setempat					
		Pembiayaan							
		1	Fisik	Pengembangan Sistem Infirmasi Geografi (SIG)	RENSTRA PU-CK	RPJMD, RTRW	BLN/ APBN/ APBD Propinsi,	5 Tahun pertama	

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			Perijinan Bangunan/ IMB berbasis GIS	Dit. Bangkim	Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat		
		Sosekmas	Mengantisipasi tertib bangunan, tertib lingkungan dan menghindari benturan kepentingan di kemudian hari					
		Kelembagan	Dinas Perkotaan dan Dinas PU					
		Pembiayaan						

B SKALA KAWASAN PRIORITAS TERPILIH

1 Kelurahan Jaya Setya RT 02 s/d 06 dan RT 12 s/d 14								
1	Bidang Jalan	1	Fisik	Peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak (peninggian, pengaspalan/ betonisasi)	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama
			Sosekmas	keteraturan lingkungan dan kelacaran mobilitas				
			Kelembagan	Dinas PU,				
			Pembiayaan					
2	Perumahan/ permukiman, terutama di RT 12 s/d 14	2	Fisik	Pemugaran rumah kurang layak huni	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama
			Sosekmas	Terwujudnya rumah sehat dan layak huni				
			Kelembagan	Dinas PU				
			Pembiayaan					
3	Bidang Drainase	3	Fisik	Pembangunan dan normalisasi saluran drainase primer dan	RENSTRA PU-CK	RPJMD, RTRW	BLN/ APBN/ APBD Propinsi,	5 Tahun pertama

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			sekunder	Dit. Bangkim	Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	APBD Kab. , Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat		
			Sosekmas					
			Kelembagan					
			Pembiayaan					
4	Bidang Sanitasi dan Air Limbah terutama di RT 12 s/d 14	4	Fisik	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab. , Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
		Sosekmas						
		Kelembagan						
		Pembiayaan						
5	Bidang Persampahan terutama di RT 12 s/d 14	5	Fisik	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab. , Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
		Sosekmas						
		Kelembagan						
		Pembiayaan						
6	Bidang Air Minum	6	Fisik	RENSTRA PU-CK	RPJMD, RTRW	BLN/ APBN/ APBD Propinsi,	5 Tahun pertama s/d	

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			Sosekmas	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan air minum serta terjamainnya kesehatan masyarakat	Dit. Bangkim	Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta , Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun keempat	
			Kelembagan	PDAM					
			Pembiayaan						
7	Bidang Penataan bangunan dan Lingkungan	7	Fisik	Peninggian lantai bangunan	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab., Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun keempat	
		Sosekmas	Mewujudkan hunian yang sehat, aman, nyaman dan bebas genangan						
		Kelembagan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Badan Pemberdayaan masyarakat,						
		Pembiayaan							

2 Kelurahan Batang Bungo, Kec. Pasar Muara Bungo, (RW.02 / RT.05, 06, 07) Permukiman di Sebelah belakang dan sebelah kiri Pasar Atas

1	Bidang Jalan	1	Fisik	Peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak (pengaspalan/ betonisasi)	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab. , Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
		Sosekmas	Kebersihan dan kelancaran mobilitas						
		Kelembagan	Dinas PU,						
		Pembiayaan							
2	Bidang Drainase	2	Fisik	Pembangunan dan normalisasi saluran drainase lingkungan sekaligus berfungsi sebagai saluran pembuangan air limbah	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab. , Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
		Sosekmas	Perluasan kawasan bebas genangan dan luapan air kotor an air hujan Kebersihan dan kesehatan						



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

				lingkungan dan masyarakat					
			Kelembagaan	Dinas PU					
			Pembiayaan						
3	Bidang Sanitasi dan Air Limbah terutama di sekitar Pasar Atas	3	Fisik	Pembangunan jamban umum, kampanye kerja bakti gotong royong pembersihan saluran, dan gerakan pemgerantasan sarang nyamuk	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab. , Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama	
			Sosekmas	Kebersihan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan					
			Kelembagaan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Dinas Kesehatan, PKK Kelurahan					
			Pembiayaan						
4	Bidang Persampahan	4	Fisik	Pemasyarakatan penyediaan bak sampah dan pengelolaan sampah secara mandiri, dan gerakan kebersihan lingkungan	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab. , Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun keempat	
			Sosekmas	Kebersihan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan					
			Kelembagaan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Dinas Kesehatan, PKK Kelurahan					
			Pembiayaan						

3 Kel. Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kp.Lorong Pepaya (RT.01, 02, 03, 04) di RW 2

1	Bidang Drainase	1	Fisik	Pembangunan dan normalisasi saluran drainase lingkungan sekaligus berfungsi sebagai saluran pembuangan air limbah	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab. , Kemitraan dgn	5 Tahun pertama	
---	-----------------	---	-------	---	----------------------------	--------------------------------	--	-----------------	--

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

			sepanjang sekitar 350 m		Kota Muara Bungo	Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat		
			Sosekmas	Perluasan kawasan bebas genangan dan luapan air kotor an air hujan				
			Kelembagan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Dinas Kesehatan, PKK Kelurahan				
			Pembiayaan					
2	Bidang Sanitasi dan Air Limbah	2	Fisik	Pemasyarakatan gerakan kerja bakti gotong royong pembersihan saluran, dan gerakan pemgerantasan sarang nyamuk secara periodik	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab. , Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun keempat
			Sosekmas	Kebersihan dan kesehatan masyarakat dan lingkungan				
			Kelembagan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Dinas Kesehatan, PKK Kelurahan				
			Pembiayaan					
3	Bidang Persampahan	3	Fisik	Pemasyarakatan penyediaan bak sampah dan pengelolaan sampah secara mandiri, dan gerakan kebersihan lingkungan	RENSTRA PU-CK Dit. Bangkim	RPJMD, RTRW Kab.Bungo dan RUTR Kota Muara Bungo	BLN/ APBN/ APBD Propinsi, APBD Kab. , Kemitraan dgn Swasta, Swasta penuh/ Investor, Swadaya Masyarakat	5 Tahun pertama s/d 5 Tahun keempat
			Sosekmas	Menyelamatkan jiwa, harta masyarakat dan asset lainnya				
			Kelembagan	Dinas PU, Dinas Perkotaan, Dinas Kesehatan, PKK Kelurahan				
			Pembiayaan					

Bab 10

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI STRATEGI

10.1. Identifikasi Implikasi Dampak Strategi

Kegiatan identifikasi terhadap implikasi dan dampak yang mungkin muncul sebagai akibat dilaksanakannya strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Identifikasi implikasi dan dampak ini dimaksudkan untuk mengantisipasi segala perubahan yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, baik yang bersifat positif maupun negatif, sehingga dapat disusun langkah-langkah untuk mengantisipasi perubahan tersebut supaya tidak menimbulkan dampak negatif. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi masukan bagi penyusunan program strategis yang akan menjadi langkah-langkah operasional dalam strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Analisis dampak pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan ini akan dilakukan tinjauan dari berbagai aspek, sesuai dengan karakteristik yang ditinjau, yakni dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan aspek budaya.

Berikut ini adalah Tabel Implikasi Dampak Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Tabel : 10 - 1
**Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
 Bidang Permukiman**

No.	Strategi Pembangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
1.a	Skala Perkotaan Muara Bungo			
	1) Memenuhi data base dan sistem informasi perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya data base dan sistem informasi perumahan di Perkotaan Muara Bungo • 		<ul style="list-style-type: none"> • Database perumahan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat
	2) Menyiapkan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk • Meningkatkan kelayakan hunian penduduk perkotaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Studi UKL-UPL/AMDAL • Pendampingan masyarakat • Sosialisasi melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan •
	3) Melakukan penanggulangan terhadap kawasan permukiman yang rawan bencana genangan / banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk • Meminimalisasi kerugian yang dapat diakibatkan oleh bencana genangan/ banjir 	<ul style="list-style-type: none"> • Peninggian lantai bangunan • Relokasi perumahan rawan bencana genangan / banjir 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penanggulangan terhadap kawasan permukiman yang rawan bencana tanpa pembongkaran rumah
	4) Pengembangan dan pembangunan permukiman bagi masyarakat menengah dan berpenghasilan rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses adaptasi di lingkungan yang baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi LARAP (Land Acquisition and Resettlement Plan) • Studi UKL-UPL/AMDAL • Pendampingan masyarakat •
	5) Melakukan penanganan terhadap permukiman padat maupun cenderung kumuh	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk • Perbaiki estetika lingkungan • Menurunkan resiko terkena bencana genangan / banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpindahnya tempat tinggal • Perlu proses adaptasi di lingkungan baru • Keresahan sosial • Kehilangan relasi sosial & ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi rumah-rumah di bantaran sungai dan saluran drainase • Studi LARAP • Pendampingan masyarakat • Sosialisasi melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

No.	Strategi Pembangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
	6) Memenuhi kekurangan kebutuhan rumah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Berpindahnya tempat tinggal 	<ul style="list-style-type: none"> Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan
1b.	Skala Kawasan Prioritas			
	1) Menyiapkan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Meningkatkan kelayakan hunian penduduk Kota 		<ul style="list-style-type: none"> Studi UKL-UPL/AMDAL Pendampingan masyarakat Sosialisasi melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan .
	2) Melakukan penanggulangan terhadap kawasan permukiman yang rawan bencana genangan / banjir.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Meminimalisasi resiko akibatkan bencana genangan / banjir 	<ul style="list-style-type: none"> Peninggian lantai bangunan Relokasi perumahan yang rawan bencana genangan/ banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningakatan penanggulangan terhadap kawasan permukiman yang rawan bencana genangan / banjir tanpa pembongkaran rumah
	3) Melakukan penanganan terhadap permukiman padat maupun cenderung kumuh	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Perbaikan estetika lingkungan Menurun resiko terkena bencana genangan / banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> Berpindahnya tempat tinggal Proses adaptasi di lingkungan yang baru Keresahan sosial Kehilangan relasi sosial dan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi rumah-rumah di bantaran sungai dan saluran drainase Studi LARAP Pendampingan masyarakat Sosialisasi Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan



Tabel : 10 - 2

Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan Bidang Jalan Lingkungan

No.	Strategi Pebangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
2.a	Skala Perkotaan Muara Bungo			
	1) Memenuhi Sistem Informasi / Data Base Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya data base dan sistem informasi jalan lingkungan yang ada di Perkotaan Muara Bungo • Dapat diketahui dengan mudah kondisi jalan lingkungan • 		<ul style="list-style-type: none"> • Database jalan lingkungan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat • Monitoring uptodate dan pemeliharaan jalan lingkungan secara berkala.
	2) Melakukan penanganan jalan lingkungan yang rusak	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan prasarana transportasi • Peningkatan kenyamanan pengguna jalan • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya lahan penduduk • Gangguan aktivitas penduduk • Bertambahnya kepadatan penduduk • 	<ul style="list-style-type: none"> • Ganti rugi lahan penduduk yang terkena pembangunan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku
	3) Memenuhi kebutuhan jalan lingkungan baru	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya panjang dan lebar jalan lingkungan • Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya lahan milik penduduk yang dijadikan jalan baru • Gangguan aktivitas penduduk • Bertambahnya kepadatan penduduk • 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi UKL-UPL/AMDAL • Ganti rugi lahan penduduk yang terkena pembangunan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku
	4) Melakukan penanganan pemeliharaan jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya prasarana transportasi • Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan aktivitas penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan pemeliharaan jalan secara berkala.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

No.	Strategi Pembangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
	5) Memenuhi kebutuhan penanggulangan jalan yang terkena genangan / banjir.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya prasarana transportasi • Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan • Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bila jalan ditinggikan kemungkinan berpindahya daerah yang terkena genangan / banjir. • Gangguan aktivitas penduduk • Bertambahnya kepadatan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan pemeliharaan jalan lingkungan secara berkala. • Studi UKL-UPL/AMDAL • Ganti rugi lahan penduduk yang terkena pembangunan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku
	6) Memenuhi kebutuhan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kemudahan aksesibilitas antar wilayah • Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan aktivitas penduduk • Bertambahnya kepadatan penduduk • Memungkinkan perubahan perilaku masyarakat • 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan kota • Pengawasan dan pemeliharaan jembatan
2.b	Skala Kawasan Prioritas			
	1) Melakukan penanganan jalan lingkungan yang rusak	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan prasarana transportasi • Peningkatan kenyamanan pengguna jalan • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya lahan penduduk • Gangguan aktivitas penduduk • Bertambahnya kepadatan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Ganti rugi lahan penduduk yang terkena pembangunan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku
	2) Melakukan penanganan pemeliharaan jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya prasarana transportasi • Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan aktivitas penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan pemeliharaan jalan lingkungan secara berkala.
	3) Memenuhi kebutuhan penanggulangan jalan yang terkena rob / air laut pasang	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya prasarana transportasi • Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan • Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bila jalan ditinggikan kemungkinan berpindahya daerah yang terkena rob • Gangguan aktivitas penduduk • Bertambahnya kepadatan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan pemeliharaan jalan lingkungan secara berkala. • Studi UKL-UPL/AMDAL • Ganti rugi lahan penduduk yang terkena pembangunan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku

Tabel : 10 - 3

Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan Bidang Drainase

No.	Strategi Pembangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
3.a	Skala Perkotaan Muara Bungo			
	1) Melakukan pengembangan dan pengelolaan sungai	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya frekuensi banjir Berkurangnya resiko penyakit. Saluran drainase lebih lancar 	<ul style="list-style-type: none"> Gangguan aktivitas penduduk Berkurang bagian rumah penduduk di sekitar sungai dan saluran drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Studi UKL-UPL/AMDAL Sosialisasi kepada masyarakat sekitar saluran drainase dan sungai
	2) Melakukan penanganan genangan sementara air hujan	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya genangan Berkurangnya resiko penyakit. Saluran drainase lebih lancar 	<ul style="list-style-type: none"> Gangguan aktivitas penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada masyarakat sekitar saluran drainase dan daerah genangan Mendorong masyarakat dalam pembuatan lobang biopori / green drainage
	3) Melakukan penanganan saluran drainase dan gorong – gorong yang rusak dan sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya resiko penyakit. Kenyamanan penduduk Saluran drainase lebih lancar 	<ul style="list-style-type: none"> Gangguan aktivitas penduduk Lahan penduduk yang terganggu 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan saluran drainase secara berkala. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar saluran drainase dan daerah genangan
	4) Melakukan penanggulangan sistem drainase yang terkena rob / air laut pasang secara komprehensif.	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya resiko penyakit. Kenyamanan penduduk Obyek pariwisata Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Gangguan aktivitas penduduk Lahan penduduk yang terganggu Bertambahnya kepadatan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Studi UKL-UPL/AMDAL Studi rob / air laut pasang yang komprehensif Mendorong swasta untuk membuka obyek wisata pantai



LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

No.	Strategi Pembangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
3b.	Skala Kawasan Prioritas			
	1) Melakukan penanganan genangan sementara air hujan	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya resiko penyakit. Kenyamanan penduduk 		<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan saluran drainase secara berkala.
	2) Melakukan penanganan saluran drainase dan gorong – gorong yang rusak dan sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya resiko penyakit. Kenyamanan penduduk Saluran drainase lebih lancar 	<ul style="list-style-type: none"> Gangguan aktivitas penduduk Lahan penduduk yang terganggu 	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan saluran drainase secara berkala. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar saluran drainase dan daerah genangan
	3) Melakukan penanggulangan sistem drainase yang terkena rob / air laut pasang secara komprehensif.	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya resiko penyakit. Kenyamanan penduduk Obyek pariwisata Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Gangguan aktivitas penduduk Lahan penduduk yang terganggu Bertambahnya kepadatan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Studi UKL-UPL/AMDAL Studi rob / air laut pasang yang komprehensif Mendorong swasta untuk membuka obyek wisata pantai

Tabel : 10 - 4

Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan Bidang Air Minum

No.	Strategi Pembangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
4.a	Skala Perkotaan Muara Bungo			
	1) Meningkatkan supply sumber air baku	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pasokan air baku untuk PDAM Meningkatkan cakupan pelayanan Meningkatkan jumlah pelanggan Meningkatkan laba perusahaan Meningkatkan potensi PAD 	<ul style="list-style-type: none"> Konflik kepentingan pemanfaatan sumber air baru Pelaksanaan konstruksi pemasangan pipa yang akan mengganggu aktifitas masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Studi UKL-UPL/AMDAL Pendekatan komunikatif terhadap warga sekitar daerah sumber air baku

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

No.	Strategi Pembangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
	2) Mengembangkan cakupan pelayanan air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas pelayanan air minum perpipaan pada masyarakat • Meningkatkan laba perusahaan • Meningkatkan potensi PAD 	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan aktivitas masyarakat pada saat konstruksi perpipaan • Kehilangan mata pencaharian masyarakat yang mengandalkan penjualan air minum eceran 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi UKL-UPL/AMDAL
	3) Meningkatkan kinerja PDAM	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan air minum yang optimal kepada masyarakat baik secara eksternal maupun internal 		<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan teknis penyehatan PDAM • Pelatihan manajemen perusahaan
	4) Menangani kebocoran air	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan tingkat kehilangan pendistribusian air minum • Peningkatan laba perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan pelayanan air minum kepada pelanggan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran informasi kepada pelanggan
4.b	Skala Kawasan Prioritas			
	1) Memudahkan akses untuk air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan air minum • Peningkatan potensi PAD 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan mata pencaharian masyarakat yang mengandalkan penjualan air minum • Persaingan dengan pengguna lain 	<ul style="list-style-type: none"> • studi UKL-UPL/AMDAL • Perencanaan air minum kawasan prioritas
	2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas IPA (sumur bor) eksisting	<ul style="list-style-type: none"> • Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan air minum non pelanggan PDAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan aktivitas masyarakat pada saat konstruksi perpipaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi UKL-UPL/AMDAL • Sosialisasi kepada masyarakat
	3) Mengembangkan aspek manajemen dan aspek legalitas IPA sederhana oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan aktivitas masyarakat pada saat konstruksi perpipaan • Adanya kecemburuan sosial dalam penetapan formatur kepengurusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi UKL-UPL/AMDAL • Pembinaan manajemen dan teknis bagi BKM dan KSM penyelenggara SPAM • Pemilihan formatur pengurus yang berkompeten

Tabel : 10 - 5
Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan Bidang Air Limbah

No.	Strategi Pembangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
5.a	Skala Perkotaan Muara Bungo			
	1) Perencanaan pengelolaan air limbah sistem off-site	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah di sungai akan berkurang • Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya lahan penduduk • Penurunan kualitas lingkungan selama masa konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi UKL-UPL/AMDAL • Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan
	2) Meningkatkan pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi yang telah terbangun	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pelayanan air limbah • Peningkatan kualitas kesehatan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang siapnya dukungan sarana dan prasarana dibidang air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana di bidang air limbah
	3) Memantapkan kelembagaan dan peraturan pengelolaan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah • 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kecemburuan sosial dalam penetapan formatur kepengurusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan air limbah • Pemilihan formatur pengurus yang berkompeten
5.b	Skala Kawasan Prioritas			
	1) Mengembangkan pengelolaan limbah domestik sistem onsite	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kualitas lingkungan • Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya lahan pekarangan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan •
	2) Mengembangkan sarana dan prarana air limbah komunal	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kualitas lingkungan • Peningkatan kualitas kesehatan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya lahan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan

Tabel : 10 - 6

Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan Bidang Persampahan

No.	Strategi Pembangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
6.a	Skala Perkotaan Muara Bungo			
	1) Mengembangkan pola kerja sama regional dalam penanganan sampah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kerjasama pengelolaan persampahan khususnya TPA Regional 	<ul style="list-style-type: none"> Gejolak sosial di wilayah rencana lokasi TPA Regional 	<ul style="list-style-type: none"> Studi UKL-UPL/AMDAL Pendekatan persuasif kepada masyarakat Biaya ganti rugi lahan
	2) Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk Optimalisasi pengangkutan sampah dari masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan biaya operasional Ceceran dan bau sampah di jalan raya 	<ul style="list-style-type: none"> Studi UKL-UPL/AMDAL Penanganan sampah melalui pengadaan sarana pengangkut sampah yang Penambahan biaya operasional
	3) Penangan pengelolaan persampahan melalui program 3R	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk Peluang usaha baru 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membuang sampah Kurangnya pengetahuan tentang pemilahan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan kepada masyarakat tentang penanganan sampah 3R Sosialisasi pemanfaatan hasil produk pengolahan sampah pola 3R
	4) Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Peran swasta dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk 		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan secara berkala kepada instansi pengelola sampah
6.b	Skala Kawasan Prioritas			
	1) Meningkatkan pengolahan sampah melalui sistem 3R	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk Peluang usaha baru 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membuang sampah Kurangnya pengetahuan tentang pemilahan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan kepada masyarakat tentang penanganan sampah 3R Sosialisasi pemanfaatan hasil produk pengolahan sampah pola 3R
	2) Meningkatkan pelayanan sampah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk Meningkatnya kualitas lingkungan khususnya dari segi estetika 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membuang sampah 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan kepada masyarakat tentang penanganan sampah 3R
	3) meningkatkan peran aktif swasta dalam pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> Peran swasta dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk 		<ul style="list-style-type: none"> Mendorong swasta untuk mendukung pengelolaan sampah melalui program CSR nya.

Tabel : 10 - 7

Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan Bidang Sosial/Pemberdayaan Masyarakat

No	Strategi Pembangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
7.a	Skala Perkotaan Muara Bungo			
	1) menyediakan informasi tentang RTRW Kab. Bungo dan RUTR/ RDTR Perkotaan Muara Bungo di kalangan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya informasi tentang RTRW Kab. Bungo dan RUTR/ RDTR Perkotaan Muara Bungo bagi masyarakat umum 		<ul style="list-style-type: none"> Menempatkan papan informasi pada lokasi yang strategis Memfasilitasi masyarakat agar menjadi pelaku dalam proses perencanaan tata ruang (Pemerintah sebagai fasilitator dan hormati hak masyarakat, serta kearifan lokal/keberagaman budayanya
	2) Menyediakan informasi tentang kawasan lindung (sempadan sungai, pantai dan kawasan hijau) yang dilarang mendirikan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya informasi tentang kawasan lindung bagi masyarakat umum 		<ul style="list-style-type: none"> Menempatkan papan informasi pada lokasi yang strategis Memfasilitasi masyarakat agar menjadi pelaku dalam proses perencanaan tata ruang (Pemerintah sebagai fasilitator dan hormati hak masyarakat, serta kearifan lokal/keberagaman budayanya
	3) Mensinergikan forum Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Kelompok Swadaya Masyarakat dalam penanganan masalah pengelolaan permukiman dan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Adanya forum komunikasi antar Pokmas/ KSM yang menjadi penyelenggara infrastruktur permukiman Memudahka proses pembinaan yang berkelanjutan 		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan manajerial dan teknis secara berkala dan berkelanjutan
	3) Penguatan implementasi pengelolaan sampah dengan 3 R (reuse, reduce, dan recycle).	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan 3 R 		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan melalui kelembagaan lokal tentang pengelolaan sampah dengan 3 R secara berkala.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan SPPIP Kota Muara Bungo – 2011

No	Strategi Pembangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
7.b	Skala Kawasan Prioritas			
	1) Pembangunan sumur bor dan jaringan distribusinya, dengan pengelolaan secara partisipatif oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya penyelenggaraan air minum yang dikelola secara mandiri 		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan penyelenggara SPAM secara demokratis dan transparan Pembinaan manajerial dan teknis secara berkala dan berkelanjutan
	2) Penguatan implementasi pengelolaan sampah dengan 3 R (reuse, reduce, dan recycle).	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan 3 R 		<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan melalui kelembagaan lokal tentang pengelolaan sampah dengan 3 R secara berkala.
	3) Penyediaan informasi tentang kawasan lindung (sempadan sungai, pantai dan kawasan hijau) yang dilarang mendirikan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya informasi tentang kawasan lindung bagi masyarakat umum 		<ul style="list-style-type: none"> Menempatkan papan informasi pada lokasi yang strategis Memfasilitasi masyarakat agar menjadi <i>pelaku</i> dalam proses perencanaan tata ruang (Pemerintah sebagai fasilitator dan hormati hak masyarakat, serta kearifan lokal/keberagaman budayanya
	4) Penguatan kelembagaan Pokmas/ KSM dalam penanganan masalah pengelolaan permukiman dan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis Pokmas/ KSM yang menjadi penyelenggara infrastruktur permukiman Memudahka proses pembinaan yang berkelanjutan 		Pembinaan manajerial dan teknis secara berkala dan berkelanjutan
	5) Penguatan dan sosialisasi kebijakan pembangunan hunan vertikal demi penghematan lahan kota, termasuk rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program Rusunami dan Rusunawa 		<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian informasi program melalui kelembagaan lokal (seperti: PKK, Karang Taruna, Pokmas/ KSM dll.)

Tabel : 10 - 8

Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan Bidang Pendanaan Ekonomi

No	Strategi Pebangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
8.a	Perkotaan Muara Bungo			
	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan melalui program SPPIP.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sumber pendapatan daerah • Pembiayaan pembangunan infrastruktur akan cepat terealisasi dan berkesinambungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu upaya dan dana dalam memenuhi kegiatan peningkatan pendapatan daerah • Perlu adanya kemampuan pencarian sumber pendanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pendapatan PAD minimal sebesar 25% per tahun dengan penggalan dari pajak dan retribusi daerah dengan cara meningkatkan efisiensi penagihan dan tarif melalui intensifikasi atau menggali sumber-sumber pajak dan retribusi baru melalui ekstensifikasi. • Mengajukan tambahan subsidi dari pemerintah pusat dan propinsi untuk menambah sumber penerimaan dalam rangka pembiayaan pembangunan. • Mengkaji sumber pendanaan baru melalui swadaya masyarakat dan juga melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui KPS.
8.b.	Kawasan Prioritas			
	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan melalui program SPPIP.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sumber pendapatan daerah • Pembiayaan pembangunan infrastruktur akan cepat terealisasi dan berkesinambungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu upaya dan dana dalam memenuhi kegiatan peningkatan pendapatan daerah • Perlu adanya kemampuan pencarian sumber pendanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pendapatan PAD minimal sebesar 25% per tahun dengan penggalan dari pajak dan retribusi daerah dengan cara meningkatkan efisiensi penagihan dan tarif melalui intensifikasi atau menggali sumber-sumber pajak dan retribusi baru melalui ekstensifikasi.
				<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan tambahan subsidi dari pemerintah pusat dan propinsi untuk menambah sumber penerimaan dalam rangka pembiayaan pembangunan • Mengkaji sumber pendanaan baru melalui swadaya masyarakat dan juga melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui KPS.

Tabel : 10 - 9

Identifikasi Implikasi Dampak Strategi Pembangunan Bidang Kelembagaan

No.	Strategi Pembangunan	Dampak		Strategi Pengelolaan
		Positif	Negatif	
9.a	Perkotaan Muara Bungo			
	1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan melalui SPPIP	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan • Meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkan perangkat dan biaya besar dalam rangka peningkatan SDM • Aparat Daerah kurang memahami tugas dan kewenangan dalam konteks penyusunan SPPIP; 	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga dan anggaran yang tersedia dalam proses fasilitasi penyusunan SPPIP; • Mengidentifikasi leading sektor dalam penyusunan SPPIP; • Mendorong pemahaman akan pentingnya visi dalam perencanaan investasi dengan langkah awal validasi data dan pembangunan system data daerah; • Pemberdayaan bahwa visi dan misi pembangunan daerah akan terwujud bilamana dapat mengesampingkan ego sektoral dan ego kedaerahan yang masih hidup di dalam pemerintah daerah.
9.b	Kawasan Prioritas			
	1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan melalui SPPIP	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan • Meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkan perangkat dan biaya besar dalam rangka peningkatan SDM • Aparat Daerah kurang memahami tugas dan kewenangan dalam konteks penyusunan SPPIP; 	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga dan anggaran yang tersedia dalam proses fasilitasi penyusunan SPPIP; • Mengidentifikasi leading sektor dalam penyusunan SPPIP; • Mendorong pemahaman akan pentingnya visi dalam perencanaan investasi dengan langkah awal validasi data dan pembangunan system data daerah; • Pemberdayaan bahwa visi dan misi daerah akan terwujud bilamana dapat mengesampingkan ego sektoral dan ego kedaerahan yang masih hidup di dalam pemerintah daerah.

Bab 11

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)

11. 1. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) SPPIP Kota Muara Bungo

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) SPPIP Kota Muara Bungo merupakan penjabaran strategi dan program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bungo khususnya visi dan misi Kota Muara Bungo dalam jangka waktu 5 tahun pertama (2012 – 2016), kedua, ketiga dan keempat sampai dengan 20 tahun (s/d 2031) yang akan datang, khususnya pada bidang keciptakarya.

11. 2. Komponen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) SPPIP Kota Muara Bungo

Komponen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) SPPIP Kota Muara Bungo dikelompokkan dalam 4 bidang yakni :

1. Bidang Permukiman dan Jalan yang didalamnya mencakup bidang pengembangan permukiman dan bidang jalan
2. Bidang Air Minum/ Air Bersih
3. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) yang di dalamnya mencakup bidang pengelolaan Drainase Perkotaan, Pengelolaan Persampahan perkotaan, sanitasi dan pengelolaan air limbah perkotaan
4. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL),

11. 3. Rincian Kegiatan RPIJM SPPIP Kota Muara Bungo

Rincian kegiatan pada Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) SPPIP Kota Muara Bungo sebagaimana disajikan pada tabel terlampir.

REKAPITULASI
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG CIPTA KARYA
STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) KOTA MUARA BUNGO,
KABUPATEN BUNGO, PROPINSI JAMBI

Kota: Muara Bungo
 Kab. : Bungo
 Propinsi: Jambi

TAHUN 2011 (Eksisting)

Dalam Ribuan Rupiah

No	Program/Kegiatan/Lokasi	Pembiayaan Tahun 2011							Jumlah
		BLN	APBN	APBD PROV	APBD KAB/ KOTA	Kemitraan dgn Swasta/ PDAM Khusus	Swasta penuh/ Masyarakat	Sumber lain	
1	2								
A	BIDANG PERMUKIMAN DAN JALAN								
1	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Program Pembangunan Perumahan	-	3.694.200	2.275.000	211.420	-	-	-	6.180.620
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	3.694.200	2.275.000	211.420	-	-	-	6.180.620
B	BIDANG AIR MINUM								
1	Pembangunan Air Minum	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembinaan Teknis SPAM	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan PS air minum pada kawasan strategis :	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Peningkatan Pelayanan Wilayah Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
C	BIDANG PLP (DRAINASE, PERSAMPAHAN, AIRLIMBAH DAN SANITASI)								
1	Pembangunan Persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembangunan Drainase	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	-	-	-	-	-	-	-	-
D	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PBL)								
1	Program Penataan/ Pembangunan Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Program Perbaikan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembinaan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembangunan Fisik dan Pengadaan	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL	0	3.694.200	2.275.000	211.420	0	0	0	6.180.620

5 (LIMA) TAHUN PERTAMA 2012 s/d 2016 TAHUN 2012

Dalam Ribuan Rupiah

No	Program/Kegiatan/Lokasi	Pembiayaan Tahun 2012							Jumlah
		BLN	APBN	APBD PROV	APBD KAB/ KOTA	Kemitraan dgn Swasta/ PDAM Khusus	Swasta penuh/ Masyarakat	Sumber lain	
1	2								
A	BIDANG PERMUKIMAN DAN JALAN								
1	Program Pengembangan Ekonomi Lokal		-	-	-	-	-	-	-
2	Program Pembangunan Perumahan		3.114.200	2.875.000	1.038.920	-	-	-	7.028.120
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		2.500.000	500.000	200.000	-	-	-	3.200.000
4	Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		-	-	-	-	-	-	-
			5.614.200	3.375.000	1.238.920	-	-	-	10.228.120
B	BIDANG AIR MINUM								
1	Pembangunan Air Minum		7.570.000	1.500.000	7.033.000	160.000	-	-	16.263.000
2	Pembinaan Teknis SPAM		-	467.000	140.000	-	-	-	607.000
3	Penyediaan PS air minum pada kawasan strategis :		24.170.422	-	-	-	-	-	24.170.422
4	Peningkatan Pelayanan Wilayah Kota	-	9.750.000	14.250.000	3.500.000	-	-	-	27.500.000
		-	41.490.422	16.217.000	10.673.000	160.000	-	-	68.540.422
C	BIDANG PLP (DRAINASE, PERSAMPAHAN, AIR LIMBAH DAN SANITASI)								
1	Pembangunan Persampahan		4.750.000	3.600.000	1.650.000	-	-	-	10.000.000
2	Pembangunan Drainase		3.000.000	-	250.000	-	-	-	3.250.000
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah		-	-	500.000	-	-	-	500.000
			7.750.000	3.600.000	2.400.000	-	-	-	13.750.000
D	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PBL)								
1	Program Penataan/ Pembangunan Kawasan		-	-	-	-	-	-	-
2	Program Perbaikan Lingkungan		-	-	600.000	-	-	-	600.000
3	Pembinaan Teknis		-	-	120.000	-	-	-	120.000
4	Pembangunan Fisik dan Pengadaan		-	-	300.000	-	-	-	300.000
			-	-	1.020.000	-	-	-	1.020.000
	JUMLAH TOTAL		54.854.622	23.192.000	15.331.920	160.000	0	0	93.538.542

TAHUN 2013

Dalam Ribuan Rupiah

No	Program/Kegiatan/Lokasi	Pembiayaan Tahun 2013							Jumlah
		BLN	APBN	APBD PROV	APBD KAB/ KOTA	Kemitraan dgn Swasta/ PDAM Khusus	Swasta penuh/ Masyarakat	Sumber lain	
1	2								
A	BIDANG PERMUKIMAN DAN JALAN								
1	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	-	7.300.000	1.600.000	730.000	-	-	-	9.630.000
2	Program Pembangunan Perumahan	-	24.229.820	8.575.000	3.343.920	-	-	-	36.148.740
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-	11.675.000	2.300.000	1.100.000	-	-	-	15.075.000
4	Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	7.400.000	1.600.000	2.740.000	-	-	-	11.740.000
		-	50.604.820	14.075.000	7.913.920	-	-	-	72.593.740
B	BIDANG AIR MINUM								
1	Pembangunan Air Minum	-	5.050.000	-	-	-	-	-	5.050.000
2	Pembinaan Teknis SPAM	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000
3	Penyediaan PS air minum pada kawasan strategis :	-	24.068.435	-	-	-	-	-	24.068.435
4	Peningkatan Pelayanan Wilayah Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	29.118.435	-	250.000	-	-	-	29.368.435
C	BIDANG PLP (DRAINASE, PERSAMPAHAN, AIRLIMBAH DAN SANITASI)								
1	Pembangunan Persampahan	-	13.125.000	4.800.000	1.075.000	-	-	-	19.000.000
2	Pembangunan Drainase	-	11.600.000	2.250.000	1.040.000	-	-	-	14.890.000
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	-	3.900.000	300.000	150.000	-	-	-	4.350.000
		-	28.625.000	7.350.000	2.265.000	-	-	-	38.240.000
D	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PBL)								
1	Program Penataan/ Pembangunan Kawasan	-	8.660.000	1.750.000	1.400.000	-	-	-	11.810.000
2	Program Perbaikan Lingkungan	-	4.550.000	900.000	600.000	-	-	-	6.050.000
3	Pembinaan Teknis	-	2.600.000	100.000	290.000	-	-	-	2.990.000
4	Pembangunan Fisik dan Pengadaan	-	10.000.000	3.000.000	1.300.000	-	-	-	14.300.000
		-	25.810.000	5.750.000	3.590.000	-	-	-	35.150.000
	JUMLAH TOTAL	0	134.158.255	27.175.000	14.018.920	0	0	0	175.352.175

TAHUN 2014

Dalam Ribuan Rupiah

No	Program/Kegiatan/Lokasi	Pembiayaan Tahun 2014						
----	-------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

		BLN	APBN	APBD PROV	APBD KAB/ KOTA	Kemitraan dgn Swasta/ PDAM Khusus	Swasta penuh/ Masyarakat	Sumber lain	Jumlah
1	2								
A	BIDANG PERMUKIMAN DAN JALAN								
1	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	-	7.300.000	1.600.000	730.000	-	-	-	9.630.000
2	Program Pembangunan Perumahan	-	21.114.200	6.675.000	2.638.920	-	-	-	30.428.120
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-	33.675.000	7.700.000	3.300.000	-	-	-	44.675.000
4	Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	7.400.000	1.600.000	2.740.000	-	-	-	11.740.000
		-	69.489.200	17.575.000	9.408.920	-	-	-	96.473.120
B	BIDANG AIR MINUM								
1	Pembangunan Air Minum	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembinaan Teknis SPAM	-	-	-	550.000	-	-	-	550.000
3	Penyediaan PS air minum pada kawasan strategis :	-	15.209.826	-	-	-	-	-	15.209.826
4	Peningkatan Pelayanan Wilayah Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	15.209.826	-	550.000	-	-	-	15.759.826
C	BIDANG PLP (DRAINASE, PERSAMPAHAN, AIRLIMBAH DAN SANITASI)								
1	Pembangunan Persampahan	-	9.800.000	4.100.000	795.000	-	-	-	14.695.000
2	Pembangunan Drainase	-	8.600.000	750.000	340.000	-	-	-	9.690.000
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	-	1.700.000	300.000	150.000	-	-	-	2.150.000
		-	20.100.000	5.150.000	1.285.000	-	-	-	26.535.000
D	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PBL)								
1	Program Penataan/ Pembangunan Kawasan	-	8.160.000	1.750.000	800.000	-	-	-	10.710.000
2	Program Perbaikan Lingkungan	-	2.635.000	900.000	600.000	-	-	-	4.135.000
3	Pembinaan Teknis	-	1.250.000	-	240.000	-	-	-	1.490.000
4	Pembangunan Fisik dan Pengadaan	-	10.000.000	3.000.000	1.300.000	-	-	-	14.300.000
		-	22.045.000	5.650.000	2.940.000	-	-	-	30.635.000
	JUMLAH TOTAL	0	126.844.026	28.375.000	14.183.920	0	0	0	169.402.946

TAHUN 2015

Dalam Ribuan Rupiah

No	Program/Kegiatan/Lokasi	Pembiayaan Tahun 2015
----	-------------------------	-----------------------

		BLN	APBN	APBD PROV	APBD KAB/ KOTA	Kemitraan dgn Swasta/ PDAM Khusus	Swasta penuh/ Masyarakat	Sumber lain	Jumlah
1	2								
A	BIDANG PERMUKIMAN DAN JALAN								
1	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	-	7.300.000	1.600.000	730.000	-	-	-	9.630.000
2	Program Pembangunan Perumahan	-	23.114.200	6.675.000	2.638.920	-	-	-	32.428.120
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-	32.175.000	7.300.000	3.150.000	-	-	-	42.625.000
4	Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	7.400.000	1.600.000	2.740.000	-	-	-	11.740.000
		-	69.989.200	17.175.000	9.258.920	-	-	-	96.423.120
B	BIDANG AIR MINUM								
1	Pembangunan Air Minum	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembinaan Teknis SPAM	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000
3	Penyediaan PS air minum pada kawasan strategis :	-	13.740.738	-	-	-	-	-	13.740.738
4	Peningkatan Pelayanan Wilayah Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	13.740.738	-	400.000	-	-	-	14.140.738
C	BIDANG PLP (DRAINASE, PERSAMPAHAN, AIRLIMBAH DAN SANITASI)								
1	Pembangunan Persampahan	-	4.850.000	3.250.000	400.000	-	-	-	8.500.000
2	Pembangunan Drainase	-	7.500.000	650.000	300.000	-	-	-	8.450.000
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	-	3.600.000	600.000	300.000	-	-	-	4.500.000
		-	15.950.000	4.500.000	1.000.000	-	-	-	21.450.000
D	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PBL)								
1	Program Penataan/ Pembangunan Kawasan	-	8.015.000	1.750.000	800.000	-	-	-	10.565.000
2	Program Perbaikan Lingkungan	-	2.550.000	900.000	600.000	-	-	-	4.050.000
3	Pembinaan Teknis	-	-	-	240.000	-	-	-	240.000
4	Pembangunan Fisik dan Pengadaan	-	10.000.000	3.000.000	1.300.000	-	-	-	14.300.000
		-	20.565.000	5.650.000	2.940.000	-	-	-	29.155.000
	JUMLAH TOTAL	0	120.244.938	27.325.000	13.598.920	0	0	0	161.168.858

TAHUN 2016

Dalam Ribuan Rupiah

No	Program/Kegiatan/Lokasi	Pembiayaan Tahun 2016						
		BLN	APBN	APBD PROV	APBD KAB/ KOTA	Kemitraan dgn Swasta/ PDAM Khusus	Swasta penuh/ Masyarakat	Sumber lain

1	2								
A	BIDANG PERMUKIMAN DAN JALAN								
1	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	-	7.300.000	1.600.000	730.000	-	-	-	9.630.000
2	Program Pembangunan Perumahan	-	17.114.200	6.675.000	2.638.920	-	-	-	26.428.120
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-	32.175.000	7.300.000	3.150.000	-	-	-	42.625.000
4	Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	7.400.000	1.600.000	2.740.000	-	-	-	11.740.000
		-	63.989.200	17.175.000	9.258.920	-	-	-	90.423.120
B	BIDANG AIR MINUM								
1	Pembangunan Air Minum	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembinaan Teknis SPAM	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan PS air minum pada kawasan strategis :	-	14.306.639	-	-	-	-	-	14.306.639
4	Peningkatan Pelayanan Wilayah Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	14.306.639	-	-	-	-	-	14.306.639
C	BIDANG PLP (DRAINASE, PERSAMPAHAN, AIRLIMBAH DAN SANITASI)								
1	Pembangunan Persampahan	-	4.350.000	3.250.000	400.000	-	-	-	8.000.000
2	Pembangunan Drainase	-	3.000.000	650.000	300.000	-	-	-	3.950.000
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	-	3.600.000	600.000	300.000	-	-	-	4.500.000
			10.950.000	4.500.000	1.000.000	-	-	-	16.450.000
D	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PBL)								
1	Program Penataan/ Pembangunan Kawasan	-	8.000.000	1.750.000	800.000	-	-	-	10.550.000
2	Program Perbaikan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembinaan Teknis	-	-	-	240.000	-	-	-	240.000
4	Pembangunan Fisik dan Pengadaan	-	10.000.000	3.000.000	1.300.000	-	-	-	14.300.000
		-	18.000.000	4.750.000	2.340.000	-	-	-	25.090.000
	JUMLAH TOTAL	0	107.245.839	26.425.000	12.598.920	0	0	0	146.269.759
Dalam Ribuan Rupiah									
	GRAND TOTAL SELAMA 5 TAHUN (2012 - 2016)	0	543.347.680	132.492.000	69.732.600	160.000	0	0	745.732.280

**REKAPITULASI RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
(SPPIP) KOTA MUARA BUNGO, KABUPATEN BUNGO, PROPINSI JAMBI**

Bidang Cipta Karya TA. 2012 s/d 2016

Kota: Muara Bungo

Kab. : Bungo

Propinsi: Jambi

Nilai : Dalam Ribuan Rupiah

No	Program/Kegiatan/Lokasi	Volume	Satuan	Pembiayaan Tahun 2012							Jumlah
				BLN	APBN	APBD PROV	APBD KAB/ KOTA	Kemitraan dgn Swasta/ PDAM Khusus	Swasta penuh/ Masyarakat	Sumber lain	
1	2	3	4								
A	BIDANG PERMUKIMAN DAN JALAN										
1	Program Pengembangan Ekonomi Lokal				-	-	-	-	-	-	
2	Program Pembangunan Perumahan				2.114.200	2.675.000	938.920	-	-	-	7.028.120
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				2.500.000	-	-	-	-	-	3.200.000
4	Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah - A				4.614.200	2.675.000	938.920	-	-	-	10.228.120
B	BIDANG AIR MINUM										
1	Pembangunan Air Minum				7.570.000	1.500.000	7.033.000	160.000	-	-	16.263.000
2	Pembinaan Teknis SPAM				-	467.000	140.000	-	-	-	607.000
3	Penyediaan PS air minum pada kawasan strategis :				24.170.422	-	-	-	-	-	24.170.422
4	Peningkatan Pelayanan Wilayah Kota				9.750.000	14.250.000	3.500.000	-	-	-	27.500.000
	Sub Jumlah - B				41.490.422	16.217.000	10.673.000	160.000	-	-	68.540.422
C	BIDANG PLP (DRAINASE, PERSAMPAHAN, AIRLIMBAH DAN SANITASI)										
1	Pembangunan Persampahan				4.750.000	3.600.000	1.650.000	-	-	-	10.000.000
2	Pembangunan Drainase				3.000.000	-	250.000	-	-	-	3.250.000
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah				-	-	500.000	-	-	-	500.000
	Sub Jumlah - C				7.750.000	3.600.000	2.400.000	-	-	-	13.750.000
D	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PBL)										
1	Program Penataan/ Pembangunan Kawasan				-	-	-	-	-	-	-
2	Program Perbaikan Lingkungan				-	-	600.000	-	-	-	600.000
3	Pembinaan Teknis				-	-	120.000	-	-	-	120.000
4	Pembangunan Fisik				-	-	300.000	-	-	-	300.000
	Sub Jumlah - D				-	-	1.020.000	-	-	-	1.020.000
	JUMLAH TOTAL				53.854.622	22.492.000	15.031.920	160.000	0	0	93.538.542

**REKAPITULASI RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
(SPPIP) KOTA MUARA BUNGO, KABUPATEN BUNGO, PROPINSI JAMBI**

Bidang Cipta Karya TA. 2012 s/d 2016

Kota: Muara Bungo

Kab. : Bungo

Propinsi: Jambi

Nilai : Dalam Ribuan Rupiah

No	Program/Kegiatan/Lokasi	Volume	Satuan	Pembiayaan Tahun 2013								
				BLN	APBN	APBD PROV	APBD KAB/ KOTA	Kemitraan dgn Swasta/ PDAM Khusus	Swasta penuh/ Masyarakat	Sumber lain	Jumlah	
1	2	3	4									
A	BIDANG PERMUKIMAN DAN JALAN											
1	Program Pengembangan Ekonomi Lokal			-	7.300.000	1.600.000	730.000	-	-	-	-	9.630.000
2	Program Pembangunan Perumahan			-	23.229.820	8.375.000	3.243.920	-	-	-	-	36.148.740
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			-	11.675.000	2.300.000	1.100.000	-	-	-	-	15.075.000
4	Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			-	7.400.000	1.600.000	2.740.000	-	-	-	-	11.740.000
	Sub Jumlah - A			-	49.604.820	13.875.000	7.813.920	-	-	-	-	72.593.740
B	BIDANG AIR MINUM											
1	Pembangunan Air Minum			-	5.050.000	-	-	-	-	-	-	5.050.000
2	Pembinaan Teknis SPAM			-	-	250.000	-	-	-	-	-	250.000
3	Penyediaan PS air minum pada kawasan strategis :			-	24.068.435	-	-	-	-	-	-	24.068.435
4	Peningkatan Pelayanan Wilayah Kota			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah - B			-	29.118.435	250.000	-	-	-	-	-	29.368.435
C	BIDANG PLP (DRAINASE, PERSAMPAHAN, AIRLIMBAH DAN SANITASI)											
1	Pembangunan Persampahan			-	13.125.000	4.800.000	1.075.000	-	-	-	-	19.000.000
2	Pembangunan Drainase			-	11.600.000	2.250.000	1.040.000	-	-	-	-	14.890.000
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah			-	3.900.000	300.000	150.000	-	-	-	-	4.350.000
	Sub Jumlah - C			-	28.625.000	7.350.000	2.265.000	-	-	-	-	38.240.000
D	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PBL)											
1	Program Penataan/ Pembangunan Kawasan			1.750.000	8.660.000	1.750.000	1.400.000	-	-	-	-	11.810.000
2	Program Perbaikan Lingkungan			900.000	4.550.000	900.000	600.000	-	-	-	-	6.050.000
3	Pembinaan Teknis			-	2.600.000	100.000	290.000	-	-	-	-	2.990.000
4	Pembangunan Fisik			-	10.000.000	3.000.000	1.300.000	-	-	-	-	14.300.000
	Sub Jumlah - D			2.650.000	25.810.000	5.750.000	3.590.000	-	-	-	-	35.150.000
	JUMLAH TOTAL			2.650.000	133.158.255	27.225.000	13.668.920	0	0	0	0	175.352.175

**REKAPITULASI RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
(SPPIP) KOTA MUARA BUNGO, KABUPATEN BUNGO, PROPINSI JAMBI**

Bidang Cipta Karya TA. 2012 s/d 2016

**Kota: Muara Bungo
Kab. : Bungo
Propinsi: Jambi**

Nilai : Dalam Ribuan Rupiah

No	Program/Kegiatan/Lokasi	Volume	Satuan	Pembiayaan Tahun 2014							
				BLN	APBN	APBD PROV	APBD KAB/ KOTA	Kemitraan dgn Swasta/ PDAM Khusus	Swasta penuh/ Masyarakat	Sumber lain	Jumlah
1	2	3	4								
A	BIDANG PERMUKIMAN DAN JALAN										
1	Program Pengembangan Ekonomi Lokal			-	7.300.000	1.600.000	730.000	-	-	-	9.630.000
2	Program Pembangunan Perumahan			-	21.114.200	6.675.000	2.638.920	-	-	-	30.428.120
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			-	31.175.000	7.200.000	3.050.000	-	-	-	44.675.000
4	Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			-	7.400.000	1.600.000	2.740.000	-	-	-	11.740.000
	Sub Jumlah - A			-	66.989.200	17.075.000	9.158.920	-	-	-	96.473.120
B	BIDANG AIR MINUM										
1	Pembangunan Air Minum			-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembinaan Teknis SPAM			-	-	550.000	-	-	-	-	550.000
3	Penyediaan PS air minum pada kawasan strategis :			-	15.209.826	-	-	-	-	-	15.209.826
4	Peningkatan Pelayanan Wilayah Kota			-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah - B			-	15.209.826	550.000	-	-	-	-	15.759.826
C	BIDANG PLP (DRAINASE, PERSAMPAHAN, AIRLIMBAH DAN SANITASI)										
1	Pembangunan Persampahan			-	9.800.000	4.100.000	795.000	-	-	-	14.695.000
2	Pembangunan Drainase			-	8.600.000	750.000	340.000	-	-	-	9.690.000
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah			-	1.700.000	300.000	150.000	-	-	-	2.150.000
	Sub Jumlah - C			-	20.100.000	5.150.000	1.285.000	-	-	-	26.535.000
D	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PBL)										
1	Program Penataan/ Pembangunan Kawasan				8.160.000	1.750.000	800.000	-	-	-	10.710.000
2	Program Perbaikan Lingkungan				2.635.000	900.000	600.000	-	-	-	4.135.000
3	Pembinaan Teknis			-	1.250.000	-	240.000	-	-	-	1.490.000
4	Pembangunan Fisik			-	10.000.000	3.000.000	1.300.000	-	-	-	14.300.000
	Sub Jumlah - D			-	22.045.000	5.650.000	2.940.000	-	-	-	30.635.000
	JUMLAH TOTAL			0	124.344.026	28.425.000	13.383.920	0	0	0	169.402.946

**REKAPITULASI RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
(SPPIP) KOTA MUARA BUNGO, KABUPATEN BUNGO, PROPINSI JAMBI**

Bidang Cipta Karya TA. 2012 s/d 2016

**Kota: Muara Bungo
Kab. : Bungo
Propinsi: Jambi**

Nilai : Dalam Ribuan Rupiah

No	Program/Kegiatan/Lokasi	Volume	Satuan	Pembiayaan Tahun 2015							
				BLN	APBN	APBD PROV	APBD KAB/ KOTA	Kemitraan dgn Swasta/ PDAM Khusus	Swasta penuh/ Masyarakat	Sumber lain	Jumlah
1	2	3	4								
A	BIDANG PERMUKIMAN DAN JALAN										
1	Program Pengembangan Ekonomi Lokal			-	7.300.000	1.600.000	730.000	-	-	-	9.630.000
2	Program Pembangunan Perumahan			-	23.114.200	6.675.000	2.638.920	-	-	-	32.428.120
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			-	32.175.000	7.300.000	3.150.000	-	-	-	42.625.000
4	Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			-	7.400.000	1.600.000	2.740.000	-	-	-	11.740.000
	Sub Jumlah - A			-	69.989.200	17.175.000	9.258.920	-	-	-	96.423.120
B	BIDANG AIR MINUM										
1	Pembangunan Air Minum			-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembinaan Teknis SPAM			-	-	400.000	-	-	-	-	400.000
3	Penyediaan PS air minum pada kawasan strategis :			-	13.740.738	-	-	-	-	-	13.740.738
4	Peningkatan Pelayanan Wilayah Kota			-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah - B			-	13.740.738	400.000	-	-	-	-	14.140.738
C	BIDANG PLP (DRAINASE, PERSAMPAHAN, AIRLIMBAH DAN SANITASI)										
1	Pembangunan Persampahan			-	4.850.000	3.250.000	400.000	-	-	-	8.500.000
2	Pembangunan Drainase			-	7.500.000	650.000	300.000	-	-	-	8.450.000
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah			-	3.600.000	600.000	300.000	-	-	-	4.500.000
	Sub Jumlah - C			-	15.950.000	4.500.000	1.000.000	-	-	-	21.450.000
D	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PBL)										
1	Program Penataan/ Pembangunan Kawasan			-	8.015.000	1.750.000	800.000	-	-	-	10.565.000
2	Program Perbaikan Lingkungan			-	2.550.000	900.000	600.000	-	-	-	4.050.000
3	Pembinaan Teknis			-	-	-	240.000	-	-	-	240.000
4	Pembangunan Fisik			-	10.000.000	3.000.000	1.300.000	-	-	-	14.300.000
	Sub Jumlah - D			-	20.565.000	5.650.000	2.940.000	-	-	-	29.155.000
	JUMLAH TOTAL			0	120.244.938	27.725.000	13.198.920	0	0	0	161.168.858

**REKAPITULASI RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
(SPPIP) KOTA MUARA BUNGO, KABUPATEN BUNGO, PROPINSI JAMBI**

Bidang Cipta Karya TA. 2012 s/d 2016

Kota: Muara Bungo

Kab. : Bungo

Propinsi: Jambi

Nilai : Dalam Ribuan Rupiah

No	Program/Kegiatan/Lokasi	Volume	Satuan	Pembiayaan Tahun 2016								Jumlah selama 5 Tahun
				BLN	APBN	APBD PROV	APBD KAB/ KOTA	Kemitraan dgn Swasta/ PDAM Khusus	Swasta penuh/ Masyarakat	Sumber lain	Jumlah	
1	2	3	4									
A	BIDANG PERMUKIMAN DAN JALAN											
1	Program Pengembangan Ekonomi Lokal			-	7.300.000	1.600.000	730.000	-	-	-	9.630.000	38.520.000
2	Program Pembangunan Perumahan			-	17.114.200	6.675.000	2.638.920	-	-	-	26.428.120	132.461.220
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan			-	32.175.000	7.300.000	3.150.000	-	-	-	42.625.000	148.200.000
4	Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			-	7.400.000	1.600.000	2.740.000	-	-	-	11.740.000	46.960.000
	Sub Jumlah - A			-	63.989.200	17.175.000	9.258.920	-	-	-	90.423.120	366.141.220
B	BIDANG AIR MINUM											
1	Pembangunan Air Minum			-	-	-	-	-	-	-	-	21.313.000
2	Pembinaan Teknis SPAM			-	-	-	-	-	-	-	-	1.807.000
3	Penyediaan PS air minum pada kawasan strategis :			-	14.306.639	-	-	-	-	-	14.306.639	91.496.060
4	Peningkatan Pelayanan Wilayah Kota			-	-	-	-	-	-	-	-	27.500.000
	Sub Jumlah - B			-	14.306.639	-	-	-	-	-	14.306.639	142.116.060
C	BIDANG PLP (DRAINASE, PERSAMPAHAN, AIRLIMBAH DAN SANITASI)											
1	Pembangunan Persampahan			-	4.350.000	3.250.000	400.000	-	-	-	8.000.000	60.195.000
2	Pembangunan Drainase			-	3.000.000	650.000	300.000	-	-	-	3.950.000	40.230.000
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah			-	3.600.000	600.000	300.000	-	-	-	4.500.000	16.000.000
	Sub Jumlah - C				10.950.000	4.500.000	1.000.000	-	-	-	16.450.000	116.425.000
D	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PBL)											
1	Program Penataan/ Pembangunan Kawasan			-	8.000.000	1.750.000	800.000	-	-	-	10.550.000	43.635.000
2	Program Perbaikan Lingkungan			-	-	-	-	-	-	-	-	14.835.000
3	Pembinaan Teknis			-	-	-	240.000	-	-	-	240.000	5.080.000
4	Pembangunan Fisik			-	10.000.000	3.000.000	1.300.000	-	-	-	14.300.000	57.500.000
	Sub Jumlah - D			-	18.000.000	4.750.000	2.340.000	-	-	-	25.090.000	121.050.000
	JUMLAH TOTAL			0	107.245.839	26.425.000	12.598.920	0	0	0	146.269.759	745.732.280